



# **BUPATI TAPANULI TENGAH**

## **PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH**  
**NOMOR : 19 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 273 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006 – 2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013-2033;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun;

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) Tahun;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

## **BAB II**

### **PENETAPAN DAN SISTEMATIKA RKPD TAHUN 2023**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RKPD Tahun 2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

#### **Pasal 3**

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan penjabaran dari RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### **Pasal 4**

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

#### **Pasal 5**

Sistematika RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- Bab I   Pendahuluan
- Bab II  Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III **Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah**
- Bab IV  Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- Bab V   Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- Bab VI  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Bab VII **Penutup.**



### **Pasal 6**

- (1) Sasaran dan Prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026, Prioritas Nasional Tahun 2023 dan Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.
- (2) Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023 dikelompokkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Bupati dengan Ketua DPRD.
- (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

### **Pasal 8**

RKPD Tahun 2023 secara rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

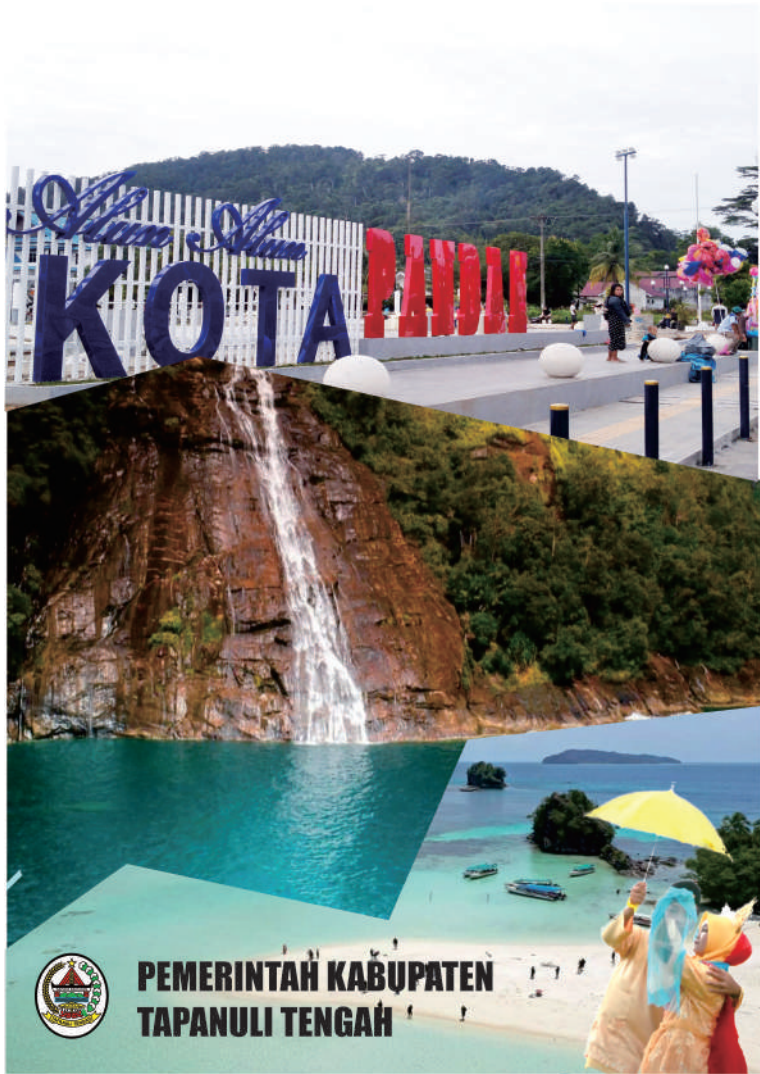
**Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 18 Juli 2022**

**Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH,**



**YETTY SEMBIRING**





RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
TAHUN 2023

# RKPD





## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	I - 1
	1.1. Latar Belakang.....	I - 1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I - 2
	1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I - 6
	1.4. Sistematika Dokumen Rancangan Akhir RKPD .....	I - 8
	1.5. Maksud dan Tujuan .....	I - 9
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....	II - 1
	2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah .....	II - 1
	2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi .....	II - 1
	2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II - 30
	2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .....	II - 35
	2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah .....	II - 105
	2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II - 106
	2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah .....	II - 107
	2.3.1. Isu Strategis.....	II - 107
	2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah .....	II - 108
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .....	III - 1
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III - 1
	3.1.1. Kondisi Ekonomi Nasional .....	III - 1
	3.1.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.....	III - 1
	3.1.3. Kondisi Ekonomi Daerah .....	III - 7
	3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023 .....	III - 13
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III - 15
	3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III - 15
	3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III - 17
	3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III - 19
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....	IV - 1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV - 1
	4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023 .....	IV - 1
	4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 .....	IV - 2





4.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 .....	IV - 5
4.2.	Prioritas Pembangunan Tahun 2023 .....	IV - 10
4.2.1	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	IV - 10
4.2.2	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 .....	IV - 22
4.2.3	Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 .....	IV - 27
4.2.4	Program Prioritas Daerah .....	IV - 28
4.3.	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Nasional (RKP Tahun 2023) Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara (RKPD Tahun 2023) dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (RKPD Tahun 2023) .....	IV - 37
4.4.	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Tapanuli Tengah	IV - 42
4.5.	Pokok – Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah.....	IV - 43
4.6.	Inovasi Kebijakan Pembangunan .....	IV - 46
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....	V - 1
5.1	Sinergitas Program Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah .....	V - 1
5.2	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah .....	V - 19
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....	VI - 1
6.1	Indikator Kinerja Makro Pembangunan.....	VI - 1
6.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	VI - 3
6.3	Indikator Kinerja Kunci.....	VI - 3
BAB VII	PENUTUP .....	VII- 1





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.....	II - 2
Tabel 2.2	Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 19
Tabel 2.3	Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Longsor Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 20
Tabel 2.4	Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 21
Tabel 2.5	Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Gempa Bumi Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 22
Tabel 2.6	Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Tsunami Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 24
Tabel 2.7	Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 25
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk .....Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 .....	II - 26
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Menurut Rasio Jenis Kelamin Penduduk Tahun 2021 .....	II - 27
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	II - 28
Tabel 2.11	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021.....	II - 29
Tabel 2.12	Penduduk Usia 10 Tahun keatas Menurut Status Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021.....	II - 29
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021 .....	II - 30
Tabel 2.14	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah (miliar rupiah) 2017-2021 .....	II - 31
Tabel 2.15	Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah (ribu rupiah) 2016-2021 .....	II - 33
Tabel 2.16	Angka Melek Huruf Tahun 2017-2021 Kabupaten Tapanuli Tengah...	II - 33
Tabel 2.17	Rata-rata Lama sekolah Tahun 2017-2021 Kabupaten Tapanuli Tengah.....	II - 34
Tabel 2.18	Perkembangan Kepemudaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Tahun 2016-2021.....	II - 35



Tabel 2.19	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2019-2021.....	II - 36
Tabel 2.20	Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sejenisnya di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021.....	II - 40
Tabel 2.21	Jumlah Perawat, Bidan, Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis Di Kabupaten Tapanuli Tengah 2016-2021 .....	II - 40
Tabel 2.22	Panjang dan Kondisi Jalan Jembatan dan Daerah Irigasi serta Luas Tata Ruang Tahun 2018-2021 .....	II - 42
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2021.....	II - 47
Tabel 2.24	Perkembangan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal Tahun 2018-2021 .....	II - 48
Tabel 2.25	Perkembangan Penertiban di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2021.....	II - 48
Tabel 2.26	Data Hasil Penindakan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Tahun 2021.....	II - 49
Tabel 2.27	Kejadian Bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 .....	II - 50
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2019-2021 .....	II - 63
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2019-2021.....	II - 65
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2021 .....	II - 66
Tabel 2.31	Perkembangan Data Kependudukan Tahun 2019-2021.....	II - 70
Tabel 2.32	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah.....	II - 71
Tabel 2.33	Data Perhubungan Darat di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021.....	II - 72
Tabel 2.34	Jumlah Koperasi di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2021....	II - 74
Tabel 2.35	Jumlah UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2021 .....	II - 75
Tabel 2.36	Kegiatan Pendaftaran Izin Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2021.....	II - 77
Tabel 2.37	Perkembangan Kepemudaan, Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2017-2021 .....	II - 79
Tabel 2.38	Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016-2021 .....	II - 83
Tabel 2.39	Luas Pertanaman, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Rakyat di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 .....	II - 83
Tabel 2.40	Data Luas Hutan Berdasarkan Fungsi di Kabupaten Tapanuli Tengah	II - 84
Tabel 2.41	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata .....	II - 87
Tabel 2.42	Produksi Ikan (Ton) di Kabupaten Tapanuli Tengah 2018-2021.....	II - 88





Tabel 2.43	Perahu Penangkap Ikan Laut di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2021 .....	II - 80
Tabel 2.44	Perkembangan Nelayan dan Petani Ikan di Kabupaten Tapanuli Tengah 2018-2021 .....	II - 89
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2021 .....	II - 90
Tabel 2.46	Perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 90
Tabel 2.47	Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2021 .....	II - 93
Tabel 2.48	Penerbitan Produk Hukum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2021 .....	II - 94
Tabel 2.49	Nama Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 94
Tabel 2.50	Jumlah Auditor Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 95
Tabel 2.51	Jumlah Temuan dan Rekomendasi BPK RI Tahun 2016-2020 .....	II - 95
Tabel 2.52	Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020 .....	II - 96
Tabel 2.53	Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016-2020 .....	II - 96
Tabel 2.54	Jumlah PNS yang Melanjutkan Pendidikan Tahun 2017-2021 .....	II - 98
Tabel 2.55	Jumlah Pemberian Ijin Belajar PNS Tahun 2017-2021 .....	II - 99
Tabel 2.56	Jumlah Pemberian Tugas Belajar PNS Tahun 2017-2021 .....	II - 99
Tabel 2.57	Jumlah Pemberian Satya Lencana Karya Satya Tahun 2017-2021 .....	II - 100
Tabel 2.58	Jumlah Pemberian Kasus Disiplin ASN di Kabupaten Tapanuli Tengah 2019-2021 .....	II - 101
Tabel 2.59	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Prajabatan Tahun 2019-2021 .....	II - 103
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2021 .....	II - 104
Tabel 2.61	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 dan 2021.....	II - 105
Tabel 3.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2023 .....	III - 3
Tabel 3.2	Proyeksi PDRB Sumatera Utara dari Sisi Pengeluaran.....	III - 4
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2021 (dalam persen) .....	III - 7
Tabel 3.4	PDRB Perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021 .....	III - 8
Tabel 3.5	Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia	



	Tahun 2019-2021 .....	III - 9
Tabel 3.6	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021.....	III - 10
Tabel 3.7	TPAK dan Kesempatan Kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 .....	III - 12
Tabel 3.8	Jumla Pendapatan Daerah Tahun 2020-2022 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023-2024.....	III - 16
Tabel 3.9	Jumlah Belanja Daerah Tahun 2020-2023 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024.....	III - 18
Tabel 3.10	Jumlah Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2023 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2024 .....	III - 20
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2023.....	IV - 3
Tabel 4.2	Tujuan dan Indikator Tujuan RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 .....	IV - 5
Tabel 4.3	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 .....	IV - 9
Tabel 4.4	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2023 ....	IV - 11
Tabel 4.5	Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKP Tahun 2023.....	IV - 14
Tabel 4.6	Proyeksi Indikator Makro Provinsi Sumatera Utara Tahu 2023.....	IV - 27
Tabel 4.7	Program Prioritas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023.....	IV - 29
Tabel 4.8	Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten Tapanuli Tengah Proinsi Sumatera Utara dan Nasional.....	IV - 39
Tabel 4.9	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023, Prioritas Propinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 .....	IV - 40
Tabel 4.10	Daftar Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah.....	IV - 44
Tabel 4.11	Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang diakomodir.....	IV - 44
Tabel 5.1	Sinergitas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah .....	V - 2
Tabel 5.2	Daftar Pagu Daerah Berdasarkan Urusan.....	V - 20
Tabel 6.1	Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026.....	VI - 2





Tabel 6.2	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 .....	VI - 3
Tabel 6.3	Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 .....	VI - 4



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I - 7
Gambar 1.2	Bagan Keterkaitan RKPD Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota .....	I - 8
Gambar 2.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 1
Gambar 4.1	Misi Presiden, Arahkan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan.....	IV - 2
Gambar 4.2	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Tapanuli Tengah .....	IV - 43
Gambar 4.3	Gambaran Pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Tengah .....	IV - 46
Gambar 4.4	Inovasi bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah.....	IV - 47





## DAFTAR GRAFIK

Grafik	2.1	Produk Domestik Regional Buto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah, 2021 (miliar rupiah) .....	II	-	32
Grafik	2.2	Grafik Perimbangan Produksi dan Kebutuhan Beras Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016-2021 .....	II	-	82
Grafik	3.1	Laju Inflasi Tahun 2017-2021 .....	III	-	11



# LAMPIRAN





Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Kabupaten Tapanuli Tengah  
Periode Pelaksanaan : 2022

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1.	Pendidikan																								
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
		1.01	Pendidikan																			DISDIK			
		1.01 .01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					246.351.878.909	14%	33.475.804.877	25%	61.551.713.188										DISDIK			
		1.01 .01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					11.998.770	-	0%	-											DISDIK			
		1.01 .01 .2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan				5.999.630	0%	-	0%	-										DISDIK			
		1.01 .01 .2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan				5.999.140	0%	-	0%	-										DISDIK			
		1.01 .01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					244.739.372.909		33.475.804.877	25%	61.146.587.083										DISDIK			
		1.01 .01 .2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				244.739.372.909	14%	33.475.804.877	25%	61.146.587.083			14%	33.475.804.877						DISDIK			
		1.01 .01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					10.000.000	-	0%	-											DISDIK			
		1.01 .01 .2.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sesuai Tupoksi				10.000.000	0%	-	0%	-										DISDIK			
		1.01 .01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.590.507.230	-	15%	242.386.807											DISDIK			
		1.01 .01 .2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	100%	275.425.855	182%	501.266.975	100%	112.206.500	0%	-	26%	29.154.440			0%	-				DISDIK			
		1.01 .01 .2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	261.397.200	214%	559.620.800	100%	657.475.270	0%	-	11%	75.556.700			0%	-				DISDIK			
		1.01 .01 .2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya sarana tugas makanan dan minuman (kantin, dll. Dinas, Pendidikan)	100%	-	0%	-	100%	66.360.600	0%	-	12%	7.863.900			0%	-				DISDIK			
		1.01 .01 .2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang dan cetakan penunjang operasional kantor	100%	342.282.900	199%	682.147.850	100%	351.040.860	0%	-	14%	49.602.210			0%	-				DISDIK			
		1.01 .01 .2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	100%	8.340.000	69%	5.760.000	100%	8.424.000	0%	-	0%	-			0%	-				DISDIK			
		1.01 .01 .2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100%	285.467.970	208%	593.969.950	100%	395.000.000	0%	-	20%	80.209.557			0%	-				DISDIK			
		1.01 .01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.525.673.750					10%	146.346.402								DISDIK			
		1.01 .01 .2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100%	66.489.000	265%	176.487.000	100%	68.640.000	0%	-	17%	11.940.000			0%	-				DISDIK			
		1.01 .01 .2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	177.600.000	173%	306.865.820	100%	213.500.000	0%	-	19%	40.250.572			0%	-				DISDIK			
		1.01 .01 .2.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	261.397.200	214%	559.620.800	100%	297.000.000	0%	-	14%	42.610.000			0%	-				DISDIK			
		1.01 .01 .2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor		-	0%	-	100%	946.533.750	0%	-	5%	51.545.830			0%	-				DISDIK			
		1.01 .01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					118.500.000					14%	16.392.896								DISDIK			
		1.01 .01 .2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	100%	79.175.000	133%	105.590.960	100%	81.500.000	0%	-	20%	16.392.896			0%	-				DISDIK			
		1.01 .01 .2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya biaya perizinan pajak kendaraan dinas operasional dan lapangan	100%	-	0%	-	100%	2.000.000	0%	-	0%	-			0%	-				DISDIK			
		1.01 .01 .2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya biaya emeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	100%	100.142.000	163%	162.968.800	100%	35.000.000	0%	-	0%	-			0%	-				DISDIK			
		1.01 .02	Program Pengelolaan Pendidikan					91.702.589.420					1%	816.473.390								DISDIK			
		1.01 .02 .2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					60.392.420.750	1%	518.225.400	1%	660.970.300			1%	518.225.400						DISDIK			
		1.01 .02 .2.01 .02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Terlaksananya penambahan ruang kelas baru	100%	826.500.000	100%	826.500.000	100%	1.789.000.000	29%	518.225.400	31%	560.970.300			29%	518.225.400				DISDIK			
		1.01 .02 .2.01 .03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya pembangunan ruang guru SD	100%	748.444.000	100%	748.444.000	100%	200.000.000	0%	-	25%	50.000.000			0%	-				DISDIK			
		1.01 .02 .2.01 .05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya pembangunan perpustakaan SD	100%	1.020.000.000	100%	1.020.000.000	100%	200.000.000	0%	-	25%	50.000.000			0%	-				DISDIK			
		1.01 .02 .2.01 .08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya pembangunan jamban dan sanitasinya serta pembangunan laboratorium SD	100%	1.768.444.000	100%	1.768.444.000	100%	1.867.300.000	0%	-	0%	-			0%	-				DISDIK			



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)	Unit SKPD Penanggung Jawab								
								I		II		III					IV		13		14=7+13		15 = 14/6 x 100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan pelayanan publik	1 2 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya RENJA SKPD, dokumen perencanaan SKPD	100%	10.000.000	100%	9.999.800	100%	9.999.880	0%	-	0%	0%	0%	0%	-	50%	9.999.800	50%	0.99998	Dinas Kesehatan		
		1 2 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Adanya laporan capaian kinerja dan khisar realisasi kinerja (LAKP) SKPD	100%	10.000.000	100%	9.999.900	100%	9.999.990	0%	-	0%	0%	0%	-	50%	9.999.900	50%	0.99999	Dinas Kesehatan			
	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan pelayanan publik	1 2 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	76.461.429.486	99%	59.721.328.554	100%	61.861.429.486	0%	-	45%	28.025.030.695	0%	45%	28.025.030.695	72%	87.746.359.249	72%	1.147589835	Dinas Kesehatan		
	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan pelayanan publik	1 2 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Kesehatan yang mempunyai kompetensi di bidangnya	100%	200.000.000	100%	147.457.084	100%	174.999.810	0%	-	19%	32.381.900	0%	19%	32.381.900	59%	179.838.984	59%	0.89919492	Dinas Kesehatan		
	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan pelayanan publik	1 2 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	150.000.000	100%	97.008.650	100%	99.998.690	0%	-	25%	24.891.310	0%	25%	24.891.310	62%	121.899.960	62%	0.8126664	Dinas Kesehatan		
		1 2 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	200.000.000	93%	318.247.500	100%	301.998.840	0%	-	15%	45.370.270	0%	15%	45.370.270	54%	363.617.770	54%	1.81808885	Dinas Kesehatan		
		1 2 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	100%	1.770.000.000	98%	111.104.500	100%	48.897.420	0%	-	23%	11.288.420	0%	23%	11.288.420	61%	122.392.920	61%	0.069148542	Dinas Kesehatan		
		1 2 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengandaan	100%	250.000.000	100%	210.159.000	100%	215.735.130	0%	-	18%	39.543.460	0%	18%	39.543.460	59%	269.708.600	59%	0.513730667	Dinas Kesehatan		
		1 2 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	100%	343.984.210	92%	219.862.724	100%	312.712.918	0%	-	18%	55.129.000	0%	18%	55.129.000	55%	274.991.724	55%	0.799431242	Dinas Kesehatan		
	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan pelayanan publik	1 2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa surat menyurat	100%	5.000.000	100%	4.998.000	100%	5.990.000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	50%	4.998.000	50%	0.9998	Dinas Kesehatan		
		1 2 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	1.950.000.000	80%	226.503.254	100%	240.000.000	0%	-	24%	57.355.231	0%	24%	57.355.231	61%	363.617.770	61%	0.069148542	Dinas Kesehatan		
		1 2 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya peralatan kerja yang dapat digunakan	100%	200.000.000	100%	211.246.300	100%	174.962.800	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	269.708.600	0%	0.513730667	Dinas Kesehatan		
		1 2 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100%	200.000.000	100%	211.246.300	100%	174.962.800	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	269.708.600	0%	0.513730667	Dinas Kesehatan		
		1 2 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100%	525.000.000	100%	198.511.800	100%	416.541.900	0%	-	17%	71.196.800	0%	17%	71.196.800	59%	269.708.600	59%	0.513730667	Dinas Kesehatan		
	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan pelayanan publik	1 2 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	350.000.000	100%	305.668.387	100%	349.987.600	0%	-	17%	60.764.020	0%	17%	60.764.020	59%	366.432.407	59%	1.046949734	Dinas Kesehatan		
		1 2 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																				
	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan pelayanan publik	1 2 2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Adanya Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	6.597.886.100	89%	2.519.897.310	100%	9.083.800.000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	44%	2.519.897.310	44%	0.381924949	Dinas Kesehatan		
	DAK Fisik	1 2 2 2.01 9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Adanya Bahan Habis Pakai	100%	6.100.000.000	0%	-	100%	6.100.000.000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	0	Dinas Kesehatan		
	DAK Fisik	1 2 2 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Adanya Bahan Habis Pakai	100%	2.600.000.000	85%	4.417.955.670	100%	6.167.126.000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	42%	4.417.955.670	42%	1.699213719	Dinas Kesehatan		
	DAK Fisik	1 2 2 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai																					



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					6		7		8		I		II		III		13		14 = 7+13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	350.000.000	99%	150.146.259	100%	100.000.080	0%	-	29%	29.090.000	0%	0%	29%	29.090.000	64%	179.236.259	64%	0.512103597	Dinas Kesehatan
			Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Dana untuk Gaji Honor / Non PNS dan Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Perairan	100%	660.000.000	100%	598.624.800	100%	659.988.540	0%	-	31%	204.339.400	0%	0%	31%	204.339.400	65%	802.964.200	65%	1.216612424	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan pelayanan publik		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Monitring ibu hamil risiko tinggi	100%	150.925.937	98%	2.068.218.149	100%	1.053.930.930	0%	-	46%	479.937.600	0%	0%	46%	479.937.600	72%	2.548.155.749	72%	16.88348471	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	80.000.000	96%	4.318.977.450	100%	1.181.150.000	0%	-	42%	493.947.200	0%	0%	42%	493.947.200	69%	4.812.924.650	69%	60.16155813	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	3.084.806	95%	576.099.000	100%	128.562.050	0%	-	27%	35.052.000	0%	0%	27%	35.052.000	61%	611.151.000	61%	198.1165104	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Monitring Pengelolaan Kesehatan Balita dan Terlayannya imunisasi rutin	100%	12.499.997	99%	2.063.165.200	100%	904.034.960	0%	-	44%	398.319.340	0%	0%	44%	398.319.340	71%	2.461.484.540	71%	196.9188105	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	65.000.000	74%	37.711.000	100%	384.965.000	0%	-	49%	188.395.000	0%	0%	49%	188.395.000	61%	226.106.000	61%	3.478553846	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	55.000.000	98%	1.497.632.000	100%	14.400.000	0%	-	50%	7.200.000	0%	0%	50%	7.200.000	74%	1.504.832.000	74%	27.36058182	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Terlayannya Pengobatan / Pelayanan Penderita Diabetes Mellitus	100%	90.000.000	94%	322.568.300	100%	74.999.860	0%	-	35%	26.487.320	0%	0%	35%	26.487.320	65%	349.055.620	65%	3.878395778	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlayannya Pengobatan / Pelayanan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	250.000.000	97%	656.283.300	100%	75.000.140	0%	-	23%	16.921.630	0%	0%	23%	16.921.630	60%	673.204.930	60%	2.69281972	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	200.000.000	98%	932.993.882	100%	217.552.800	0%	-	35%	77.177.000	0%	0%	35%	77.177.000	67%	1.010.170.882	67%	5.05085441	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana	100%	200.000.000	69%	17.386.029.694	100%	1.124.271.138	0%	-	34%	385.405.000	0%	0%	34%	385.405.000	52%	17.771.434.694	52%	88.85717347	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100%	60.091.935	96%	2.008.840.662	100%	4.082.814.334	0%	-	45%	1.844.041.080	0%	0%	45%	1.844.041.080	71%	3.852.881.742	71%	64.11645326	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Sosialisasi Pelaksanaan Penggunaan APD dan Monitring dan evaluasi penggunaan APD	100%	150.000.000	82%	121.932.650	100%	70.440.000	0%	-	34%	24.190.000	0%	0%	34%	24.190.000	58%	146.122.650	58%	0.974151	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Inspeksi Kesehatan Lingkungan (TPM, TTU & DAMILU)	100%	372.591.846	87%	947.119.228	100%	1.415.130.230	0%	-	28%	389.808.970	0%	0%	28%	389.808.970	57%	1.336.928.198	57%	3.588184262	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100%	114.476.774	96%	2.299.363.500	100%	986.784.794	0%	-	4%	42.407.500	0%	0%	4%	42.407.500	50%	2.341.771.000	50%	20.45629797	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	100%	120.000.000	84%	125.558.124	100%	100.000.050	0%	-	25%	24.965.020	0%	0%	25%	24.965.020	54%	150.523.144	54%	1.254359533	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya kegiatan Surveilans Kesehatan	100%	200.000.000	99%	608.949.400	100%	1.110.215.000	0%	-	48%	532.815.000	0%	0%	48%	532.815.000	74%	1.141.764.400	74%	5.708822	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlayannya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	100%	90.000.000	100%	124.966.900	100%	79.799.840	0%	-	31%	25.085.520	0%	0%	31%	25.085.520	66%	150.072.420	66%	1.667471333	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100%	778.750.000	68%	48.617.000	100%	398.750.000	0%	-	49%	194.980.000	0%	0%	49%	194.980.000	58%	243.597.000	58%	3.13E-01	Dinas Kesehatan
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlayannya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100%	400.000.000	98%	2.765.313.852	100%	2.269.737.960	0%	-	41%	938.674.220	0%	0%	41%	938.674.220	70%	3.703.988.072	70%	9.25997018	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung jawab				
					6		7		8		I		II		III		IV		13			14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Sosialisasi dan Advokasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Sosialisasi Kegiatan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	100%	26.440.000,000	95%	11.881.970,075	100%	27.263.200,150	0%	-	16%	4.488.467,480	0%	0%	16%	4.488.467,480	56%	16.370.437,555	56%	0.619154219	Dinas Kesehatan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Gaji Non PNS dan terlaksananya Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	21.708.196,800	63%	18.448.238,197	100%	8.086.137,560	0%	-	53%	4.294.995,380	0%	0%	53%	4.294.995,380	58%	22.743.233,577	58%	1.047679537	Dinas Kesehatan	
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	100%	1.143.640,415	14%	199.340,633	100%	585.127,650	0%	-	0%	-	0%	0%	7%	199.340,633	7%	0.174303593	Dinas Kesehatan			
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	100%	153.000,000	97%	538.118,000	100%	1.087.776,000	0%	-	44%	477.043,000	0%	0%	44%	477.043,000	70%	1.015.161,000	70%	6.635039216	Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan pelayanan publik			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi																					
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100%	150.000,000	0%	-	100%	150.000,020	0%	-	21%	31.261,920	0%	0%	21%	31.261,920	10%	31.261,920	10%	0.2084128	Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan pelayanan publik			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN																					
	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan pelayanan publik			Perencanaan Kabuluhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota																					
				Pemenuhan Kabuluhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Adanya Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standard	100%	1.125.995,000	98%	575.299,200	100%	1.061.995,080	0%	-	45%	480.221,360	0%	0%	45%	480.221,360	72%	1.055.520,560	72%	0.937411409	Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan pelayanan publik			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota																					
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	210.000,000	96%	215.545,600	100%	504.000,000	0%	-	64%	324.620,000	0%	0%	64%	324.620,000	80%	540.165,600	80%	2.572217143	Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan pelayanan publik			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN																					
	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan pelayanan publik			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga																					
				Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	100%	200.000,000	0%	-	100%	100.000,150	0%	-	30%	30.067,400	0%	0%	30%	30.067,400	15%	30.067,400	15%	0.150337	Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan pelayanan publik			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																					
	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan pelayanan publik			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota																					
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Adanya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100%	400.000,000	67%	99.811,000	100%	164.019,158	0%	-	5%	8.282,580	0%	0%	5%	8.282,580	36%	108.093,580	36%	0.27023395	Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan pelayanan publik			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung jawab				
					6		7		8		I		II		III		IV		13			14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1		2021020101	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100%	109.999.769	98%	97.527.800	100%	99.999.790	0%	-	23%	22.829.410	0%	0%	23%	22.829.410	60%	120.757.210	60%	1.097.951.24	Dinas Kesehatan		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>											0%	-	27%	44.939.978.436	0%	-	0%	27%	44.843.079.745						
<b>Predikat Kinerja</b>											Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
3.	RSUD Pandan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			38.975.000.000		38.341.886.620	44.700.154.603			4.840.488.968		11.182.054.606				5.581.592.589		17.435.831.932		1.19	RSUD PANDAN		
		1.2.1.2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.600.000.000		11.854.239.343	12.299.476.373			1.687.619.622		3.893.972.967											
		1.2.1.2.2.1	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14.600.000.000	9600%	11.854.239.343	12.299.476.373	14%	1.687.619.622	32%	3.893.972.967				45%	5.581.592.589	23%	17.435.831.932	23%	1.19			
		1.2.1.2.2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.500.000.000	-	-	599.976.300			-		-											
		1.2.1.2.2.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Tersedianya makanan dan minuman pendamping pasien		1.500.000.000	-	-	599.976.300																
		1.2.1.2.2.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			700.000.000		175.605.082	151.201.930			-		-											
		1.2.1.2.2.7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	700.000.000	116%	175.605.082	151.201.930			-		-			0%	-	0%	154.495.000	0%	0.22			
		1.2.1.2.2.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.175.000.000		444.332.000	1.649.500.000			342.485.026		350.101.073											
		1.2.1.2.2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	1.650.000.000	-	-	1.199.500.000	22%	267.485.026	23%	275.101.073												
		1.2.1.2.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	525.000.000	9900%	444.332.000	450.000.000	17%	75.000.000	17%	75.000.000				33%	150.000.000	17%	444.332.000	17%	0.85			
		1.2.1.2.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			20.000.000.000		25.867.710.195	30.000.000.000			2.810.384.320		6.937.980.566											
		1.2.1.2.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%	20.000.000.000	8600%	25.867.710.195	30.000.000.000	9%	2.810.384.320	23%	6.937.980.566				32%	9.748.364.886	16%	23.603.985.033	16%	1.18			
		1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			8.400.000.000		7.055.521.500	7.093.200.000			1.068.522.728		1.085.122.180									RSUD PANDAN		
		1.2.3.2.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota			8.400.000.000	9900%	7.055.521.500	7.093.200.000			1.068.522.728		1.085.122.180											
		1.2.3.2.2.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terperuhnya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	100%	8.400.000.000	9900%	7.055.521.500	7.093.200.000	15%	1.068.522.728	15%	1.085.122.180				30%	2.153.644.908	15%	7.055.521.500	15%	0.84			
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>											11%	5.909.011.696	24%	12.267.176.786	0%	-	0%	35%	18.176.188.482						
<b>Predikat Kinerja</b>											Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
4.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		100%	10.512.846.000	103.078.363.543																	
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kinerja pengelolaan pelayanan publik yang didukung sarana dan prasarana aparatur dengan memanfaatkan teknologi informasi (TIK)	1.3.1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH																						
		1.3.1.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Laporan Renstra dan Renja OPD	0%	-	0%	3.979.500	14.999.910	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	3.979.500	0	0	DPUPR		
		1.3.1.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																					
		1.3.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Adanya Pengadaan Pakaian hari-hari tertentu	0%	-	0%	16.530.000	19.954.900	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	16.530.000	0	0	DPUPR		
		1.3.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsinya	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	0%	-	100%	229.953.141	80.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	50%	229.953.141	0	0	DPUPR		
		1.3.1.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Tingkat Ketersediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Administrasi Kantor																					



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung jawab				
					6		7		8		I		II		III		IV		13			14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	3	1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	100%	134.951.210	95%	127.588.700	20.993.170	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	47%	127.588.700	47%	0.945443172	DPUPR		
5	1	2	1	1	31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Listrik																			
1	3	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	216.457.600	95%	206.604.500	110.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	48%	206.604.500	48%	0.954480231	DPUPR		
1	3	1	2.06	4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor	Tersedianya makanan dan minuman																		
1	3	1	2.06	5		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor	Tersedianya Barang Cetak	100%	39.470.600	0%	35.406.000	39.996.770	0%	-	0%	-	0%	-	0%	35.406.000	0%	0.897022087	DPUPR		
1	3	1	2.06	9		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak	100%	245.444.400	97%	237.080.910	55.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	48%	237.080.910	48%	0.965925114	DPUPR		
1	3	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah																		
5	1	2	4	1	3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		100%	407.300.000	81%	330.968.370	120.000.000	23%	27.575.000	0%	-	0%	-	23%	27.575.000	52%	358.543.370	52%	0.880293076	DPUPR
5	1	2	4	1	5	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah																			
5	1	2	4	1	5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		100%	1.597.017.204	28%	448.999.847	400.000.000	7%	27.871.900	0%	-	0%	-	7%	27.871.900	18%	476.871.747	18%	0.298601509	DPUPR
1	3	1	2.07			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terlaksananya Pengadaan Mobiler																		
1	3	1	2.07	5		Pengadaan Mebel		100%	70.718.600	0%	70.607.000	149.306.280	0%	-	0%	-	0%	-	0%	70.607.000	0%	0.998421914	DPUPR		
1	3	1	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Gedung Kantor	100%	240.280.900	0%	240.029.000	249.870.060	0%	-	0%	-	0%	-	0%	240.029.000	0%	0.998951644	DPUPR		
1	3	1	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	76.038.500	0%	75.922.000	99.452.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	75.922.000	0%	0.998467881	DPUPR		
1	3	1	2.08			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Mendukung Operasional Kantor																		
1	3	1	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	76.630.000	73%	55.689.000	25.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	36%	55.689.000	36%	0.726725825	DPUPR		
5	1	2	1	1	27	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos																			
1	3	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	290.475.000	79%	228.625.454	75.475.000	18%	13.215.825	0%	-	0%	-	18%	13.215.825	48%	241.841.279	48%	0.83257175	DPUPR
1	3	1	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan, Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%	2.848.912.800	99%	2.820.755.500	776.919.800	15%	114.000.000	0%	-	0%	-	15%	114.000.000	57%	2.934.755.500	57%	1.03013174	DPUPR
1	3	1	2.09			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Mendukung Operasional Kantor																		
1	3	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan dinas Operasional	100%	134.000.300	0%	115.007.900	119.998.740	3%	3.600.000	0%	-	0%	-	3%	3.600.000	2%	118.607.900	2%	0.8851316	DPUPR
1	3	1	2.09	9		Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Ruin/berkala gedung kantor																		
5	1	2	3	3	1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan gedung Kantor																			
						Pemeliharaan Sarana Kantor AC Spt	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Kantor AC Spt	0%	-	0%	-	35.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0	DPUPR	
						Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook					25.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0	DPUPR	
						Pemeliharaan Ruin Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Ruin Gedung Kantor	100%	300.000.000	0%	299.403.600	338.873.900	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	299.403.600	0%	0.998012	DPUPR
						PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang saluran irigasi																		
								100%	94.382.597.747		50.003.288.928														
1	3	2	2.02			PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1(SATU) DAERAH KABUPATENKOTA																			



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Laju (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)	Unit SKPD Penanggung Jawab							
								I		II						III		IV				
								9	10	11	12					13	14=7+13	15 = 14/6 x 100%	16			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan																			
			Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya																			
			Biaya Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan DAK Air Minum	Tersedianya Makanan dan minuman Rapat	0%	-	0%	-	20,000,000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0	0	DPUPR	
			Pembangunan Baru Spam Jaringan Perpipaan Desa Suga-suga Kec. Pasaribu Tobing	Terlaksananya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0%	-	0%	-	2,400,000,000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0	0	DPUPR	
			Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan DAK Air Minum	Terlaksananya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0%	-	0%	-	141,101,000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0	0	DPUPR	
			Biaya Dana Penunjang DAK SPAM	Adanya Dana Penunjang DAK SPAM	0%	-	0%	-	50,000,000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0	0	DPUPR	
			Biaya Konsultan Pengawasan kegiatan DAK Air Minum	Terlaksananya Pengawasan Kegiatan DAK Air Minum	0%	-	0%	-	150,000,000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0	0	DPUPR	
			Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Siantar CA Kec. Sosorgadong	Terlaksananya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0%	-	0%	-	2,330,000,000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0	0	DPUPR	
			Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tapan Nauli/Saurmangila Kec. Tukka	Terlaksananya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0%	-	0%	-	1,920,000,000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0	0	DPUPR	
			Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Aek Raso Kec. Sorikam Barat	Terlaksananya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0%	-	0%	-	2,400,000,000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0	0	DPUPR	
	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar perumahan dan kawasan permukiman (air minum, air bersih, sanitasi, sarana prasarana dan utilitas kawasan permukiman)			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rasio Rumah bersanitasi																	
				PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATENKOTA																		
				Pembangunan/penyediaan Sistem pengelolaan Air Limbah terpusat Skala Permukiman	Terlaksananya Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK)																	
				Dana Penunjang DAK Sanitasi (DAK)																		
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Tersedianya makan dan minuman Rapat	0%	-	0%	-	7,000,000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0	0	DPUPR
				Belanja Jasa Tenaga Ahli																		
				Honor Tenaga Fasilitator Lapangan	Tersedianya Tenaga Fasilitator	0%	-	0%	-	63,000,000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0	0	DPUPR
				Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Tersedianya Biaya perjalanan Dinas	0%	-	0%	-	50,000,000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0	0	DPUPR
				Belanja Transper Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)																		
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Desa Aek Raso Kec. Sorikam Barat	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah	0%	-	0%	-	380,000,000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0	0	DPUPR
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Desa Barambang Kec. Sosorgadong	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah	0%	-	0%	-	380,000,000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0	0	DPUPR
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Desa Muara Bolak Kec. Sosorgadong	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah	0%	-	0%	-	380,000,000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0	0	DPUPR
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Desa Simanosor Kec. Sibabangun	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah	0%	-	0%	-	380,000,000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0	0	DPUPR
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Desa Suka Maju Kec. Pasaribu Tobing	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah	0%	-	0%	-	380,000,000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0	0	DPUPR
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Kelurahan Lumut Kec. Lumut	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah	0%	-	0%	-	380,000,000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0	0	DPUPR
				Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik																		
				Monitoring kegiatan DAK Sanitasi	Terlaksananya Monitoring Dak Sanitasi	0%	-	0%	-	60,000,000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0	0	DPUPR



No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)	Unit SKPD Penanggung jawab			
								I		II		III		IV						13	14=7+13	15 = 14/6 x 100%
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15 = 14/6 x 100%	16							
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE																			
	Meningkatnya penyehatan lingkungan pemukiman kumuh.	1 3 6																				
		1 3 6 2.01	PENGELAAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATENKOTA	Luas Kawasan Genangan yang Dilangani																		
		1 3 6 2.01 5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terlaksananya Pembangunan saluran Drainase																		
		5 2 4 2 1 2	Belanja Modal Bangunan Pengambitan Irigasi																			
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		0%	400.000.000	0%	399.870.000	500.000.000	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	0%	399.870.000	0	0.999675	DPUPR	
	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar perumahan dan kawasan permukiman (air minum, air bersih, sanitasi, sarana prasarana dan vilitas kawasan pemukiman)	1 3 7			100%	7.095.612.235	5.052.763.950															
		1 3 7 2.01	PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PADA PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATENKOTA	Tersedianya Lampu Jalan Umum																		
		1 3 7 2.01	Pemeliharaan dan Pemeliharaan Infrastruktur kawasan Permukiman di kawasan Strategis Daerah KabupatenKota	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)																		
		5 2 4 4 2 3	Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU dan Lampu Hias	Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU dan Lampu Hias	100%	3.876.433.000	3.857.088.950	1.334.999.730	18%	263.335.000	0%	-	0%	-	0%	18%	263.335.000	9%	4.120.423.950	9%	1.062394	DPUPR
			Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya																			
			Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias di Kab. Tapanuli Tengah	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias di Kab. Tapanuli Tengah	0%	409.999.800	398.954.000	210.000.010	0%		0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	398.954.000	0	0.973059011	DPUPR
			Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan umum (LPJU) di Rayon Barus di Kab. Tapanuli Tengah	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan umum (LPJU) di Rayon Barus di Kab. Tapanuli Tengah	0%	409.999.900	406.023.150	210.000.090	0%		0%	-	0%	-	0%	0%	-	50%	406.023.150	0	0.990300607	DPUPR
			Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan umum (LPJU) di Rayon Sibolga di Kab. Tapanuli Tengah	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan umum (LPJU) di Rayon Sibolga di Kab. Tapanuli Tengah	0%	409.999.900	405.825.050	209.999.980	0%		0%	-	0%	-	0%	0%	-	50%	405.825.050	0	0.989817437	DPUPR
	Meningkatnya penyehatan lingkungan pemukiman kumuh.	1 3 8			100%	663.297.546	1.514.006.260															
		1 3 8 2.01	PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATENKOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya Pelayanan Publik																		
		1 3 8 2.01 1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sertifikat laik fungsi (SLF), peran tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) Pendaftaran Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan IMB dan Verifikasi Permohonan IMB																		
			Monitoring Pelaksanaan IMB	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan IMB	100%	373.890.700	372.866.550	149.998.900	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	50%	372.866.550	50%	0.997260831	DPUPR
			Verifikasi Permohonan IMB	Terlaksananya Verifikasi Permohonan IMB	100%	128.969.600	126.182.250	100.001.090	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	49%	126.182.250	49%	0.978387542	DPUPR
		5 1 2 1 1 40	Belanja Peresidan untuk dijual/Diserahkan Peresidan untuk dijual/Diserahkan Lainnya																			
			Pembangunan Kantor Kepala Desa Bunga Tanjung Kec. Barus	Tersedianya Prasarana Gedung Kantor		-	-	350.000.070	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0	0	DPUPR
			Pembangunan Kantor Lurah Baji Mas Kec. Srandorung	Tersedianya Prasarana Gedung Kantor		-	-	349.999.080	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0	0	DPUPR
		5 2 3 1 1 1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor																			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung jawab		
					6		7		8		I		II		III		13		14=7+13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Pembangunan Kantor Induk Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah Tahap III	Tersedianya Prasarana Gedung Kantor	0%	32.999.999,800	0%	25.857.904,200	10.000,000,140	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	25.857.904,200	0	0.783572859	DPUPR
		5 2 3 1 1 1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olah Raga																				
			Pembangunan GOR Barus Kec.Barus	Tersedianya Prasarana Gedung Kantor	0%	-	0%	-	6.999,999,990	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0	0	DPUPR
		5 2 3 1 1 25	Belanja Modal Bangunan Terbuka																				
			Pembangunan Alun-alun Kota Pandan Kec. Pandan	Terlaksananya Pembangunan Alun-alun Kota Pandan	0%	-	0%	-	6.000,000,170	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0	0	DPUPR
	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar perumahan dan kawasan permukiman (air minum, air bersih, sanitasi, sarana prasarana dan utilitas kawasan permukiman)	1 3 9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		100%	8.722.362,733	3.152.802,350																
		1 3 9 2.01	PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (tempat)																			
		1 3 9 2.01 3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Pemeliharaan Taman, Ruang Terbuka Hijau, Gapura Perbatasan, Air Mancur																			
			Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Terlaksananya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	100%	396,311,500	100%	394,439,050	140,000,230	19%	26,706,500	0%	-	0%	-	0%	19%	26,706,500	59%	421,145,550	59%	1,062662956	DPUPR
			Pemeliharaan Rulin Air Mancur	Terlaksananya Pemeliharaan Rulin Air Mancur	100%	285,151,700	99%	283,484,950	75,000,790	20%	14,925,500	0%	-	0%	-	0%	20%	14,925,500	60%	298,410,450	60%	1,04649718	DPUPR
			Pemeliharaan Rulin/Berkala Taman	Terlaksananya Pemeliharaan Rulin/Berkala Taman	100%	2,150,878,500	100%	2,146,243,850	434,999,880	17%	74,167,500	0%	-	0%	-	0%	17%	74,167,500	58%	2,220,411,350	58%	1,032327651	DPUPR
		5 2 3 1 1 25	Pemeliharaan Rulin Gapura Perbatasan kabupaten	Terlaksananya Pemeliharaan Rulin Gapura Perbatasan kabupaten	100%	470,553,700	100%	468,381,800	99,998,970	16%	15,817,000	0%	-	0%	-	0%	16%	15,817,000	58%	484,198,800	58%	1,028997966	DPUPR
			Belanja Modal Bangunan Terbuka																				
			Pembangunan Jogging Track dan Pagar Lapangan Bola Pandan (Karya Bhakti TNI)	Terlaksananya Pembangunan Pagar Perkuburan di Kelurahan Lubuk Tukko Kec. Pandan	0%	-	0%	-	4,000,000,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0	0	DPUPR
	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar perumahan dan kawasan permukiman (air minum, air bersih, sanitasi, sarana prasarana dan utilitas kawasan permukiman)	1 3 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan yang akan dibangun	100%	315,112,765,292	302,722,319,114																
		1 3 10 2.01	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA																				
		1 3 10 2.01 4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Terlaksananya Informasi Data Base Jalan/Jembatan	0%	472,999,400	0%	466,954,000	100,000,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	466,954,000	0	0.987219011	DPUPR
		1 3 10 2.01 5	Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan																			
		5 1 2 2 1 29	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat		100%	2,089,000,000	97%	2,026,364,000	425,000,000	19%	82,250,000	0%	-	0%	-	0%	19%	82,250,000	58%	2,108,614,000	58%	1,009389181	DPUPR
			Belanja Jasa Tenaga Ahli																				
			Honorarium Operator Alat Berat																				
		5 1 2 3 2 12	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Darat - Alat Besar Darat Lainnya																				
			Service Alat Berat																				
			Belanja Suku Cadang -Suku Cadang Alat Angkutan																				
		5 2 2 8 1 64	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kebinarmagaan																			
			Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kebinarmagaan		100%	514,950,000	97%	498,213,000	50,000,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	48%	498,213,000	48%	0.967497815	DPUPR
		5 2 4 1 1 3	Belanja Modal Jalan Kabupaten																				
			Dana Penunjang DAK Jalan						340,000,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0	0	DPUPR
			Jasa Konsultan Perencanaan DAK Jalan Tahun 2023	Adanya perencanaan DAK Jalan Tahun 2023	100%	3,587,473,050	97%	3,487,767,960	300,000,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	49%	3,487,767,960	49%	0.972207432	DPUPR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		13		14 = 7+13			15 = 14/6 x 100%		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
			Pelebaran Jalan Simpang Bukit Hasang-Kedai Tiga Kec. Barus	Terlaksananya pembangunan Jalan	100%	1.110.000.000	99%	1.095.721.150	28%	2.206.000.210	28%	625.050.000	0%	-	0%	0%	28%	625.050.000	64%	1.720.771.150	64%	1.550244279	DPUPR	
			Pembangunan Jalan Dana DAK	Terlaksananya pembangunan Jalan																				
			Jasa Konsultan Pengawas DAK Jalan	Terlaksananya Pengawasan kegiatan DAK Jalan	0%	-	0%	-	0%	350.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	DPUPR
			Peningkatan Jalan Ruas Batu Leap -Watas Taput Kec. Kolang	Terlaksananya peningkatan Jalan	0%	-	0%	-	0%	13.714.285.742	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	DPUPR
			Peningkatan Jalan Ruas Hutabolon-Watas Taput Kec. Tukka	Terlaksananya peningkatan Jalan	0%	-	0%	-	0%	3.171.291.853	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	DPUPR
			Peningkatan Jalan Ruas Lumut-Sihong Kec. Lumut	Terlaksananya peningkatan Jalan	0%	-	0%	-	0%	7.582.490.405	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	DPUPR
			Peningkatan Jalan Ruas Simanosor-Masundung Kec. Sibabangun	Terlaksananya peningkatan Jalan	0%	-	0%	-	0%	3.000.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	DPUPR
			Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan DAK	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas	0%	-	0%	-	0%	150.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	DPUPR
			Peningkatan Jalan Ruas Aek Raso-Maduma Kec. Sorkam Barat	Terlaksananya peningkatan Jalan	0%	-	0%	-	0%	5.131.034.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	DPUPR
			Pembuatan Tembok Penahan Jalan Hurlang Kec. Kolang	Terlaksananya Pembangunan Tembok Penahan	0%	-	0%	-	0%	200.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	DPUPR
			Pengaspalan Jalan Perumahan Taman Griya Pandan Kec. Pandan	Terlaksananya Pengaspalan Jalan	0%	-	0%	-	28%	600.000.000	28%	169.800.000	0%	-	0%	-	28%	169.800.000	14%	169.800.000	0	0	0	DPUPR
			Peningkatan Jalan Kantor Camat Pandan	Terlaksananya peningkatan Jalan	0%	-	0%	-	28%	700.000.000	28%	196.950.000	0%	-	0%	-	28%	196.950.000	14%	196.950.000	0	0	0	DPUPR
			Peningkatan Jalan Kelling Sipea-pea Kec. Sorkam Barat	Terlaksananya peningkatan Jalan	0%	-	0%	-	28%	1.650.000.130	28%	465.000.000	0%	-	0%	-	28%	465.000.000	14%	465.000.000	0	0	0	DPUPR
			Peningkatan Jalan Kelurahan Albion Kec. Pinangori	Terlaksananya peningkatan Jalan	0%	-	0%	-	28%	550.000.000	28%	154.800.000	0%	-	0%	-	28%	154.800.000	14%	154.800.000	0	0	0	DPUPR
			Peningkatan Jalan menuju Makam Mahligai Kec. Barus Utara	Terlaksananya peningkatan Jalan	0%	-	0%	-	28%	650.000.000	28%	181.950.000	0%	-	0%	-	28%	181.950.000	14%	181.950.000	0	0	0	DPUPR
			Peningkatan Jalan Saridewa Kec. Pandan	Terlaksananya peningkatan Jalan	0%	-	0%	-	28%	700.000.000	28%	197.100.000	0%	-	0%	-	28%	197.100.000	14%	197.100.000	0	0	0	DPUPR
			Peningkatan Jalan Teluk Roban Kec. Sorkam	Terlaksananya peningkatan Jalan	0%	-	0%	-	70%	2.200.000.000	70%	1.542.750.000	0%	-	0%	-	70%	1.542.750.000	35%	1.542.750.000	0	0	0	DPUPR
			Survey Inventory Jalan	Terlaksananya Survey Inventory Jalan	0%	-	0%	-	0%	100.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	DPUPR
			Survey Inventory Jembatan	Terlaksananya Survey Inventory Jembatan	0%	-	0%	-	0%	50.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	DPUPR
			Kewajiban kepada PHAK KETIGA																					
			Peningkatan Jalan Ruas Pasar Kemis-SP II Kec. Srandorung	Terlaksananya Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga	100%	8.074.000.000	62%	4.981.387.200	100%	2.971.155.000	100%	2.971.155.000	0%	-	0%	-	100%	2.971.155.000	81%	7.952.542.200	81%	0.984956923	DPUPR	
			Peningkatan Jalan Ruas Lobutua-Siliri-iris Kec. Andam Dewi	Terlaksananya Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga	100%	4.000.000.000	25%	990.550.000	100%	2.971.650.000	100%	2.971.650.000	0%	-	0%	-	100%	2.971.650.000	62%	3.962.200.000	62%	0.99055	DPUPR	
			Peningkatan Jalan Ruas Manduamas Lama-Urug Baru Kec. Manduamas	Terlaksananya Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga	100%	2.000.000.000	25%	494.560.000	100%	1.483.680.000	100%	1.483.680.000	0%	-	0%	-	100%	1.483.680.000	62%	1.978.240.000	62%	0.98912	DPUPR	
			Peningkatan Jalan Ruas Sigotom -Onan Tukka Kec. Tukka	Terlaksananya Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga	100%	4.000.000.000	25%	989.670.000	100%	2.969.010.000	100%	2.969.010.000	0%	-	0%	-	100%	2.969.010.000	62%	3.958.680.000	62%	0.98967	DPUPR	
			Peningkatan Jalan Ruas Sibulan III-Span Kec. Sarudik	Terlaksananya Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga	100%	2.000.000.000	25%	495.082.500	100%	1.485.247.500	100%	1.485.247.500	0%	-	0%	-	100%	1.485.247.500	62%	1.980.330.000	62%	0.990165	DPUPR	
			Peningkatan jalan BKKN - Pondok Batu Kec. Sarudik	Terlaksananya Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga	100%	2.000.000.000	25%	495.165.000	100%	1.485.495.000	100%	1.485.495.000	0%	-	0%	-	100%	1.485.495.000	62%	1.980.660.000	62%	0.99033	DPUPR	
			Peningkatan Jalan Ruas Kelling Batu Harimo Kec. Pandan	Terlaksananya Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga	100%	2.000.000.000	25%	495.110.000	100%	1.485.330.000	100%	1.485.330.000	0%	-	0%	-	100%	1.485.330.000	62%	1.980.440.000	62%	0.99022	DPUPR	
			Konsultan Pengawas kegiatan Bidang Jalan dan Jembatan Wilayah I	Terlaksananya Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga	100%	200.000.000	67%	133.540.000	0%	33.385.000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	33%	133.540.000	33%	0.6677	DPUPR		
			Konsultan Pengawas kegiatan Bidang Jalan dan Jembatan Wilayah II	Terlaksananya Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga	100%	220.000.000	68%	149.160.000	0%	37.290.000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	34%	149.160.000	34%	0.678	DPUPR		
			Konsultan Pengawas Kegiatan Peningkatan Jalan FL Tobing-Jalan Jurungan Lubis Kec. Pandan	Terlaksananya Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga	100%	250.000.000	30%	73.878.750	0%	172.383.750	0%	-	0%	-	0%	0%	-	15%	73.878.750	15%	0.295515	DPUPR		
			Konsultan Pengawas kegiatan Peningkatan Jalan Kelling Perkebunan Barus Kec. Barus	Terlaksananya Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga	100%	250.000.000	30%	73.887.000	0%	172.403.000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	15%	73.887.000	15%	0.295548	DPUPR		
			Peningkatan Jalan FL Tobing-Jalan Jurungan Lubis. Kec. Pandan	Terlaksananya Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga	100%	21.856.990.000	25%	5.409.195.000	0%	16.227.585.000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	12%	5.409.195.000	12%	0.247481241	DPUPR		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
				Peningkatan Jalan Kelling Perkotaan Baru	Terlaksananya Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga	100%	13,099,460,000	25%	3,238,482,500	9,715,447,500	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	12%	3,238,482,500	12%	0.247222595	DPUPR		
				Peningkatan Jalan Ruas Hutabalang- Kampung Sebelah Kec. Badiri	Terlaksananya Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga	100%	3,000,000,000	25%	742,665,000	2,227,995,000	100%	2,227,995,000	0%	-	0%	-	0%	100%	2,227,995,000	62%	2,970,660,000	62%	0.99022	DPUPR	
				Peningkatan Jalan Ruas Sogar-Silambang Kec. Andani Dewi	Terlaksananya Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga	100%	3,000,000,000	25%	742,115,000	2,226,345,000	100%	2,226,345,000	0%	-	0%	-	0%	100%	2,226,345,000	62%	2,968,460,000	62%	0.989486667	DPUPR	
				Peningkatan Jalan Kelling Sorkam Kanan Kec. Sorkam Barat	Terlaksananya Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga	100%	2,000,000,000	25%	494,532,500	1,483,597,500	100%	1,483,597,500	0%	-	0%	-	0%	100%	1,483,597,500	62%	1,978,130,000	62%	0.989065	DPUPR	
				Peningkatan Jalan Ruas Raso- Partudungan Kec. Kolang	Terlaksananya Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga	100%	2,000,000,000	25%	494,890,000	1,484,670,000	100%	1,484,670,000	0%	-	0%	-	0%	100%	1,484,670,000	62%	1,979,560,000	62%	0.98978	DPUPR	
		1 3 10 2 1 11		Pemeliharaan Rutin Jalan																					
		5 1 2 3 4 3		Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten																					
				Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan	100%	4,235,000,000	99%	4,197,678,280	1,500,000,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	50%	4,197,678,280	50%	0.991187315	DPUPR	
		1 3 10 2 1 18		Rehabilitasi Jembatan																					
				Pemeliharaan Rutin Jembatan AL- Fansury Barus Kec.Barus	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan Al-Fansury	100%	209,997,904	99%	207,030,500	209,998,460	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	49%	207,030,500	49%	0.985869364	DPUPR	
				Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten																					
		5 1 2 3 4 3		Pemeliharaan Rutin Jembatan Labuhan Angin Kec. Tapani Nauli	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan Labuhan Angin	0%	-	0%	-	209,882,960	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	DPUPR		
	Meningkatnya kesehatan lingkungan pemukiman kumuh.	1 3 12		PROGRAM PENYELENGARAAN PENATAAN RUANG	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau																				
		1 3 12 2.02		KOORDINASI DAN SINERJISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATENKOTA																					
		1 3 10 2.02 2		Pengawasan dan Pemanfaatan Pengendalian Ruang	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RDTR dan Penyusunan Peta Dasar Rencana Detail Tata Ruang	0%	-	0%	-	75,000,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	DPUPR		
		1 3 12 2.04		KOORDINASI DAN SINERJISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATENKOTA																					
		1 3 12 2.04 4		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																					
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	0%	267,499,600	56%	150,398,600	149,999,990	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	28%	150,398,600	0	0.562238598	DPUPR	
				Peningkatan Kapasitas Tim TKPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tim TKPRD	0%	189,823,900	60%	113,381,250	99,999,720	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	30%	113,381,250	0	0.597297021	DPUPR	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>											17%	28,220,933,975	0%	-	0%	-	0%	-	17%	28,220,933,975					
<b>Predikat Kinerja</b>											Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
<b>5. PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>																									
		1		URUSAN WAJIB																					
		1 4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100%	13,689,534,724.00	94.39%	12,114,592,988.00	100%	9,449,289,173.00	29.70%	2,806,867,345.00	35.07%	3,313,660,807.00	-	-	-	64.77%	6,120,528,152.00	79.58%	18,235,121,140.00	79.58%	133.20%	
		1 4 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100%	1,634,778,724.00	97.82%	8,659,403,059.00	100%	3,557,030,373.00	15.74%	559,892,063.00	23.72%	843,561,505.00	-	-	-	39.46%	1,403,453,568.00	68.64%	10,062,856,627.00	68.64%	615.55%	
		1 4 1 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	6,000,000.00	99.42%	9,941,600.00	100%	10,000,000.00	21.47%	2,147,000.00	26.70%	2,669,800.00	-	-	-	48.17%	4,816,800.00	73.79%	14,758,400.00	73.79%	245.97%	
		1 4 1 2.01 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	6,000,000.00	99.42%	9,941,600.00	100%	10,000,000.00	21.47%	2,147,000.00	26.70%	2,669,800.00	-	-	-	48.17%	4,816,800.00	73.79%	14,758,400.00	73.79%	245.97%	PERKIM
		1 4 1 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	95.71%	2,178,607,289.00	100%	2,290,986,573.00	15.46%	354,283,787.00	24.76%	567,351,651.00	-	-	-	40.23%	921,635,438.00	67.97%	3,100,242,727.00	-	-	
		1 4 1 2.02 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	95.71%	2,178,607,289.00	100%	2,290,986,573.00	15.46%	354,283,787.00	24.76%	567,351,651.00	-	-	-	40.23%	921,635,438.00	67.97%	3,100,242,727.00	-	-	PERKIM
		1 4 1 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	75,000,000.00	76.27%	22,880,000.00	100%	30,000,000.00	-	-	39.19%	11,758,000.00	-	-	-	39.19%	11,758,000.00	57.73%	34,638,000.00	57.73%	46.18%	
		1 4 1 2.05 9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	100%	75,000,000.00	76.27%	22,880,000.00	100%	30,000,000.00	-	-	39.19%	11,758,000.00	-	-	-	39.19%	11,758,000.00	57.73%	34,638,000.00	57.73%	46.18%	PERKIM
		1 4 1 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	589,776,674.00	98.20%	538,223,862.00	100%	416,576,600.00	11.52%	48,000,300.00	20.71%	86,279,496.00	-	-	-	32.23%	134,279,796.00	65.22%	672,503,658.00	65.22%	114.03%	
		1 4 1 2.06 1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	100%	15,000,000.00	99.70%	9,970,000.00	100%	9,999,600.00	29.49%	2,948,500.00	38.29%	3,828,500.00	-	-	-	67.77%	6,777,000.00	83.74%	16,747,000.00	83.74%	111.65%	PERKIM



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13			14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K
1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	243.888.337,00	99%	79.277.100,00	100%	50.578.000,00	-	-	16,68%	8.437.700,00	-	-	16,68%	8.437.700,00	57,88%	87.714.800,00	57,88%	35,97%	PERKIM	
1	4	1	2.06	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	53.888.337,00	90,43%	38.048.000,00	100%	39.999.000,00	26,25%	10.500.400,00	28,36%	11.342.500,00	-	-	54,61%	21.842.900,00	72,52%	59.890.900,00	72,52%	111,14%	PERKIM	
1	4	1	2.06	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	17.000.000,00	99,57%	9.957.200,00	100%	10.000.000,00	11,50%	1.150.400,00	19,53%	1.953.200,00	-	-	31,04%	3.103.600,00	65,30%	13.060.800,00	65,30%	78,83%	PERKIM	
1	4	1	2.06	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	100%	10.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100%	6.000.000,00	25,00%	1.500.000,00	16,67%	1.000.000,00	-	-	41,67%	2.500.000,00	70,83%	8.500.000,00	70,83%	85,00%	PERKIM	
1	4	1	2.06	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	250.000.000,00	98,74%	394.971.562,00	100%	300.000.000,00	10,63%	31.901.000,00	19,91%	59.717.596,00	-	-	30,54%	91.618.596,00	64,64%	486.590.158,00	64,64%	194,64%	PERKIM	
1	4	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	194.002.050,00	100%	5.296.234.415,00	100%	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	49,98%	5.296.234.415,00	49,98%		2729,99%			
1	4	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Adanya Pengadaan Mebel	-	-	-	-	100%	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PERKIM	
1	4	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Kantor Induk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	-	-	100%	5.268.855.415,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	5.268.855.415	25,00%	-	-	PERKIM
1	4	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan Pendukung Kantor	100%	194.002.050,00	91%	27.379.000,00	100%	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	45,63%	27.379.000,00	45,63%	14,11%	-	-	PERKIM
1	4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	420.000.000,00	91,68%	558.771.133,00	100%	624.467.200,00	23,26%	145.251.476,00	23,78%	148.471.033,00	-	-	47,04%	293.722.509,00	69,36%	852.493.642,00	69,36%	202,97%		
1	4	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	4.000.000,00	99,87%	4.494.000,00	100%	6.000.000,00	25,00%	1.500.000,00	25,00%	1.500.000,00	-	-	50,00%	3.000.000,00	74,93%	7.494.000,00	74,93%	187,35%	PERKIM	
1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kantor	100%	70.000.000,00	78,98%	63.186.633,00	100%	80.000.000,00	19,24%	15.388.976,00	16,55%	13.243.333,00	-	-	35,79%	28.632.309,00	57,39%	91.818.942,00	57,39%	131,17%	PERKIM	
1	4	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kantor	100%	16.000.000,00	99,56%	24.880.000,00	100%	30.000.000,00	11,95%	3.585.000,00	22,77%	6.830.000,00	-	-	34,72%	10.415.000,00	67,14%	35.295.000,00	67,14%	220,59%	PERKIM	
1	4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kantor	100%	330.000.000,00	93%	466.210.500,00	100%	508.467.200,00	24,54%	124.777.500,00	24,96%	126.897.700,00	-	-	49,50%	251.675.200,00	71,37%	717.885.700,00	71,37%	217,54%	PERKIM	
1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	350.000.000,00	68,43%	54.744.760,00	100%	125.000.000,00	8,17%	10.209.500,00	21,63%	27.031.525,00	-	-	29,79%	37.241.025,00	49,11%	91.985.785,00	49,11%	26,28%		
1	4	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	250.000.000,00	50,52%	25.260.760,00	100%	90.000.000,00	11,34%	10.209.500,00	14,83%	13.350.025,00	-	-	26,18%	23.559.525,00	38,35%	48.820.285,00	38,35%	19,53%	PERKIM	
1	4	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	100%	100.000.000,00	98,28%	29.484.000,00	100%	35.000.000,00	-	-	39,09%	13.681.500,00	-	-	39,09%	13.681.500,00	68,69%	43.165.500,00	68,69%	43,17%	PERKIM	
					URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100%	12.054.756.000,00	87,57%	3.290.415.329,00	100%	5.652.258.800,00	39,26%	2.219.162.382,00	42,80%	2.419.443.902,00	-	-	82,07%	4.638.606.284,00	84,82%	7.929.021.613,00	84,82%	65,78%		
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		-	-	68,69%	831.121.279,00	100%	947.258.800,00	13,24%	125.443.282,00	15,75%	149.214.102,00	-	-	28,99%	274.657.384,00	48,84%	1.105.778.663,00	-	-		
1	4	2	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		-	-	88,31%	70.647.000,00	100%	180.000.000,00	3,33%	5.999.900,00	9,40%	16.927.600,00	-	-	12,74%	22.927.500,00	50,52%	93.574.500,00	-	-		
1	4	2	2.01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Relokasi	-	-	92,12%	46.061.600,00	100%	100.000.000,00	1,92%	1.917.200,00	5,07%	5.073.300,00	-	-	6,99%	6.990.500,00	49,56%	53.052.100,00	-	-	PERKIM	
1	4	2	2.01	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Terlaksananya Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah	-	-	81,95%	24.585.400,00	100%	30.000.000,00	3,51%	1.051.500,00	24,51%	7.352.000,00	-	-	28,01%	8.403.500,00	54,98%	32.988.900,00	-	-	PERKIM	
1	4	2	2.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Terlaksananya Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	-	-	-	-	100%	50.000.000,00	6,06%	3.031.200,00	9,00%	4.502.300,00	-	-	15,07%	7.533.500,00	7,53%	7.533.500,00	-	-	PERKIM	
1	4	2	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		-	-	67,20%	33.601.200,00	100%	-	-	-	-	-	-	-	33,60%	33.601.200,00	-	-	-	-	PERKIM	
1	4	2	2.02	2	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Terlaksananya Sosialisasi dengan Masyarakat	-	-	67,20%	33.601.200,00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	33,60%	33.601.200,00	-	-	-	-	PERKIM
1	4	2	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		-	-	40,34%	74.127.000,00	100%	-	-	-	-	-	-	-	20,17%	74.127.000,00	-	-	-	-		
1	4	2	2.03	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terlaksananya Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi	-	-	40,34%	74.127.000,00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	20,17%	74.127.000,00	-	-	-	-	PERKIM
1	4	2	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		-	-	7,20%	4.680.000,00	100%	-	-	-	-	-	-	-	3,60%	4.680.000,00	-	-	-	-	PERKIM	



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)	Unit SKPD Penanggung Jawab									
								I		II		III					IV		13		14=7+13		15 = 14/6 x 100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	4	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Tertelaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	100%	12,054.756.000,00	99,82%	2,033.829.850,00	100%	-	-	-	-	-	-	-	49,91%	2,033.829.850,00	49,91%	16,87%	PERKIM			
1	4	5		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		-	-	88,18%	180.760.000,00	100%	175.000.000,00	16,24%	28.426.200,00	38,52%	67.418.500,00	-	-	54,77%	95.844.700,00	71,47%	276.604.700,00	-	-		
1	4	5	2.01	Usuran Penyelenggaraan PSU Perumahan		-	-	88,18%	180.760.000,00	100%	175.000.000,00	16,24%	28.426.200,00	38,52%	67.418.500,00	-	-	54,77%	95.844.700,00	71,47%	276.604.700,00	-	-		
1	4	5	2.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		-	-	98,76%	103.696.600,00	100%	-	-	-	-	-	-	49,38%	103.696.600,00	-	-	-	PERKIM		
1	4	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		-	-	77,06%	77.063.400,00	100%	75.000.000,00	21,85%	16.384.500,00	40,21%	30.157.500,00	-	-	62,06%	46.542.000,00	69,56%	123.605.400,00	-	-	PERKIM
1	4	5	2.01	4	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembangan		-	-	-	-	100%	100.000.000,00	12,04%	12.041.700,00	37,26%	37.261.000,00	-	-	49,30%	49.302.700,00	24,65%	49.302.700,00	-	-	PERKIM
1	4	5		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		-	-	46,23%	65.278.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,11%	65.278.600,00	-	-	-			
1	4	5	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil		-	-	65,28%	65.278.600,00	-	-	-	-	-	-	-	32,64%	65.278.600,00	-	-	-	PERKIM		
1	4	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil		-	-	65,28%	65.278.600,00	-	-	-	-	-	-	-	32,64%	65.278.600,00	-	-	-	PERKIM		
					Tertelaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan		-	-	65,28%	65.278.600,00	-	-	-	-	-	-	-	32,64%	65.278.600,00	-	-	-	PERKIM		
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		-	-	73,23%	164.774.600,00	100%	240.000.000,00	11,59%	27.812.900,00	21,11%	50.655.400,00	-	-	32,70%	78.468.300,00	52,96%	243.242.900,00	-	-		
2	10	2		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI		-	-	80,97%	60.725.600,00	100%	50.000.000,00	7,21%	3.604.000,00	12,18%	6.088.800,00	-	-	19,39%	9.692.800,00	50,18%	70.418.400,00	-	-		
2	10	2	2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	80,97%	60.725.600,00	100%	50.000.000,00	7,21%	3.604.000,00	12,18%	6.088.800,00	-	-	19,39%	9.692.800,00	50,18%	70.418.400,00	-	-		
2	10	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha		-	-	80,97%	60.725.600,00	100%	50.000.000,00	7,21%	3.604.000,00	12,18%	6.088.800,00	-	-	19,39%	9.692.800,00	50,18%	70.418.400,00	-	-	PERKIM
2	10	4		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		-	-	78,32%	46.993.200,00	100%	50.000.000,00	9,68%	4.841.400,00	44,06%	22.029.400,00	-	-	53,74%	26.870.800,00	66,03%	73.864.000,00	-	-		
2	10	4	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	78,32%	46.993.200,00	100%	50.000.000,00	9,68%	4.841.400,00	44,06%	22.029.400,00	-	-	53,74%	26.870.800,00	66,03%	73.864.000,00	-	-		
2	10	4	2.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	50,000.000,00	9,68%	4.841.400,00	44,06%	22.029.400,00	-	-	53,74%	26.870.800,00	26,87%	26.870.800,00	-	-	PERKIM	
2	10	4	2.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	78,32%	46.993.200,00	100%	-	-	-	-	-	-	-	39,16%	46.993.200,00	-	-	-	PERKIM	
2	10	5		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		-	-	-	-	100%	40.000.000,00	8,22%	3.289.500,00	15,10%	6.040.400,00	-	-	23,32%	9.329.900,00	11,66%	9.329.900,00	-	-		
2	10	5	2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	100%	40.000.000,00	8,22%	3.289.500,00	15,10%	6.040.400,00	-	-	23,32%	9.329.900,00	11,66%	9.329.900,00	-	-		
2	10	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	100%	40.000.000,00	8,22%	3.289.500,00	15,10%	6.040.400,00	-	-	23,32%	9.329.900,00	11,66%	9.329.900,00	-	-	PERKIM
2	10	6		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		-	-	77,66%	31.065.800,00	100%	-	-	-	-	-	-	-	38,83%	31.065.800,00	-	-	-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab				
					6		7		8		I		II		III		IV		13			14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		2 10 6 2.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	77.66%	31.065.800,00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.83%	31.065.800,00	-	-			
		2 10 6 2.01 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Akses dalam Pemanaan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Akses dalam Pemanaan Redistribusi Tanah	-	-	77.66%	31.065.800,00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.83%	31.065.800,00	-	-	PERKIM		
		2 10 7	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT		-	-	51.98%	25.990.000,00	100%	50.000.000,00	22.71%	11.353.000,00	2.27%	1.132.600,00	-	-	-	24.97%	12.485.600,00	38.48%	38.475.600,00	-	-		
		2 10 7 2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	51.98%	25.990.000,00	100%	50.000.000,00	22.71%	11.353.000,00	2.27%	1.132.600,00	-	-	-	24.97%	12.485.600,00	38.48%	38.475.600,00	-	-		
		2 10 7 2.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat	-	-	51.98%	25.990.000,00	100%	50.000.000,00	22.71%	11.353.000,00	2.27%	1.132.600,00	-	-	-	24.97%	12.485.600,00	38.48%	38.475.600,00	-	-	PERKIM	
		2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		-	-	0.00%	-	100%	50.000.000,00	9.45%	4.725.000,00	30.73%	15.364.200,00	-	-	-	40.18%	20.089.200,00	20.09%	20.089.200,00	-	-		
		2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		-	-	0.00%	-	100%	50.000.000,00	9.45%	4.725.000,00	30.73%	15.364.200,00	-	-	-	40.18%	20.089.200,00	20.09%	20.089.200,00	-	-		
		2 10 10 2.01 2	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0.00%	-	100%	50.000.000,00	9.45%	4.725.000,00	30.73%	15.364.200,00	-	-	-	40.18%	20.089.200,00	20.09%	20.089.200,00	-	-	PERKIM	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>											30%	2.806.867.345	35%	3.313.660.807	-	-	-	65%	6.120.528.152						
<b>Predikat Kinerja</b>											Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Rendah						
6.	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)																								
		1 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAH DAERAH	78%	5.284.299,047	96%	904.206,062	100%	777.770,420	28%	218.156,186	24%	183.174,932	0%	-	0%	52%	401.331,118	148%	1.305.537,180	191%	24.71%		
		1 5 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60%	42.497,935	88%	14.020,060	100%	24.999,720	100%	24.978,620	0%	-	0%	-	100%	24.978,620	188%	38.998,680	314%	91.77%			
	Terlaksananya Penyusunan LAKP dan Renja SKPD	1 5 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi terkait Perencanaan Perangkat Daerah	60%	42.497,935	88%	14.020,060	100%	24.999,720	100%	24.978,620	0%	-	0%	-	100%	24.978,620	188%	38.998,680	314%	91.77%	Satpol PP		
		1 5 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Kantor	100%	1.189.352,899	100%	186.132,995	100%	185.623,130	28%	52.394,220	25%	46.772,260	0%	-	0%	53%	99.166,480	153%	285.299,475	153%	23.99%		
	Mendukung Operasional Kantor	1 5 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Alat Kantor yang dibutuhkan	100%	156.408,064	100%	39.883,700	100%	39.824,070	25%	9.951,150	25%	9.953,570	0%	-	0%	50%	19.904,720	150%	59.788,420	150%	38.23%	Satpol PP	
	Mendukung Kelancaran Operasional Kantor	1 5 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	100%	58.713,226	100%	19.996,696	100%	19.209,300	21%	4.059,170	21%	4.059,170	0%	-	0%	42%	8.118,340	142%	28.115,036	142%	47.89%	Satpol PP	
	Mendukung Operasional Kantor	1 5 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan Dokumen Kantor	100%	156.408,064	100%	24.991,274	100%	24.993,760	24%	5.905,900	23%	5.778,520	0%	-	0%	47%	11.684,420	147%	36.675,694	147%	23.45%	Satpol PP	
	Mendukung Operasional Kantor	1 5 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar dan Majalah	100%	31.701,613	93%	1.380,000	100%	1.600,000	0%	-	38%	600,000	0%	-	0%	38%	600,000	131%	1.980,000	131%	6.25%	Satpol PP	
	Mendukung Kelancaran Operasional Kedinasan	1 5 1 2.06 7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam luar daerah	100%	786.121,933	100%	99.881,325	100%	99.996,000	32%	32.478,000	26%	26.381,000	0%	-	0%	59%	58.859,000	159%	158.740,325	159%	20.19%	Satpol PP	
		1 5 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan yang Menunjang Berjalannya Operasional Kantor	100%	329.591,870	97%	59.468,057	100%	63.920,900	25%	15.717,766	25%	15.920,142	0%	-	0%	50%	31.637,908	146%	91.105,965	146%	27.64%		
	Mendukung Operasional Kantor	1 5 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya peranko dan material	100%	18.138,968	100%	3.990,000	100%	3.990,000	25%	990,000	25%	1.000,000	0%	-	0%	50%	1.990,000	150%	5.980,000	150%	32.97%	Satpol PP	
	Mendukung Kelancaran Operasional Kantor	1 5 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Air, Listrik dan Internet	100%	230.871,290	90%	40.588,131	100%	44.940,000	26%	11.574,866	28%	12.529,542	0%	-	0%	54%	24.104,408	144%	64.692,539	144%	28.02%	Satpol PP	
	Mendukung Operasional Kantor	1 5 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Service Peralatan Kantor	100%	50.000,000	100%	10.000,000	100%	10.000,000	19%	1.900,000	12%	1.200,000	0%	-	0%	31%	3.100,000	131%	13.100,000	131%	26.20%	Satpol PP	
	Mendukung Operasional Kantor	1 5 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan	100%	30.581,613	98%	4.889,926	100%	4.990,900	25%	1.252,900	24%	1.190,600	0%	-	0%	49%	2.443,500	147%	7.333,426	147%	23.98%	Satpol PP	
		1 5 1 2.09	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	50%	3.722.856,343	99%	644.584,950	100%	503.226,670	25%	125.065,580	24%	120.482,530	0%	-	0%	49%	245.548,110	148%	890.133,060	296%	23.91%		
	Mendukung Operasional Kantor	1 5 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	13 unit	3.405.791,247	100%	613.564,750	100%	499.630,000	25%	124.519,100	24%	119.585,700	0%	-	0%	49%	244.104,800	149%	857.669,550	11%	25.18%	Satpol PP	
	Mendukung Operasional Kantor	1 5 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terperuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor	50%	300.816,128	100%	29.040,200	100%	3.596,670	15%	546,480	25%	896,830	0%	-	0%	40%	1.443,310	140%	30.483,510	280%	10.13%	Satpol PP	
		11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terperuhinya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	50%	16.248,968	98%	1.620,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	98%	1.620,000	196%	-	9.97%			

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14=7+13		15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		1 5 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	TERLAKSANANYA PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	5.896.045.450	100%	430.000.000	17%	72.165.000	38%	162.010.000	0%	-	0%	54%	234.175.000	154%	6.130.220.450	257%	203.79%				
		1 5 2 2.01	Penanganan Gangguan Kelentraman dan Keterlibatan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dapat terlaksana dengan baik dan meningkatnya keamanan daerah	60%	3.008.161.280	100%	5.896.045.450	100%	430.000.000	17%	72.165.000	38%	162.010.000	0%	-	0%	54%	234.175.000	154%	6.130.220.450	257%	203.79%		
Terlaksananya Pengendalian dan Penegakan Perda		1 5 2 2.01 1	Pencegahan gangguan kelentraman dan keterlibatan umum melalui Deteksi Dini dan Cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan	Relaksanaan Koordinasi Penegakan Perda, Penyelenggaraan Umum dan Kelentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	60%	3.008.161.280	100%	5.896.045.450	100%	120.000.000	25%	29.995.000	25%	29.900.000	0%	-	0%	50%	59.895.000	150%	5.955.940.450	250%	197.99%	Satpol PP	
			Penindakan atas gangguan kelentraman dan keterlibatan umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Terciptanya Kelentraman dan Keterlibatan Masyarakat	0%	-	0%	-	100%	130.000.000	32%	42.170.000	0%	42.120.000	0%	-	65%	84.290.000	65%	84.290.000	0%	0.00%	Satpol PP		
			Kerjasama antar lembaga dan mitra dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan kelentraman dan keterlibatan umum	Terciptanya kerjasama antar aparat	0%	-	0%	-	100%	180.000.000	0%	-	0%	89.990.000	0%	-	0%	89.990.000	0%	89.990.000	0%	0.00%	Satpol PP		
		1 5 3	PROGRAM PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	TERLAKSANANYA PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	0%	-	100%	46.205.800	75%	35.706.000	24%	8.720.000	26%	9.130.000	0%	-	0%	50%	17.850.000	150%	64.055.800	-	-		
		1 5 3 2.02	Pelatihan Pencegahan dan Miligasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Terkendalanya Stabilitas Keamanan dan Keterlibatan	0%	-	100%	46.205.800	100%	35.706.000	24%	8.720.000	26%	9.130.000	0%	-	0%	50%	17.850.000	150%	64.055.800	-	-		
		1 5 3 2.02 1	Pelatihan Pencegahan dan Miligasi Bencana Kabupaten/Kota	Terciptanya Penguatan Kapasitas untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0%	-	100%	46.205.800	100%	35.706.000	24%	8.720.000	26%	9.130.000	0%	-	0%	50%	17.850.000	150%	64.055.800	-	-	Satpol PP	
		1 5 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	TERLAKSANANYA PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100%	3.362.077.600	100%	2.202.420.059	100%	168.715.190	24%	40.564.590	21%	35.791.440	0%	-	#REF!	45%	76.356.030	145%	2.278.776.089	145%	67.78%		
		1 5 4 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran	100%	3.362.077.600	100%	2.202.420.059	100%	168.715.190	24%	40.564.590	21%	35.791.440	0%	-	0%	45%	76.356.030	145%	2.278.776.089	145%	67.78%		
Terkendalanya Bahaya Kebakaran		1 5 4 2.01 1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota	Terciptanya Penguatan Kapasitas untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	3.362.077.600	100%	2.191.440.059	100%	118.472.040	28%	32.821.440	24%	27.871.440	0%	-	0%	51%	60.692.880	151%	2.252.132.939	151%	66.99%	Satpol PP	
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Penguatan Kapasitas untuk Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	0%	-	0%	-	100%	20.000.000	0%	-	40%	7.920.000	0%	-	0%	40%	7.920.000	40%	7.920.000	0%	0.00%	Satpol PP	
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	0%	-	100%	10.980.000	100%	30.243.150	26%	7.743.150	0%	-	0%	-	0%	26%	7.743.150	125%	18.723.150	0%	0.00%	Satpol PP	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>					24%	339.605.776	28%	390.106.372	0%	-	0%	-	0%	52%	729.712.148										
<b>Predikat Kinerja</b>					Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Rendah		Rendah		Rendah				
7.	BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	1 5 1	Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			BPBD		
		1 5 1 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Relasasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Relasasi Kinerja SKPD	100%	4.628.360	100%	4.573.600	100%	4.628.360	32%	1.496.500	0%	-	32%	1.496.500	66%	6.070.100	66%	1.311.501			BPBD		
		1 5 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1.920.174.400	100%	1.830.329.955	100%	1.920.174.400	16%	297.726.526	27%	514.867.871	42%	812.594.397	71%	2.642.924.352	71%	1.376.980.077			BPBD		
		1 5 1 2.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	10.088.940	100%	9.945.400	100%	10.088.940	16%	1.652.500	33%	3.345.000	50%	4.997.500	75%	14.942.900	75%	1.481.116.946			BPBD		
		1 5 1 2.06 2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	3.747.480	100%	1.353.000	100%	3.747.480	23%	874.000	0%	-	23%	874.000	62%	2.227.000	62%	0.594266013					







No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab													
					6		7		8		9		10		11		12		13			14=7+13		15 = 14/6 x 100%										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																			
		1 6 4 2 1 9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tersedianya Layanan Data dan Pengaduan untuk Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantai Sosial			100%	24.999.460	4%	1.000.000	6%	1.500.000																						
		1 6 4 2 2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Pantai Sosial																															
		1 6 4 2 2 1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tersedianya Layanan Data dan Pengaduan untuk PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Pantai	85%	261.477.000	80%	240.067.200	100%	19.501.280	12%	2.360.000	18%	3.600.000																				
		1 6 4 2 2 3	Penyediaan Permakanan	Tersedianya Makanan untuk PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Pantai			100%	39.998.420	0%	-	0%	-																						
		1 6 4 2 2 13	Pemberian Layanan Rujukan	Tersedianya Layanan Rujukan untuk PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Pantai			100%	35.000.900	0%	-	4%	1.499.500																						
		1 6 5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial																															
		1 6 5 2 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																															
		1 6 5 2 2 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin dan Verifikasi Santunan Kemauan untuk Keluarga Kurang Mampu (SANKEM) di Kabupaten Tapanuli Tengah	80%	215.000.000	196%	69.532.000	100%	70.000.000	17%	11.974.000	14%	9.961.200																				
		1 6 5 2 2 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tersedianya Biaya Sekretariat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tapanuli Tengah	80%	475.000.000	197%	43.830.000	100%	24.760.030	23%	5.720.000	13%	3.100.000																				
		1 6 6	Program Penanganan Bencana																															
		1 6 6 2 1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota																															
		1 6 6 2 1 1	Penyediaan Makanan	Penyediaan Buffer Stock di Kabupaten Tapanuli Tengah	85%	170.965.000	85%	158.805.550	100%	55.999.950	0%	-	0%	-																				
		1 6 6 2 1 4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Terlaksananya Bantuan Sosial kepada masyarakat korban bencana alam dan non alam yang direncanakan dan Tersedianya santunan kematian (SANKEM) bagi masyarakat miskin	85%	303.146.000	-	-	100%	290.499.940	0%	-	0.21%	599.000																				
		1 6 6 2 2	Penyelenggaraan Pembudayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota																															
		1 6 6 2 2 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	85%	510.710.000	278%	689.510.300	85%	54.998.700	27%	14.780.000	6%	3.099.600																				
					<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>		<b>11%</b>		<b>126.305.333</b>		<b>7%</b>		<b>84.060.930</b>		<b>0%</b>		<b>-</b>		<b>18%</b>		<b>17.879.600</b>		<b>311%</b>		<b>707.389.900</b>		<b>365%</b>		<b>138.51</b>		<b>Dinosa</b>			
					<b>Predikat Kinerja</b>		<b>Sangat Rendah</b>		<b>Sangat Rendah</b>		<b>Sangat Rendah</b>		<b>gat Rend</b>		<b>Sangat Rendah</b>																			
9.	Tenaga Kerja																																	
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kinerja pengelolaan pelayanan publik yang didukung sarana dan	2 7 1 2 1 1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Mendukung operasional kedisnasan																														
		2 7 1 2 1 1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Terwujudnya tatakelola yang baik dan tertib administrasi serta peningkatan kinerja dan akuntabilitas SKPD	100%	90.000.000	100%	5.999.900	100%	9.999.800	26%	8.602.590	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	26%	8.602.590	63%	14.602.490	63%	0.16								Disaker
		2 7 1 2 5 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	100%	18.000.000	0%	0	100%	18.000.000	0%	0	96%	17.220.000	0%	0	0%	0%	0%	96%	17.220.000	96%	17.220.000	96%	0								Disaker	
		2 7 1 2 6 1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	62.400.000	100%	5.998.300	100%	5.996.100	25%	1.486.540	25%	1.486.540	0%	0	0%	0%	50%	2.973.080	75%	8.971.380	75%	0.14									Disaker	
		2 7 1 2 6 2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	171.000.000	100%	18.522.100	100%	21.675.060	25%	5.416.950	17%	3.611.300	0%	0	0%	0%	42%	9.028.250	71%	27.550.350	71%	0.16									Disaker	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
																								9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 =7+13	15 = 14/6 x 100%	16									
	prasarana aparatur dengan memanfaatkan teknologi	2 7 1 2 6 4	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya makanan dan minuman	100%	131.600.000	100%	9.965.200	100%	7.997.220	25%	1.977.030	16%	1.318.020	0%	0	0%	41%	3.295.050	70%	13.260.250	70%	0.1	Disaker
	informasi dan komunikasi (TK)	2 7 1 2 7 10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	149.500.000	100%	3.692.100	100%	4.999.940	25%	1.247.070	17%	831.380	0%	0	0%	42%	2.078.450	71%	5.770.550	71%	0.04	Disaker
		2 7 1 2 6 9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	757.500.000	100%	54.000.000	100%	205.000.000	30%	62.170.000	21%	42.408.000	0%	0	0%	51%	104.578.000	76%	158.578.000	76%	0.21	Disaker
		2 7 1 2 7 10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya sarana peralatan gedung kantor	100%	15.000.000	0%	0	100%	15.000.000	33%	4.995.320	0%	0	0%	0	0%	33%	4.995.320	67%	4.995.320	0	0%	Disaker
		2 7 1 2 8 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100%	23.700.000	100%	1.998.000	100%	1.000.000	50%	500.000	0%	0	0%	0	0%	50%	500.000	75%	2.498.000	75%	0.11	Disaker
		2 7 1 2 8 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	298.980.000	100%	20.425.000	100%	24.997.500	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0	0%	20.425.000	0%	0	Disaker
		2 7 1 2 8 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana peralatan dan perlengkapan kantor	100%	142.700.000	100%	5.866.100	100%	5.760.810	52%	3.010.810	0%	0	0%	0	0%	52%	3.010.810	76%	8.876.910	76%	0.06	Disaker
		2 7 1 2 8 4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	180.810.000	100%	28.000.000	100%	29.207.610	26%	7.572.120	18%	5.389.640	0%	0	0%	44%	12.961.760	72%	40.961.760	72%	0.23	Disaker
		2 7 1 2 9 2	Pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terperuhinya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	100%	516.000.000	100%	36.170.800	100%	35.999.400	29%	10.399.800	17%	6.199.000	0%	0	0%	46%	16.598.800	73%	52.769.600	73%	0.1	Disaker
		2 7 1 2 9 7	Pemeliharaan Asset tetap lainnya	Terlaksananya pemeliharaan asset tetap lainnya	100%	172.840	0%	0	100%	172.840	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	-	0%	0	0%	0	Disaker
		2 7 3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tersedianya Tenaga Kerja Yang Terampil																				
	Meningkatnya Peluang	2 7 3 2 1 1	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Terselenggaranya pelatihan berdasarkan unit kompetensi kejuruan salon penata rias	100%	79.999.800	0%	0	100%	79.999.800	6%	4.500.000	6%	4.500.000	0%	0	0%	12%	9.000.000	12%	9.000.000	12%	0.11	Disaker
	Kerja Bagi Penduduk Lokal	2 7 4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Memperoleh Kesempatan Kerja																				
		2 7 4 2 3 1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Terpeliharanya aplikasi informasi pasar kerja online	100%	440.000.000	100%	75.266.800	100%	94.998.840	13%	12.205.760	19%	18.093.330	0%	0	0%	32%	30.299.090	66%	105.565.890	66%	0.24	Disaker
		2 7 4 2 5 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Rancangan Perda Retribusi Perpanjangan Ijin TKA	100%	70.019.540	0%	0	100%	70.019.540	9%	6.357.000	41%	28.488.530	0%	0	0%	50%	34.845.530	50%	34.845.530	50%	0.5	Disaker
		2 7 5	Program Hubungan Industrial	Terlaksananya tata kelola kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial																				
	Meningkatnya Perlindungan	2 7 5 2 2 2	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Terlaksananya kesepakatan penetapan UMK/UMSK	100%	960.000.000	100%	119.098.200	100%	159.999.900	6%	10.130.000	28%	45.330.000	0%	0	0%	34%	55.460.000	67%	174.558.200	67%	0.18	Disaker
	Tenaga Kerja dan hubungan industrial yang harmonis	2 7 5 2 2 5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terfasilitasinya penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100%	922.915.140	0%	0	100%	922.915.140	13%	118.140.210	3%	30.933.330	0%	0	0%	16%	149.073.540	16%	149.073.540	16%	0.16	Disaker
					<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>		<b>15%</b>		<b>258.711.200</b>		<b>12%</b>		<b>205.809.070</b>		<b>0%</b>		<b>27%</b>		<b>464.520.270</b>					
					<b>Predikat Kinerja</b>		<b>Sangat Rendah</b>		<b>Sangat Rendah</b>		<b>Sangat Rendah</b>		<b>gat Rend</b>		<b>Sangat Rendah</b>									
10.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)	2 8 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			520.708.399				279.614.890	10%	28.758.200	31%	86.946.200				41%	115.704.400					
		2 8 1 2 1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terperuhinya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8.580.000				6.593.620	0%	-	93%	6.134.200				93%	6.134.200					
		2 8 1 2 1 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Meningkatnya Sistem Capaian Kinerja	100%	8.580.000	89%	5.893.700	100%	6.593.620	0%	-	93%	6.134.200	0%	-	0%	93%	6.134.200	91%	12.027.900	91%	1.401853147	DPPPA
		2 8 1 2 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		134.074.372				101.200.570	10%	9.762.200	38%	38.052.500				47%	47.814.700					
		2 8 1 2 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Kantor	100%	18.474.372	99%	40.198.400	100%	14.211.010	17%	2.366.200	25%	3.549.600	0%	-	0%	42%	5.915.800	70%	46.114.200	70%	2.496117392	DPPPA
		2 8 1 2 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	6.500.000	70%	8.348.020	100%	4.989.600	0%	-	33%	1.637.300	0%	-	0%	33%	1.637.300	51%	9.985.320	51%	1.536203077	DPPPA
		2 8 1 2 6 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terperuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	9.100.000	99%	14.587.600	100%	6.999.960	17%	1.166.000	33%	2.332.000	0%	-	0%	50%	3.498.000	74%	18.085.609	74%	1.98742956	DPPPA
		2 8 1 2 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100.000.000	91%	131.753.800	100%	75.000.000	8%	6.230.000	41%	30.533.600	0%	-	0%	49%	36.763.600	70%	168.517.400	70%	1.685174	DPPPA
		2 8 1 2 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terperuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		157.574.027				-														





No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)	Unit SKPD Penanggung jawab									
								I		II						III		IV						
								K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	13	14 = 7+13	15 = 14/6 x 100%	16	
			Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga penyedia layanan penangananan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penangananan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	100%	100.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	DPPPA					
		2 8 5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			300.000.000		70.999.790	4%	3.000.000	30%	21.182.500		34%	24.182.500									
		2 8 5 2 1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhiya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		300.000.000		70.999.790	4%	3.000.000	30%	21.182.500		34%	24.182.500									
		2 8 5 2 1 1	Penyajian Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	100%	150.000.000	99%	77.378.000	100%	70.999.790	4%	3.000.000	30%	21.182.500	0%	-	0%	34%	24.182.500	67%	101.560.500	67%	0.67707	DPPPA
		2 8 5 2 1 2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di kewenangan Kabupaten/Kota	100%	150.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	0%	0	DPPPA
		2 8 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			403.825.412		85.998.960	3%	3.000.000	28%	24.377.900		32%	27.377.900									
		2 8 6 2 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhiya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		403.825.412		85.998.960	3%	3.000.000	28%	24.377.900		32%	27.377.900									
		2 8 6 2 2 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	250.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	0%	0	DPPPA
		2 8 6 2 2 3	Pengembangan Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Desa Kelurahan, kecamatan Forum Anak dan Penguatan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tapanuli Tengah	100%	153.825.412	99%	136.732.000	100%	85.998.960	3%	3.000.000	28%	24.377.900	0%	-	0%	32%	27.377.900	65%	164.109.900	65%	1.066858186	DPPPA
		2 8 7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			250.000.000		136.310.050	12%	17.000.000	21%	28.347.100		33%	45.347.100									
		2 8 7 2 2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhiya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		150.000.000		69.999.790	4%	3.000.000	32%	22.271.800		36%	25.271.800									
		2 8 7 2 2 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	100%	150.000.000	99%	59.792.500	100%	69.999.790	4%	3.000.000	32%	22.271.800	0%	-	0%	36%	25.271.800	68%	85.064.300	68%	0.567095333	DPPPA
		2 8 7 2 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhiya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100.000.000		66.310.260	21%	14.000.000	9%	6.075.300		30%	20.075.300									
			Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	100%	200.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	0%	0	DPPPA
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah layanan tindak lanjut koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	100%	100.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	0%	0	DPPPA
			Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	100%	100.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	0%	0	DPPPA



No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)	Unit SKPD Penanggung Jawab												
								I		II						III		IV									
								K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15 = 14/6 x 100%	16												
		25	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				39,999.840	6,859.500	11,854.455	-		18,713.955	18,713.955	0													
			Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Terlaksananya Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%		100%	39,999.840	17%	6,859.500	30%	11,854.455	0%	0%	47%	18,713.955	23%	18,713.955	23%	0							
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT																								
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				34,999.800	10,094.709	8,297.728	-		30,000.000	30,000.000	0													
	2	9	1	5			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	100%	100%	34,999.800	29%	10,094.709	24%	8,297.728	0%	-	0%	53%	30,000.000	26%	30,000.000	26%	0				
							Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			76,185.730		12,000.000		18,000.000		-			30,000.000		30,000.000		0				
	2	9	1	5	1		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100%		93%	100%	76,185.730	16%	12,000.000	24%	18,000.000	0%	0%	39%	30,000.000	66%	30,000.000	66%	0	KETAPANG		
							PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN																				
							Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota																				
	2	9	1	6			Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100%		80%		54,999.970	20%	11,147.692	61%	33,484.090	0%	-	0%	81%	44,631.782	81%	44,631.782	81%	0		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>								21%		21%		142,129.828	21%	230,898.284	0%	-	0%	41%	384,635.675								
<b>Predikat Kinerja</b>								Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah									
12	Lingkungan Hidup																										
	Meningkatnya kualitas pelayanan Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2	11	1			Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Lancarnya urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota																			
		2	11	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		2	11	1	2.01	1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	7,000,000	100%	67,074.880	100%	54,607.180	27%	14,924.400	33%	17,920.650	0%	0%	60%	32,845.050	60%	1	80%	99,919.930	80.00%
		2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	100%	7,000,000	0%	-	100%	2,495.680	100%	2,495.680	0%	-	0%	100%	2,495.680	100%	1	50%	2,495.680	50.00%	
		2	11	1	2.06		Administrasi umum perangkat daerah																				
		2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik	100%	10,000,000	100%	2,491.300	100%	2,491.500	20%	507.540	28%	707.520	0%	0%	49%	1,215.060	49%	0	74%	3,693.360	74.40%
		2	11	1	2.06	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor	100%	75,000,000	100%	27,067.700	100%	24,999.700	33%	8,197.640	17%	4,230.050	0%	0%	50%	12,427.690	50%	0	75%	39,495.390	74.80%
		2	11	1	2.06	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya bahan logistik kantor	100%	20,000,000	100%	8,979.250	100%	8,994.480	10%	892.980	40%	3,601.180	0%	0%	50%	4,494.160	50%	1	75%	13,473.410	74.80%
		2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan untuk cetakan dan penggandaan	100%	30,000,000	100%	3,113.771	100%	2,998.270	24%	716.650	24%	716.650	0%	0%	48%	1,433.300	48%	0	74%	4,547.071	73.90%
		2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	300,000,000	100%	99,500.000	100%	160,000.000	30%	47,282.000	15%	23,806.400	0%	0%	44%	71,088.400	44%	0	72%	170,588.400	72.00%
		2	11	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah																				
		2	11	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	100%	50,000,000	0%	-	100%	6,871.590	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	-	0.00%	
		2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah																				
		2	11	1	2.08	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	100%	15,000,000	100%	2,343.000	100%	2,100.000	29%	600.000	24%	500.000	0%	0%	52%	1,100.000	52%	1	76%	3,443.000	76.20%
		2	11	1	2.08	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa-jasa komunikasi sumberdaya air, listrik	100%	30,000,000	100%	14,738.228	100%	13,875.000	21%	2,853.728	15%	2,029.296	0%	0%	35%	4,883.024	35%	0	67%	19,621.252	67.40%
		2	11	1	2.08	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	60,000,000	100%	6,677.000	100%	4,500.000	0%	-	44%	2,000.000	0%	0%	44%	2,000.000	44%	0	72%	8,677.000	72.20%

No	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung jawab				
										6		7		8		I		II		III		IV		13				14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	
		2	11	1	2.08	4		Penyediaan jasa pelayanan umum: kantor	Terciptanya suasana nyaman, bersih dan rapi	100%	75.000.000	100%	37.927.480	100%	88.391.840	16%	13.683.910	15%	13.284.000	0%	0%	0%	0%	31%	26.967.910	31%	0	65%	64.895.390	65.20%	
		2	11	1	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
		2	11	1	2.09	2		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	750.000.000	97%	480.978.387	100%	509.270.000	25%	125.122.831	23%	116.238.300	0%	0%	0%	0%	47%	241.361.131	47%	0	72%	722.339.518	72.00%	
	Meningkatnya kualitas pengendalian pencemaran dan perusakan LH	2	11	3				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (LH)																							
		2	11	3	2.01			Pencegahan Pencemaran dan / atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten																							
		2	11	3	2.01	2		Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Terkoordinasi, sinkron dan terlaksananya pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	100%	500.000.000	98%	229.157.000	100%	188.136.470	22%	41.985.190	18%	33.396.618	0%	0%	0%	0%	40%	75.381.808	40%	0	69%	304.538.808	69.10%	
	Meningkatnya kualitas pengendalian B3 dan limbah B3	2	11	5				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Limbah B3)																							
		2	11	5	2.01			Penyimpanan Sementara Limbah B3																							
		2	11	5	2.01	2		Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Terverifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	100%	200.000.000	99%	21.263.500	100%	19.998.380	0%	-	35%	6.938.380	0%	0%	0%	0%	35%	6.938.380	35%	0	67%	28.201.880	67.00%	
								Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)																							
								Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten / Kota																							
								Pengawasan Usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota	Terlaksananya Pengawasan Usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota	100%	250.000.000	0%	-	100%	72.999.840	17%	12.678.000	22%	15.780.730	0%	0%	0%	0%	39%	28.458.730	39%	0	20%	28.458.730	19.50%	
								Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH																							
								Pengakuan MHA, Kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH																							
								Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan data dan informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan data dan informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	100%	100.000.000	0%	-	100%	21.999.970	52%	11.517.970	45%	9.908.000	0%	0%	0%	0%	97%	21.425.970	97%	1	49%	21.425.970	48.70%	
	Meningkatnya kualitas penghargaan LH untuk masyarakat	2	11	9				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat																							
		2	11	9	2.01			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14=7+13		15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		2 11 9 2.01 1	Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat dunia Usaha / dunia Pendidikan / Filantropi Dalam Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / dunia Usaha / dunia Pendidikan / Filantropi Dalam Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	500.000.000	100%	91.645.902	100%	62.999.590	56%	35.323.000	31%	19.563.540	0%	0%	87%	54.886.540	87%	1	93%	146.532.442	93.40%		
	Meningkatnya kualitas pelayanan persampahan di Kab.Tapanuli Tengah	2 11 11 2.01	Program Pengelolaan Persampahan																						
		2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah																						
		2 11 11 2.01 3	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA,TPST,SPA Kabupaten	Tertanganinya sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA,TPST,SPA Kabupaten	70%	15.000.000,000	100%	6.375.819.661	100%	7.283.041.710	16%	1.183.078.447	11%	780.095.750	0%	0%	27%	1.963.174.197	27%	0	64%	8.338.993.858	90.70%		
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	100%	100.000.000	0%	-	100%	19.997.910	0%	-	0%	-	0%	0%	47%	2.552.577.030	-	-	0%	-	0.00%		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>					25%	1.501.859.966	22%	1.050.717.064																	
<b>Predikat Kinerja</b>					Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah				
13.	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																								
	Terlaksananya pelayanan adm. kependudukan	2 12 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Melengkapi Administrasi Perkantoran																					
		2 12 1 2.01 1	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100%	120.000.000	99%	74.200.000	100%	31.799.960	9%	2.800.000	48%	15.186.100	0%	-	0%	57%	17.986.100	78%	92.186.100	78%	1	Dukcapil	
		2 12 1 2.01 7	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terbentuknya tim terkait pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan	100%	10.000.000	0%	-	0%	9.999.880	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	Dukcapil	
		2 12 1 2.06 1	3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan/penerangan dalam mendukung Adm. Kantor	100%	131.000.000	100%	9.990.500	100%	9.991.850	19%	1.922.500	28%	2.835.500	0%	-	0%	48%	4.758.000	74%	14.748.500	74%	0	Dukcapil	
		2 12 1 2.06 2	4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK Administrasi Kantor dan Peralatan/Pencetakan KTP-EI dan KIA	100%	3.370.000.000	100%	638.899.200	100%	579.144.840	4%	25.353.800	24%	140.556.200	0%	-	0%	29%	165.910.000	64%	804.809.200	64%	0	Dukcapil	
		2 12 1 2.06 4	5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan Minuman Kantor	100%	195.000.000	100%	11.992.200	100%	14.985.300	14%	2.137.000	14%	2.137.500	0%	-	0%	29%	4.274.500	64%	16.266.700	64%	0	Dukcapil	
		2 12 1 2.06 5	6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan Cetakan dan penggandaan	100%	240.000.000	100%	13.985.800	100%	17.999.960	20%	3.689.250	29%	5.257.250	0%	-	0%	50%	8.946.500	75%	22.932.300	75%	0	Dukcapil	
		2 12 1 2.06 9	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dalam dan Luar Daerah	100%	1.350.000.000	99%	144.113.547	100%	260.000.000	9%	23.356.000	11%	27.601.000	0%	-	0%	20%	50.957.000	59%	195.070.547	59%	0	Dukcapil	
		2 12 1 2.07 10	8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mendukung Kelancaran Operasional Kantor	100%	2.700.000.000	90%	403.227.500	100%	210.398.210	0%	-	99%	208.483.000	0%	-	0%	99%	208.483.000	95%	611.710.500	95%	0	Dukcapil	
		2 12 1 2.08 1	9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat Perkantoran	100%	22.800.000	97%	3.696.000	100%	1.500.000	25%	375.000	0%	-	0%	-	0%	25%	375.000	61%	4.071.000	61%	0	Dukcapil	
		2 12 1 2.08 2	10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	100%	460.000.000	83%	57.919.889	100%	101.700.000	13%	13.632.326	13%	12.757.342	0%	-	0%	26%	26.389.668	54%	84.309.557	54%	0	Dukcapil	
		2 12 1 2.08 4	11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	100%	270.000.000	100%	42.978.400	100%	53.631.664	11%	5.887.500	23%	12.521.200	0%	-	0%	34%	18.408.700	67%	61.387.100	67%	0	Dukcapil	
		2 12 1 2.09 2	12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mendukung Kelancaran Operasional Kantor	100%	545.000.000	100%	78.529.180	100%	74.900.000	44%	32.648.457	5%	3.600.000	0%	-	0%	48%	36.248.457	74%	114.777.637	74%	0	Dukcapil	
		2 12 1 2.09 10	13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mendukung Kelancaran Operasional Gedung Kantor	100%	259.500.000	100%	62.300.822	100%	114.000.000	4%	5.000.000	61%	69.664.000	0%	-	0%	65%	74.664.000	83%	136.964.822	83%	1	Dukcapil	
	Terlaksananya pelayanan adm. kependudukan	2 12 2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Mendukung Kelancaran Operasional Pendaftaran Penduduk																					
		2 12 2 2.01 4	14. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	1.700.000.000	99%	550.768.800	100%	433.261.610	11%	45.526.000	25%	109.201.220	0%	-	0%	36%	154.727.220	67%	705.496.020	67%	0	Dukcapil	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)	Unit SKPD Penanggung Jawab												
								I		II						III		IV									
								K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	13	14 = 7+13	15 = 14/6 x 100%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7+13	15 = 14/6 x 100%	16												
			15. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya Kertas A4 (pengganti Blangko Kartu Keluarga) tinta printer dan	100%	1.800.000.000	99%	90.099.400	100%	79.464.000	24%	19.060.000	0%	-	0%	-	0%	24%	19.060.000	61%	109.159.400	61%	0	Dukcapil			
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Mendukung Kelancaran Operasional Pencatatan Sipil																							
			16. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan Administrasi PencatatanSipil	100%	2.200.000.000	100%	516.810.600	100%	435.294.420	8%	35.526.000	24%	103.914.450	0%	-	0%	32%	139.440.450	66%	656.251.050	66%	0	Dukcapil			
			17. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkaitPencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya Kertas A4 (pengganti Blangko) dan Tinta Printer	100%	1.800.000.000	100%	77.583.800	100%	58.694.790	17%	9.775.000	0%	-	0%	-	0%	17%	9.775.000	58%	87.368.800	58%	0	Dukcapil			
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Mendukung Kelancaran Program Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan																							
			18. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Tercapainya Koordinasi dan Kerjasama Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi	100%	500.000.000	99%	34.606.000	100%	72.999.840	11%	8.000.000	11%	8.000.000	0%	-	0%	22%	16.000.000	60%	50.606.000	60%	0	Dukcapil			
			19. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemanfaatan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	100%	23.477.300	0%	-	100%	23.477.300	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	0	Dukcapil			
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Mendukung Kelancaran Program Pengelolaan Profil Kependudukan																							
			20. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Tersusunnya data Kependudukan Kabupaten Tapanuli Tengah	100%	1.332.000.000	98%	252.681.153	100%	235.999.970	14%	34.175.200	23%	53.533.200	0%	-	0%	37%	87.708.400	68%	340.389.553	68%	0	Dukcapil			
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																13%	268.864.033	22%	775.247.962	0%	-	0%	35%	1.044.111.995			
<b>Predikat Kinerja</b>																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah			
14.	Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)																										
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	7.500.000	97%	4.857.900	100%	4.999.870	100%	4.999.870	0%	-	0%	-	0%	100%	4.999.870	99%	9.857.770	99%	1.314369333	Dinas PMD			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah																							
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	50.000.000	100%	5.789.200	100%	16.792.490	0%	-	25%	4.129.840	0%	-	0%	25%	4.129.840	62%	9.919.040	62%	0.1983808	Dinas PMD			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	80.000.000	100%	13.390.100	100%	34.499.850	14%	4.994.110	36%	12.454.202	0%	-	0%	51%	17.448.312	75%	30.838.412	75%	0.38548015	Dinas PMD			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	50.000.000	100%	24.997.200	100%	44.979.880	0%	-	25%	11.369.630	0%	-	0%	25%	11.369.630	63%	36.366.830	63%	0.7273366	Dinas PMD			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	40.000.000	100%	13.729.600	100%	19.955.800	0%	-	35%	6.960.340	0%	-	0%	35%	6.960.340	67%	20.689.940	67%	0.5172485	Dinas PMD			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhi kebutuhan untuk cetak dan penggandaan	100%	55.000.000	100%	7.735.000	100%	22.999.900	0%	-	51%	11.708.950	0%	-	0%	51%	11.708.950	76%	19.443.950	76%	0.353526364	Dinas PMD			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Adanya bahan bacaan dan peraturan undang - undang	100%	9.500.000	100%	2.712.000	100%	2.692.800	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	50%	2.712.000	50%	0.285473684	Dinas PMD			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	400.000.000	49%	39.106.000	100%	80.000.000	7%	5.236.000	0%	-	0%	-	0%	7%	5.236.000	28%	44.342.000	28%	0.110855	Dinas PMD			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	93.000.000	0%	-	100%	60.085.740	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	0	Dinas PMD			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Laju (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		13		14 = 7+13			15 = 14/6 x 100%			
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1																									
		2 13 0 0 1 2 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	6.500.000	100%	2.998.370	100%	7.000.000	0%	-	50%	3.500.000	0%	-	0%	50%	3.500.000	75%	6.498.370	75%	0.999749231	Dinas PMD
		2 13 0 0 1 2 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terkananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	45.000.000	61%	17.088.748	100%	30.000.000	11%	3.182.000	14%	4.174.290	0%	-	0%	25%	7.356.290	43%	24.445.038	43%	0.543223067	Dinas PMD
		2 13 0 0 1 2 8	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Terkananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	100%	20.000.000	100%	5.909.800	100%	5.500.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	50%	5.909.800	50%	0.29549	Dinas PMD
		2 13 0 0 1 2 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terkananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	90.000.000	100%	85.514.800	100%	73.786.700	24%	18.067.200	16%	12.067.200	0%	-	0%	41%	30.134.400	70%	115.649.200	70%	1.284991111	Dinas PMD
		2 13 0 0 1 2 9		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		2 13 0 0 1 2 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	60.000.000	63%	23.050.274	100%	49.998.330	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	31%	23.050.274	31%	0.384171233	Dinas PMD
		2 13 0 0 1 2 9	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terkananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	50.000.000	100%	8.614.950	100%	8.250.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	50%	8.614.950	50%	0.172299	Dinas PMD
		2 13 0 0 4 2 1		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																				
		2 13 0 0 4 2 1	4	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	0%	-	0%	-	100%	213.804.620	11%	23.226.605	20%	43.065.420	0%	-	0%	31%	66.292.025	16%	66.292.025	0%	0	Dinas PMD
		2 13 0 0 4 2 1	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terkananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-	53%	484.989.440	100%	2.046.999.590	12%	253.975.708	13%	261.137.328	0%	-	0%	25%	515.113.036	39%	1.000.102.476	0%	0	Kepala Desa Se-Kabupaten
		2 13 0 0 5 2 1		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota																				
		2 13 0 0 5 2 1	9	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terkananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	0%	-	56%	450.513.550	100%	382.999.940	23%	88.391.800	6%	22.468.800	0%	-	0%	11%	110.860.600	43%	561.374.150	0%	0	Dinas PMD
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>											4%	402.073.293	6%	393.036.000	0%	-	0%	11%	795.109.293						
<b>Predikat Kinerja</b>											Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
15.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PKKB)																								
		2 8 2 8 1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																					
		2 14 1 2 0 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen renja	100%	15.000.000	100%	5.000.000	100%	7.499.940	0%	-	99%	7.444.510	0%	-	0%	99%	7.444.510	100%	12.444.510	100%	0.829634	DPPKB
		2 14 1 2 0 2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	tersusunnya dokumen RKA-SKPD	0%	-	0%	-	100%	1.499.740	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	0	DPPKB
		2 14 1 2 0 4		Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	tersusunnya dokumen DPA-SKPD	0%	-	0%	-	100%	999.900	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	0	DPPKB
		2 14 1 2 0 6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	15.000.000	100%	2.494.000	100%	2.499.860	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	50%	2.494.000	50%	0.166266667	DPPKB
		2 14 1 2 0 2 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	-	95%	4.715.590.044	100%	5.268.942.900	16%	839.033.393	24%	1.249.413.030	0%	-	0%	40%	2.088.446.423	67%	6.804.036.467	67%	0	DPPKB
		2 14 1 2 0 5 9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kompetensi Aparatur	100%	115.000.000	0%	-	100%	15.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	0	DPPKB
		2 14 1 2 0 6 1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya Biaya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	100%	8.000.000	0%	1.603.100	100%	14.999.280	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	1.603.100	0%	0.2003875	DPPKB
		2 14 1 2 0 6 2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	350.000.000	98%	21.260.682	100%	34.999.910	0%	-	49%	17.079.810	0%	-	0%	49%	17.079.810	73%	38.340.492	73%	0.109544263	DPPKB
		2 14 1 2 0 6 4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor	100%	300.000.000	90%	25.000.000	100%	37.027.980	0%	-	49%	18.303.000	0%	-	0%	49%	18.303.000	70%	43.303.000	70%	0.144343333	DPPKB

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Laju (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)	Unit SKPD Penanggung jawab													
								I		II						III		IV										
								9	10	11	12					13	14=7+13	15 = 14/6 x 100%	16									
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
	2	14	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Biaya Cetak dan Penggandaan	100%	70.000.000	99%	7.681.250	100%	16.526.950	0%	-	43%	7.076.000	0%	-	0%	43%	7.076.000	71%	14.757.250	71%	0.210817857	DPPKB
	2	14	1	2.06	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Mendukung operasional kantor	100%	65.000.000	100%	780.000	100%	1.082.000	0%	-	27%	291.300	0%	-	0%	27%	291.300	63%	1.071.300	63%	0.016481538	DPPKB
	2	14	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	500.000.000	100%	213.535.527	100%	150.000.000	0%	-	45%	66.905.000	0%	-	0%	45%	66.905.000	72%	280.440.527	72%	0.560881054	DPPKB
	2	14	1	2.07	5		Pengadaan Mebel	Mendukung operasional kantor	100%	100.000.000	100%	116.590.100	100%	19.997.230	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	50%	116.590.100	50%	1.165901	DPPKB
	2	14	1	2.07	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Mendukung operasional kantor	100%	250.000.000	0%	-	-	99.974.500	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	0	DPPKB
	2	14	1	2.07	9		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mendukung operasional kantor	100%	45.375.000	0%	-	-	420.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	0	DPPKB
	2	14	1	2.07	9		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	250.000.000	95%	4.537.500	100%	19.248.460	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	47%	4.537.500	47%	0.01815	DPPKB
	2	14	1	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor	100%	15.000.000	100%	2.400.000	100%	4.000.000	0%	-	50%	2.000.000	0%	-	0%	50%	2.000.000	75%	4.400.000	75%	0.293333333	DPPKB
	2	14	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya air, dan Listrik kantor	100%	250.000.000	86%	55.724.489	100%	75.000.000	0%	-	34%	25.872.660	0%	-	0%	34%	25.872.660	60%	81.597.149	60%	0.326388596	DPPKB
	2	14	1	2.08	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	100%	60.000.000	100%	25.800.500	100%	19.500.000	0%	-	23%	4.400.000	0%	-	0%	23%	4.400.000	61%	30.200.500	61%	0.503341667	DPPKB
	2	14	1	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mendukung operasional kantor	100%	100.000.000	100%	145.200.000	100%	101.548.800	3%	3.124.800	22%	22.308.000	0%	-	0%	25%	25.432.800	63%	170.632.800	63%	1.706328	DPPKB
	2	14	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan ,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Perorangan	100%	75.000.000	97%	34.067.718	100%	29.500.000	0%	-	36%	10.642.400	0%	-	0%	36%	10.642.400	66%	44.710.118	66%	0.596134907	DPPKB
	2	14	1	2.09	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan ,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	100%	175.000.000	97%	47.742.437	100%	33.500.000	0%	-	22%	7.333.172	0%	-	0%	22%	7.333.172	59%	56.075.609	59%	0.314717766	DPPKB
	2	14	1	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung kantor	100%	150.000.000	0%	-	100%	210.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	0	DPPKB
	2	8	2	8	1		Program Pengendalian Penduduk																					
	2	14	2	2.01	5		Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Tersusunnya Grand Design Kependudukan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021	100%	-	0%	-	100%	65.000.000	0%	-	90%	58.720.600	0%	-	0%	90%	58.720.600	45%	58.720.600	45%	0	DPPKB
	2	14	2	2.02	3		Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Terbentuknya Kerjasama dengan Instansi Pendidikan Non formal	100%	115.000.000	0%	31.718.700	100%	9.999.830	0%	-	51%	5.074.140	0%	-	0%	51%	5.074.140	25%	36.792.840	25%	0.31993739	DPPKB
	2	14	2	2.02	11		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	100%	130.000.000	100%	-	100%	4.655.000	0%	-	100%	4.655.000	0%	-	0%	100%	4.655.000	100%	4.655.000	100%	0.035807692	DPPKB
	2	14	2	2.02	13		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Rapat Program KKBPK	100%	100.000.000	98%	-	100%	151.200.000	0%	-	21%	31.819.940	0%	-	0%	21%	31.819.940	60%	31.819.940	60%	0.3181994	DPPKB
	2	14	2	2.02	14		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Adanya Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	100%	-	0%	74.750.400	100%	74.999.810	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	74.750.400	0%	0	DPPKB
	2	14	3				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)																					
	2	14	3	2.01	1		Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terjalinya kerja sama dengan stakeholders dan mitra kerja	0%	-	100%	56.466.100	100%	54.374.940	0%	-	96%	52.463.440	0%	-	0%	96%	52.463.440	98%	108.929.540	0%	0	DPPKB
	2	14	3	2.01	2		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	umlah Sosialisasi	100%	250.000.000	100%	61.569.700	100%	74.999.930	0%	-	60%	44.972.250	0%	-	0%	60%	44.972.250	80%	106.541.950	80%	0.4261678	DPPKB
	2	14	3	2.01	3		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Akseptor KB	100%	200.000.000	100%	101.635.050	100%	10.120.340	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	50%	101.635.050	50%	0.50817525	DPPKB
	2	14	3	2.01	4		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Program Keluarga Berencana melalui Media massa, cetak dan Elektronik dan Melalui Penggerak MUPEN	100%	200.000.000	100%	49.673.000	100%	103.564.850	0%	-	34%	35.181.280	0%	-	0%	34%	35.181.280	67%	84.854.280	67%	0.4242714	DPPKB
	2	14	3	2.01	6		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Rapat dan koordinasi Kecamatan dan Desa	100%	100.000.000	100%	92.994.300	100%	340.555.640	0%	-	25%	86.228.970	0%	-	0%	25%	86.228.970	63%	179.223.270	63%	1.7922327	DPPKB
	2	14	3	2.01	7		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Tersedianya operasional balai penyuluhan KB dan Sarana dan Prasarana di Balai Penyuluhan KB	100%	626.035.000	89%	1.405.456.750	100%	769.500.000	0%	-	20%	151.191.750	0%	-	0%	20%	151.191.750	54%	1.556.648.500	54%	2.486519923	DPPKB

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13			14=7+13		15 = 14/6 x 100%	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
				Pengendalian Program KKBPK	Tertelaksananya Kegiatan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Program KKBPK dan Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan Monitoring Program KKBPK Lainnya	100%	190.816.000	86%	95.424.750	100%	40.000.000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	43%	95.424.750	43%	0.500087781	DPPKB		
				Bimbingan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Akseptor KB	100%	80.000.000	100%	73.207.900	100%	65.000.000	0%	-	94%	61.266.890	0%	94%	61.266.890	97%	134.474.790	97%	1.680934875	DPPKB		
				Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Tersedianya Operasional PLKB	0%	-	0%	-	1.550.000.000	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	0			
				Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Tersedianya Operasional PLKB Non PNS	100%	4.000.000.000	100%	2.620.800.000	100%	2.634.000.000	16%	427.000.000	17%	449.000.000	0%	33%	876.000.000	67%	3.496.800.000	67%	0.8742	DPPKB		
				Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Akseptor KB	100%	150.000.000	100%	1.032.000.000	100%	1.032.000.000	0%	-	25%	258.000.000	0%	25%	258.000.000	63%	1.290.000.000	63%	8.6	DPPKB		
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jajarannya	Tersedianya Alotkon	100%	250.000.000	100%	168.480.500	100%	17.100.000	0%	-	33%	5.688.410	0%	33%	5.688.410	67%	174.168.910	67%	0.69667564	DPPKB		
				Peningkatan Kesertian Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Akseptor KB	100%	150.000.000	100%	1.219.649.560	100%	884.760.980	0%	-	16%	143.052.260	0%	16%	143.052.260	58%	1.362.701.820	58%	9.0846788	DPPKB		
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor KB	100%	100.000.000	100%	1.093.583.000	100%	21.800.000.000	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Bimbingan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jajarannya	Jumlah Akseptor KB	100%	150.000.000	0%	20.900.000	3.000.000	0%	-	50%	1.500.000	0%	50%	1.500.000	25%	22.400.000	25%	0.149333333	DPPKB			
				Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	adanya Tenaga Kesehatan yang mempunyai sertifikasi Pelayanan KB	0%	-	0%	-	98.765.310	-	-	-	89.948.680	-	-	89.948.680	0%	89.948.680	0%	0	DPPKB			
				Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Bimbingan Keserban Ber-KB	Jumlah Akseptor KB	100%	400.000.000	0%	102.298.750	99.999.530	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	102.298.750	0%	0.255746875	DPPKB			
				Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Jumlah Akseptor KB	100%	1.025.312.000	100%	44.000.190	0%	-	99%	43.780.090	0%	99%	43.780.090	100%	1.069.092.090	0%	0	DPPKB				
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Jumlah Akseptor KB	100%	146.022.200	100%	681.543.500	0%	-	46%	311.059.480	0%	46%	311.059.480	23%	457.081.680	0%	0	DPPKB				
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)																					
				Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Kegiatan (POKTAN)	100%	116.986.000	0%	102.939.700	79.999.640	0%	-	99%	79.231.420	0%	99%	79.231.420	50%	182.171.120	50%	1.557204452	DPPKB			
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Sarana Kelompok Kegiatan (POKTAN)	0%	-	100%	265.403.800	566.068.590	0%	-	0%	-	0%	0%	-	50%	265.403.800	0%	0	DPPKB			
				Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Kelompok Kegiatan KB	100%	520.000.000	100%	92.461.150	49.797.240	0%	-	99%	49.267.940	0%	99%	49.267.940	99%	141.729.090	99%	0.272555942	DPPKB			
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	penyediaan biaya operasional untuk Kader	100%	150.000.000	0%	-	2.011.520.000	-	-	39.860.000	-	-	0%	39.860.000	0%	39.860.000	0%	0.265733333				
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>											1%	1.269.158.193	33%	3.441.031.422	0%	0%	33%	4.710.189.615							
<b>Predikat Kinerja</b>											Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah								
16.	Perhubungan			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		684.000.000		219.739.204	256.788.660		49.541.550		44.222.947		-		93.764.497		313.503.701						
				Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya peranko dan materai	100%	12.000.000	100%	4.200.000	3.700.000	17%	620.000	9%	320.000	0%	0%	25%	940.000	63%	5.140.000	63%	0.428333333	Dishub		
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kegiatan rutin menjadi lancar	100%	120.000.000	58%	21.586.504	35.500.000	10%	3.598.720	10%	3.667.087	0%	0%	20%	7.265.807	39%	28.852.311	39%	0.240435925	Dishub		
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya suasana nyaman, bersih dan rapi	100%	70.000.000	100%	45.886.400	64.427.950	18%	11.469.500	12%	7.939.150	0%	0%	30%	19.408.650	65%	65.295.050	65%	0.932786429	Dishub		
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	100%	30.000.000	100%	10.841.500	13.750.000	25%	3.395.000	16%	2.225.000	0%	0%	41%	5.620.000	70%	16.461.500	70%	0.548716667	Dishub		
				Penyediaan alat tulis kantor	Adanya alat tulis kantor	100%	30.000.000	100%	21.892.000	21.578.810	25%	5.315.640	25%	5.471.400	0%	0%	50%	10.787.040	75%	32.679.040	75%	1.089301333	Dishub		

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab														
					6		7		8		I		II		III		13		14 = 7+13			15 = 14/6 x 100%													
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp												
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	K	Rp	14	K	Rp	15	K	Rp	16								
		5 1 2 0 26	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	33.000.000	100%	11.229.500	100%	11.229.460	25%	2.805.550	25%	2.799.390	0%	0%	0%	50%	5.604.940	75%	16.834.440	75%	0.510134545	Dishub											
		2 15 1 6 1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	33.000.000	87%	11.439.700	100%	11.438.900	25%	2.814.020	25%	2.869.350	0%	0%	0%	50%	5.683.370	68%	17.123.070	68%	0.518880909	Dishub											
		2 9 1 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Adanya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	28.000.000	100%		100%														0%	0	Dishub										
		2 15 1 4 4	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	100%	28.000.000	100%	30.163.600	100%	30.163.540	16%	4.958.250	31%	9.267.170	0%	0%	0%	47%	14.225.420	74%	44.389.020	74%	1.585322143	Dishub											
		5 1 2 0 1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	200.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	0%	9.564.870	9%	3.664.400	0%	0%	0%	33%	13.229.270	67%	53.229.270	67%	0.26614635	Dishub											
		5 1 2 0 3	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	100%	100.000.000	100%	22.500.000	100%	25.000.000	20%	5.000.000	24%	6.000.000	0%	0%	0%	44%	11.000.000	72%	33.500.000	72%	0.335	Dishub											
		2 9 1 2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			150.000.000		156.719.400		84.575.000		18.228.000		13.910.000		-			32.138.000		119.720.400			-											
		2 9 1 2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%		100%		100%																0	Dishub									
		2 9 1 2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%		100%		100%								0%	0%							50%	0	Dishub								
		2 9 1 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%		96%		100%							0%	0%	0%							48%	0	Dishub								
		2 15 1 9 2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	150.000.000	99%	87.582.400	100%	84.575.000	22%	18.228.000	16%	13.910.000	0%	0%	0%	38%	32.138.000	68%	119.720.400	68%	0.798136	Dishub											
			25	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%		69.137.000											0%						0	Dishub									
		2 9 1 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			277.000.000		-	100%	-															49%	-	49%								
		2 9 1 5 1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	Terlaksananya Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	100%	277.000.000	98%		100%							0%	0%	0%								49%	0	Dishub							
		2 9 1 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			10.000.000	100%	6.400.800		5.999.980																6.400.800	-								
		2 15 1 2 1	Penyusunan LAKIP dan RENJA SKPD	Tersusunnya LAKIP dan RENJA SKPD	100%	10.000.000	100%	6.400.800	100%	5.999.980			0%			0%	0%	0%								50%	6.400.800	50%	0.64008	Dishub					
		2 9 1 17	Program peningkatan pelayanan angkutan																																
		2 9 1 17 5	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Terlaksananya Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	100%		100%		100%					0%		0%											0	Dishub							
		2 9 1 17 18	Koordinasi Forum Lalu Lintas	Terlaksananya Koordinasi Forum Lalu Lintas	100%		100%		100%					0%		0%	0%	0%									50%	0	Dishub						
		2 9 1 17 35	Operasi Ketupat dan Lini Toba	Terlaksananya Operasi Ketupat dan Lini Toba	100%		100%		100%					0%		0%	0%	0%									50%	0	Dishub						
		2 9 1 17 34	Operasional Bus Pelajar di Luar Trayek Umum	Terlaksananya Operasional Bus Pelajar di Luar Trayek Umum	100%		100%		0%					0%		0%	0%	0%									50%	0	Dishub						
		2 9 1 19 9	Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan bermotor			105.939.808																					0%	0							
		2 9 1 19 9	Pelaksanaan Pengujian/Operasional Mobil Pengujian Kendaraan bermotor keliling	Terlaksananya Operasional Mobil Pengujian Kendaraan bermotor keliling	100%	105.939.808			100%					0%		0%	0%	0%									0%	0	Dishub						
		5 2 19	Program Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	4.670.000.000		199.129.400		231.499.120		13.500.000		22.220.700				1%										0%	0.050289101						
		2 15 2 5 1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		100%	4.500.000.000		149.585.600		211.689.280	6%	13.500.000	6%	12.332.000	0%			1%										0%	0.038981689	Dishub					
		5 2 19 10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		100%	50.000.000		49.543.800																				0%	0.990876	Dishub					
		2 15 2 6 5	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		100%	120.000.000				19.809.840																		8%	9.888.700						
		5 2 22	Program Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	100%	40.000.000																						0%	0						
		5 2 22 1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ			40.000.000																						0%	0	Dishub					
		5 2 25	Program Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	40.000.000		1.595.330.600		1.574.811.180		392.488.810		244.456.000															40%	636.944.810	20%	2.232.275.410	20%	55.80688525	
		2 15 2 11 3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			40.000.000		1.595.330.600		1.574.811.180	25%	392.488.810		244.456.000	0%														40%	636.944.810	20%	2.232.275.410	20%	55.80688525	Dishub
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>18%</b>		<b>18%</b>		<b>0%</b>		<b>36%</b>		<b>798.568.007</b>																



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Akses Jaringan Broadband Dedicated dalam Rangka Kelancaran Pengelolaan dan Pemeliharaan Pusat Data dan dan Jaringan Internet Wifi OPD	100%	1.406.500.000	100%	1.641.780.100	100%	539.998.550	1%	6.085.700	29%	155.127.120	0%	0%	30%	161.212.820	65%	1.802.992.920	65%	1.281900405	Dinas KOMINFO		
		2 16 3 2 2 3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terkelaksananya Fasilitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	100%	217.750.000	49%	83.296.125	100%	279.997.870	8%	21.252.900	30%	83.513.100	0%	0%	37%	104.766.000	43%	188.062.125	43%	0.863660735	Dinas KOMINFO		
		2 16 3 2 2 11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Terkelaksananya Penataan Pengelolaan E-Government	0%	-	0%	-	100%	24.999.980	5%	1.350.800	20%	5.021.100	0%	0%	25%	6.371.900	13%	6.371.900	0%	0	Dinas KOMINFO		
			Program Penyelenggaraan Statistik Sekbral	Pengembangan Data Informasi Statistik Sekbral Data/Informasi Statistik Sekbral																					
		2 20 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sekbral	Tersedianya Dokumen Statistik Daerah	100%	425.000.000	50%	144.960.225	100%	35.999.390	7%	2.580.500	28%	10.254.300	0%	0%	36%	12.834.800	43%	157.795.025	43%	0.371282412	Dinas KOMINFO		
		2 21 2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Penganaman Informasi	Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Milik Pemerintah Daerah																					
		2 21 2 2 1 3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terselenggaranya koordinasi persandian untuk penganaman informasi pemerintah daerah	100%	217.750.000	50%	129.038.400	100%	63.995.460	21%	13.210.400	34%	21.634.600	0%	0%	54%	34.845.000	52%	163.883.400	52%	0.752621814	Dinas KOMINFO		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>					12%	517.877.065	32%	1.332.179.373	0%	-	0%	44%	1.850.056.438												
<b>Predikat Kinerja</b>					Sangat Rendah				Sangat Rendah				Sangat Rendah				Sangat Rendah								
18.	Koperasi UKM	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																						
		2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
		2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terkelaksananya Lapik dan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	100%	10.000.000	99%	9.999.000	100%	5.999.840	0%	-	0%	-	0%	-	50%	5.999.000	50%	0.5999	0.5999	Koperasi UKM			
		2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
		2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	31.300.000	100%	4.687.400	100%	4.690.840	49%	2.284.810	25%	1.159.235			73%	3.444.045	87%	8.131.445	87%	0.259790575	Koperasi UKM		
		2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	300.000.000	0%	-	100%	14.920.730	49%	7.314.120	25%	3.731.200			74%	11.045.320	37%	11.045.320	37%	0.036817733	Koperasi UKM		
		2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	100%	10.000.000	100%	23.021.600	100%	23.052.370	25%	5.672.240	25%	5.672.920			49%	11.345.160	75%	34.366.760	75%	3.436676	Koperasi UKM		
		2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	80.000.000	98%	5.943.000	100%	6.038.560	48%	2.907.960	25%	1.492.150			73%	4.400.110	86%	10.343.110	86%	0.129288875	Koperasi UKM		
		2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkelaksananya Rapat dan koordinasi dan Konsultasi SKPD ke dalam daerah dan luar daerah	100%	360.000.000	99%	44.483.600	100%	44.979.000	42%	18.785.906	14%	6.350.000			56%	25.135.906	77%	69.619.506	77%	0.193387517	Koperasi UKM		
		2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																						
		2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor	100%	100.000.000	101%	66.641.754	100%	66.066.880	0%	-	0%	-			0%	-	50%	66.641.754	50%	0.66641754	Koperasi UKM		
		2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan																						
		2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	100%	4.000.000	96%	2.869.100	100%	2.990.000	0%	-	25%	740.000			25%	740.000	60%	3.609.100	60%	0.902275	Koperasi UKM		
		2.17.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Mendukung operasional perkantoran	100%	40.000.000	68%	38.125.970	100%	55.780.000	12%	6.720.880	5%	2.933.900			17%	9.654.780	43%	47.780.750	43%	1.19451875	Koperasi UKM		
		2.17.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Mendukung operasional perkantoran	100%	20.000.000	100%	6.006.000	100%	6.000.000	10%	625.000	25%	1.500.000			35%	2.125.000	68%	8.131.000	68%	0.40655	Koperasi UKM		
		2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%	50.000.000	96%	46.915.800	100%	49.060.340	0%	-	11%	5.313.520			11%	5.313.520	53%	52.229.320	53%	1.0445864	Koperasi UKM		
		2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																						
		2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pelayanan supir dinas dan pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas	100%	131.500.000	99%	39.436.550	100%	39.907.933	9%	3.600.000	25%	10.080.247			34%	13.680.247	67%	53.116.797	67%	0.403930015	Koperasi UKM		
		2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terkelaksananya rehabilitasi gedung kantor	100%	131.500.000	133%	19.958.750	100%	14.992.450	0%	-	0%	-			0%	-	67%	19.958.750	67%	0.151777567	Koperasi UKM		





No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung jawab					
						7			8				13			15 = 14/6 x 100%							
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15 = 14/6 x 100%	16								
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%		4,985,090.00	4,367,000.00	4,367,000.00														
	2	18	1	2.05			166,748,000.00																
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya sumber daya aparatur																			
	2	18	1	2.05	9																		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat/kursus singkat	100%	25,000,000	100%	198,827,600.00	100%	14,000,000.00	0%	0	0%	-	0%	0%	0%	-	50.00%	198,827,600.00	50.00%	795.31%	DPMPPTSP
	2	18	1	2.05	11																		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha pelaksanaan penanaman modal	100%	25,000,000	100%	100%	0	0	0	0%	-	0%	0%	0%	-	50.00%	-	50.00%	0.00%	DPMPPTSP	
	2	18	1	2.06																			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mendukung operasional kedinasan			96,988,600.00																
	2	18	1	2.06	1																		
			Penyediaan Komponen Instalasi/Listrik Penerangan Kantor	Rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	160,000,000	100%	284,482,740.00	100%	4,999,390.00	25%	1,288,600.00	42%	2,100,000.00	0%	0%	67%	3,358,600.00	83.59%	287,841,340.00	83.59%	179.90%	DPMPPTSP
	2	18	1	2.06	2																		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rentang waktu penyediaan ATK yang tercukupi	100%	20,000,000	100%	121,969,000.00	100%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	-	0.00%	121,969,000.00	0.00%	609.85%	DPMPPTSP	
	2	18	1	2.06	4																		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makan dan minum rapat kantor	100%	12,000,000	100%	121,923,400.00	100%	9,995,590.00	30%	3,000,000.00	50%	5,000,000.00	0%	0	80%	8,000,000.00	90.02%	129,923,400.00	90.02%	1082.70%	DPMPPTSP
	2	18	1	2.06	5																		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rentang waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	12,000,000	100%	49,257,000.00	100%	6,999,850.00	25%	1,781,000.00	42%	2,939,800.00	0%	0	67%	4,720,800.00	83.72%	53,977,800.00	83.72%	449.82%	DPMPPTSP
	2	18	1	2.06	6																		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rentang waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	2,000,000	100%	886,824,788.00	100%	0	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	-	0.00%	886,824,788.00	0.00%	44341.24%	DPMPPTSP
	2	18	1	2.06	9																		
			Penyelenggaraan Rapat - rapat Koordinasi SKPD	Rentang waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	80,000,000	100%	100%	80,000,000.00	23%	18,388,817.00	29%	22,967,617.00	0%	0%	52%	41,356,434.00	75.85%	41,356,434.00	75.85%	51.70%	DPMPPTSP	
	2	18	1	2.08																			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mendukung operasional kedinasan			22,800,000.00																
	2	18	1	2.08	1																		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rentang waktu penyediaan benda pos untuk kebutuhan kantor	100%	80,000,000	100%	241,604,611.00	100%	2,000,000.00	24%	480,000.00	40%	800,000.00	0%	0%	64%	1,280,000.00	82.00%	242,884,611.00	82.00%	303.61%	DPMPPTSP
	2	18	1	2.08	2																		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	100%	140,000,000	100%	141,750,000.00	100%	62,475,000.00	25%	15,511,391.00	48%	29,943,824.00	0%	0%	73%	45,455,215.00	86.38%	187,205,215.00	86.38%	133.72%	DPMPPTSP
	2	18	1	2.08	3																		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rentang waktu pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	100%	55,000,000	100%	436,393,700.00	100%	6,820,000.00	24%	1,605,000.00	32%	2,215,000.00	0%	0%	56%	3,820,000.00	78.01%	440,213,700.00	78.01%	800.39%	DPMPPTSP
	2	18	1	2.08	4																		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga operator komputer dan administrasi kantor	100%	250,000,000	100%	100%	225,475,650.00	17%	38,125,700.00	48%	107,871,300.00	0%	0%	65%	145,997,000.00	82.38%	145,997,000.00	82.38%	58.40%	DPMPPTSP	
	2	18	1	2.09																			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rentang waktu penyediaan bahan dan peralatan kebersihan kantor			434,264,286.00																
	2	18	1	2.09	2																		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mendukung operasional kedinasan	100%	40,000,000	100%	195,450,900.00	100%	41,700,000.00	23%	9,447,919.00	45%	18,820,285.00	0%	0%	68%	28,268,204.00	83.89%	223,719,104.00	83.89%	559.30%	DPMPPTSP
	2	18	1	2.09	9																		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mendukung operasional kedinasan	100%	8,500,000	100%	195,450,900.00	100%	4,989,600.00	0%	-	33%	1,656,400.00	0%	0%	33%	1,656,400.00	66.60%	197,107,300.00	66.60%	2318.91%	DPMPPTSP
	2	18	3																				
			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah promosi dan kerjasama investasi																			
	2	18	3	2.01																			
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan promosi penanaman modal																			
	2	18	3	2.01	1																		
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Terlaksananya Penyediaan Bahan Pameran Investasi	100%	150,000,000	100%	243,808,900.00	100%	31,499,860.00	0%	-	0%	0%	0%	-	50.00%	243,808,900.00	50.00%	162.54%	DPMPPTSP		
	2	18	4																				
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah jenis pelayanan perizinan dan non perizinan																			
	2	18	4	2.01																			
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu																			
	2	18	4	2.01	4																		
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Adanya pengembangan aplikasi perizinan	100%	450,000,000	100%	1,428,472,592.00	100%	135,189,000.00	18%	23,901,740.00	42%	56,334,440.00	0%	0%	59%	80,236,180.00	79.68%	1,508,708,772.00	79.68%	335.27%	DPMPPTSP
	2	18	4	2.01	4																		
			Penanganan Pengaduan dan Keberatan Pelayanan Perizinan	Terbentuknya tim penyelesaian masalah/konflik perizinan	100%	80,000,000	100%	261,826,348.00	100%	37,999,760.00	13%	4,911,700.00	39%	14,735,400.00	0%	0%	52%	19,647,100.00	75.85%	281,473,448.00	75.85%	351.84%	DPMPPTSP
	2	18	5																				
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah investasi PMDN																			

















No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		13		14 =7+13			15 = 14/6 x 100%	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
		3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas keluar dan dalam daerah	100%	230.000.000	99,61%	99.612.100	100%	175.000.000	16%	27.227.000	39%	68.943.904	55%	96.170.904	77%	195.783.004	77%	0.851230452	Disperindag		
		3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100%	10.000.000	100%	3.000.000	100%	900.000			100%	900.000	100%	3.900.000	100%	3.900.000	100%	0.39	Disperindag		
		3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air & listrik	100%	80.000.000	98,46%	81.792.932	100%	62.000.000	6%	3.778.540	31%	18.966.652	37%	22.745.192	68%	104.538.124	68%	1.30672655	Disperindag		
		3.30.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan kantor & perlengkapan kantor	100%	20.000.000	99,97%	18.216.000	100%	13.200.000			66%	8.650.000	66%	8.650.000	83%	26.866.000	83%	1.3433	Disperindag		
		3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor, makan-minum rapat	100%	50.000.000		49.077.000	100%	41.961.460			47%	19.530.000	47%	19.530.000	73%	68.607.000	73%	1.37214	Disperindag		
		3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan dinas	100%	170.000.000	96,12%	139.937.229	100%	113.200.000	7%	7.770.903	43%	49.201.485	50%	56.972.388	75%	196.909.617	75%	1.158291865	Disperindag		
		3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya dana untuk pemeliharaan gedung kantor	100%	50.000.000	99,30%	42.943.545	100%	38.500.000			100%	38.493.000	100%	38.493.000	100%	81.436.545	100%	1.6287309	Disperindag		
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		75%	35.540.000	98,76%	63.866.550	100%	28.199.770	4%	1.100.000			4%	1.100.000	52%	64.966.550	69%	1.827983962	Disperindag		
		3.30.02.2.01.01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik	Adanya Rekomendasi saat Pengajuan Penerbitan Izin	75%	35.540.000	97,72%	29.262.200	100%	28.199.770	4%	1.100.000	40%	11.240.000	44%	12.340.000	72%	41.602.200	96%	1.170574001	Disperindag		
		3.30.02.2.02.01	Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya Penerbitan dan Pengawasan tanda daftar gudang			99,53%	19.904.400	100%						0%	-	50%	19.904.400			Disperindag		
		3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Penyimpanan distribusi, pengemasan dan pelabelan Bahan Berbahaya			99,81%	14.699.950	100%						0%	-	50%	14.699.950			Disperindag		
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		75%	283.630.001	99,36%	404.283.010	100%	189.997.782	7%	13.780.000	0%		7%	13.780.000	54%	418.063.010	72%	1.473973164	Disperindag		
		3.30.03.2.01.02	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Pengurusan IMB Pasar dan Terlaksananya Perencanaan 50% Pembangunan Pasar serta retribusi PAD	75%	283.630.001	99,35%	384.403.010	100%	171.998.290	8%	13.780.000	33%	56.176.400	41%	69.956.400	70%	454.359.410	94%	1.601944112	Disperindag		
		3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan serta penyusunan draft perda PKL			99,55%	19.880.000	100%	17.999.492			70%	12.641.700	70%	12.641.700	85%	32.521.700			Disperindag		
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		75%	35.540.000	99,77%	128.285.717	100%	28.198.140	4%	1.100.000			4%	1.100.000	52%	129.385.717	69%	3.640566038	Disperindag		
		3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi ketersediaan bahan pokok dan barang penting	75%	35.540.000	99,77%	47.514.500	100%	28.198.140	4%	1.100.000			4%	1.100.000	52%	48.614.500	69%	1.367881261	Disperindag		
		3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Sbk Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			99,64%	52.106.717							0%	-	0%	52.106.717			Disperindag		
		3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan pupuk pestisida			99,69%	28.664.500							0%	-	0%	28.664.500			Disperindag		
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		75%	86.635.625	100%	52.627.000	100%	58.880.000	4%	2.200.000	0%		4%	2.200.000	52%	54.827.000	69%	0.632845899	Disperindag		
		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Kalibrasi	Metrologi Legal Berupa Tera Ulang	75%	86.635.625	100%	31.386.500	100%	30.128.500	7%	2.200.000	51%	15.415.400	58%	17.615.400	79%	49.001.900	106%	0.565609124	Disperindag		
		3.30.06.2.01.02	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Pengawasan/penyuluhan metrologi legal			100%	21.240.500	100%	28.751.500			23%	6.600.000	23%	6.600.000	61%	27.840.500			Disperindag		
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				96,37%	32.472.100	100%						0%	-	50%	32.472.100			Disperindag		
		3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Promosi Produk Dalam Negeri			96,37%	32.472.100	100%						0%	-	50%	32.472.100			Disperindag		
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		75%	190.540.025	99,68%	168.810.199	100%	132.798.040	6%	7.779.090			6%	7.779.090	53%	176.589.289	71%	0.926783173	Disperindag		
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Tersedianya fasilitas dekranada, terlaksananya pelatihan e-commers	75%	190.540.025	99,68%	168.810.199	100%	132.798.040	6%	7.779.090	32%	43.046.000	38%	50.825.090	69%	219.635.289	92%	1.152698962	Disperindag		
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		75%	24.185.109	99,58%	39.830.309	100%	15.998.580					0%	-	50%	39.830.309	67%	1.646893921	Disperindag		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab								
					6		7		8		I		II		III		13		14 = 7+13			15 = 14/6 x 100%							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp						
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16					
	3.31.03.2.01.01		Facilities Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, PULUKI dan PKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya pemenuhan komitmen perolehan IUI, PULUKI, dan PKI Kewenangan Kab/Kota dalam SIInas 20 Kec yang terintegrasi /Advis Teknis	75%	24.185.109	99,58%	39.830.309	100%	15.998.580			6%	997.500				6%	997.500	53%	40.827.809	71%	1.688.138309	Disperindag					
	3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		75%	24.184.024	99,95%	19.989.000	100%	15.990.480	32%	5.040.000						32%	5.040.000	66%	25.029.000	88%	1.034939428	Disperindag					
	3.31.04.2.01.01		Facilities Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas)	Tersedianya Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan analisis data industri	75%	24.184.024	99,95%	19.989.000	100%	15.990.480	32%	5.040.000	68%	10.816.000				99%	15.856.000	100%	35.845.000	133%	1.482.176829	Disperindag					
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>											8%	104.074.623	45%	390.581.641				53%	494.656.264										
<b>Predikat Kinerja</b>											Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah										
<b>26. Administrasi Pemerintahan (Setdakab)</b>																													
	4	1	4	1	3	1	1																						
	4	1	4	1	3	1	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
	4	1	4	1	3	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Tersedianya Renja SKPD	100%	100.000.000	86%	16.824.300	100%	14.612.880	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	43%	16.824.300	43%	0.168243	Setdakab	
	4	1	4	1	3	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
	4	1	4	1	3	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%			8.389.778.769	15%	1.272.261.329	28%	2.336.200.438											
	4	1	4	1	3	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan/semester	100%	55.979.000	92%	25.794.450	100%	27.789.190	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	46%	25.794.450	46%	0.460787974	Setdakab	
	4	1	4	1	3	1	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
	4	1	4	1	3	1	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhiya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	1.250.000.000	95%	140.348.700	100%	145.077.130	0%	0	23%	33.311.000	0%	0	23%	33.311.000	59%	173.659.700	59%	0.13892776	Setdakab
	4	1	4	1	3	1	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	1.500.000.000	100%	399.042.000	100%	299.944.380	15%	43.576.000	30%	45.722.000	0%	0	30%	89.298.000	65%	488.340.000	65%	0.32556	Setdakab
	4	1	4	1	3	1	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	100%	8.000.000.000	63%	1.068.305.500	100%	1.400.034.000	19%	269.082.000	9%	129.135.500	0%	0	28%	398.217.500	45%	1.466.523.000	45%	0.183315375	Setdakab
	4	1	4	1	3	1	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	1.500.000.000	99%	396.945.285	100%	299.715.460	13%	39.913.590	12%	36.297.620	0%	0	25%	76.211.210	62%	473.156.495	62%	0.315437663	Setdakab
	4	1	4	1	3	1	6	8	Facilities Kunjungan Tamu	Terpenuhiya Fasilitas Bagi Tamu Kenegaraan dan Bagi Tamu Lainnya	100%	899.675.780	70%	456.100.000	100%	453.718.700	26%	116.800.000	0	0	0%	0	26%	116.800.000	48%	572.900.000	48%	0.636784954	Setdakab
	4	1	4	1	3	1	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhiya Kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar maupun Dalam Daerah	100%	10.000.000.000	98%	1.092.302.500	100%	710.000.000	30%	212.332.379	4%	27.237.218	0%	0	34%	239.569.597	66%	1.331.872.097	66%	0.13318721	Setdakab
	4	1	4	1	3	1	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				
	4	1	4	1	3	1	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100%	5.000.000.000	97%	454.653.000	100%	175.933.400	0%	0	0%	0	0%	0	49%	454.653.000	49%	0.0909306	Setdakab		
	4	1	4	1	3	1	7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	5.000.000.000	99%	132.631.000	100%	178.982.000	0%	0	0%	0	0%	0	50%	132.631.000	50%	0.0265262	Setdakab		
	4	1	4	1	3	1	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
	4	1	4	1	3	1	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	100%	500.000.000	100%	99.990.000	100%	99.000.000	15%	15.000.000	14%	14.000.000	0%	0	29%	29.000.000	65%	128.990.000	65%	0.25798	Setdakab
	4	1	4	1	3	1	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	50.000.000.000	99%	11.030.266.260	100%	8.979.655.879	52%	4.685.036.513	32%	2.898.715.413	0%	0	84%	7.583.751.926	92%	18.614.018.186	92%	0.372280364	Setdakab
	4	1	4	1	3	1	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhiya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	2.142.862.042	33%	353.853.000	100%	971.231.420	18%	174.277.500	0%	0	0%	0	18%	174.277.500	25%	528.130.500	25%	0.246460337	Setdakab
	4	1	4	1	3	1	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhiya pelayanan Umum Kantor	100%	4.331.979.800	93%	2.121.909.664	100%	2.165.919.640	19%	419.450.400	20%	432.072.500	0%	0	39%	851.522.900	66%	2.973.432.564	66%	0.688391142	Setdakab
	4	1	4	1	3	1	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
	4	1	4	1	3	1	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhiya Kebutuhan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Jabatan	100%	400.000.000	79%	157.497.425	100%	199.000.000	0%	0	28%	56.397.000	0%	0	28%	56.397.000	54%	213.894.425	54%	0.534736063	Setdakab
	4	1	4	1	3	1	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhiya Kebutuhan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	100%	2.700.000.000	93%	1.885.051.210	100%	1.347.020.000	0%	95.000	27%	363.411.025	0%	0	27%	363.506.025	60%	2.248.557.235	60%	0.832798976	Setdakab
	4	1	4	1	3	1	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terfaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	300.000.000	99%	257.314.371	100%	157.500.000	0%	0	0	0	0	0%	0	49%	257.314.371	49%	0.85771457	Setdakab	
	4	1	4	1	3	1	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terfaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	140.000.000	100%	99.616.500	100%	76.500.000	0%	0	28%	21.390.500	0%	0	28%	21.390.500	64%	121.007.000	64%	0.864335714	Setdakab





No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					6		7		8		I		II		III		13		14 = 7+13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		4 2 1 2 2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		4 2 1 2 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	2.385.801,647	100%	2.182.386,207	100%	2.195.199,807	16%	344.445,138	26%	578.362,754			42%	922.807,892	71%	3.105.194,099	71%	1.301530705	Setwan
		4 2 1 2 5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																				
		4 2 1 2 5 2	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakain Khusus Hari-hari Tertentu dan Pakain Olah Raga	100%	142.017,000	100%	-	100%	-							0%	-	50%	-	50%	Setwan	
		4 2 1 2 5 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimtek/Workshop/Diklat Staf Sekretariat DPRD	100%	584.929,000	100%	5.000,000	100%	90.000,000	0%	380,000	0%	-			0%	380,000	50%	5.380,000	50%	0.009197697	Setwan
		4 2 1 2 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		4 2 1 2 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Pemeliharaan Listrik/Penerangan Kantor	100%	52.644,000	100%	31.845,500	100%	31.836,310	25%	7.952,120	25%	7.964,770			50%	15.916,890	75%	47.762,390	75%	0.907271294	Setwan
		4 2 1 2 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	153.251,000	100%	100.001,800	100%	99.999,460	24%	23.636,620	24%	23.555,670			47%	47.192,290	74%	147.194,090	74%	0.960477191	Setwan
		4 2 1 2 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Makanan/Minuman, Plakat dan Spanduk	100%	207.783,000	100%	240.383,600	100%	240.378,730	6%	13.807,200	30%	71.817,800			36%	85.625,000	68%	326.008,600	68%	1.568985913	Setwan
		4 2 1 2 6 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	308.634,000	100%	134.123,528	100%	124.036,990	14%	17.830,000	34%	42.368,850			49%	60.198,850	74%	194.322,378	74%	0.629620774	Setwan
		4 2 1 2 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Konsultasi/Koordinasi Dalam Kota dan Luar Daerah	100%	337.647,000	100%	197.500,000	100%	137.500,000	18%	25.236,000	26%	35.987,577			45%	61.223,577	72%	258.723,577	72%	0.76625463	Setwan
		4 2 1 2 7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				
		4 2 1 2 7 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Kantor	100%	548.934,000	100%	-	100%	159.062,090	0%	-	39%	62.326,500			39%	62.326,500	70%	62.326,500	70%	0.113540972	Setwan
		4 2 1 2 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		4 2 1 2 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	100%	17.548,000	100%	14.454,000	100%	7.000,000	28%	1.980,000	43%	3.020,000			71%	5.000,000	86%	19.454,000	86%	1.108616367	Setwan
		4 2 1 2 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	324.051,000	100%	214.050,000	100%	249.050,000	14%	34.329,249	26%	64.994,541			40%	99.323,790	70%	313.373,790	70%	0.967050835	Setwan
		4 2 1 2 8 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	100%	72.531,000	100%	33.000,000	100%	33.000,000	3%	900,000	36%	12.000,000			39%	12.900,000	70%	45.900,000	70%	0.632832858	Setwan
		4 2 1 2 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Operator Komputer, Tenaga Kebersihan dan Alat/Bahan Kebersihan	100%	707.697,000	100%	682.446,400	100%	678.083,311	17%	115.355,680	24%	163.958,180			41%	279.313,860	71%	961.760,260	71%	1.359000052	Setwan
		4 2 1 2 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		4 2 1 2 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya BBM, Oli dan Pajak Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	770.193,000	100%	597.600,000	100%	558.950,000	11%	61.688,000	16%	88.899,050			27%	150.587,050	63%	748.187,050	63%	0.971428006	Setwan
		4 2 1 2 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	116.986,000	100%	29.322,900	100%	91.081,650	0%	-	51%	46.618,800			51%	46.618,800	76%	75.941,700	76%	0.649152035	Setwan
		4 2 1 2 9 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100%	70.192,000	100%	71.500,000	100%	71.500,000	0%	-	38%	27.484,000			38%	27.484,000	69%	98.984,000	69%	1.410189195	Setwan
		4 2 1 2 15	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD																				
		4 2 1 2 15 1	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan DPRD	100%	15.145.328,649	100%	13.846.493,445	100%	14.066.993,445	25%	3.529.174,371	24%	3.410.884,155			49%	6.940.058,526	75%	20.786.551,971	75%	1.372472823	Setwan
		4 2 1 2 15 2	Penyediaan Pakain Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakain Dinas DPRD	100%	870.932,000	100%	476.823,100	100%	476.791,890	0%	-	0%	-			0%	-	50%	476.823,100	50%	0.547486026	Setwan
		4 2 1 2 16	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD																				
		4 2 1 2 16 3	Fasilitasi Rapat/Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Rapat-rapat DPRD	100%	297.261,000	100%	187.009,400	100%	170.599,220	4%	6.359,250	30%	51.696,600			34%	58.055,850	67%	245.065,250	67%	0.824411039	Setwan
		4 2 2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD																				
		4 2 2 2 1	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD																				
		4 2 2 2 1 2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	100%	66.648,200	100%	14.614,000	100%	14.599,750	0%	-	0%	-			0%	-	50%	14.614,000	50%	0.219270738	Setwan
		4 2 2 2 2	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran																				
		4 2 2 2 2 1	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Rapat Pembahasan KUA dan PPAS	100%	95.865,000	100%	62.824,700	100%	66.099,990	0%	-	0%	-			0%	-	50%	62.824,700	50%	0.655345538	Setwan
		4 2 2 2 2 2	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Terlaksananya Rapat KUA dan PPAS Perubahan	100%	77.233,200	100%	45.488,100	100%	50.830,450	0%	-	0%	-			0%	-	50%	45.488,100	50%	0.588970805	Setwan
		4 2 2 2 2 3	Pembahasan APBD	Terlaksananya Rapat Pembahasan APBD	100%	65.392,800	100%	48.791,100	100%	45.065,130	0%	-	0%	-			0%	-	50%	48.791,100	50%	0.746123426	Setwan







No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung jawab		
					6		7		8		I		II		III		13		14 = 7+13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	100%	3.660.000	92%	2.000.000	100%	2.010.000	0%	-	25%	500.000	25%	500.000	58%	2.500.000	58%	0.683060109	Bappeda		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	100%	357.240.000	83%	175.171.654	100%	122.056.000	27%	32.802.188	22%	26.963.842	49%	59.766.030	66%	234.937.684	66%	0.657646635	Bappeda		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	100%	32.942.000	97%	37.310.520	100%	39.203.690	25%	9.861.830	26%	10.373.746	52%	20.235.576	74%	57.546.096	74%	1.746891385	Bappeda		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mendukung Kelancaran Operasional Kantor	100%	142.102.000	88%	282.138.850	100%	121.500.000	27%	32.618.150	36%	43.157.550	62%	75.775.700	75%	357.914.550	75%	2.518715782	Bappeda		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mendukung Kelancaran Operasional Kantor	100%	2.435.734.000	100%	42.000.000	100%	35.000.000	30%	10.500.000	30%	10.500.000	60%	21.000.000	80%	63.000.000	80%	0.025864893	Bappeda		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mendukung Kelancaran Operasional Kantor	100%	142.102.000	21%	1.071.500	100%	5.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	11%	1.071.500	11%	0.007540358	Bappeda		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mendukung Kelancaran Operasional Kantor	100%	142.102.000	87%	9.499.000	100%	2.500.000	62%	1.545.000	36%	910.000	98%	2.455.000	93%	11.954.000	93%	0.084122672	Bappeda		
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																				
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan																				
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang RKPD	100%	300.000.000	62%	117.291.040	100%	187.870.740	80%	151.075.820	16%	29.611.140	96%	180.686.960	79%	297.978.000	79%	0.99326	Bappeda		
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rancangan RKP	100%	197.000.000	89%	183.741.720	100%	392.059.570	40%	155.560.780	42%	165.222.900	82%	320.783.680	85%	504.525.400	85%	2.56104264	Bappeda		
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																				
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah	100%	160.000.000	97%	220.837.180	100%	53.054.960	10%	5.488.300	16%	8.661.400	27%	14.149.700	62%	234.986.880	62%	1.468668	Bappeda		
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																				
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																				
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah, Kewilayahan dan Pembangunan Manusia	0%	-	96%	78.985.290	100%	53.488.240	31%	16.538.470	25%	13.614.000	56%	30.152.470	76%	109.137.760	0%	0	Bappeda		
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	100%	214.637.000	99%	102.147.500	100%	30.844.810	8%	2.448.930	54%	16.733.500	62%	19.182.430	80%	121.329.930	80%	0.565279658	Bappeda		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	100%	71.741.000	92%	37.913.000	100%	73.826.940	23%	17.269.100	38%	28.265.000	62%	45.534.100	77%	83.447.100	77%	1.163171687	Bappeda		
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)																				
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	0%	-	92%	98.096.370	100%	64.047.550	35%	22.115.130	33%	21.408.750	68%	43.523.880	80%	141.620.250	0%	0	Bappeda		
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan																				
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Program Integrated Participatory Development and Management Irigaton Program (PDMIP)	0%	303.801.000	95%	260.774.450	100%	230.217.672	22%	51.761.000	18%	41.961.882	41%	93.722.882	68%	354.497.332	0%	1.166873486	Bappeda		
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																				
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																				
			Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan di Bidang Cukai Hasil Tembakau	0%	-	59%	28.687.500	100%	39.999.810	14%	5.698.400	0%	-	14%	5.698.400	37%	34.385.900	0%	0	Bappeda		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13			14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K
1			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan																							
			Facilitasi , Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketataaksanaan	Terlaksananya Kajian Penelitian Bidang Ekonomi	100%	155.000.000	63%	81.113.850	100%	121.923.590	9%	10.534.400	25%	30.977.400					34%	41.511.800	49%	122.625.650	49%	0.791133226	Bappeda	
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Inovasi Daerah	100%	124.449.000	97%	181.992.850	100%	136.360.630	14%	19.010.000	42%	56.885.500					56%	75.895.500	76%	257.888.350	76%	2.072241239	Bappeda	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>											25%	578.397.538	28%	624.203.192	0%	-	0%	53%	1.202.600.730							
<b>Predikat Kinerja</b>											Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
30.	Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA																							
		5 2 1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			241.180.000	185.772.575	100%	218.339.900														BPKPAD			
		5 2 1 2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	11.950.000	21%	6.352.250	100%	9.948.840										53%	6.352.250	53%	12.704.500	BPKPAD		
		5 2 1 2.01 1	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan khisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan khisar Relaisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan khisar realisasi kinerja SKPD	100%	229.230.000	88%	179.420.325	100%	208.391.060	40.640.500	51.439.460							44%	92.079.960	118%	271.500.285	118%	450.920.610	BPKPAD	
		5 2 1 2.01 6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	13.226.659.376	13.955.369.980	100%	27.995.775.962	20%									0%		106%	13.955.369.980	6088%	27.910.739.960	BPKPAD	
		5 2 1 2.02	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	13.117.745.376	85%	13.897.924.570	100%	27.896.763.172	8%	2.125.144.974	10.38	2.896.658.674	-	-	-	-	18%	5.021.803.648	144%	18.919.728.218	144%	32.817.652.788	BPKPAD	
		5 2 1 2.02 1	Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	100%	108.914.000	92%	57.445.410	100%	99.012.790	24%	23.357.862	19.64	19.448.329	-	-	-	-	43%	42.806.191	92%	100.251.601	92%	157.697.011	BPKPAD	
		5 2 1 2.02 7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			27.500.000	43.534.000	100%	25.000.000	0%									0%	-	158%	43.534.000	158%	87.068.000	BPKPAD	
		5 2 1 2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan	100%	27.500.000	97%	43.534.000	100%	25.000.000	0%								0%	-	158%	43.534.000	158%	87.068.000	BPKPAD	
		5 2 1 2.05 9	Administrasi Umum Perangkat Daerah			854.230.000	1.493.062.390	100%	1.514.929.830	0%									0%		0%		0%	BPKPAD		
		5 2 1 2.06	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	76.996.000	100%	59.997.600	100%	69.996.740	25%	17.341.500	16.81	11.763.780	-	-	-	-	42%	29.105.280	116%	89.102.880	116%	149.100.480	BPKPAD	
		5 2 1 2.06 1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%	-	87%	670.588.690	100%	738.356.340	16%	115.872.300	28.35	209.319.785					44%	325.192.085		995.780.775	0%	1.666.369.465	BPKPAD	
		5 2 1 2.06 2	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100%	62.943.000	100%	37.244.500	100%	57.221.000	20%	11.514.000		16.939.000					50%	28.453.000	104%	65.697.500	104%	102.942.000	BPKPAD	
		5 2 1 2.06 4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	509.691.000	93%	500.808.375	100%	463.355.750	8%	37.271.620	14.20	65.801.689	-	-	-	-	22%	103.073.309	118%	603.881.684	118%	1.104.690.059	BPKPAD	
		5 2 1 2.06 5	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	100%	23.100.000	97%	14.720.000	100%	21.000.000				3.680.000					18%	3.680.000	80%	18.400.000	80%	33.120.000	BPKPAD	
		5 2 1 2.06 6	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	181.500.000	93%	209.703.225	100%	165.000.000	10%	15.794.200		59.832.465					46%	75.626.665	157%	285.329.890	157%	495.033.115	BPKPAD	
		5 2 1 2.06 9	Pengadaan barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.614.649.000	951.586.528	100%	1.331.499.880	0%				36.26					0%		0%		0%	BPKPAD		
		5 2 1 2.07	Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kenderaan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	100%	1.398.649.000	99%	911.436.528	100%	1.271.499.880	90%	1.139.242.000	2.27	28.865.630					92%	1.168.107.630	149%	2.079.544.158	149%	2.990.980.686	BPKPAD	
		5 2 1 2.07 2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	100%	150.000.000	70%	40.150.000	100%	-										27%	40.150.000	27%	80.300.000		80.300.000	BPKPAD
		5 2 1 2.07 5	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	100%	66.000.000	0%	-	100%	60.000.000	0%			59.136.000					99%	59.136.000	90%	59.136.000	90%	59.136.000	BPKPAD	
		5 2 1 2.07 11	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			558.915.000	375.094.671	100%	508.105.000	0%				98.56					0%		0%		0%	BPKPAD		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung jawab		
					6		7		8		I		II		III		13		14 = 7+13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
	5	2	1	2.08	1																		
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	100%	12,705,000	100%	11,540,000	100%	11,550,000	17%	1,930,000	16.45	1,900,000			0%		0%				
	5	2	1	2.08	2																		
			Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik yang disediakan	100%	291,500,000	93%	191,477,471	100%	265,000,000	13%	34,813,196		35,335,595			0%		0%				
	5	2	1	2.08	4																		
			Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	254,710,000	78%	172,077,200	100%	231,555,000	24%	55,524,300	24.02	55,611,240			0%		0%				
	5	2	1	2.09																			
			Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		592,075,000		655,300,833	100%	538,250,000	0%						0%		0%				
	5	2	1	2.09																			
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	100%	414,150,000	88%	474,238,735	100%	376,500,000		62,108,000		96,568,940			158,676,940	153%	632,915,675	153%	1,107,154,410		
	5	2	1	2.09	2																		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	111,925,000	85%	92,552,578	100%	101,750,000	0%			10,109,000			99%	101,090,000	173%	193,642,578	173%	286,195,156	BPKPAD
	5	2	1	2.09	9																		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	66,000,000	92%	88,509,520	100%	60,000,000	15%	9,100,000	11.65	6,990,000			27%	16,090,000	158%	104,599,520	158%	193,109,040	BPKPAD
	5	2	1	2.09	11																		
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah laporan PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH yang disediakan																			
	5	2	2																				
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang disediakan		1,153,690,600		850,208,250		1,061,533,410	0%						0%		74%	850,208,250	74%	1,700,416,500	BPKPAD
	5	2	2	2.01																			
			Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	100%	139,177,000	93%	118,197,100	100%	126,524,710	0%		2.81	3,558,660			3%	3,558,660	87%	121,755,760	87%	239,952,860	BPKPAD
	5	2	2	2.01	1																		
			Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	100%	115,710,000	84%	90,241,050	100%	105,190,920	0%						0%		78%	90,241,050	78%	180,482,100	BPKPAD
	5	2	2	2.01	2																		
			Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA- SKPD yang diverifikasi	100%	49,361,000	58%	26,126,000	100%	44,873,730	0%						0%		53%	26,126,000	53%	52,252,000	BPKPAD
	5	2	2	2.01	3																		
			Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang diverifikasi	100%	50,022,000	62%	28,150,400	100%	45,474,830	0%						0%		56%	28,150,400	56%	56,300,800	BPKPAD
	5	2	2	2.01	4																		
			Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang diverifikasi	100%	61,819,000	50%	33,479,050	100%	56,199,940	79%	44,662,810					79%	44,662,810	126%	78,141,860	126%	111,620,910	BPKPAD
	5	2	2	2.01	5																		
			Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang diverifikasi	100%	139,932,600	95%	127,400,125	100%	139,932,600	12%	16,478,600	9.97	13,955,393			22%	30,433,993	113%	157,834,118	113%	285,234,243	BPKPAD
	5	2	2	2.01	6																		
			Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	100%	225,201,000	89%	173,772,625	100%	204,728,320		41,986,800					21%	41,986,800	96%	215,759,425	96%	389,532,050	BPKPAD
	5	2	2	2.01	7																		
			Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	100%	232,278,000	98%	196,713,800	100%	211,161,870		11,439,950	7.19	15,175,890			13%	26,615,840	96%	223,329,640	96%	420,043,440	BPKPAD
	5	2	2	2.01	8																		
			Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang Anggaran	Jumlah Dokumen regulasi serta kebijakan bidang Anggaran	100%	67,102,000	47%	25,140,250	100%	61,002,590	25%	14,947,900	8.06	4,917,040			33%	19,864,940	67%	45,005,190	67%	70,145,440	BPKPAD
	5	2	2	2.01	9																		
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	100%	38,202,000	54%	13,230,300	100%	34,729,120	16%	5,459,100	7.51	2,609,610			23%	8,068,710	56%	21,299,010	56%	34,529,310	BPKPAD
	5	2	2	2.01	10																		
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	100%	34,886,000	60%	17,757,550	100%	31,714,780	19%	6,023,000	36.85	11,685,500			56%	17,708,500	102%	35,466,050	102%	53,223,600	BPKPAD
	5	2	2	2.01	11																		
			Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah laporan Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang disediakan		808,758,000		424,374,760	100%	412,508,350	0%						0%		0%		0%		
	5	2	2	2.02																			
			Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan Anggaran Kas Dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100%	59,182,000	78%	41,916,050	100%	53,801,990	15%	7,860,000	29.20	15,710,000			44%	23,570,000	0%		0%	41,916,050	BPKPAD
	5	2	2	2.02	3																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
		5 2 2 2.02 5	Koordinasi, fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi,Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, ndan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	100%	343,769,000	94%	344,394,535	100%	312,517,630	26%	79,982,000	104,397,400	-	59%	184,379,400	154%	528,773,935	154%	873,168,470	BPKPAD				
		5 2 2 2.02 6	Koordinasi, Pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non Tunai dengan lembaga Keuangan Bank dan lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non Tunai dengan lembaga Keuangan Bank dan lembaga Keuangan Bukan Bank	100%	150,000,000	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	BPKPAD				
		5 2 2 2.02 7	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas Daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan, pemotongan dan penyerahan perhitungan Fihak ketiga (PFK).	Jumlah laporan realisasi Penerimaan dan pengeluaran kas Daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan, pemotongan dan penyerahan perhitungan Fihak ketiga (PFK) dan laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan laporan realisasi Penerimaan dan pengeluaran Kas daerah, laporan aliran Kas dan pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan penyerahan perhitungan fihak ketiga (PFK)	100%	50,807,000	82%	38,064,175	12 bln	46,188,730	20%	9,065,600	23,923,800	-	71%	32,989,400	140%	71,053,575	140%	109,117,750	BPKPAD				
		5 2 2 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	205,000,000	-	-	-	-	-	51.80	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	BPKPAD				
		5 2 2 2.03	Koordinasi pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			212,237,000	170,112,352	100%	161,680,160	0%					0%		0%		0%						
		5 2 2 2.03 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, Triwulanan dan semesteran	Jumlah laporan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan semesteran	100%	43,748,000	96%	37,992,212	100%	39,771,080	0%	-	46.81	18,617,526	-	0%		0%		0%					
		5 2 2 2.03 5	Koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%	143,099,000	93%	132,120,140	100%	121,909,080	0%	-	55.51	67,670,477	-	56%	67,670,477	140%	199,790,617	140%	331,910,757	BPKPAD			
		5 2 2 2.03 7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan kerugian Daerah	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan kerugian Daerah	100%	25,390,000	-	-	100%	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-					
		5 2 2 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			226,938,551,803	184,391,425,722	100%	208,360,501,993	0%					0%		0%		0%						
		5 2 2 2.04 4	Analisis Perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	AnJumlah laporan hasil analisis Perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	100%	4,388,168,803	83%	6,804,191,856	100%	7,431,946,896	14%	1,023,984,046	1,739,174,396	-	37%	2,763,158,442	218%	9,567,350,298	218%	16,371,542,154	BPKPAD				
		5 2 2 2.04 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	216,292,953,000	100%	176,818,895,216	100%	196,629,957,300	8%	15,872,260,727	14,912,533,725	-	16%	30,784,794,452	96%	207,603,689,668	96%	384,422,584,884	BPKPAD				
		5 2 2 2.04 9	Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak	100%	2,222,873,000	68%	768,338,650	100%	630,617,997	35%	220,762,000	-	-	35%	220,762,000	44%	989,100,650	44%	1,757,439,300	BPKPAD				
		5 2 2 2.04 10	Pengelolaan Dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana bagi hasil Kabupaten/Kota	100%	4,034,557,000	0%	-	100%	3,667,779,800	0%	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-					
		5 2 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH																						
		5 2 3 2.01	Pengelolaan barang Milik Daerah			2,609,454,998	950,634,676	100%	1,081,225,460	0%					0%		0%		0%						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Laju (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		13		14 = 7+13			15 = 14/6 x 100%	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		5 2 3 2.01 1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar yang disusun	100%	54.999.000	100%	49.851.200	100%	49.999.990	6%	2.937.000	54.45	27.227.210	-	-	60%	30.164.210	145%	80.015.410	145%	129.866.610	BPKPAD
		5 2 3 2.01 2	Penyusunan standar Barang milik Daerah dan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah standar Barang milik Daerah dan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	21.906.000	99%	19.800.900	100%	19.914.900	0%	-	41.50	8.263.950	-	-	41%	8.263.950	128%	28.064.850	128%	47.865.750	BPKPAD
		5 2 3 2.01 3	Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah		100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	BPKPAD
		5 2 3 2.01 4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	BPKPAD
		5 2 3 2.01 5	Penatuesahan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Penatuesahan Barang Milik Daerah		100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	BPKPAD
		5 2 3 2.01 6	inventarisasi Barang milik Daerah	Jumlah laporan hasil inventarisasi Barang milik Daerah	100%	293.326.000	100%	249.565.900	100%	266.660.820	12%	32.362.600	40.89	109.048.070	-	-	53%	141.410.670	133%	390.976.570	133%	640.542.470	BPKPAD
		5 2 3 2.01 7	Pengamanan Barang milik Daerah	Jumlah laporan hasil Pengamanan Barang milik Daerah	100%	940.219.998	81%	324.025.370	100%	427.372.000	10%	41.689.500	15.45	66.040.280	-	-	25%	107.729.780	46%	431.755.150	46%	755.780.520	BPKPAD
		5 2 3 2.01 8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah		200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	BPKPAD
		5 2 3 2.01 9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan barang Milik Daerah		150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	BPKPAD
		5 2 3 2.01 10	Optimalisasi penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen hasil Optimalisasi penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah	100%	138.180.000	100%	125.608.050	100%	125.618.840	11%	13.192.500	57.07	71.694.210	-	-	68%	84.886.710	152%	210.494.760	152%	336.102.810	BPKPAD
		5 2 3 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik daerah	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik daerah		100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	BPKPAD
		5 2 3 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	Jumlah Laporan Barang milik Daerah	100%	198.667.000	89%	43.834.950	100%	44.242.940	19%	8.251.100	44.37	19.632.120	-	-	63%	27.883.220	36%	71.718.170	36%	115.553.120	BPKPAD
		5 2 3 2.01 13	Pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	100%	162.157.000	99%	137.948.306	100%	147.415.970	22%	32.477.300	20.46	30.160.770	-	-	42%	62.638.070	124%	200.586.376	124%	338.534.682	BPKPAD
		5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH																		0%	BPKPAD	
		5 2 4 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			2.183.706.000	1.060.329.409	1.167.010.600	0%								0%		0%		0%		BPKPAD
		5 2 4 2.01 2	Analisa dan pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Analisa dan pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan kebijakan Pajak Daerah	100%	15.954.000	97%	14.012.450	100%	14.503.930	0%	-	13.16	1.909.200	-	-	13%	1.909.200	100%	15.921.650	100%	29.934.100	BPKPAD
		5 2 4 2.01 3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100%	55.582.000	80%	53.291.185	100%	50.529.350	0%	-	-	17.846.000	-	-	35%	17.846.000	128%	71.137.185	128%	124.428.370	BPKPAD
		5 2 4 2.01 4	Penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Penyediaan sarana dan prasarana Pajak Daerah	100%	1.157.410.000	82%	701.112.781	100%	779.464.200	11%	81.974.700	15.32	119.434.483	-	-	26%	201.409.183	78%	902.521.964	78%	1.603.634.745	BPKPAD
		5 2 4 2.01 5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	100%	52.228.000	96%	45.688.280	100%	47.480.770	11%	5.400.000	-	-	-	-	11%	5.400.000	98%	51.088.280	98%	96.776.560	BPKPAD
		5 2 4 2.01 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan pelaporan Basis data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pemeliharaan, dan pelaporan Basis data Pajak Daerah	100%	25.715.000	80%	16.275.470	100%	20.329.970	0%	-	4.78	972.000	-	-	5%	972.000	67%	17.247.470	67%	33.522.940	BPKPAD
		5 2 4 2.01 7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Terlaksananya Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	100%	51.974.000	90%	42.641.460	100%	47.249.820	0%	-	3.59	1.694.970	-	-	4%	1.694.970	85%	44.336.430	85%	86.977.890	BPKPAD
		5 2 4 2.01 8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Penetapan Wajib Pajak Daerah	100%	600.000.000	63%	1.907.000	100%	3.047.770	0%	-	48.48	1.477.410	-	-	48%	1.477.410	1%	3.384.410	1%	5.291.410	BPKPAD
		5 2 4 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah	100%	67.186.000	92%	41.391.300	100%	45.124.790	14%	6.300.000	16.95	7.650.000	-	-	31%	13.950.000	82%	55.341.300	82%	96.732.600	BPKPAD
		5 2 4 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	100%	31.761.000	91%	26.256.126	100%	28.874.120	12%	3.600.000	-	-	-	-	12%	3.600.000	94%	29.856.126	94%	56.112.252	BPKPAD
		5 2 4 2.01 12	Penyelesaian keberatan Pajak Daerah	Terselenggaranya keberatan Pajak Daerah	100%	-	83%	13.247.680	100%	15.953.820	0%	-	-	-	-	-	0%	-	-	13.247.680	-	26.495.360	BPKPAD
		5 2 4 2.01 13	Pengedalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengedalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	100%	60.519.000	93%	51.211.357	100%	55.017.520	0%	-	-	-	-	-	0%	-	85%	51.211.357	85%	102.422.714	BPKPAD



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab							
								I		II		III		IV		13			14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16									
		5 4 2 2 3		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Adanya Lelang terbuka bagi JPT	90%	2.160.000.000	64%	1.372.410.779	90%	34.549.490	98%	34.014.000	0%	-	0%	-	0%	98%	34.014.000	65%	1.406.424.779	65%	753.575.221	BKPSDM
		5 4 2 2 7		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Prajabatan CPNS	85%	15.088.094.880	71%	10.743.021.259	85%	819.999.800	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	71%	10.743.021.259	71%	4.345.073.621	BKPSDM
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>								18%	988.134.002	19%	604.083.541	0%	-	0%	26%	1.592.217.543									
<b>Predikat Kinerja</b>								Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah									
32.	Kesatuan Bangsa dan Politik																								
	Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas	8 1 1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Pelaporan Perangkat Daerah																				
		8 1 1 2 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaporan Keuangan	100%																			
		8 1 1 2 1 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100%	4.880.414	100%	18.356.600	100%	4.436.740	26%	1.164.500	18%	820.179	0%	0%	45%	1.984.679	72%	20.341.279	72%	4.17	Bakesbangpol	
		8 1 1 2 1 7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	2.379.465	100%	2.103.400	100%	2.163.150	80%	1.737.500	17%	368.631	0%	0%	97%	2.106.131	99%	4.209.531	99%	1.77	Bakesbangpol	
		8 1 1 2 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaporan Keuangan																				
		8 1 1 2 2 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	1.892.599.390	100%	1.626.173.731	100%	1.720.544.900	22%	374.372.899	26%	455.869.116	0%	0%	48%	830.242.015	74%	2.456.415.746	74%	1.3	Bakesbangpol	
		8 1 1 2 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi perkantoran	90%																			
		8 1 1 2 6 2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya pelayanan kantor	100%	23.758.834	100%	-	100%	21.598.940	23%	4.895.500	27%	5.886.466	0%	0%								
		8 1 1 2 6 4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya makanan dan minuman rapat pegawai	100%	6.415.420	100%	5.143.700	100%	5.832.200	34%	1.998.700	34%	1.996.490	0%	0%	69%	3.995.190	84%	9.138.890	84%	1.42	Bakesbangpol	
		8 1 1 2 6 5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tercapainya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	100%	12.688.544	100%	18.398.900	100%	11.535.040	24%	2.727.000	28%	3.262.988	0%	0%	52%	5.989.988	76%	24.388.888	76%	1.92	Bakesbangpol	
		8 1 1 2 6 9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	143.000.000	100%	50.000.000	100%	130.000.000	27%	35.347.279	24%	30.851.142	0%	0%	51%	66.198.421	75%	116.198.421	75%	0.81	Bakesbangpol	
		8 1 1 2 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur	85%																			
		8 1 1 2 7 10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pengadaan peralatan kantor	100%	20.000.000	100%	15.159.400	100%	-							0%	-	50%	15.159.400	50%	0.76	Bakesbangpol	
		8 1 1 2 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	90%																			
		8 1 1 2 8 1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Kantor	100%	550.000	100%	2.700.000	100%	500.000	100%	500.000	0%	-	0%	0%	100%	500.000	100%	3.200.000	100%	5.82	Bakesbangpol	
		8 1 1 2 8 2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	7.425.000	100%	6.750.000	100%	6.750.000	23%	1.555.210	17%	1.139.984	0%	0%	40%	2.695.194	70%	9.445.194	70%	1.27	Bakesbangpol	
		8 1 1 2 8 3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terawalnya peralatan gedung kantor	100%	5.405.048	100%	7.098.636	100%	4.913.680	31%	1.500.000	30%	1.450.000	0%	0%	60%	2.950.000	80%	10.048.636	80%	1.86	Bakesbangpol	
		8 1 1 2 8 4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya kebersihan kantor dan kenyamanan bagi aparatur	100%	45.877.282	100%	22.497.100	100%	41.706.620	25%	10.432.800	22%	9.131.868	0%	0%	47%	19.564.668	73%	42.061.768	73%	0.92	Bakesbangpol	
		8 1 1 2 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mendukung Operasional Kedinasan	100%																			
		8 1 1 2 9 2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Persentase kendaraan yang terpelihara	100%	39.050.000	100%	27.500.000	100%	35.500.000	24%	8.398.569	24%	8.398.824	0%	0%	47%	16.797.393	74%	44.297.393	74%	1.13	Bakesbangpol	
	Mewujudkan dan Meningkatkan Kualitas Wawasan Kebangsaan Bagi Kalangan Masyarakat	8 1 2		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat																				
		8 1 2 2 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Meningkatnya Kualitas Wawasan Kebangsaan Bagi Kalangan Masyarakat	70 Kali																			
		8 1 2 2 1 4		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat	100%	425.226.375	100%	81.784.700	100%	386.569.432	4%	14.712.100	23%	87.569.317	0%	0%	26%	102.281.417	63%	184.066.117	63%	0.43	Bakesbangpol	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)	Unit SKPD Penanggung jawab						
								I		II		III		IV											
								9	10	11	12	13		14=7+13						15 = 14/6 x 100%					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Mewujudkan Nilai-Nilai Persatuan dan Kebangsaan	813	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Nilai-Nilai Persatuan dan Kebangsaan																					



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13			14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		8 1 3 2 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Eka Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Nilai-Nilai Persatuan dan Kebangsaan	75 Kali																				
		8 1 3 2 1 1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Eka Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Meningkatnya pendidikan politik masyarakat	100%	101.725.580	100%	82.760.400	100%	92.477.800	29%	27.143.600	15%	13.820.073	0%	0%	44%	40.963.673	72%	123.724.073	72%	1.22	Bakesbangpol		
		8 1 3 2 1 3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Eka Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Adanya bantuan keuangan partai politik	100%	604.145.100	100%	604.145.100	100%	604.145.100	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	-	50%	604.145.100	50%	1	Bakesbangpol		
	Mewujudkan Stabilitas Keamanan dan Keterlibatan	8 1 4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Keterlibatan																					
		8 1 4 2 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Keterlibatan	80%																				
		8 1 4 2 1 5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Adanya bantuan keuangan Ormas	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	-	50%	30.000.000	50%	1	Bakesbangpol		
	Mewujudkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	8 1 6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																					
		8 1 6 2 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	80 Kali																				
		8 1 6 2 1 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Menciptakan rasa aman, damai dan kondusif	100%	101.725.602	100%	81.259.700	100%	92.477.820	30%	27.462.100	40%	36.754.507	0%	0%	69%	64.216.607	85%	145.476.307	85%	1.43	Bakesbangpol		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>											17%	513.947.757	18%	657.319.585	0%	-	0%	35%	1.160.485.376						
<b>Predikat Kinerja</b>											Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		pat Ren	Sangat Rendah							
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>											15%	121.019.450.304	22%	187.660.328.878	0%	-	0%	37%	308.679.779.182						
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>											Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		pat Ren	Sangat Rendah							
<b>Faktor pendorong keberhasilan kinerja :</b>																									
<b>Faktor penghambat pencapaian kinerja :</b>																									
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :</b>																									
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :</b>																									

Pandan, Agustus 2022

**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN  
TAPANULI TENGAH**

**ANTON SUJARWO BS, S.STP, MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19790621 199912 1 001**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya, dalam peraturan yang sama pada pasal 4 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan Daerah mengacu pada prinsip-prinsip: a) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b) dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan d) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pembangunan Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dalam aturan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2022, menyatakan bahwa bagi Kabupaten/Kota yang masa jabatan bupati/walikota berakhir pada tahun 2022, penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan RKPD Tahun 2023, RKP Tahun 2023, RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi 2019-2023, RKPD Provinsi Tahun 2023. Maka dari itu, penyusunan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 mengacu pada RPD yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026.

RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 merupakan RKPD tahun ke I (satu) atau tahun pertama periode RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026. RPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, dimana RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPD dan berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA). RENSTRA menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun RENJA tahunan yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan anggaran per kegiatan. Selain itu Rencana Kerja (RENJA) juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam perumusan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan tentu saja akan



memperhatikan dan menyesuaikan rencana kerja prioritas daerah dalam satu tahun anggaran (RKPD).

Sebelum RAPBD ditetapkan, RKPD menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kedua dokumen ini sangat penting dibahas lebih tajam sebelum sampai kepada rincian APBD. KUA memberikan suatu gambaran umum tentang kemampuan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran ke depan. Berdasarkan KUA PPAS ditetapkan prioritas plafon anggaran untuk setiap perangkat daerah berdasarkan fungsinya, plafon anggaran akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menentukan anggaran per program per kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunannya. Atas dasar itu, perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran. Akumulasi dari semua rencana kerja dan anggaran bagi seluruh Perangkat Daerah akan melahirkan RAPBD.

Memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 mempunyai hubungan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, dengan memperhatikan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2023. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 merupakan dokumen resmi tahunan sebagai tahapan akhir penyusunan RKPD yang mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 memuat rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, prioritas pembangunan daerah, indikator hasil program (*outcome*), penanggungjawab program, serta rincian kebutuhan dana/pagu indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dan disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD dengan mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta memperhatikan azas koordinasi dengan berbagai pihak.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera



- Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  18. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2021 tentang penysusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022
  22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026;
27. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022.

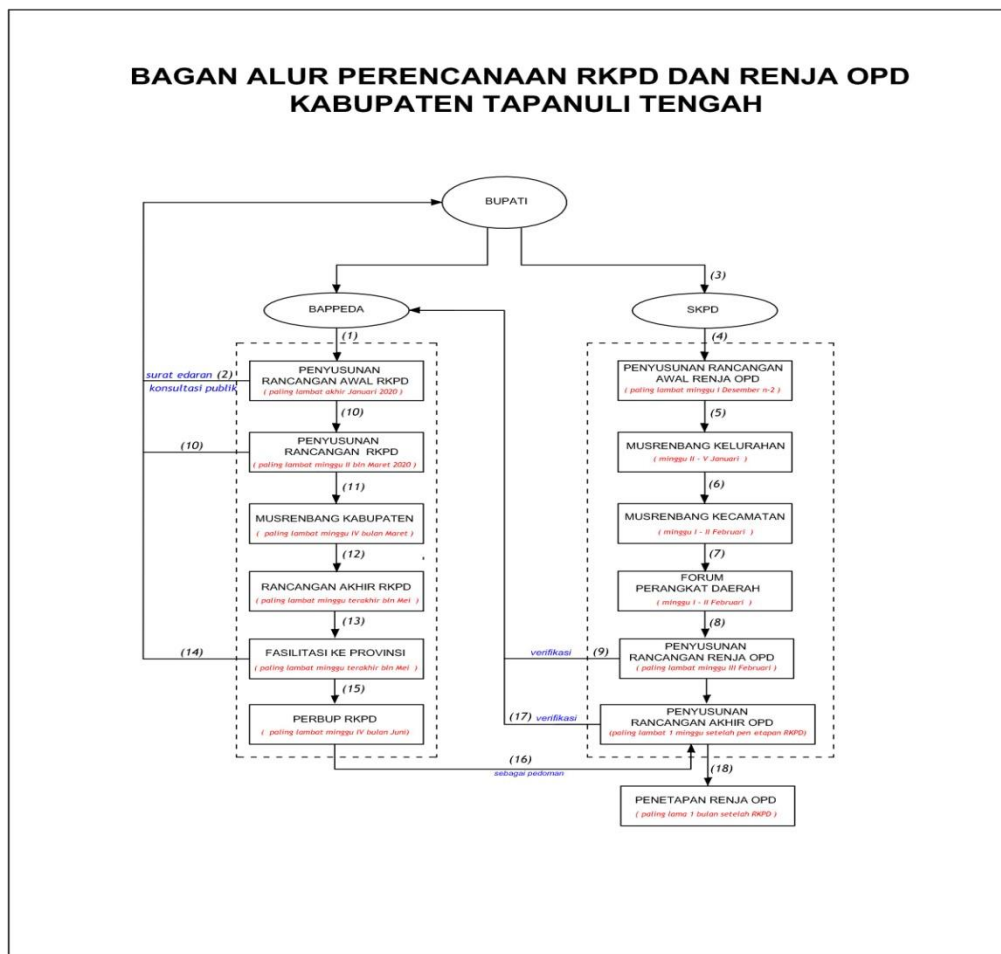
### **1.3 Hubungan antar Dokumen**

RKPD Tahun 2023 Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (20 tahun), (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD membentuk keterkaitan secara hierarkis dengan RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2019-2024 RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018 - 2023, RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah 2006-2026 dan RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026.

Keterkaitan RKPD dengan dokumen Perencanaan yang lain dapat dilihat melalui gambar berikut ini:



**Gambar 1.1**  
**Proses Penyusunan Dan Keterkaitan RKPD Dengan**  
**Dokumen Perencanaan Lainnya**

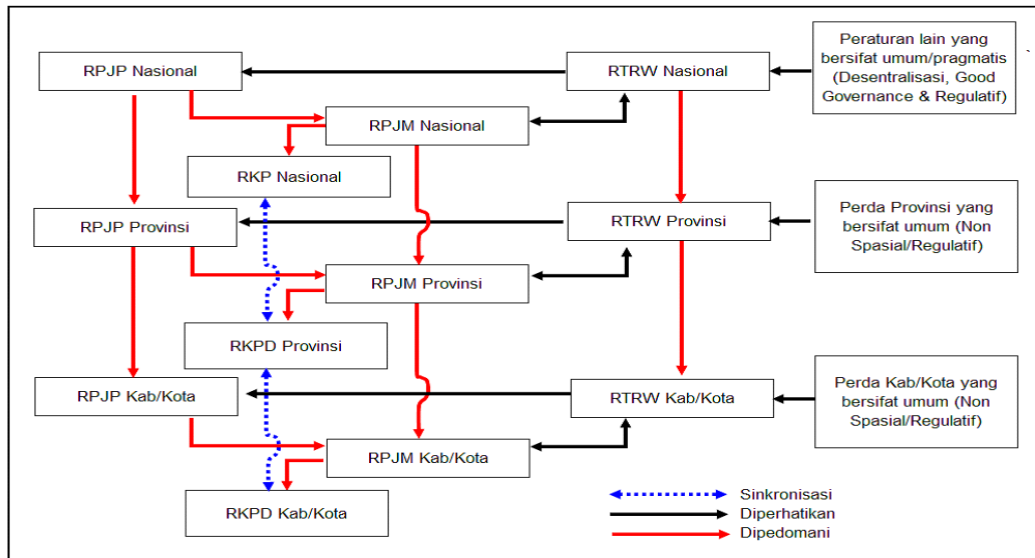


RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJM Nasional, RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara serta RPJMD Provinsi Sumatera Utara melalui mekanisme Musrenbang Provinsi.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 ini harus mengacu dan berpedoman kepada dokumen RKP Nasional, Renja K/L dan RKPD Provinsi Sumatera Utara. Selain itu juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten. Untuk Kabupaten Tapanuli Tengah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar. 1.2 berikut ini.



**Gambar 1.2**  
**Bagan Keterkaitan RKPД Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota**



#### 1.4 Sistematika Dokumen RKPД

RKPД Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 yang mengimplementasikan Rencana Pembangunan Daerah dan penganggaran tahunan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penyusunan RKPД serta Maksud dan Tujuan.

#### **BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi kinerja pembangunan daerah dan evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Lalu.

#### **BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun lalu dan tahun berjalan, arah kebijakan ekonomi daerah dan analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah serta arah Kebijakan Keuangan Daerah untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### **BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Menjelaskan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, prioritas pembangunan Tahun 2023.

#### **BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Memuat rencana program dan kegiatan pada tiap bidang urusan wajib/pilihan pemerintahan Tahun 2023.

## **BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023.

## **BAB VII. PENUTUP**

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai bagian penegasan Pemerintah Daerah kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

### **1.5 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 yang selanjutnya akan disempurnakan hingga menjadi RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman ataupun landasan bagi para penyelenggara pemerintahan dan para pelaku/pelaksana pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 adalah:

1. Dokumen yang memuat arahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 ke dalam rencana operasional pada Tahun 2023;
2. Sebagai tolok ukur bagi Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib/pilihan daerah;
3. Sebagai acuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.



- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam);
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Pakpak Bharat;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Sibolga dan Samudera Hindia.

**c. Luas Wilayah**

Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ibu kotanya Pandan mempunyai luas wilayah **6.194,98 km<sup>2</sup>** meliputi 2.194,98 km<sup>2</sup> luas daratan dan 4.000 km<sup>2</sup> luas laut.

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 20 kecamatan, yang terdiri dari 159 Desa dan 56 Kelurahan. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Kolang yaitu 436,29 km<sup>2</sup> (19,88%), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Barus yaitu 21,81 km<sup>2</sup> (0,99%). Secara lebih rinci mengenai luas wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah**

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	%
1.	Manduamas	3	17	99,55	4,54
2.	Sirandorong	1	7	87,72	4,00
3.	Andam Dewi	1	13	122,42	5,58
4.	Barus Utara	-	6	63,02	2,87
5.	Barus	2	11	21,81	0,99
6.	Pasaribu Tobing	-	9	103,36	4,71
7.	Sosor Gadong	1	8	143,13	6,52
8.	Sorkam Barat	2	10	44,58	2,03
9.	Sorkam	4	17	80,61	3,67
10.	Kolang	2	12	436,29	19,88
11.	Tapian Nauli	1	8	83,01	3,78
12.	Sitahuis	1	5	50,52	2,30
13.	Pandan	20	2	34,31	1,56
14.	Sarudik	4	1	25,92	1,18
15.	Tukka	5	4	150,93	6,87
16.	Badiri	2	7	129,49	5,90
17.	Pinangsori	5	5	78,32	3,57
18.	Lumut	1	5	105,98	4,83
19.	Sibabangun	1	6	284,64	12,97
20.	Suka Bangun	-	6	49,37	2,25
	<b>Luas Daratan</b>			<b>2.194,98</b>	<b>35,43</b>
	<b>Luas Perairan</b>			<b>4.000</b>	<b>64,57</b>

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	%
	<b>Jumlah</b>	<b>56</b>	<b>159</b>	<b>6.194,98</b>	<b>100.00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

#### d. Topografi dan Hidrologi

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu wilayah yang berada dipesisir Pantai Barat Sumatera dengan ketinggian antara 0–1.266 m di atas permukaan laut (dpl). Kota Pandan adalah Ibukota Kabupaten Tapanuli Tengah yang berada pada ketinggian antara 0-1.000 m di atas permukaan laut. Umumnya setiap kecamatan yang ada di Tapanuli Tengah memiliki ketinggian yang bervariasi yaitu antara 0-1.000 m di atas permukaan laut, karena umumnya kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah berada di sepanjang pesisir Pantai Barat Sumatera Utara dengan ketinggian antara 0-8 m di atas permukaan laut dan ke arah tengah merupakan kawasan perbukitan yang memiliki ketinggian di atas 100 m dari permukaan laut. Hanya beberapa kecamatan yang tidak berada di pesisir pantai dan terletak di ketinggian antara 100-1.266 di atas permukaan laut, seperti Kecamatan Barus Utara, Kecamatan Pasaribu Tobing, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Tukka, Kecamatan Suka Bangun, Kecamatan Lumut dan Kecamatan Sirandorung.

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki hamparan gunung, pantai, laut dan sungai (GUPALA) dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan garis pantai ±200 km dan dilalui jalur pegunungan Bukit Barisan. Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai ketinggian tempat yang bervariasi antara wilayah yang paling rendah, yang sejajar dengan permukaan laut hingga wilayah tertinggi di daerah pegunungan. Sebesar 50,46 persen wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada ketinggian diatas 100 m di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah terbagi dalam beberapa tipologi kelerengan yang bervariasi terdiri dari kelerengan Datar (0–8%), Berombak (8–15 %), Bergelombang (15–25 %), Curam (25 – 40 %) dan Terjal (>40 %).

Sumber air yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah berasal dari mata air dan sungai hal ini dapat menjadi pengembangan jaringan sumber daya air dan sarana prasarana sumber daya air selain air minum dapat juga mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Secara umum, sungai-sungai di Kabupaten Tapanuli Tengah beraliran panjang. Pola Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat dipengaruhi oleh keadaan morfologis, topografi dan bentuk wilayah disamping bentuk atau corak DAS itu sendiri. Di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) utama meliputi DAS Tapus, DAS Lae Chinong, DAS Sirahar, DAS Aek Sibudong, DAS Aek Kolang, dan DAS Batangtoru. Daerah hulu sungai berasal dari Pegunungan Bukit Barisan dan bermuara ke Pantai Barat Sumatera Utara. Selain itu terdapat sungai-sungai lainnya yang secara keseluruhan dimanfaatkan oleh

masyarakat untuk air minum, irigasi, transportasi, pembangkit listrik tenaga air, dan untuk kepentingan lainnya.

#### **e. Geologi**

Dari aspek geologisnya, kondisi tanah di Kabupaten Tapanuli Tengah hanya terdiri dari struktur tanah alluvium, dan regosol. Untuk alluvium berada di daerah dataran rendah sedangkan tanah regosol merah berada di kaki bukit. Jenis struktur tanah lainnya yang ditemui adalah batuan cadas. Jenis Bahan Tambang yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu jenis bahan galian bukan logam dan batuan (Galian C') yang tersebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, bahan tambang granite terdapat di Kecamatan Kolang, Tapan Nauli, Sitahuis, dan Tukka; bahan tambang andesite di Kecamatan Sorkam, Badiri, Sibabangun, Lumut, Pinangsori. Sementara logam dasar (emas, perak dan tembaga) di Kecamatan Sitahuis, Manduamas, Andam Dewi, Sirandorung, Barus Utara, Sosorgadong, Kolang, Badiri, Pinangsori, Lumut, Sibabangun.

#### **f. Hidrologi**

Sumber air yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah berasal dari mata air dan sungai hal ini dapat menjadi pengembangan jaringan sumber daya air dan sarana prasarana sumber daya air selain air minum dapat juga mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Secara umum, sungai-sungai di Kabupaten Tapanuli Tengah beraliran panjang. Pola Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat dipengaruhi oleh keadaan morfologis, topografi dan bentuk wilayah disamping bentuk atau corak DAS itu sendiri. Di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) utama meliputi DAS Tapus, DAS Lae Chinong, DAS Sirahar, DAS Aek Sibudong, DAS Aek Kolang, dan DAS Batangtoru. Daerah hulu sungai berasal dari Pegunungan Bukit Barisan dan bermuara ke Pantai Barat Sumatera Utara. Selain itu terdapat sungai-sungai lainnya yang secara keseluruhan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk air minum, irigasi, transportasi, pembangkit listrik tenaga air, dan untuk kepentingan lainnya.

#### **g. Klimatologi**

Sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah berbatasan dengan lautan, sehingga berpengaruh pada suhu udara yang tergolong daerah beriklim tropis. Dalam periode Bulan Januari sampai Desember, suhu udara maksimum bisa mencapai 36,20°C dan suhu minimum mencapai 22,00°C. Rata-rata suhu udara di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 26,40°C. Adapun rata-rata curah hujan 358,71mm. Kecepatan angin rata-rata 2,68 m/det, rata-rata penyinaran matahari 56,17% dan rata-rata penguapan 3,80 mm.

### **2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah**

Sesuai dengan deskripsi karakteristik wilayah pada sub bab sebelumnya, maka wilayah yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut :

#### **a. Wilayah Hutan Produksi**

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 2) meningkatkan fungsi lindung;
- 3) menyangga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budi daya;
- 4) menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan;
- 5) meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan;
- 6) meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
- 7) meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
- 8) meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
- 9) meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri yang mengolahnya;
- 10) meningkatkan ekspor; atau
- 11) mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat terutama di daerah setempat.

#### **b. Wilayah Hutan Produksi Terbatas**

Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah hutan produksi dimana eksploitasinya hanya dapat dengan cara tebang pilih dan tanam. Tujuan dari kawasan hutan produksi ini adalah untuk mengeksploitasi tanaman yang ada didalam kawasan hutan dengan tidak merubah fungsi kawasan tersebut. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara terbatas.

Berdasarkan SK.44/Menhut-II/2005 Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai luas kawasan Hutan Produksi Terbatas sebesar 52.280 Ha yang terdapat di Kecamatan Kolang, Sorkam, Sorkam Barat, Pasaribu Tobing, Sosor Gadong, Andam Dewi, Manduamas, Sirandorung dan Tapanuli Nauli. Berdasarkan hal tersebut dengan luasan HPT yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat



dimanfaatkan sebagai bahan baku industri seperti pohon sengon yang sebagai bahan baku pembuatan beton, pagar konstruksi. Pohon lainnya dapat juga dialokasikan oleh masyarakat untuk produksi kayu sebagai bahan konstruksi.

### **c. Wilayah Pertanian tanaman pangan**

Kawasan tanaman pangan basah adalah kawasan yang dipergunakan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Berdasarkan analisis kesesuaian lahan, maka kawasan ini direncanakan berlokasi menyebar hampir di seluruh wilayah kecamatan baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total 16.653 Ha yang secara dominan berlokasi pada Kecamatan Kolang, Sibabangun, Sorkam, Sorkam Barat, Tukka dan Badiri.

Bila dilihat peruntukan guna lahan sawah dilapangan dari tahun ketahun mengalami penurunan dan peralihan fungsi lahan, perubahan luas lahan ini antara lain disebabkan:

- 1) Telah terjadinya perubahan status penggunaan lahan (alih fungsi lahan) dari kawasan pertanian lahan basah (sawah) menjadi kawasan perkebunan.
- 2) Masih kurangnya sarana irigasi untuk persawahan dan irigasi yang ada belum dapat difungsikan dengan baik sehingga banyak masyarakat mengalih fungsikan lahannya.
- 3) Sawah non irigasi/tadah hujan pada prinsipnya dapat dialihkan ke penggunaan lain tanpa menimbulkan kerugian investasi yang besar karena tidak ada saluran irigasi teknis yang dibongkar/tidak terpakai.
- 4) Prospek dan pemasaran hasil perkebunan lebih luas, tidak hanya berskala lokal dan regional tetapi juga internasional.

Oleh sebab itu untuk mempertahankan pertanian lahan basah yang ada saat ini harus melakukan peningkatan, baik hasil produksi maupun pemasaran serta peningkatan sarana irigasi teknis, sehingga Kabupaten Tapanuli Tengah dapat sebagai salah satu pemasok hasil pertanian lahan basah di Sumatera Utara.

Adapun rencana peningkatan dan pengelolaan kawasan pertanian lahan basah dalam rangka upaya mempertahankan lahan pertanian yang ada, meliputi :

- 1) Dalam jangka pendek meningkatkan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan bibit yang unggul, pupuk yang tepat, teknologi tepat-guna, pemanfaatan sistem jaringan irigasi secara optimal, pengembangan kelompok dan kelembagaan usaha tani untuk yang didukung sistem pengolahan produksi dan jaringan pemasaran.
- 2) Lembaga yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Kawasan Pertanian Lahan Basah di tingkat kabupaten
- 3) Penentuan batas dan pemberian ijin Kawasan Pertanian Lahan
- 4) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan arahan kepada masyarakat tentang pengelolaan Kawasan Pertanian Lahan Basah.



5) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Pertanian Lahan Basah dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya.

Pada prinsipnya pengelolaan kawasan pertanian lahan basah bertujuan untuk selalu menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya dan Provinsi Sumatera Utara umumnya.

Kawasan tanaman pangan lahan kering adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering berupa tanaman palawija, hortikultura, atau tanaman pangan lainnya.

Tanaman pangan lahan kering tidak memerlukan sistem pengairan irigasi. Sedangkan kawasan tanaman lahan kering direncanakan menyebar hampir diseluruh Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total 35.654 Ha dengan pusat pengembangan pertanian lahan kering di Kecamatan Kolang dan Sibabangun

#### **d. Wilayah Pertanian Hortikultura**

Prospek hortikultura diperkirakan akan semakin baik. Tanaman ini terdapat pada semua kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, namun dominan di Kecamatan Kolang dan Sibabangun serta akan dikembangkan disemua kecamatan di samping padi dan palawija, baik di lahan basah maupun kering.

Tanaman sayuran dan buah-buahan di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tujuan konsumsi lokal, regional maupun ekspor dapat dikembangkan diseluruh kecamatan.

Kawasan hortikultura dapat berupa kawasan tanaman pangan lahan kering yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering berupa tanaman palawija, hortikultura, atau tanaman pangan lainnya.

Kawasan hortikultura direncanakan menyebar hampir diseluruh Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total 458.12 Ha dengan pusat pengembangan hortikultura di Kecamatan Kolang dan Sibabangun dengan komoditas unggulan adalah mangga, rambutan dan durian.

#### **e. Wilayah Perkebunan**

Pengembangan kawasan tanaman tahunan di Kabupaten Tapanuli Tengah berupa perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Seiring dengan usaha perluasan kawasan tanaman tahunan, maka jaringan jalan yang ada harus ditingkatkan. Kabupaten Tapanuli Tengah terdapat lahan tidur yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu lahan tidur yang telah dimiliki oleh perorangan dan lahan tidur yang merupakan hak pemerintah setempat. Kedua jenis lahan tidur tersebut diatas masih banyak terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyebar diseluruh kecamatan. Lahan tidur tersebut diprioritaskan dalam pengembangannya untuk kawasan tanaman tahunan.

Berdasarkan rencana pengembangan perkebunan, dan melihat ketersediaan lahan serta potensinya, maka Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai bagi pengembangan perkebunan, utamanya di Kecamatan Kolang, Sibabangun, Tukka, Sosorgadong, Kecamatan Manduamas dan Kecamatan Pinangsori. Kondisi infrastruktur yang masih terbatas sangat mempengaruhi minat swasta untuk investasi, sehingga perlu peran serta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan infrastruktur pendukung.

Orientasi pasar komoditif perkebunan umumnya sudah berorientasi pasar lokal, regional dan bahkan nasional seperti kelapa sawit, coklat, karet, kelapa, dan kopi. Hal ini membuat pengembangan komoditi perkebunan tidak terbatas oleh daya serap pasar lokal. Pembatas utama adalah ketersediaan dan kesesuaian dan lahan dengan jenis komoditi yang dikembangkan. Oleh karena itu, pengembangan komoditif perkebunan juga harus melihat kesesuaian lahan yang ada agar hasil yang diperoleh optimal. Luar rencana polar ruang perkebunan kurang lebih sebesar 40.386 Ha

Pengelolaan Kawasan Perkebunan, meliputi :

- 1) Dalam jangka pendek meningkatkan produktivitas perkebunan melalui pemanfaatan bibit yang unggul, pupuk yang tepat, dan teknologi tepat-guna yang didukung oleh pengembangan sistem jaringan pemasaran produksi perkebunan melalui pembangunan sentra pengumpulan dan Terminal Agribisnis di sekitar kawasan perkebunan.
- 2) Dalam jangka pendek mencari investor untuk pengembangan perkebunan besar untuk mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 3) Lembaga yang bertanggung-jawab dalam pengelolaan Kawasan Perkebunan Rakyat adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan sedangkan untuk Perkebunan besar adalah Badan Usaha pengelola.
- 4) Penentuan batas dan pemberian ijin pemanfaatan Kawasan Perkebunan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Badan Pertanahan dengan mendapat arahan dari Pemerintah Provinsi.
- 5) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan memberikan arahan kepada masyarakat dan seluruh stakeholders tentang pengelolaan Kawasan Perkebunan.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Perkebunan dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya.

#### **f. Wilayah Perikanan**

Pengembangan kawasan perikanan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ikan, baik pasar lokal daerah sekitar Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk mencapai

arahan ini perlu ditindak lanjuti dengan menyediakan sarana dan prasarana pembangunan perikanan, terutama perikanan darat dan laut.

Penetapan wilayah pengembangan perikanan didasarkan pada pendekatan konsep kompleks wilayah. Konsep kompleks wilayah adalah kombinasi antara analisis keruangan dan ekologi perikanan. Setiap wilayah mempunyai interaksi dengan wilayah lain yang muncul karena adanya perbedaan antar wilayah.

Fenomena wilayah dipelajari melalui analisis keruangan, sedangkan interaksi manusia dengan lingkungan dipelajari keterkaitannya dalam analisis ekologi. Satu wilayah adalah satu kesatuan sosial ekonomi dan sumber hayati perikanan.

Sektor perikanan merupakan sektor yang cukup berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan perikanan merupakan salah satu dari bentuk pemanfaatan ruang yang lebih efisien dari pertanian dan perkebunan. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki cukup banyak sumberdaya ruang yang sesuai untuk pengembangan sektor perikanan, baik budidaya perikanan darat, budidaya perikanan air payau/tambak, penangkapan di daerah perairan umum, maupun penangkapan di laut.

Kaitannya dengan pola pemanfaatan ruang, maka yang menjadi penekanan disini adalah budidaya tambak dan penangkapan perikanan laut. Kebutuhan masyarakat akan produk perikanan makin hari makin meningkat seiring dengan peningkatan pemenuhan gizi masyarakat. Produk perikanan menjadi pilihan dalam pemenuhan kebutuhan akan gizi, karena disamping mudah diperoleh juga harganya relatif terjangkau. Akhir-akhir ini bahkan sudah banyak dijumpai pabrik-pabrik pengelolaan ikan untuk tujuan ekspor. Prospek pasar untuk pengembangan komoditi ini baik lokal, nasional, maupun internasional sangat tinggi.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan luas kurang lebih sebesar 2.508,78 Ha yang meliputi pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan kawasan peruntukan pengolahan ikan

- 1) Rencana pengembangan kawasan perikanan tangkap dikembangkan di Kecamatan Badiri, Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Tapan Nauli, Kecamatan Sorkam Barat, Kecamatan Barus, Kecamatan Andam Dewi, dan Kecamatan Manduamas;
- 2) Rencana pengembangan perikanan budidaya dikembangkan di Kecamatan Andam Dewi, Kecamatan Tapan Nauli, Kecamatan Badiri, Kecamatan Sibabangun, Kecamatan Lumut, dan Kecamatan Pinagsori;
- 3) Kawasan pengembangan pengolahan ikan berada di Kecamatan Sarudik dan Kecamatan Tapan Nauli.
- 4) Kawasan pengembangan pangkalan ikan (PPI) dan Tempat Penangkapan Ikan (TPI) yaitu diarahkan ke TPI Labuan Angin, PPI Barus dan PPI Sorkam.

Rencana Pengelolaan Kawasan Perikanan, meliputi :

- a) Meningkatkan produktivitas perikanan dengan memperhatikan aspek lingkungan;
- b) Penentuan batas dan pemberian ijin pada Kawasan Perikanan;
- c) Meningkatkan kualitas pelaku perikanan khususnya dalam pengelolaan menuju industri perikanan;
- d) Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Perikanan dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya;
- e) Pengembangan kawasan perikanan menuju pengembangan kawasan Minapolitan.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut:

- 1) Meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi;
- 2) Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 3) Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- 4) Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 5) Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- 6) Meningkatkan kesempatan kerja;
- 7) Meningkatkan ekspor; dan/atau
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

#### **g. Wilayah Pertambangan**

Kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun akan segera dilakukan kegiatan penambangan. Kriteria lokasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi untuk daerah masing-masing, yang mempunyai potensi bahan tambang yang bernilai tinggi.

Kawasan pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas kawasan pertambangan mineral logam, kawasan pertambangan mineral non logam, kawasan pertambangan batubara, dan kawasan pertambangan rakyat. Yang dimaksud dengan kawasan pertambangan mineral logam meliputi emas, tembaga, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin. Definisi dari kawasan pertambangan mineral bukan logam meliputi komoditas intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit,

gypsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen

Untuk pengembangan potensi bahan galian yang terdapat di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, perlu disusun skala prioritas terhadap bahan galian yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan bahan galian dan lokasinya
- 2) Kondisi dan Kebutuhan Daerah
- 3) Pangsa Pasar

Beberapa komoditi yang menonjol untuk dikembangkan selain bahan galian c untuk konstruksi adalah bahan galian industri dan energi, diantaranya Batu Bara dan Logam Dasar.

Pola pemanfaatan ruang di wilayah potensi pertambangan diarahkan pada kegiatan industri pengolahan bahan-bahan tersebut menjadi komoditi turunan yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pola pemanfaatan ini perlu diiringi dengan penyediaan sarana dan prasarana fisik yang mendukung. Salah satu prasyarat pengembangan kawasan pertambangan adalah kemudahan perijinan bagi pengusaha yang akan membuka usaha pertambangan, termasuk perijinan industri yang menggunakan bahan baku bahan tambang dari Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kawasan pertambangan merupakan kawasan budidaya yang mempunyai kriteria berpotensi mineral yang sudah atau belum dibudidayakan, tetapi kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pertambangan harus diluar dari kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan. Sehingga kawasan pertambangan yang ada tidak merusak kawasan lindung yang telah ditetapkan.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi :

- 1) jenis bahan galian komoditi yang menonjol untuk dikembangkan selain bahan galian c untuk konstruksi adalah bahan galian industri dan energi;
- 2) kawasan pertambangan merupakan kawasan budidaya yang mempunyai kriteria berpotensi mineral yang sudah atau belum dibudidayakan;
- 3) kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pertambangan harus diluar dari kawasan kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan;
- 4) Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WP) di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah berada di Kecamatan Sibabangun, Kecamatan Pinangsori dan Kecamatan Tukka.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertambangan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

- 1) meningkatkan produksi pertambangan dan mendayagunakan investasi;
- 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

- 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
- 4) memperhatikan upaya pengelolaan kemampuan sumber daya alam;
- 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- 7) menciptakan kesempatan kerja;
- 8) meningkatkan ekspor; dan/atau
- 9) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana kawasan pertambangan mineral logam di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas emas, timah, seng dan perak meliputi:

- 1) Kecamatan Sibabangun;
- 2) Kecamatan Sukabangun;
- 3) Kecamatan Lumut;
- 4) Kecamatan Pinangsori;
- 5) Kecamatan Badiri;
- 6) Kecamatan Tukka;
- 7) Kecamatan Manduamas;
- 8) Kecamatan Sitahuis;
- 9) Kecamatan Tapan Nauli;
- 10) Kecamatan Kolang;
- 11) Kecamatan Sorkam;
- 12) Kecamatan Sorkam Barat;
- 13) Kecamatan Sirandorung;
- 14) Kecamatan Barus Utara;
- 15) Kecamatan Andamdewi.

Rencana kawasan pertambangan mineral non logam dan pertambangan batuan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas batu gamping, batu cadas dan pasir sedimen meliputi:

- 1) Kecamatan Sibabangun;
- 2) Kecamatan Pinangsori; dan
- 3) Kecamatan Tukka;
- 4) Kecamatan Tapan Nauli;
- 5) Kecamatan Sitahuis;
- 6) Kecamatan Kolang;
- 7) Kecamatan Manduamas;
- 8) Kecamatan Andamdewi;
- 9) Kecamatan Barus;
- 10) Kecamatan Sorkam;
- 11) Kecamatan Sorkam Barat;
- 12) Kecamatan Pasaributobing;
- 13) Kecamatan Sosorgadong;

- 14) Kecamatan Pandan;
- 15) Kecamatan Sarudik;
- 16) Kecamatan Badiri;
- 17) Kecamatan Sibabangun dan
- 18) Kecamatan Sukabangun.

Rencana kawasan pertambangan batubara meliputi:

Kecamatan Badiri;

- 1) Kecamatan Kolang; dan
- 2) Kecamatan Sosorgadong.

Rencana kawasan pertambangan rakyat adalah usaha pertambangan terhadap galian C yang di usahakan secara individu oleh masyarakat yang lokasinya meliputi..

- 1) Kecamatan Sibabangun;
- 2) Kecamatan Pinangsori; dan
- 3) Kecamatan Tukka;
- 4) Kecamatan Tapian Nauli;
- 5) Kecamatan Sitahuis;
- 6) Kecamatan Kolang;
- 7) Kecamatan Manduamas;
- 8) Kecamatan Andamdewi;
- 9) Kecamatan Barus;
- 10) Kecamatan Sorkam;
- 11) Kecamatan Sorkam Barat;
- 12) Kecamatan Pasaributobing;
- 13) Kecamatan Sosorgadong;
- 14) Kecamatan Pandan;
- 15) Kecamatan Sarudik;
- 16) Kecamatan Badiri.

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **h. Wilayah Industri**

Pengembangan kawasan peruntukan industri diarahkan pada industri yang tidak merusak lingkungan. Penekanan kegiatan industri adalah industri kecil dan kerajinan yang tersebar di berbagai kecamatan serta industri yang berbasis agroindustri atau industri yang mengelola hasil pertanian. Tidak ada peruntukan kawasan industri khusus untuk menampung kegiatan industri kecil dan kerajinan. Kawasan industri pertambangan diarahkan sesuai dengan lokasi bahan baku berada.

Yang dimaksud dengan jenis atau klasifikasi industri pada kawasan peruntukan industri adalah :

- 1) Industri besar, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal sangat besar, teknologi canggih dan modern, organisasi teratur, tenaga kerja dalam jumlah banyak dan terampil, pemasarannya berskala nasional atau internasional;
- 2) Industri menengah, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relatif besar, teknologi cukup maju tetapi masih terbatas, pekerja antara 10-200 orang, tenaga kerja tidak tetap, dan lokasi pemasarannya relatif lebih luas (berskala regional).
- 3) Industri kecil dan mikro, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relatif kecil, teknologi sederhana, pekerjanya kurang dari 10 orang biasanya dari kalangan keluarga, produknya masih sederhana, dan lokasi pemasarannya masih terbatas (berskala lokal).

Secara garis besar, pengembangan industri diarahkan pada :

- 1) Pengembangan industri yang memiliki hubungan dan keterkaitan erat dengan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata;
- 2) Memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha dan meningkatkan volume ekspor;
- 3) Peningkatan kualitas produksi dan daya saing;
- 4) Menciptakan iklim usaha yang tetap untuk mendorong investasi lokal.

Dalam pengembangan sektor industri di Kabupaten Tapanuli Tengah, penentuan lokasi pengembangan merupakan salah satu faktor penting karena kesalahan pemilihan lokasi akan berakibat terhambatnya perkembangan yang ingin dicapai.

Teori lokasi menyatakan bahwa variabel-variabel yang perlu mendapat penilaian atas potensi lokasi industri adalah :

- 1) Ketersediaan prasarana dan sarana penunjang pada lokasi atau daerah sekitarnya;
- 2) Kemudahan mendapat material dari sumbernya ditinjau dari segi waktu, biaya dan mutu;
- 3) Ketersediaan tenaga kerja yang potensial bagi kegiatan industri;
- 4) Sarana lingkungan yang menunjang bagi perkembangan kegiatan industri.

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor di atas disimpulkan bahwa beberapa kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah dipandang memenuhi syarat sebagai lokasi pengembangan agro industri yang dinilai berdasarkan ketersediaan potensi bahan baku pada hinterlandnya. Dan berdasarkan kriteria yang telah diuraikan di atas, maka rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi :

- 1) industri kecil dan menengah dapat diarahkan diseluruh kecamatan sesuai dengan potensi dan sumber bahan baku yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan tetap melihat kaedah lingkungan;
- 2) industri besar diarahkan di pusat industri Labuan Angin Kecamatan Tapan Nauli ;



3) industri menengah di kawasan pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah terutama di Kecamatan Sarudik dan Kecamatan Barus

Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi di daerah sekitarnya;
- 2) mendorong perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
- 4) tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- 7) menciptakan kesempatan kerja;
- 8) meningkatkan ekspor; dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya industri dan berdaya saing.

#### **i. Wilayah Pariwisata**

Dari segi potensi, Kabupaten memiliki potensi-potensi berupa keunggulan kondisi alam maupun kegiatan lain yang mendukung kegiatan pariwisata. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan pariwisata dengan mengacu pada pola pemanfaatan ruang yang telah ditentukan. Selain itu, pengembangan pariwisata juga diisyaratkan tetap berbasis pada nilai budaya setempat, pendidikan sosial dan upaya-upaya pelestarian alam.

Pola pengembangan pariwisata dilakukan dengan mekanisme yang terencana dan terpadu. Perencanaan yang perlu dilakukan berupa identifikasi potensi objek dan potensi pasar wisata, penyusunan prioritas pengembangan kawasan, studi kelayakan pengembangan serta penyusunan *master plan* pengembangan yang dipaduserasikan dengan pola pemanfaatan ruang untuk sektor-sektor lain. Mekanisme keterpaduan dalam pengembangan pariwisata dimaksudkan agar pengembangan pariwisata sejauh mungkin melibatkan unit-unit usaha masyarakat lokal secara aktif dan memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial.

Rencana pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi :

- 1) Kawasan peruntukkan pariwisata bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
- 2) Usaha pariwisata digolongkan ke dalam usaha jasa pariwisata, perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha sarana pariwisata.

- 3) Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
- 4) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.
- 5) Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi;
- 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
- 4) tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- 7) menciptakan kesempatan kerja;
- 8) melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam; dan/atau
- 9) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana peruntukan kawasan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas:

- 1) Pariwisata alam berupa wisata sungai, pegunungan, pantai, air terjun meliputi di Kecamatan Pinangsori yaitu danau pandan, pemandian sungai lubuk nabolon, sungai ramayana dan air terjun aeknabobar, Kecamatan Badiri yaitu pantai ujung batu pari, pantai kampung sawah sitandus, pantai maloko, pantai sikapas, pantai kampung danau, pulau situngkus, pulau batu mandi, pulau batu layar, pantai bottot, pantai monyet, pulau bakar, pulau ungge, dan pantai sijago-jago, Kecamatan Pandan yaitu pantai bosur, pantai kalangan, pantai hajoran, pantai pandan cerita, pantai labuan mandailing, pantai sibuluan, pantai muara sibuluan, pantai muara nibung, air terjun labuan sonang, sungai sibuluan, Kecamatan Sarudik yaitu bukit pondok batu, sungai sarudik, pantai ujung batu, pantai labuan nasonang, pantai batu lubang, pulau poncan gadang, pulau poncan ketek dan air terjun sibuni-buni, Kecamatan Sitahuis dengan objek wisata adalah bukit anugerah, puncak bonan dolok, sungai aek maranti, sungai aek raisan, air terjun batu lobang dan air terjun bonan dolok, Kecamatan Tapanuli Nauli dengan objek wisata pantai labuan angin, pantai mela, pulau mursala, air terjun mursala, pulau silaban barat, pulau talam, pulau silabu na menek, pulau

silabu na godang, pulau kalimatung na menek, pulau kalimatung na godang, pulau putri runduk, pulau raja janggi, pulau putih, air terjun aloban dan pantai kuta, Kecamatan Kolang dengan objek wisata adalah air terjun silaklak, sungai aek sibundong, pantai muara kolang, pantai kayu putih, pantai tanah hitam, pantai rintis, pantai bandang, Kecamatan Sorkam Barat dengan objek wisata adalah pantai aek raso, pantai binasi, pantai pasar sorkam, Kecamatan Barus dengan objek wisata adalah pantai pasar tarandam, pantai pasar batu gerigis, pantai kade gadang, Kecamatan Sorkam dengan objek wisata adalah sungai aek sibundong, pantai teluk roban/bottot, pulau sorkam, Kecamatan Andam Dewi dengan objek wisata adalah sungai aek husor, pantai sitiris-tiris, pantai sipaubat, pantai aek busuk, pantai kinati, pantai kedai tiga, pulau karang, pulau panjang, pulau dundun, Kecamatan Manduamas dengan objek wisata adalah pantai sitiris tiris, pantai simanuk manuk

- 2) Pariwisata budaya dan sejarah meliputi Kecamatan Sitahuis adalah tugu peringatan perang gerilia, makam raja panggabean dan batu lobang, Kecamatan Kolang adalah liang gorga, dan makam pahlawan Dr. Ferdinan Lumbantobing, Kecamatan Barus makam papan tinggi, makam mahligai, makam tuan madhdud, makam ibrahim syeh, makam tuan ambar, benteng portugis, pasar tarandam, rumah tradisional barus, dan desa nelayan pasar tarandam, Kecamatan Barus Utara adalah batu cawan perjamuan kudus, Kecamatan Andamdewi batu ping, makam raja uti, lobu tua, sungai aek busuk, permandian putri andam dewi, dan aek raja, Kecamatan Sorkam dengan objek wisata adalah makam tuan hidayat, Kecamatan Tukka dengan objek wisata adalah liang pagar gunung, Kecamatan Tapian Nauli dengan objek wisata adalah makam raja sasi hutagalung.

#### **j. Wilayah Permukiman**

Kawasan permukiman terdiri dari permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan. Pengembangan Permukiman pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kondisi permukiman perkotaan dan pedesaan yang sehat dan layak huni (*liveble*), aman, nyaman, damai dan berkelanjutan sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pengembangan permukiman, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merencanakan penetapan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) di beberapa lokasi. Proses penetapan dengan memperhatikan berbagai faktor, seperti potensi ekonomi kawasan, jumlah penduduk, prasarana dan sarana dasar serta potensi-potensi lain yang belum tergali yang diperkirakan mampu meningkatkan kawasan menjadi lebih mandiri dan berkembang.

Di sisi lain, terdapat lingkungan permukiman yang telah berkembang relatif sangat cepat dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi sehingga cenderung mengakibatkan lingkungan permukiman menjadi kumuh (*slum area*) karena keterbatasan ketersediaan prasarana dan sarana dasar.

Pengembangan kawasan pemukiman terkait dengan sektor-sektor lain, terutama sektor fisik prasarana. Kawasan yang dikembangkan untuk pemukiman memiliki beberapa syarat, antara lain :

- 1) Memiliki sumber air yang terjamin kontinuitasnya.
- 2) Aksesibilitas (keterjangkauan transportasi) mudah.
- 3) Dekat dengan pusat-pusat ekonomi-sosial.
- 4) Mudah dalam pengembangan sarana prasarana seperti penerangan, komunikasi/telepon, air bersih dan sebagainya.
- 5) Resiko bencana alam kecil.

Pola pengembangan pemukiman diselaraskan dengan pola pemanfaatan ruang untuk sektor lain, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang. Hal ini terutama agar tidak terjadi dislokasi kawasan budidaya menjadi kawasan pemukiman, terlebih dengan semakin banyaknya jumlah penduduk. Penggunaan kawasan budidaya menjadi kawasan pemukiman akan berakibat pada menurunnya produktifitas lahan secara keseluruhan dan menurunnya tingkat kemandirian kawasan.

Pengembangan kawasan pemukiman meliputi beberapa langkah pokok, yaitu identifikasi kesesuaian kawasan untuk pemukiman, penetapan kawasan, sosialisasi pemanfaatan ruang dan relokasi kawasan pemukiman. Identifikasi kawasan pemukiman dilakukan untuk mendata kawasan-kawasan yang memenuhi syarat dan diprioritaskan untuk pengembangan pemukiman, yang selanjutnya ditetapkan sebagai kawasan untuk pengembangan pemukiman. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran penggunaan ruang. Adapun relokasi yang dimaksudkan disini adalah penempatan kembali pemukiman yang berada pada kawasan yang dialokasikan untuk tujuan lain dan keberadaannya membahayakan fungsi utama kawasan tersebut. Hal ini terutama karena di Kabupaten Tapanuli Tengah banyak terjadi pemukiman dan kegiatan budidaya ilegal di kawasan-kawasan lindung/konservasi, seperti di kawasan Hutan Lindung, kawasan sempadan pantai dan kanan kiri sungai yang keseluruhannya merupakan kawasan lindung.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;
- 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
- 4) tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;

- 7) menyediakan kesempatan kerja; dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat

### 2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Penentuan kawasan rawan bencana alam dilakukan dengan metode scoring terhadap informasi geologi. Caranya dengan membobot parameter geologi yang berperan dalam penentuan masing-masing kawasan rawan bencana dan mengalikan dengan nilai kemampuan dari masing-masing parameter geologi sesuai situasi kondisi wilayahnya. Pola ruang untuk kawasan rawan bencana berdasarkan tingkat kerawaannya dapat dimanfaatkan sebagai kawasan/fungsi budidaya. Sedangkan analisa tingkat kerawanan dilakukan dengan menganalisa aspek fisik geologi dengan metode skoring.

#### a. Kawasan Rawan Bencana Longsor

Aspek geologi yang mengontrol terjadinya longsor adalah kemiringan lereng, litologi/batuan, bidang lemah atau struktur geologi dengan faktor pemicu adalah curah hujan. Pembobotan dari masing-masing informasi geologi seperti pada tabel dibawah ini. Berdasarkan pembobotan tersebut diperoleh tiga tingkat kerentanan, yaitu kerentanan longsor tinggi, sedang dan rendah.

**Tabel 2.2**  
**Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Longsor**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah**

Komponen	Klas Komponen	Nilai Kemampuan	Bobot	Skor
Kemiringan lereng	1. Kemiringan 0 % - 8 %	1	5	5
	2. Kemiringan 8 % - 25 %	2		10
	3. Kemiringan 25 % - 40 %	3		15
	4. Kemiringan 40 %	5		5
Batuan	1. Kode : Qh, Qp	1	4	4
	2. Kode : Qvt, Tmvak, Tmvp	3		12
	3. Kode : Tmba, Tlsb	5		20
	4. Kode : Mpisl, Puk	2		8
Curah hujan	1. 2500 - 3000 mm/thn	1	4	4
	2. 3000 - 3500 mm/thn	2		8
	3. 3500 - 4000 mm/thn	3		12
	4. > 4000 mm/thn	5		20
Struktur geologi	1. < 100 m	5	3	15
	2. 100 - 1000 m	3		9
	3. > 1000 m	1		3

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033

Dari kondisi alamnya disimpulkan bahwa di Kabupaten Tapanuli Tengah potensi bencana longsor sangat tinggi. Faktor pengontrol utama adalah kemiringan lereng dan curah hujan yang cukup tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana longsor sangat tinggi harus difungsikan sebagai kawasan lindung. Sedangkan kawasan dengan kerentanan tinggi, sedang dan rendah dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya yang dalam pembangunannya harus memenuhi prasyarat. Bahkan akan lebih baik bila kawasan dengan kerentanan tinggi juga dijadikan kawasan lindung. Sebaran luas kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi dan sedang paling dominan dibanding dengan tingkat kerawanan tinggi.

**Tabel 2.3**  
**Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Longsor**  
**Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah**

Kecamatan	Luas (Ha) per Tingkat Kerawanan				Jumlah Total (Ha)
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	
Andam Dewi	2.284,03	2.194,62	3.226,52	623,48	8.328,65
Badiri	732,27	4.044,02	9.945,92	1.606,05	16.328,26
Barus	-	35,57	914,24	568,94	1.518,75
Barus Utara	-	246,15	750,39	77,12	1.073,67
Kolang	520,43	9.360,22	12.803,52	2.991,80	25.675,97
Lumut	1.037,75	2.127,59	4.636,96	446,58	8.248,879
Manduamas	3.569,50	3.847,54	10.600,63	13.858,80	3.1876,48
Pandan	1,79	1.870,82	3.389,06	543,46	5.805,14
Pasaribu Tobing	1.730,56	4.403,35	189,90	-	6.323,81
Pinang Sori	86,83	7.088,91	10.430,21	781,71	18.387,66
Sarudik	230,82	2.809,22	1.634,05	72,31	4746,4
Sibabangun	2.632,22	6.982,71	3.355,12	230,29	13.200,33
Sirandorung	386,75	2.014,37	5.078,39	2.141,59	9.621,11
Sitahuis	1.527,12	3.265,03	1.387,82	-	6.179,97
Sorkam	205,59	6.631,76	6.667,55	1.002,81	14.507,72
Sorkam Barat	59,64	982,47	4.208,26	28,63	5.279,00
Sosorgadong	8.535,44	7.575,46	4.707,63	282,23	21.100,76
Sukabangun	-	381,84	3.660,85	546,43	4.589,12
Tapian Nauli	-	3.203,22	5.964,74	8.822,04	17.990,00
Tukka	3.421,15	6.464,57	2.508,58	34,13	12.428,43
<b>Jumlah Total (Ha)</b>	<b>26.961,92</b>	<b>75.529,45</b>	<b>96.060,33</b>	<b>34658,41</b>	<b>233.210,10</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033

#### b. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan Rawan Banjir, adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada dataran di bagian hilir dan muara sungai, kawasan cekungan di sepanjang bantaran sungai. Daerah yang berpotensi tinggi mengalami bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah meliputi Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Barus, Kecamatan Sorkam Barat, dan Kecamatan Kolang.

#### c. Kawasan Rawan Gelombang Pasang Surut

Kawasan rawan gelombang pasang air laut meliputi seluruh wilayah pantai khususnya Kecamatan Badiri, Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Sosorgadong, Kecamatan Barus dan Kecamatan Andamdewi.

#### d. 4. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

Kawasan lindung geologi di Kabupaten Tengah terdiri dari kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi terdiri atas:

##### 1) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Parameter geologi yang digunakan dalam penentuan kawasan rawan bencana gempabumi adalah : sifat fisik batuan, kemiringan lereng, struktur geologi serta kondisi kegempaan. Data kegempaan yang digunakan dalam menganalisa data keterjadian gempa selama sepuluh tahun (2000-2009). Dari hasil skoring akan diperoleh peta kawasan rawan bencana gempabumi ( dan akan menggambarkan sebaran dari masing-masing tingkat kerawanan bencana gempabumi yang dibagi atas tiga tingkat kerawanan, yaitu : kawasan rawan bencana gempa tinggi, sedang dan rendah.

**Tabel 2.4**  
**Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan**  
**Bencana Gempa Bumi Kabupaten Tapanuli Tengah**

Komponen	Klas Komponen	Nilai Kemampuan	Bobot	Skor
Batuan	1. Kode : Qh, Qp	5	4	20
	2. Kode : Qvlt, Tmba, Tmvak, Tmvp, Tlsb	4		16
	3. Kode : Mpisl, Puk	1		4
Struktur	1. < 100 m	5	3	15
	2. 100 - 1000 m	3		9
	3. > 1000 m	1		3
Kegempaan	1. Intensitas tinggi	5	5	25
	2. Intensitas sedang	3		15

Komponen	Klas Komponen	Nilai Kemampuan	Bobot	Skor
	3. Intensitas rendah	2		10
	4. Intensitas sangat rendah	1		5
Kemiringan lereng	1. 0 % - 8 %	1	3	3
	2. 8 % - 25 %	2		6
	3. 25 % - 40 %	3		9
	4. > 40 %	4		12

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033

Data kegempaan yang dianalisa hanya data keterjadian gempa (di darat dan di laut pantai barat) kurun waktu sepuluh tahun dengan kekuatan gempa yang secara umum tergolong rendah. Artinya bila kekuatan gempa yang bersumber dari patahan di laut dan di darat meningkat, maka tingkat kerentanan dimasing-masing juga akan meningkat. Berdasarkan hal tersebut, maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana gempa tinggi difungsikan sebagai kawasan lindung, hal ini lebih bersifat antisipasi. Sedangkan untuk tingkat kerawanan sedang, rendah dan sangat rendah difungsikan sebagai kawasan budi daya. Penyebaran masing-masing tingkat kerentanan perkecamatan seperti yang terlihat pada tabel dibawah. Pada tabel terlihat tingkat kerentanan rendah sebarannya lebih luas dibandingkan tingkat kerentanan lainnya.

**Tabel 2.5**  
**Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Gempa Bumi**  
**Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah**

Kecamatan	Luas (Ha) Tingkat Kerawanan				Jumlah Total (Ha)
	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Andam Dewi	59,39	1.303,43	6.826,86	138,97	8.328,65
Badiri	415,16	3.111,59	12.774,59	26,92	16.328,26
Barus	-	118,21	1.400,54	-	1.518,75
Barus Utara	-	146,75	926,93	-	1.073,67
Kolang	9,38	4.332,18	18.391,11	2.943,29	25.675,97
Lumut	87,13	1.808,22	6.353,52	-	8.248,88
Manduamas	102,92	3.313,90	22.566,91	5.892,74	31.876,48
Pandan	-	934,87	4.508,32	361,95	5.805,14
Pasaribu Tobing	152,71	3.759,99	2.399,78	11,33	6.323,81
Pinang Sori	7,65	4.032,04	14.347,98	-	18.387,66
Sarudik	4,38	536,08	3.897,48	308,46	4.746,40
Sibabangun	64,52	3.037,77	10.098,03	-	13.200,33
Sirandorung	-	633,46	8.081,39	906,26	9.621,11



Kecamatan	Luas (Ha) Tingkat Kerawanan				Jumlah Total (Ha)
	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Sitahuis	-	480,16	3.573,07	2.126,75	6.179,97
Sorkam	-	1.111,56	1.3396,16	-	14.507,72
Sorkam Barat	-	740,89	4.509,48	28,63	5.279,00
Sosorgadong	247,64	5.439,04	15.259,68	154,41	21.100,76
Sukabangun	-	679,68	3.459,50	449,93	4.589,115
Tapian Nauli	-	818,99	8.756,74	8.414,26	17.990,00
Tukka	504,71	4.848,29	6.379,81	695,61	12.428,43
<b>Jumlah Total (Ha)</b>	<b>1.655,59</b>	<b>41.187,13</b>	<b>167.907,89</b>	<b>22.459,51</b>	<b>233.210,10</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-203

## 2) Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Penentuan kawasan rawan bencana tsunami di dasarkan pada beda tinggi dataran pantai terhadap garis pantai, bentuk morfologi pantainya serta bentuk geometri pantainya (bentuk teluk atau pantai lurus). Berdasarkan hal tersebut tingkat kerawanan kawasan rawan bencana tsunami dibagi atas tiga tingkat, yaitu kerawanan tinggi, sedang dan rendah.

- Kawasan Rawan Bencana Tsunami Tinggi, berada persis disepanjang pantai yang memiliki ketinggian atau elevasi < 12.5 m dari garis pantai dengan morfologi dataran atau dengan kemiringan antara 0 % - 8 %. Potensi bahaya pada kawasan ini terutama akibat run up yang dapat menyapu apapun yang ada di permukaan pantai, serta bahaya dari energi limpasan air run up bila terjadi tsunami.
- Kawasan Rawan Bencana Tsunami Sedang, Sebaran dari kawasan ini persis disisi belakang dari kawasan rawan bencana tsunami tinggi. Kawasannya memiliki ketinggian atau elevasi > 12,5 m dari garis pantai dan dengan bentuk morfologi yang dominan dataran dengan kemiringan dominan 0 % - 8 % dan sebagian kecil memiliki kemiringan 8 % - 15 %. Bila terjadi tsunami, energi run up mulai berkurang namun tetap memiliki potensi bencana tinggi akibat perluasan limpasan air.
- Kawasan Rawan Bencana Tsunami Rendah, Kawasan ini memiliki tingkat kerawanan yang rendah bahkan sampai sangat rendah, karena morfologinya dominan miring dengan kemiringan > 15 %. Kondisi demikian dapat memperlemah energi run up saat terjadi tsunami, sehingga potensi bencana yang ditimbulkan jauh lebih rendah.

**Tabel 2.6**  
**Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Tsunami**  
**Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah**

Kecamatan	Luas (Ha) per Tingkat Kerawanan			Jumlah Total (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Andam Dewi	5.697,06	1.387,77	1.243,83	8.328,65
Badiri	4.681,35	9.493,86	2.153,04	16.328,26
Barus	58,56	704,04	756,16	1.518,75
Barus Utara	878,86	194,81	-	1.073,67
Kolang	16.631,49	6.434,51	2.609,97	25.675,97
Lumut	8.248,88	-	-	8.248,88
Manduamas	16.433,22	9.123,99	6.319,27	31.876,48
Pandan	2.538,94	2.211,69	1.054,51	5.805,14
Pasaribu Tobing	6.237,60	86,21	-	6.323,81
Pinang Sori	12.682,12	4.554,93	1.150,61	18.387,66
Sarudik	3.199,83	1.191,02	355,55	4.746,40
Sibabangun	13.200,33	-	-	13.200,33
Sirandorung	5.668,46	3.066,28	886,37	9.621,11
Sitahuis	6.069,00	110,98	-	6.179,97
Sorkam	11.348,06	2.299,93	859,74	14.507,72
Sorkam Barat	1.262,98	2.676,48	1.339,54	5.279,00
Sosorgadong	16.835,04	2.279,52	1.986,20	21.100,76
Sukabangun	4.589,12	-	-	4.589,12
Tapian Nauli	3.943,29	2.372,65	11.674,06	17.990,00
Tukka	11.687,14	741,29	-	12.428,43
<b>Jumlah Total (Ha)</b>	<b>151.891,32</b>	<b>48.929,95</b>	<b>32.388,84</b>	<b>233.210,11</b>

*Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033*

Berdasarkan hal tersebut maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana tsunami tinggi harus difungsikan sebagai kawasan lindung. Sedangkan pola ruang kawasan rawan bencana tsunami sedang dan rendah dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya yang dalam pengembangan atau pembangunannya harus memenuhi prasyarat. Dari uraian ketiga kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, dapat disimpulkan bahwa pola ruang untuk semua kawasan rawan bencana yang tingkat kerentanannya tergolong tinggi - sangat tinggi difungsikan sebagai kawasan lindung. Sedangkan yang memiliki tingkat kerawanan sedang, rendah dan sangat rendah dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya.

**Tabel 2.7**  
**Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Tapanuli Tengah**

Kawasan Rawan Bencana	Tingkat Kerawanan	Pola Ruang
Longsor	Tinggi	Kawasan fungsi lindung
	Sedang	Kawasan fungsi budi daya
	Rendah	
	Sangat rendah	
Gempabumi	Sangat Tinggi	Kawasan fungsi lindung
	Tinggi	Kawasan fungsi budi daya
	Sedang	
	Rendah	
Tsunami	Tinggi	Kawasan fungsi lindung
	Sedang	Kawasan fungsi budi daya
	Rendah	

*Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033*

Adanya potensi bahaya geologi yang berpotensi terhadap terjadinya bencana, maka sangat perlu ditetapkan strategi perencanaan dimasa yang akan datang. Perencanaan kegiatan yang harus dilakukan adalah kegiatan Pemetaan dan Mitigasi Bencana Alam Geologi Detail di masing-masing kecamatan.

### **3) Kawasan Rawan Gerakan Tanah**

Kawasan Rawan Gerakan Tanah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi adalah kawasan disepanjang Jalan Sibolga – Tarutung Kecamatan Sitahuis.

#### **2.1.1.4. Demografi**

Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari berbagai etnis antara lain etnis Batak, Melayu, Minangkabau, Jawa, Bugis, Aceh dan pembauran dari suku-suku bangsa lain sebagai pendatang. Kehidupan etnis yang ada berjalan cukup baik dan harmonis serta memiliki rasa kekeluargaan yang cukup tinggi. Hal ini didukung kegiatan sosial dan adat istiadat di kalangan masyarakat serta didorong rasa kebersamaan sesuai dengan motto Kabupaten Tapanuli Tengah "Sahata Saoloan" atau "seia sekata". Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2020 sebesar 365.177 jiwa penduduk dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 369.300 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 168,25 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Pandan dengan kepadatan penduduk sebesar 1.750 jiwa per km<sup>2</sup>.

### a. Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk disuatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi neto. Secara terus menerus jumlah penduduk akan dipengaruhi oleh banyaknya bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi disisi lain akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur. Sementara itu migrasi juga berperan dalam mempengaruhi jumlah dimana penduduk imigran (pendatang) akan menambah dan emigran (penduduk yang keluar) akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen demografi, yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi (masuk/inmigration dan keluar/outmigration). Selisih antar fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduktif (reproduktive change) atau pertumbuhan alamiah (natural growth), sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi neto (net migration). Dengan telah berjalannya system registrasi penduduk melalui pelayanan pendaftaran penduduk, maka data jumlah penduduk dapat diketahui secara langsung dari database kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Pinangsori	25728	328,50
2	Badiri	27502	212,39
3	Sibabangun	18523	65,08
4	Lumut	12847	121,22
5	Sukabangun	3940	79,81
6	Pandan	60047	1 750,13
7	Tukka	14554	96,43
8	Sarudik	22651	873,88
9	Tapian Nauli	20609	248,27
10	Sitahuis	5956	117,89
11	Kolang	21135	48,44
12	Sorkam	16671	206,81
13	Sorkam Barat	17810	399,51
14	Pasaribu Tobing	7588	73,41
15	Barus	17577	805,91
16	Sosor Gadong	14746	103,03
17	Andam Dewi	16328	133,38

18	Barus Utara	4891	77,61
19	Manduamas	23200	233,05
20	Sirandorung	16997	193,76
<b>Jumlah</b>		<b>369.300</b>	<b>168,25</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022

#### b. Penduduk Menurut Rasio Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk menurut jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya.

**Tabel 2.9**  
**Jumlah Penduduk Menurut Rasio Jenis**  
**Kelamin Penduduk Tahun 2021**

No.	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk	
		2020	2021
1	Pinangsori	101,04	101,28
2	Badiri	104,14	105,62
3	Sibabangun	100,33	100,66
4	Lumut	100,33	100,58
5	Sukabangun	102,90	102,99
6	Pandan	103,14	103,07
7	Tukka	99,62	100,36
8	Sarudik	104,30	100,79
9	Tapian Nauli	103,60	103,97
10	Sitahuis	99,63	99,53
11	Kolang	102,11	102,23
12	Sorkam	97,90	97,45
13	Sorkam Barat	100,23	100,79
14	Pasaribu Tobing	98,13	98,12
15	Barus	104,32	104,74
16	Sosor Gadong	98,45	98,47
17	Andam Dewi	98,01	98,20
18	Barus Utara	95,17	95,09
19	Manduamas	99,92	99,97
20	Sirandorung	99,98	100,93
<b>Jumlah</b>		<b>101,35</b>	<b>101,42</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022

### c. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk yang sering digunakan untuk analisis perencanaan pembangunan adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dimana hal tersebut merupakan karakteristik penduduk yang pokok. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi.

Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Pada tabel 2.10 menunjukkan bahwa penduduk kabupaten Tapanuli Tengah sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-39 tahun.

**Tabel 2.10**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan**  
**Jenis Kelamin Tahun 2021**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-Laki (Jiwa)</b>	<b>Perempuan (Jiwa)</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>
0-4	15.142	14.505	<b>29.647</b>
5-9	17.614	16.778	<b>34.392</b>
10-14	18.814	18.063	<b>36.877</b>
15-19	19.534	18.348	<b>37.882</b>
20-24	18.460	16.990	<b>35.450</b>
25-29	17.157	15.715	<b>32.872</b>
30-34	16.220	15.209	<b>31.429</b>
35-39	13.688	12.656	<b>26.344</b>
40-44	11.944	11.080	<b>23.024</b>
45-49	10.186	9.845	<b>20.031</b>
50-54	8.231	8.647	<b>16.878</b>
55-59	6.673	7.487	<b>14.160</b>
60-64	5.069	6.247	<b>11.316</b>
65-69	3.533	4.893	<b>8.426</b>
70-74	2.160	3.368	<b>5.528</b>
75+	1.523	3.521	<b>5.044</b>
<b>Jumlah</b>	<b>185.948</b>	<b>183.352</b>	<b>369.300</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022

### d. Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Secara umum lapangan usaha yang paling besar menyerap tenaga kerja adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 86.485 jiwa, diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

sebesar 17.349 jiwa, dan sektor Industri Pengolahan sebesar 9.809 jiwa. Secara detail dapat digambarkan dalam tabel dibawah.

**Tabel 2.11**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021**

No	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Pertanian	55.459	43.735	99.194
2.	Manufaktur	11.511	7.019	18.530
3.	Jasa	33.654	35.152	68.806
<b>Tapanuli Tengah</b>		<b>100.624</b>	<b>85.906</b>	<b>186.530</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022

**e. Penduduk Menurut Pendidikan**

Persentase penduduk berusia 10 tahun keatas yang masih tidak bersekolah pada tahun 2021 ditingkat SD berjumlah 45.168 orang atau 0,1% meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 0,09%. Pada tingkat SMP yang masih tidak bersekolah pada tahun 2021 berjumlah 22.663 orang atau 0,17% dan pada tingkat SLTA yang masih tidak bersekolah pada tahun 2021 berjumlah 17.299 orang atau 0,09%.

**Tabel 2.12**  
**Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Status Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021**

No.	Status Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tidak / Belum pernah sekolah	4.656				
2.	Masih Sekolah					
	- SD	46.220	47.563	45.121	43.936	45.168
	- SMP	20.890	20.598	21.979	20.154	22.663
	- SLTA	16.400	14.799	18.630	15.628	17.299
3.	Tidak Bersekolah lagi					
	- SD (%)	0,08	0,07	0,05	0,09	0,1
	- SMP (%)	0,12	0,08	0,39	0,51	0,17
	- SLTA (%)	0,12	0,13	0,006	0,007	0,09

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

**f. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan garis Kemiskinan**

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 47.190 jiwa dan meningkat lagi sebesar 12,67% menjadi sebanyak 49.950 jiwa pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan dampak pandemic covid-19 yang melanda seluruh dunia.

**Tabel 2.13**

**Jumlah Penduduk miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017 – 2021**

INDIKATOR	Capaian Kabupaten Tapanuli Tengah				
	2017	2018	2019	2020	2021
- Jumlah total (000 jiwa)	53,05	48,53	46,99	47,19	49,95
- Persentase	14,66	13,17	12,53	12,38	12,67
- Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	367.687	369.471	376.474	406.646	429.050

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022

**2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. UNDP mendefinisikan pembangunan dan khususnya pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan bagi penduduk (*a proses of enlarging people's choise*). Dalam konsep tersebut penduduk di tempatkan sebagai tujuan akhir (*The ultimate end*), bukan ala, cara atau instrumen pembangunan sebagaimana yang dilihat oleh model formasi modal manusia (Human capital formation). Seperti diketahui, beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya.

**2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

**Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah (miliar rupiah), 2017-2021.



**Tabel 2.14**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah (miliar rupiah),**  
**2017-2021**

No	Kategori	2017	2018	2019	2020*	2021* *
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	3.964,67	4.241,57	4.512,63	4.682,30	4.906,09
2	Pertambangan dan Penggalian	22,48	24,39	26,28	26,20	27,62
3	Industri Pengolahan	987,12	1.059,80	1.127,03	1.133,10	1.232,82
4	Pengadaan listrik dan gas	48,79	53,13	56,87	57,53	59,82
5	Pengadaan Air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang	10,42	11,26	12,13	12,56	12,27
6	Konstruksi	993,27	1.092,31	1.192,60	1.170,78	1.246,27
7	Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	973,87	1.084,65	1.229,06	1.246,49	1.327,07
8	Transportasi dan Pergudangan	233,74	252,25	276,47	259,80	231,17
9	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	123,28	134,84	147,23	138,99	140,84
10	Informasi dan komunikasi	50,25	54,77	60,42	65,35	70,94
11	Jasa keuangan dan asuransi	84,89	91,13	97,04	98,92	108,86
12	Real Estate	169,87	184,96	201,85	208,59	215,09
13	Jasa Perusahaan	27,27	29,31	32,26	33,08	34,68
14	Adm. Pemerintahan, pertanahan dan Jamsos wajib	736,82	787,55	843,75	861,53	856,01
15	Jasa Pendidikan	83,19	89,51	98,21	99,16	103,83
16	Jasa Kesehatan dan Keg. Soaial	27,75	30,23	33,79	35,16	35,22
17	Jasa Lainnya	7,68	8,30	9,18	9,30	9,63

<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>8.545,38</b>	<b>9.229,98</b>	<b>9.956,78</b>	<b>10.138,83</b>	<b>10.618,75</b>
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------

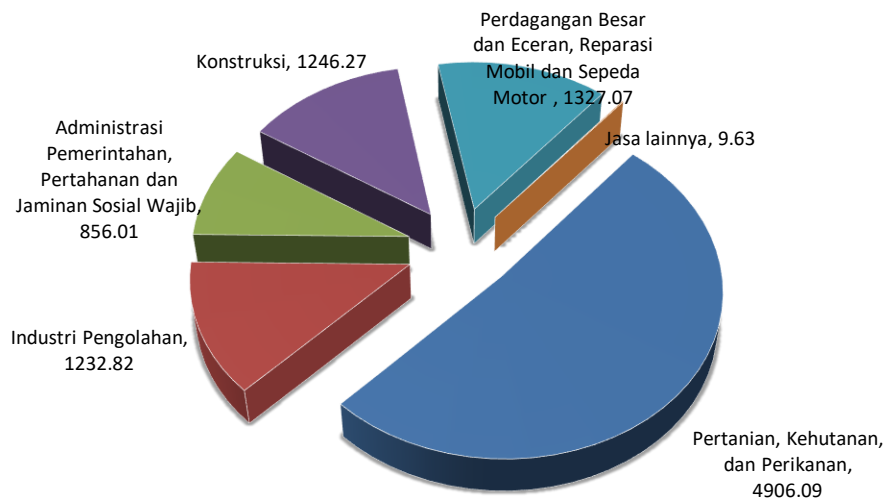
Catatan: \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah dari tiap tahun meningkat. Dapat dilihat mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 angka yang ditunjukkan selalu meningkat. Walaupun dengan kondisi Pandemi Covid-19, angka yang ditunjukkan pada tahun 2021 tidak menurun secara signifikan. Hal ini juga sejalan dengan Provinsi Sumatera Utara yang mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 2,61% walaupun masih dalam kondisi Pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan sinergitas pembangunan perekonomian Daerah Kabupaten/Kota sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh Provinsi dan selaras dengan Pembangunan Perekonomian Nasional dalam perbaikan perekonomian yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19, namun hal tersebut secara garis besar tidak sampai membuat perekonomian Provinsi Sumatera Utara menurun secara signifikan.

**Grafik. 2.1**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah, 2021 (miliar rupiah)**



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022

**Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah (rupiah), 2016-2020**

Produktivitas ekonomi (dengan mengabaikan inflasi) dapat dilihat dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK).

**Tabel 2.15**  
**Produk Domestik Regional Bruto Perkapita**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah (ribu rupiah), 2016-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Atas Dasar Harga Berlaku</b>	<b>Atas Dasar Harga Konstan</b>
2016	21.992	16.900
2017	23.495	17.454
2018	24.934	18.040
2019	26.119	18.426
2020*	27.868	19.160
2021**	28.754	19.359

Catatan: \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022

PDRB Perkapita ADHK Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 meningkat walaupun tidak meningkat secara signifikan. Namun, PDRB Perkapita ADHK Provinsi Sumatera Utara menurundari Tahun 2019 ke Tahun 2020 dari Rp 37,05 Juta menjadi 37,05 Juta lebih rendah daripada PDRB ADHK Nasional yaitu sebesar Rp 39,55 Juta.

#### **2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial**

Untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan focus kesejahteraan sosial dapat dilihat melalui indikator-indikator sebagai berikut :

##### **a. Angka Melek Huruf (AMH)**

Angka Melek Huruf merupakan gambaran dari jumlah penduduk yang bisa baca tulis. Di Kabupaten Tapanuli Tengah AMH pada tahun 2020 sebesar 99,93% dan meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 99,95%. Hal ini diharapkan agar dapat dipertahankan guna meningkatkan kesejahteraan sosial.

**Tabel 2.16**  
**Angka Melek Huruf Tahun 2017-2021**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah**

<b>INDIKATOR</b>	<b>Capaian</b>				
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
- Angka Melek Huruf	99,45%	99,98%	99,90%	99,93%	99,95

Sumber :Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

##### **b. Angka rata-rata lama sekolah (MYS)**

Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal.

**Tabel 2.17**  
**Rata-rata lama sekolah Tahun 2017-2021**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah**

INDIKATOR	Capaian Kabupaten Tapanuli Tengah				
	2017	2018	2019	2020	2021
- Rata rata Lama Sekolah (thn)	8,04	8,29	8,48	8,62	8,84

*Sumber :Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah*

Dari tabel tersebut dapat dilihat peningkatan rata-rata lama sekolah dari tahun 2017 s/d 2021 yaitu sebesar 8,84 tahun. Dari tabel tersebut dapat di ketahui bahwa pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih harus berusaha dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah dalam rangka pencapaian wajib belajar 12 Tahun. Pada Tahun 2018 Rata-Rata Lama Sekolah adalah 9,34 Tahun, pada Tahun 2019 mencapai angka 9,45 Tahun dan pada Tahun 2020 menyentuh angka 9,54 Tahun.

### **2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

Urusan kebudayaan terkait dengan penanaman nilai-nilai budaya, perlindungan dan pemeliharaan cagar budaya baik di daratan maupun di bawah air, pembinaan kesenian tradisional dan modern, menjalin kerjasama dengan berbagai daerah dan luar negeri.

Benda cagar budaya di Kabupaten Tapanuli Tengah cukup banyak, yang terbagi dalam benda bersejarah bergerak dan tidak bergerak. Benda bersejarah bergerak antara lain ulos, gondang batak, dan tenunan khas melayu. Sedangkan benda bersejarah yang tidak bergerak, yaitu makam pembawa ajaran Agama Islam, Kristen Protestan dan Kristen Katholik pertama kali di Pantai Barat Sumatera, Batu Lobang dan Monumen – monumen perjuangan yang ada di Kecamatan Sitahuis dan Tapan Nauli serta Situs Makam Mahligai dan Situs Makam Papan Tinggi sebagai pembawa ajaran Islam di Indonesia, Situs dimaksud berada di Kecamatan Barus Utara yang sangat penting untuk dibangun fasilitas pendukung sebagai tempat wisata religi.

Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh Pemerintah, maupun atas inisiasi masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan. Pada tahun 2021 jumlah gedung olahraga adalah 1 unit, sedangkan organisasi kepemudaan berjumlah 40 Organisasi.

Pada awalnya kondisi keolahragaan di Kabupaten Tapanuli Tengah belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan. Belum terwujudnya prestasi olahraga dikarenakan pembinaan dan pembibitan atlet berprestasi di beberapa cabang olah raga, antara lain terkendala oleh keterbatasan dukungan dana serta sarana dan prasarana pendukung.

**Tabel 2.18**  
**Perkembangan Kepemudaan, Sarana dan Prasarana Olahraga**  
**Tahun 2016 – 2021**

No	Uraian	Jumlah					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cabang Olahraga	8	12	12	12	12	12
2	Gedung Olahraga	1	1	1	1	1	1
3	Organisasi Kepemudaan	40	40	40	40	40	40
4	Induk Organisasi Olahraga	1	1	1	1	1	1
5	Kegiatan Kepemudaan	3	3	3	4	3	3

*Sumber: Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah*

Dalam rangka meningkatkan prestasi di bidang pemuda dan keolahragaan, selain mengadakan kompetisi Pemuda dan Keolahragaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan dana pengiriman atlet-atlet yang mengikuti perlombaan baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi, maupun tingkat nasional, bantuan dana kepemudaan, bantuan dana keolahragaan dan bantuan alat olah raga.

### **2.1.3. Aspek Pelayanan Umum**

#### **2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib**

##### **2.1.3.1.1. Pendidikan**

Pelaksanaan Urusan Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019 diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pada Urusan Pendidikan Tahun 2019, Kita telah membangun dan merehabilitasi 178 Ruang Kelas SD dan SMP, sehingga sejak Tahun 2017-2019 jumlahnya 304 Ruang Kelas dan Kita targetkan menjadi 380 Ruang Kelas Tahun 2020. Selain itu juga dilaksanakan Pembangunan Perpustakaan, Laboratorium, Perbaikan Sanitasi Sekolah, Pengadaan Mobiler, Buku serta Media Pembelajaran. Kedepan Kita upayakan seluruh sarana dan prasarana Pendidikan dalam Kondisi yang representatif guna mendukung proses belajar dan mengajar berjalan dengan baik dan lancar. Sementara itu Tahun 2021 APK SD sebesar 99,77%, APM 98,73%, dan Angka Kelulusan 100%. Selanjutnya APK SMP/MTs sebesar 98,45%, APM sebesar 91,82% dan Angka Kelulusan sebesar 100%.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal mendukung Program Nasional terkait peningkatan mutu pendidikan melalui Akreditasi sekolah SD s/d SMP ,

bahwa di Kabupaten Tapanuli Tengah sekolah yang sudah memperoleh Akreditasi A untuk SD sebanyak 182 SD dan Akreditasi B sejumlah 94 SD sedangkan Sekolah SMP Akreditasi A sejumlah 32 SMP dan Akreditasi B sebanyak 23 SMP.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga telah memberikan Beasiswa kepada Putra-Putri Tapanuli Tengah untuk Tingkat SMA dan Mahasiswa yang Berprestasi dari keluarga yang kurang mampu. Beasiswa Ini diberikan kepada Siswa dan Mahasiswa yang selain Beprestasi dan juga tidak merokok. Khusus Beasiswa untuk SMA pada tahun 2019 sebanyak 77 orang siswa dan Mahasiswa 20 (dua puluh) orang diberikan hingga lulus kuliah kecuali Jurusan Kedokteran, untuk lebih jelasnya dapat dilihat capaian kinerja.

Capaian rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Tapanuli Tengah selama 8,62 tahun menjadi 8,84 tahun pada tahun 2021. Meskipun meningkat akan tetapi capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Tapanuli Tengah masih jauh berada di bawah angka capaian rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara.

Sama halnya dengan rata-rata lama sekolah, capaian harapan lama sekolah juga mengalami pola peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2019, harapan lama sekolah di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 12,79 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 13,07 tahun pada tahun 2021. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk yang memasuki usia sekolah (kurang lebih 7 tahun) memiliki kesempatan mengenyam pendidikan selama 13,07 tahun atau menduduki jenjang pendidikan hingga kuliah semester kedua.

**Tabel 2.19**  
**Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2019 - 2021**

NO	URAIAN	TAHUN		
		2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Murid/Siswa</b>			
	- TK/PAUD	8.652	7.492	3.366
	- SD/MI	45.121	43.938	45.168
	- SMP/MTs	21.979	20.154	22.663
	- SMA/SMK/MA	18.630	15.628	17.299
<b>2</b>	<b>Guru</b>			
	- TK/PAUD	487	417	955
	- SD/MI	3.543	3.380	3.339
	- SMP/MTs	2.319	2.226	1.573
	- SMA/SMK/MA	954	1.001	1.300
<b>3</b>	<b>Sekolah</b>			
	- TK/PAUD	249	246	304
	- SD/MI	351	351	353

NO	URAIAN	TAHUN		
		2019	2020	2021
	- SMP/MTs	103	104	106
	- SMA/SMK/MA	55	55	59
<b>4</b>	<b>Angka Partisipasi</b>			
	- TK / PAUD			
	* APK	66,68	68,83	71,86
	- SD/MI			
	* APK	99,58	99,69	99,77
	* APM	96,51	97,31	98,73
	* Angka Putus Sekolah	0,05	0,09	0,10
	* Angka Kelulusan	100	100	100
	* Rasio Murid-Guru	12,74	12,83	15,53
	- SMP/MTs			
	* APK	95,21	96,71	98,45
	* APM	90,20	91,63	91,82
	* Angka Putus Sekolah	0,39	0,51	0,17
	* Angka Kelulusan	100	100	100
	* Rasio Murid-Guru	9,58	11,13	14,40
	- SMA/MA			
	* APK	92,51	93,25	93,95
	* APM	82,5	83,72	83,87
	* Angka Putus Sekolah	0,006	0,007	0,09
	* Angka Kelulusan	100	100	100
	* Rasio Murid-Guru	19,53	19,80	19,80
<b>5</b>	Penduduk Berusia>15 Tahun Melek Huruf (%)	99,90	99,93	99,95
<b>6</b>	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	91,47	93,25	95,37
<b>7</b>	Angka Melanjutkan dari SMP ke SMA/SMK/MA	97,87	97,87	98,24
<b>8</b>	Guru Pendidikan Dasar Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	85,38	88,34	94,22

Sumber :Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

#### 2.1.3.1.2. Kesehatan

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan upaya kesehatan terintegrasi dalam peran dan fungsi sebagai berikut :

1. Pusat pembangunan berwawasan kesehatan;

2. Pusat pergerakan peran serta masyarakat; dan
3. Pusat pelayanan Kesehatan dasar.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2021 sebanyak 25 unit yang terdiri dari 6 unit Puskesmas rawat inap dan 19 unit puskesmas non rawat inap. Jumlah Puskesmas tahun 2021 sama dengan jumlah Puskesmas tahun 2020, namun bila dibandingkan dengan tahun 2018 (23 Puskesmas), jumlah Puskesmas mengalami penambahan sebanyak 2 unit yaitu Puskesmas Kedai Tiga yang terletak di Kecamatan Barus dan Puskesmas Sijungkring yang terletak di Kecamatan Andam Dewi.

Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral Puskesmas, yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas. Tujuan Puskesmas Pembantu adalah untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Fungsi Puskesmas Pembantu adalah untuk menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas, di wilayah kerjanya. Puskesmas Pembantu didirikan dengan perbandingan 1 (satu) Puskesmas Pembantu untuk melayani 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa/kelurahan. Pendirian Puskesmas Pembantu harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan dan ketenagaan. Tenaga minimal di Puskesmas Pembantu terdiri dari 1 (satu) orang perawat dan 1 (satu) orang bidan. Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) yang aktif di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam 3 tahun terakhir mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena bangunan puskesmas pembantu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi dan tenaga kesehatan yang tidak tersedia. Tahun 2018 jumlah Puskesmas pembantu sebanyak 90 unit, tahun 2019 sebanyak 93 unit, tahun 2020 sebanyak 91 unit, dan pada tahun 2021 jumlah Pustu yang aktif berkurang 2 unit menjadi 89 unit yang disebabkan oleh bangunan pustu sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang klinik, maka istilah balai pengobatan diubah menjadi klinik. Berdasarkan jenis pelayanan, Klinik dibagi menjadi 2 yaitu Klinik pratama dan Klinik utama. Klinik pratama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus sedangkan Klinik utama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialis atau pelayanan medik dasar dan spesialis. Jumlah klinik di kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2021 sebanyak



17 unit yang terdiri dari 16 unit klinik pratama dan 1 unit klinik utama. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar masyarakat desa. Poskesdes dibentuk dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat serta sebagai sarana kesehatan yang merupakan pertemuan antara upaya masyarakat dan dukungan pemerintah. Jumlah Poskesdes di kabupaten Tapanuli Tengah mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir karena bangunan yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi dan ketidakaktifan petugas dalam memberikan pelayanan. Pada tahun 2019 jumlah Poskesdes sebanyak 74 unit, tahun 2020 sebanyak 42 unit, dan pada tahun 2021 bertambah menjadi 46 unit.

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan Kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Dalam penyelenggaraan posyandu, peran aktif ada di masyarakat, sedangkan petugas Kesehatan dan aparat desa/ kelurahan hanya bertindak sebagai fasilitator dan pelaksana kegiatan kesehatan/ medis. Pada tahun 2021, jumlah posyandu di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 393 unit. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 (385 posyandu). Penambahan 8 (delapan) unit Posyandu yang tersebar di beberapa kecamatan.

Pelayanan keperawatan merupakan suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan kepada individu, kelompok, atau masyarakat dalam keadaan sehat maupun sakit. Jumlah perawat Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2019 sebanyak 416 orang. Kemudian pada tahun 2020 terjadi penambahan jumlah perawat sebanyak 22 orang, sehingga total perawat Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2020 yaitu sebanyak 438 orang. Tahun 2021, dimana jumlah perawat Kabupaten Tapanuli Tengah berkurang menjadi 413 orang, hal ini disebabkan beberapa perawat pindah tugas dan ada juga yang beralih menjadi Tenaga Kesehatan Masyarakat.

Jumlah bidan Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2019 sebanyak 773 orang. Kemudian pada tahun 2020 sebanyak 788 orang dan pada tahun 2021 berkurang menjadi 785 orang. Dapat disimpulkan bahwa jumlah bidan di Kabupaten Tapanuli Tengah selama 2 tahun berturut-turut selalu mengalami peningkatan namun pada Tahun 2021 berkurang sebanyak 3 orang. Hal ini disebabkan beberapa bidan pindah tugas dan ada juga yang beralih menjadi Tenaga Kesehatan Masyarakat.

Jumlah dokter umum Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak 47 orang. Kemudian pada tahun 2021 bertambah sebanyak 10 orang menjadi 57 orang. Jumlah dokter gigi Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2019 sebanyak 19 orang. Kemudian pada tahun 2020 sebanyak 20 orang dan tahun 2021 menjadi sebanyak 18 orang, hal ini disebabkan beberapa dokter gigi pindah tugas.

Seiring dengan hal itu pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selalu berusaha dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penambahan pusat kesehatan masyarakat dan sejenisnya, yang dapat dilihat dari tabel berikut.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Angka harapan hidup cenderung meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, di mana pada tahun 2019 angka harapan hidup Tapanuli Tengah selama 67,08 tahun dan terus meningkat hingga pada tahun 2021 mencapai 67,24 tahun. Peningkatan ini tentu merupakan capaian yang positif bagi perwujudan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Jika dibanding dengan Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 mencapai 71,08.

**Tabel 2.20**  
**Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sejenisnya**  
**Di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017- 2021**

No	Tahun	Puskesmas	PUSTU	BPU	Poskesdes	Posyandu
1	2017	23	91	11	152	382
2	2018	23	90	12	95	382
3	2019	25	93	12	74	383
4	2020	25	91	15	42	385
5	2021	25	89	17	46	393

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah

Selain penyediaan sarana prasarana kesehatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga berupaya dalam penyediaan tenaga kesehatan.

**Tabel 2.21**  
**Jumlah Perawat, Bidan, Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis**  
**Di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 - 2021**

No.	Tahun	Perawat	Bidan	Dokter Umum PNS/PTT	Dokter Gigi PNS/PTT	Dokter Spesialis
1	2016	250	228	33	11	-
2	2017	227	416	34	11	-
3	2018	384	755	38	12	-

4	2019	416	773	47	19	-
5	2020	438	788	47	20	-
6	2021	413	785	57	18	

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah

### 2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### a. Jalan dan Jembatan

Keluaran (*output*) dari kegiatan pada Program Pembangunan Jalan dan Jembatan adalah Jalan Hotmix 33.718 m<sup>1</sup>, Jalan Lapen 1.177 m<sup>1</sup>, Telford 240 m<sup>1</sup>, Rabat 2047 m<sup>1</sup>, Pembukaan Jalan 3.700 m, Sirtu 2560 m<sup>1</sup>, Pembangunan Jembatan 5 Unit, Pembangangan Jembatan Kayu 5 Unit, Rehab. Rambin 2 Unit, Plat Beton 31 Unit, Saluran Drainase 3.073 m<sup>1</sup>, Dek 2.337 m<sup>1</sup> dan Saluran 2.186 m<sup>1</sup> dan gorong-gorong 10 m<sup>1</sup>.

Hal ini memperlihatkan perkembangan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tapanuli Tengah cukup baik sehingga keadaan ini dapat membuat kemudahan arus barang dan jasa dari dan ke Kabupaten Tapanuli Tengah. Dengan demikian, diharapkan kondisi infrastruktur jalan ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah dimasa mendatang.

Panjang jalan yang menjadi kewenangan Nasional dan Provinsi yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2021, untuk Jalan Nasional 181,89 km, Jalan Provinsi 56,50 km dan Jalan Kabupaten 722,57 km. Sedangkan untuk kondisi jalan di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2021 yang Baik 391,2 km, Sedang 51,43 km, Rusak 154,98 km dan Rusak Berat 124,96 km.

Sedangkan untuk Total Jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2021 sebanyak 249 jembatan yang tersebar di 20 Kecamatan.

#### b. Kondisi Daerah Irigasi

Keluaran (*output*) dari Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya adalah Bronjong 69 m<sup>1</sup>, Saluran Pasangan 5.701 m<sup>1</sup>, Rehab Saluran Pasangan 153 m<sup>1</sup>, Rehab Bendung 5 Unit, Bangunan Bagi 1 Unit, Saluran Pipa 143 m<sup>1</sup>, Dek Pengaman 48 m dan Box Kwarter 7 Unit. Keluaran (*output*) pada kegiatan Pemeliharaan Rutin Irigasi Tahun 2019 yaitu Pembersihan Saluran 1.700 m<sup>1</sup>, Rehab Saluran 981 m<sup>1</sup>, Tembok Penahan 12 m<sup>1</sup>, Bronjong 12 m<sup>1</sup> dan Bangunan Bagi 1 Unit.

Irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi yang ada di kabupaten Tapanuli Tengah ada 3 Daerah Irigasi Mombang boru seluas 320 ha, Daerah Irigasi Badiri Lopian seluas 1.283 ha dan Daerah Irigasi Pandurungan/Sitandiangan seluas 1.769 ha.

**Tabel 2.22**  
**Panjang dan Kondisi Jalan Jembatan dan Daerah Irigasi**  
**Serta Luas Tata Ruang Tahun 2018-2021**

NO	URAIAN	SAT	TAHUN			
			2018	2019	2020	2021
<b>1.</b>	Perkembangan Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten					
	a. Panjang Jalan Kabupaten		722,57	722,57	722,57	722,57
	- Diaspal	Km	499,45	499,45	521,05	521,05
	- Kerikil	Km	84,12	84,12	62,52	62,52
	- Tanah	Km	139	139	139	139
	b. Panjang Jembatan Kabupaten					
	- Jembatan Rangka Baja	M	335	335	335	335
	- Jembatan Beton	M	2.022	2.022	2.022	2.022
	- Jembatan Kayu	M	265	265	265	265
	- Gelagar Kayu	M	15	15	15	15
	- Gelagar Besi	M	247	247	247	247
	- Jembatan Rambu	M	662,2	662,2	662,2	662,2
<b>2.</b>	Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten					
	a. Jalan Kabupaten					
	- Baik	Km	281,17	301,88	363,27	391,20
	- Sedang	Km	53,14	51,43	51,43	51,43
	- Rusak	Km	247,80	244,30	182,91	154,98
	- Rusak Berat	Km	140,46	124,96	124,96	124,96
	b. Jembatan Kabupaten					
	- Baik	M	2.123,95	2.172,45	2.272,45	2.272,45
	- Sedang	M	246,80	246,8	246,8	246,8
	- Rusak	M	431,06	382,56	382,56	382,56
<b>3</b>	Jenis Bendung					
	a. Bendung Teknis/ Permanen	Buah	54	59	59	59
	b. Bendung Semi Permanen	Buah	2	2	2	2

NO	URAIAN	SAT	TAHUN			
			2018	2019	2020	2021
	c. Bendung Sederhana	Buah	10	5	5	5
<b>4</b>	Kondisi Bendung Permanen					
	- Baik	Buah	24	29	30	31
	- Sedang	Buah	24	24	23	22
	- Rusak	Buah	6	6	6	6
<b>5</b>	Kondisi Bendung Semi Permanen					
	- Baik	Buah	1	1	1	1
	- Sedang	Buah	-	-	-	-
	- Rusak	Buah	1	1	1	1
<b>6</b>	Kondisi Saluran Irigasi Primer					
	- Baik	M	25.057,0 9	28.154,1 3	28.154,1 3	30.803,1 3
	- Sedang	M	17.047,4 8	13.950,4 4	13.950,4 4	11.301,4 4
	- Rusak	M	-	-	-	-
<b>5</b>	Kondisi Saluran Irigasi Sekunder					
	- Baik	M	69.122,8 2	70.229,1 2	74.697,3 2	77.065,3 2
	- Sedang	M	29.581,4 7	28.475,1 7	24.842,4 7	22.474,4 7
	- Rusak	M	4.036,71	4.036,71	3.201,21	3.201,21
<b>6</b>	Kondisi Saluran Irigasi Tersier					
	- Baik	M	23.284,9 3	23.284,9 3	26.715,7 3	26.715,7 3
	- Sedang	M	11.341,1 1	11.341,1 1	9.207,81	9.207,81
	- Rusak	M	7.874,81	7.874,81	6.577,31	6.577,31
<b>7</b>	Luas Irigasi Kabupaten	Ha	12.853	12.853	12.853	12.853
	- Baik	Ha	7.779,92	8.141,09	8.673,20	9.040,80
	- Baik	%	60,53	63,34	67,48	70,34

Sumber: Dinas PU Kabupaten Tapanuli Tengah

### c. Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa setiap daerah harus telah menyesuaikan RTRW terhadap undang-undang tersebut. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tujuan penataan ruang Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2013-2033 adalah untuk mewujudkan kabupaten Tapanuli Tengah sebagai salah satu pusat perdagangan, jasa, perikanan, industri, dan pariwisata di kawasan barat Sumatera Utara.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Untuk mencapai tujuan penataan ruang maka kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah:

1. Untuk mencapai pemanfaatan potensi sumber daya alam secara tepat guna yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan, maka dilakukan strategi sebagai berikut:
  - a. Melestarikan areal pertanian lahan basah yang sudah ada melalui upaya intensifikasi dengan di dukung jaringan irigasi yang mantap.
  - b. Mempertahankan kawasan hutan dan areal lindung lainnya dalam rangka penyangga sumber daya air, penyaring polusi udara, keanekaragaman hayati dan penangkal bencana untuk daerah bawahannya.
  - c. Menetapkan jenis komoditi pertanian dan perkebunan sesuai dengan karakteristik alam dan lingkungan melalui zonasi komunitas.
  - d. Pembangunan mini hidro pada aliran sungai yang berpotensi dan pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga angin
  - e. Menetapkan, memanfaatkan, dan mengendalikan kawasan penambangan galian C.
2. Untuk melakukan pengembangan kegiatan sosial ekonomi pada kawasan perkotaan yang dikembangkan melalui prinsip optimalisasi pemanfaatan lahan, maka dilakukan strategi sebagai berikut :
  - a. Menetapkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan bagi kegiatan ekonomi masyarakat
  - b. Mempercepat tersusunnya rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan.
  - c. Menyediakan prasarana dan sarana dasar perkotaan yang sesuai dengan kebutuhan pada waktu yang tepat.
3. Untuk melakukan penyediaan insfrastruktur untuk mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, maka dilakukan strategi sebagai berikut :
  - a. Jaringan Transportasi

- 1) Menyediakan jaringan transportasi darat yang menunjang pengembangan daerah dengan:
    - a) Merencanakan jaringan jalan baru, meningkatkan kapasitas pelayanan jalan yang ada dan menetapkan terminal angkutan penumpang dan barang serta daerah tempat istirahat (*rest area*) pada jaringan jalan arteri atau kolektor primer.
    - b) Merencanakan jalur kereta api yang baru, meningkatkan kapasitas pelayanan kereta yang ada, pembangunan dan peningkatkan stasiun angkutan penumpang dan barang.
  - 2) Mengembangkan transportasi udara dengan mengembangkan dan memelihara bandara perintis di Kecamatan Pinangsori.
  - 3) Mengembangkan jaringan air baku untuk kegiatan domestik, industri dan irigasi untuk pertanian dalam jumlah yang cukup dan berkualitas.
  - 4) Mengembangkan jaringan listrik melalui pembangunan pembangkit listrik mini hidro, energi angin, energi bio massa dan sumber energi listrik lainnya yang berkapasitas besar serta mengembangkan sistem jaringan listrik yang efektif melalui pengembangan jaringan kluster dan interkoneksi.
  - 5) Mengembangkan jaringan telekomunikasi guna mempercepat arus informasi yang mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.
  - 6) Mempersiapkan jaringan gas sebagai sumber energi baru dalam rangka menunjang kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
4. Pengembangan kawasan-kawasan strategis dalam rangka pemerataan pembangunan, antara lain:
- a. Mengembangkan stasiun agropolitan guna mendukung daerah pegunungan
  - b. Mengembangkan kawasan pariwisata guna mendukung pembangunan di daerah.
  - c. Mengembangkan kawasan industri Kecamatan Tapian Nauli, Sarudik, dan Barus guna mendukung pembangunan agroindustri
  - d. Mengembangkan Ibukota Kabupaten di Pandan sebagai pusat pemerintahan.
  - e. Menetapkan PKL, PPK, dan PPL.

Struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai.

Dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten dan perletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten juga memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi.

Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 tahun 2007 disebutkan bahwa rencana struktur ruang meliputi rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana. Sesuai dengan Undang-undang tersebut, maka Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah direncanakan meliputi rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana.

Pusat permukiman tersebut mempunyai fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi komoditas/jasa dan tumbuh secara berjenjang/berhierarki sesuai dengan fungsi dan perannya, baik sebagai pusat pengembangan maupun pusat kegiatan.

Rencana sistem jaringan yang dimaksud terdiri dari rencana sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya, sistem jaringan prasarana dan sarana lainnya seperti sistem jaringan persampahan, penyediaan air minum, drainase, dan air limbah.

Rencana sistem perkotaan di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan simpul pelayanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, yang terdiri atas:

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- c. Pusat Kegiatan Lingkungan (PPL)

### **1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan dengan kriteria:

1. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri, Perdagangan dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Berdasarkan hasil analisis pusat pelayanan kabupaten, kecamatan yang merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah:

- a. Barus
- b. Pandan

Besaran Potensi Lokasi PKL di dua daerah sangat baik, mudah dan menguntungkan di karenakan Pandan merupakan Pusat Ibukota Kabupaten dan Kecamatan Barus banyak di keliingi oleh Destinasi wisata dan Transportasi masih mudah terjangkau.



## 2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Penetapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Tapanuli Tengah ditetapkan berdasarkan pertimbangan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan, kemudahan aksesibilitas dan dukungan sarana dan prasarana yang ada. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah menunjukkan ciri-ciri perkotaan adalah Ibukota kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

### 2.1.3.1.3. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan Pembangunan Kantor Induk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahap I dengan nilai pagu sebesar Rp. 30.350.000.000,00, dimana pada pembangunan tahap I ini meliputi pembangunan pondasi dan struktur. Adapun Pembangunan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Tapanuli Tengah. Untuk Pembangunan Kantor Induk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahap II akan Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019, dimana Program dan Kegiatan Pembangunan Gedung Pemerintah menjadi kewenangan Dinas PUPR.

**Tabel 2.23**  
**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2021**

No.	Indikator	2018	2019	2020	2021
1.	Rumah layak huni (%)	21,28	21,83	21,14	21,2
2.	Lingkungan permukiman kumuh (%)	0,023	0,023	0,023	-
3.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	60,15	61,44	67,24	-
4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	18,21	18,51	49,67	-

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Tengah

Pada tahun 2017 jumlah rumah tangga pengguna air bersih berjumlah 47.708 rumah tangga. Pada tahun 2018 jumlah rumah tangga pengguna air bersih mengalami peningkatan menjadi 47.783 rumah tangga. Pada Tahun 2019 jumlah rumah tangga pengguna air bersih meningkat menjadi 48.813 rumah tangga. Pada Tahun 2020 jumlah rumah tangga pengguna air bersih meningkat menjadi 49.793 rumah tangga.

#### 2.1.3.1.4. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

##### a. Satuan Polisi Pamong Praja

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan **Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** yaitu Kegiatan operasional kasih sayang. Kegiatan operasional kasih sayang dilakukan secara rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menjangkau pelajar yang berkeliaran pada jam sekolah. Pelajar yang terjaring akan diberi pembinaan khusus dan sekolah-sekolah yang terkait akan disarankan supaya lebih meningkatkan kedisiplinan. dengan adanya kegiatan operasi kasih sayang diharapkan pelajar yang berkeliaran pada jam sekolah dapat diminimalkan. operasi kasih sayang ini juga dapat mencegah tindak kriminal seperti tawuran pelajar, pelajar yang menggunakan narkoba dan main di Warung Internet (Warnet).

**Tabel 2.24**  
**Perkembangan Kantrantibnas dan Pencegahan**  
**Tindak Kriminal Tahun 2018 - 2021**

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN			
			2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	Orang	357	366	347	365
2	Jumlah Linmas	Orang	2.076	2.076	2.076	2.076

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah

**Tabel 2.25**  
**Perkembangan Penertiban di Kabupaten**  
**Tapanuli Tengah Tahun 2018 - 2021**

No	Operasi Penertiban	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Peningkatan disiplin PNS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Penertiban IMB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Operasional Kasih	100	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100

4	Sayang Pengaman Objek Vital Penertiban PSK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	dan Sarang Prostitusi	100	100	100	973	973	100	973	973	100	100	100	100
6	Penegakan Perda	100	95	95	100	95	95	100	95	95	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah

**Tabel 2.26**  
**Data Hasil Penindakan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Tahun 2021**

NO	NAMA OPERASI	JUMLAH	SATUAN	KET.
1	Operasi Penutupan Sarang Prostitusi	36	Tempat	-
2	Operasi Pedagang Kaki Lima	60	Orang	-
3	Operasi Wanita Rawan Sosial	96	Orang	-
4	Operasi Hewan berkaki empat	-	Ekor	Setiap Satu Bulan Sekali Dilaksanakan Penertiban Hewan Berkaki Empat
5	Operasi Kasih Sayang	30	Orang (Anak Usia Sekolah)	Penertiban Anak Usia Sekolah Pada Jam Belajar (malam) sekaligus Himbauan Terkait Covid-19

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah

#### b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Keluaran (*output*) kegiatan pada Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah terlaksananya koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, terlaksananya kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana, terlaksananya kegiatan pembekalan keterampilan sederhana bagi masyarakat agar survive dari bencana yang diikuti oleh 120 orang peserta dan terlaksananya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

**Tabel 2.27**  
**Kejadian Bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2021**

NO.	TANGGAL	LOKASI	KORBAN JIWA	KETERANGAN
<b>A. BENCANA BANJIR</b>				
1	17 Mei 2021	<b>1. Kecamatan Manduamas</b>		
		1. Kelurahan P.O Hurlang	Tidak ada	Sebanyak 60 KK rumah penduduk terendam banjir dan arus lalu lintas tidak bisa dilalui
		2. Desa Binjohara	Tidak ada	Sebanyak 20 KK rumah penduduk terendam banjir
		<b>2. Kecamatan Sirandorung</b>	Tidak ada	Sungai meluap yang menyebabkan jalan lintas kecamatan Sirandorung tidak bisa dilalui kendaraan
2	28 September 2021	<b>Kecamatan Sarudik</b>		
		Kelurahan Pasir Bidang	Tidak ada	Bencana banjir terjadi karena angin kencang disertai hujan deras dan mengakibatkan banjir di Wilayah Sarudik
3	16 Nopember 2021	<b>Kecamatan Barus</b>		
		Desa Bukit Hasang	Tidak ada	Sebanyak 7 KK Rumah Penduduk terendam Banjir.
4	16 Desember 2021	<b>Kecamatan Sukabangun</b>		
		Desa Pulo Pakkat II	Tidak ada	Sebanyak 120 KK Rumah Penduduk terendam Banjir.
5	18 Desember 2021	<b>Kecamatan Lumut</b>		
		Desa Lumut Maju	Tidak ada	Sebanyak 20 KK Rumah Penduduk terendam

NO.	TANGGAL	LOKASI	KORBAN JIWA	KETERANGAN
				Banjir.
<b>B. BENCANA LONGSOR</b>				
1	06 April 2021	<b>Kecamatan Pasaribu Tobing</b>		
		Dusun IV Desa Simargarap	Tidak ada	Intensitas Curah Hujan Yang Tinggi menyebabkan bongkahan tanah longsor menutup badan jalan
2	07 April 2021	<b>1. Kecamatan Andam Dewi</b>		
		Desa Sijungkang	Tidak ada	Intensitas Curah Hujan Yang Tinggi menyebabkan pengikisan tanah dari sungai sehingga bongkahan tanah longsor menutup badan jalan
		<b>2. Kecamatan Sitahuis</b>		
		Desa Naga Timbul	Tidak ada	1 orang penduduk mengalami luka ringan
				1 Unit rumah penduduk rusak ringan
3	17 Mei 2021	<b>1. Kecamatan Manduams</b>		
		Desa Saragih	Tidak ada	Badan jalan tertutup material longsor sepanjang 15 meter
		<b>2. Kecamatan Kolang</b>		
		Kelurahan P.O Hurlang	Tidak ada	Ambruknya Tembok Penahan sepanjang 30 meter
4	04 Juni 2021	<b>Kecamatan Tukka</b>		
		Desa Sigiring-giring	Tidak ada	Badan jalan ditutupi material longsor dan sementara aktivitas lalu lintas tidak bisa dilewati oleh roda 2 dan roda 4
5	29 Juni 2021	<b>Kecamatan Tapian Nauli</b>		
		Desa Sibura-Bura	Tidak ada	1 Unit rumah warga rusak berat

NO.	TANGGAL	LOKASI	KORBAN JIWA	KETERANGAN
6	09 Agustus 2021	<b>Kecamatan Andam Dewi</b>		
		Desa Sijungkang	Tidak ada	Longsor titik pertama sepanjang 25meter dan titik kedua sepanjang 30 meter serta arus lalu lintas terhenti sementara
7	17 Agustus 2021	<b>1. Kecamatan Sukabangun</b>		
		Jalan Sikkam Lingkungan IX	Tidak ada	Badan jalan tertutup material longsor sepanjang 45 meter
		<b>2. Kecamatan Lumut</b>		
		Lingkungan VIII Garingging	Tidak ada	Arus lalu lintas tidak bisa dialui kendaraan roda 6
8	28 September 2021	<b>Kecamatan Pinangsori</b>		
		Lingkungan II	Tidak ada	1 Unit rumah rusak ringan dan 1 unit rumah rusak berat
9	08 Nopember 2021	<b>Kecamatan Sarudik</b>		
		Lingkungan V	Tidak ada	1 Unit rumah penduduk rusak ringan
10	09 Nopember 2021	<b>Kecamatan Tapian Nauli</b>		
		Mela 1	Tidak ada	3 unit rumah warga rusak berat
11	16 Desember 2021	<b>Kecamatan Kolang</b>		
		Desa Mekarti Nauli	Tidak ada	Arus lalu lintas terhenti untuk sementara untuk roda 4
12	18 Desember 2021	<b>1. Kecamatan Sitahuis</b>		
		Desa Rampah	Tidak ada	3 Unit rumah bagian dapur dan kamar mandi rusak berat

NO.	TANGGAL	LOKASI	KORBAN JIWA	KETERANGAN
		<b>2. Kecamatan Badiri</b>		
		Desa pagaran Honas	Tidak ada	Badan jalan ambblas sepanjang 50meter dengan ketinggian ± 100cm dan jalan tidak bisa dilalui oleh roda 4, di titik kedua mengakibatkan badan jalan ambblas sepanjang 50meter dengan ketinggian ± 150cm namun masih bisa dilalui roda 2 dan roda 4
<b>C. BENCANA BANJIR DAN LONGSOR</b>				
1	09 Januari 2021	<b>Kecamatan Pasaribu Tobing</b>		
		Dusun III Desa Sipakpahi	Tidak ada	Badan Jalan ambruk sepanjang 150 m, Lebar 9 m, dan Tinggi 3 m. Badan Jalan ambruk sepanjang 20 m, Lebar 4 m, dan Tinggi 8 m. 1 Unit rumah terancam longsor
<b>D. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN</b>				
1	11 Februari 2021	Dusun I Kecamatan Badiri	Tidak ada	Luas lahan yang terbakar ± 1 Ha
2	12 Februari 2021	Desa Pardamean Kecamatan Sukabangun	Tidak ada	Luas lahan yang terbakar ± 1 Ha
3	13 Februari 2021	1. Desa Lumut Maju Kecamatan Lumut	Tidak ada	Luas lahan yang terbakar ± 1,5 Ha
		2. Jln. Arion Belakang Gardu	Tidak ada	Luas lahan yang terbakar ± 1 Ha

NO.	TANGGAL	LOKASI		KORBAN JIWA	KETERANGAN
			Kecamatan Pandan		
4	15 Februari 2021		Jln. PLTA Kecamatan Pandan	Tidak ada	Luas lahan yang terbakar ± ½ Ha
5	17 Februari 2021	1.	Jln. Tukka Belakang STM Karya Tua Kecamatan Pandan	Tidak ada	Luas lahan yang terbakar ± 3 Ha
		2.	Desa Sipakpahi Kecamatan Kolang	Tidak ada	Luas lahan yang terbakar ± 1,5 Ha
6	18 Februari 2021	1.	Lingkungan III Desa Gunung Kelambu Kecamatan Badiri	Tidak ada	Luas lahan yang terbakar ± 1,5 Ha
		2.	Desa Lubuk Ampolu Kecamatan Badiri	Tidak ada	Luas lahan yang terbakar ± 3 Ha
7	20 Februari 2021	Sipan Sihaporas Kecamatan Pandan		Tidak ada	Luas lahan yang terbakar ± 2 Ha
8	23 Februari 2021	Jln. Poriaha Desa Mardame Kecamatan Sitahuis		Tidak ada	Luas lahan yang terbakar ± 600 m
9	02 Maret 2021	Dusun I Desa Lumut Maju Kecamatan Lumut		Tidak ada	Luas lahan yang terbakar ± 5 Ha
10	05 Maret 2021	Dusun IX Desa Gunung Sakti Kecamatan Lumut		Tidak ada	Luas lahan yang terbakar ± 1 Ha
11	20 Februari 2021	Sipan Sihaporas Kecamatan Pandan		Tidak ada	Luas lahan yang terbakar ± 2 Ha
12	23 Februari 2021	Jln. Poriaha Desa Mardame		Tidak ada	Luas lahan yang terbakar ± 600 m



NO.	TANGGAL	LOKASI	KORBAN JIWA	KETERANGAN
		Kecamatan Sitahuis		
13	02 Maret 2021	Dusun I Desa Lumut Maju Kecamatan Lumut	Tidak ada	Luas lahan yang terbakar ± 5 Ha
14	05 Maret 2021	Dusun IX Desa Gunung Sakti Kecamatan Lumut	Tidak ada	Luas lahan yang terbakar ± 1 Ha
15	28 Juli 2021	1. Jalan Sipange Kecamatan Tukka	Tidak ada	Luas lahan yang terbakar ± 1 Ha
		2. Jalan PLTU Labuhan Angin Kecamatan Tapihan Nauli	Tidak ada	Luas lahan yang terbakar ± 1 Ha
16	23 September 2021	Lingkungan II Kecamatan Pinangsori	Tidak ada	1 unit Rumah rusak berat dan 2 unit rumah rusak ringan
17	04 Oktober 2021	Lingkungan IV Kecamatan Pandan	Tidak ada	lahan terbakar ± 4 Ha
18	06 Oktober 2021	Lingkungan VI Kecamatan Tukka	Tidak ada	Lahan terbakar ± 3 Ha
19	15 Oktober 2021	Lingkungan III Kecamatan Pandan	Tidak ada	1 Unit atap bagian dapur rusak ringan
<b>E. KEBAKARAN RUMAH</b>				
1	13 Maret 2021	Lingkungan V Kecamatan Sarudik	Tidak ada	Sebanyak 3 unit rumah penduduk hagus terbakar
2	24 April 2021	Lingkungan II kelurahan Binasi Kecamatan Sorkam Barat	Tidak ada	1 Unit dapur rumah penduduk rusak ringan
3	09 Juli 2021	Desa Siharbo Kecamatan Barus	Tidak ada	1 Unit rumah warga rusak berat
4	29 Juli 2021	Lingkungan IV Kecamatan Lumut	Tidak ada	1 Unit dapur rumah penduduk rusak ringan
5	02 Agustus 2021	Kecamatan Pinangsori	Tidak ada	1 Unit rumah rusak berat, 1 Unit sepeda motor terbakar dan 1 unit mesin

NO.	TANGGAL	LOKASI	KORBAN JIWA	KETERANGAN
				Genset terbakar
6	07 September 2021	Lingkungan 2 Kecamatan Lumut	Tidak ada	3 Unit rumah penduduk rusak ringan
<b>F. POHON TUMBANG</b>				
1	16 Maret 2021	1. Desa Simaninggir km 7 Kecamatan Sitahuis	Tidak ada	1 unit Mobil rusak parah yang tertimpa Pohon tumbang dan para penumpang mobil dalam kondisi baik
		2. Desa Sitonong Kecamatan Pinangsori	Tidak ada	Pohon tumbang mengenai jalan raya
2	22 Maret 2021	Desa Sipogu Pinangsori	Tidak ada	Pohon tumbang mengenai jalan raya
3	29 Maret 2021	Batu Lobang Desa Simaninggir KM 7 Kecamatan Sitahuis	Tidak ada	Pohon tumbang mengenai jalan raya
4	30 Maret 2021	1. Desa Parlabian Kecamatan Pasaribu Tobing	Tidak ada	3 Unit rumah penduduk rusak berat
		2. Lingkungan II Kecamatan Pandan	Tidak ada	1 Unit rumah penduduk rusak ringan
5	31 Maret 2021	1. Hajoran Indah Kecamatan Pandan	Tidak ada	2 Unit rumah penduduk rusak berat
		2. Lingkungan IV Potar Kecamatan Barus	Tidak ada	3 Unit rumah penduduk rusak berat
		3. Desa Sijungkang Kecamatan Andam Dewi	Tidak ada	1 Unit rumah penduduk rusak berat
		4. Binasi Kecamatan	Tidak ada	6 Unit rumah penduduk rusak berat

NO.	TANGGAL	LOKASI		KORBAN JIWA	KETERANGAN
			Sorkam Barat		
		5.	Desa Sihorbo Kecamatan Barus Utara	Tidak ada	2 Unit rumah penduduk rusak berat
		6.	Jln Bongsu Pasaribu, Ling. I Kecamatan Pandan	Tidak ada	1 Unit rumah penduduk rusak ringan
		7.	Lingk. VII Sihiong Kecamatan Lumut	Tidak ada	Pohon tumbang mengenai jalan raya
6	01 April 2021	1.	Lingk. IV Potar Kecamatan Barus	Tidak ada	2 Unit rumah penduduk rusak berat
		2.	Desa Kedai Gedang Kecamatan Barus	Tidak ada	1 Unit rumah penduduk rusak berat
		3.	Desa Sigambo- gambo Kecamatan Barus	Tidak ada	1 Unit rumah penduduk rusak berat
		4.	Desa Bukit Patupangan Lorong 3 Kecamatan Barus	Tidak ada	1 Unit rumah penduduk rusak berat
		5.	Desa Pasaribu Tobing Jae Kecamatan Sorkam Barat	Tidak ada	3 Unit rumah penduduk rusak ringan
		6.	Sipange Kecamatan Tukka	Tidak ada	2 Unit rumah penduduk rusak berat dan 1 Unit Gedung sekolah PAUD serta 1 Unit Gedung Kantor Lurah Sipange

NO.	TANGGAL	LOKASI		KORBAN JIWA	KETERANGAN
					rusak ringan
		7.	Kecamatan Andam Dewi	Tidak ada	4 Unit rumah penduduk, 1 Unit Sepeda Motor dan 1 Unit Kantor Camat rusak
		8.	Desa Sibintang Lorong 2 Kecamatan Sosorgadong	Tidak ada	3 Unit rumah penduduk, 2 Unit Gereja rusak dan 2 Orang Luka-luka
		9.	Kecamatan Sirandorung	Tidak ada	2 Unit rumah penduduk, 2 Unit tempat usaha dan 1 Unit Kantor Kepala Desa Rusak
7	02 April 2021	1.	Dekat Titung Jln. Oswald Siahaan Kecamatan Pandan	Tidak ada	1 Unit rumah penduduk rusak ringan
		2.	Lingkungan I dan Lingkungan II Kecamatan Pandan	Tidak ada	4 Unit rumah penduduk rusak
		3.	Sekitar Gereja Katolik Pandan Kecamatan Pandan	Tidak ada	Pohon tumbang mengenai jalan raya
		4.	Lingkungan VII Sihiong Kecamatan Lumut	Tidak ada	1 Unit rumah penduduk rusak berat
		5.	Lingkungan 8 Garingging Kecamatan Lumut	Tidak ada	Pohon tumbang mengenai jalan raya
		6.	Dusun I Desa	Tidak	1 Unit rumah penduduk

NO.	TANGGAL	LOKASI	KORBAN JIWA	KETERANGAN
		Pargaringan Kecamatan Kolang	ada	rusak berat
		7. Lingkungan IV Potar Kecamatan Kolang	Tidak ada	2 Unit rumah penduduk rusak ringan
		8. Desa Sipakpahi Kecamatan Kolang	Tidak ada	1 Unit rumah penduduk rusak ringan
		9. Dusun II Desa Pulo Pakkat Kecamatan Sukabangun	Tidak ada	1 Unit Gereja rusak berat
		10. Dusun II Desa Mombang Boru Kecamatan Sibabangun	Tidak ada	2 Unit rumah penduduk rusak ringan
		11. Desa Bungo Tanjung Lorong III Kecamatan Barus	Tidak ada	2 Unit rumah penduduk rusak berat
8	03 April 2021	1. Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat	Tidak ada	1 Unit rumah penduduk rusak ringan dan 1 Unit Mesjid
		2. Lingkungan I Kecamatan Pandan	Tidak ada	1 Unit rumah penduduk rusak ringan
9	05 April 2021	Desa Pahieme II Kecamatan Sorkam Barat	Tidak ada	1 Unit rumah penduduk rusak ringan
10	27 Mei 2021	Hajoran Indah Kecamatan Pandan	Tidak ada	1 Unit rumah dan 2 Unit gudang hanyut

NO.	TANGGAL	LOKASI		KORBAN JIWA	KETERANGAN
11	31 Mei 2021	Jalan lintas Sibolga Km 7 Kecamatan Sitahuis		Tidak ada	Pohon tumbang mengenai jalan raya
12	15 Juni 2021	1.	Dusun I Kecamatan Badiri	Tidak ada	1 Unit rumah warga rusak berat
		2.	Lingkungan I Kecamatan Pandan	Tidak ada	1 Unit rumah warga rusak ringan dan 1 Unit rumah warga rusak berat
13	29 Juni 2021	1.	Pantai Indah Kalangan Kecamatan Pandan	Tidak ada	1 Unit rumah warga rusak ringan
		2.	Jln.Laksma Manonga Napitupulu Kecamatan Pandan	Tidak ada	Pohon tumbang mengenai jalan raya
		3.	Jln.Raja Junjungan Lubis No.17 dekat SMP Al- Muslimin Pandan Kecamatan Pandan	Tidak ada	Pohon tumbang mengenai jalan raya
		4.	Lingkungan III Kecamatan Sorkam Barat	Tidak ada	1 Unit Rumah Rusak Berat
14	16 Agustus 2021	Lingkungan VI Gunung Payung Kecamatan Lumut		Tidak ada	2 Unit rumah rusak berat
15	10 Oktober 2021	1.	Jalan Bakti Apri Kecamatan Sarudik	Tidak ada	Pohon tumbang mengenai jalan raya
		2.	Lingkungan IX Sikkam	Tidak ada	Arus lalu lintas terhenti sementara akibat pohon

NO.	TANGGAL	LOKASI		KORBAN JIWA	KETERANGAN
			Kecamatan Sibabangun		tumbang membentang di badan jalan
16	03 Nopember 2021	Desa Mela 1 Kecamatan Tapian Nauli		1 Orang	Pohon tumbang mengenai jalan raya
17	28 Nopember 2021	Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat		Tidak ada	1 unit rumah Penduduk rusak berat
18	10 Desember 2021	Desa Kebun Pisang Kecamatan Badiri		Tidak ada	1 unit rumah Penduduk rusak berat
19	18 Desember 2021	1. Kelurahan Hutanabolon Kecamatan Pandan		Tidak ada	1 unit rumah rusak berat dan 1 unit rumah rusak ringan
		2. Jalan Koprul Galung Kecamatan Sarudik		Tidak ada	terjadi kerusakan pada kabel listrik dan lampu jalan
<b>F. BENCANA LAIN</b>					
1	15 Juni 2021	Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun		Tidak ada	Saluran irigasi persawahan roboh di dua tempat yaitu saluran bunga bondar sepanjang 2 meter dan saluran baba janggutan sepanjang 5meter mengakibatkan rencana tanam persawahan terbengkalai
2	24 Oktober 2021	Desa Sihaporas Kecamatan Pinangsori		1 Orang	Korban ditemukan pada pukul 09.00 Wib tanggal 24 Oktober 2021

Sumber : BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah

Pelayanan dasar yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana  
Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang ada di daerah rawan bencana yang ditargetkan sebanyak 3.000 jiwa
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Memberikan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bagi warga yang ada di daerah rawan bencana.

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Memberikan Penyelamatan dan Evakuasi kepada korban bencana yang ada di daerah rawan bencana.

#### **2.1.3.1.5. Sosial**

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial merupakan program yang bertujuan untuk pemulihan kebutuhan dasar dan hak-hak dasar masyarakat. Salah satu kegiatan dalam program ini adalah Biaya Sekretariat Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendukung dalam kelancaran program tersebut. Pada Tahun 2021 petugas pendamping PKH di 20 (duapuluh) Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 60 (enam puluh) orang, terdiri dari operator komputer sebanyak 1 (satu) orang, Koordinator kabupaten sebanyak 1 (satu) orang, pendamping Kecamatan sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang. Jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2021 sebanyak 16.853 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sedangkan Jumlah Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020 sebanyak 15.815 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2021.

Dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) atau yang disingkat dengan SDGs, Program Keluarga Harapan PKH menjadi program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Adapun tujuan Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/ atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.



### 2.1.3.1.6 Tenaga Kerja

Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah. Pencapaiannya kinerja dalam Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Nomor 166 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan program diukur melalui Tingkat Kapasitas Pelatihan, Tingkat Lembaga Pelatihan yang terakreditasi dan Peningkatan Sarana Prasarana Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS).

**Tabel 2.28**  
**Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2019 - 2021**

No	Ketenagakerjaan	Satuan	Tahun		
			2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	Jiwa	176.988	171.470	185.218
2	Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun)	Jiwa	234.654	239.854	261.202
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	75,42	71,49	70,90
4	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	Jiwa	1.010	339	7
5	Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar	Jiwa	1.249	452	252
6	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persen	80,84	75	81,13
7	Jumlah Pencari Kerja	Orang	1.249	452	252
8	Jumlah Pengangguran	Orang	11.287	12.447	13,968
9	Jumlah PHK	Orang	52	68	70
10	Jumlah TKI /PMI yang dikirim	Orang	982	339	0
11	Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Tapanuli Tengah	Orang	4	2	7
12	Upah Minimum Kabupaten	Rupiah	2.608.869	2.830.884,32	2.830.884,32
13	Upah Minimum Provinsi	Rupiah	2.303.403	2.499.423,06	2.522.609,94

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah

Angkatan kerja terdiri dari individu yang saat ini sedang bekerja dan mereka yang belum bekerja namun secara aktif mencari pekerjaan. Pada tahun 2021 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 185.218 jiwa mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 171.470 jiwa. Sementara itu, definisi populasi usia kerja mencakup individu yang berusia antara 15 dan 64 tahun. Sedangkan bila di bandingkan dengan Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 sebanyak 7.479.112 jiwa atau sebesar 93,70%.

Pada tahun 2021 Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun) di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 261.202 jiwa naik sebanyak sebesar 21.348 jiwa dibandingkan tahun 2020.

#### **2.1.3.1.7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah. Salah satu program yang dilaksanakan yaitu Program Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Kabupaten/Kota. Kasus yang ditangani pada kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota sebanyak 25 kasus.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota juga berkoordinasi dengan Pihak Kecamatan maupun dengan Pihak Kelurahan/ Kepala Desa. Dan pada tahun 2021, korban yang melapor dan diberi pelayanan sebanyak 25 orang anak korban kekerasan.

Hasil dari kegiatan ini adalah 25 kasus telah diberikan pelayanan berupa pendampingan dan dapat dirincikan sebagai berikut :

1. 2 Kasus anak sebagai pelaku;
2. 1 Kasus anak sebagai saksi;
3. 22 Kasus anak sebagai korban.

Dengan rincian :

1. 7 kasus dilakukan mediasi bersama aparat kelurahan/desa;
2. 16 kasus didampingi ke proses penegakan hukum;
3. 2 kasus anak sebagai pelaku didampingi dalam proses hukum.

#### **2.1.3.1.8. Pangan**

Data produksi tanaman pangan (padi dan palawija) merupakan salah satu indikator ketersediaan pangan nasional. Penyediaan data produksi tanaman pangan secara berkesinambungan diharapkan mampu menyediakan informasi yang akurat dan terkini bagi kebutuhan pemerintah dan masyarakat umum.

Kabupaten Tapanuli Tengah mampu berswasembada beras di mana produksi beras yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan kebutuhan daerahnya. Terlihat bahwa produksi berat di Tapanuli Tengah pada tahun 2020 sebesar 83.622 ton sedangkan kebutuhan beras hanya mencapai 47.473 ton. Selain itu, Tanaman perkebunan rakyat unggulan di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah karet, kelapa sawit, kakao, dan coklat dimana produksi yang paling tinggi adalah produksi karet yang mencapai 23.619,99 ton dengan rata-rata produksi 950,31 kg/ha/tahun.

Urusan Ketahanan Pangan dulunya dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah maka urusan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### 2.1.3.1.9. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk kepentingan pembangunan yang digunakan sebagai fasilitas umum seperti pelebaran jalan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan perubahan Sertifikat kepada Masyarakat yang tanahnya terkena pelebaran jalan sebagai perhatian Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya.

**Tabel 2.29**  
**Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2019 - 2021**

NO.	URAIAN	SATUAN	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	%	21.39	27.09	-
2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	50	50	50
3.	Penyelesaian izin lokasi	%	82.35	0	-

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tapanuli Tengah

Untuk menghindari adanya permasalahan dilapangan terhadap asset Tanah Pemerintah yang ada, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tapanuli Tengah membuat tanda patok dan plank asset Tanah Pemerintah, sehingga asset tanah Pemerintah tersebut dapat terinventarisir dengan baik. Untuk kepentingan pembangunan yang digunakan sebagai fasilitas umum seperti pelebaran jalan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan perubahan Sertifikat kepada Masyarakat yang tanahnya terkena pelebaran jalan sebagai perhatian Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya.

#### 2.1.3.1.10. Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah. Berikut disajikan data capaian kinerja urusan lingkungan hidup tahun 2019-2021. Dari data dilihat bahwa persentase penanganan sampah di Kabupaten Tapanuli Tengah masih 10% sejak 2019 sampai tahun 2021. Untuk Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal tahun 2021 masih sama dengan tahun 2020 yaitu sebesar 45,45%.

**Tabel 2.30**  
**Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup tahun 2018-2021**

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL yang diawasi	Perusahaan	11	11	11	11
2	Jumlah Seluruh Perusahaan Wajib AMDAL	Perusahaan	11	11	11	11
3	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL	Persen	100	45,45	45,45	45,45
4	Jumlah seluruh perusahaan wajib UKL/UPL	Perusahaan	78	87	97	101
5	Uraian Penjelasan Kasus Lingkungan Hidup					
	1. Pengaduan masyarakat kelurahan Sarudik tentang pembuangan limbah PT. Toba Surimi	Kasus (selesai)	√			
	2. Penambangan bahan galian C oleh PT. CIPTA DAYA PERKASA di Kecamatan Pinangsori	Kasus (selesai)	√			
	3. Peternakan babi yang menimbulkan keresahan masyarakat di Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan	Kasus (selesai)	√			
	4. Keluhan masyarakat atas sedimentasi akibat galian tanah ke kawasan permukiman masyarakat	Kasus (selesai)	√			
	5. Keberatan masyarakat terhadap bau yang ditimbulkan oleh peternakan bebek di Kecamatan Tukka	Kasus (selesai)	√			
	6. Penambangan mineral jenis batu di luar kawasan oleh PT. ANRA	Kasus (selesai)	√			
	7. Keberatan masyarakat sekitar PT. Mujur Timber karena sebaran debu hasil pengolahan	Kasus (selesai)	√			

	kayu					
	8. Perambahan mangrove oleh PT. Nauli Sawit	Kasus (selesai)	√			
	9. Longsor yang disebabkan oleh pembangunan perumahan citra hijau lestari	Kasus selesai	√			
	10. Dugaan pencemaran air laut oleh PLTU Labuan Angin oleh limbah pembakaran batubara	Kasus selesai (tidak terbukti)	√			
	11. PT. Horizon, Keberatan Masyarakat atas dugaan pencemaran dan temuan atas dokumen lingkungan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada	Kasus selesai (dokumen sudah diperbaharui)		√		
	12. PT. ASAHI, temuan atas dokumen lingkungan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada	Kasus Selesai (dokumen sudah diperbaharui)		√		
	13. PT Tobasurimi, temuan atas dokumen lingkungan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada	Kasus Selesai (dokumen sudah diperbaharui)		√		
	14. CV. Roganda, dugaan perusakan lingkungan	Kasus selesai (CV. Roganda telah memiliki dokumen perizinan)		√		
	15. PT. Mujur Timber, dugaan pencemaran lingkungan	Kasus selesai (tidak		√		

		terbukti mencemari lingkungan)				
	16. PT. KASAHI, temuan atas dokumen lingkungan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada	Kasus Selesai (dokumen sudah diperbaharui)		√		
	17. Penambangan batu di Kec. Sitahuis	Kasus selesai (kegiatan ditutup)		√		
	18. Dugaan pencemaran air terhadap pelurusan sungai oleh PT. Tri Bahtera Srikandi di Kecamatan Sibabangun	Kasus selesai			√	
	19. Dugaan pencemaran air sungai oleh PT. Tri Bahtera Srikandi	Kasus selesai			√	
	20. Keberatan masyarakat atas penutupan daerah genangan air di Kelurahan Binasi Kec. Sorkam Barat	Kasus selesai			√	
	21. Keberatan masyarakat terhadap dugaan pencemaran air yang berdampak terhadap ekosistem ikan pada lubang larangan di kecamatan Lumut	Kasus selesai				√
	22. Keresahan masyarakat terhadap tangki timbun dan permintaan tembok penahan oleh PT. Indera Angkola	Kasus selesai				√
	23. Keresahan masyarakat atas dugaan reklamasi, penebangan mangrove dan penggerusan bukit karena pembangunan perumahan Grand Tapian Nauli di Kecamatan Tapian Nauli	Proses ditangani Polres Tapteng				√

	24. Laporan masyarakat atas dugaan pencemaran air karena galian C di sungai Pinangsori di Kecamatan Pinangsori	Kasus selesai semua perusahaan pertambangan memiliki dokumen perizinan				√
--	--	--	--	--	--	---

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah

#### 2.1.3.1.11. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Keluaran (*output*) kegiatan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan adalah terlaksananya Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu kepada penduduk wajib KTP-el; Terwujudnya pendataan penduduk wajib wajib KTP-el yang akurat dan akuntabel; Terciptanya administrasi kependudukan yang baik; serta terlaksananya kegiatan KTP-el dengan baik. Pada Tahun 2020 Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam KTP-el sebanyak 210.957 orang, sementara jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el sebanyak 253.056 orang, dengan demikian persentase indicator pengurusan KTP-el sebesar 83,36 persen. Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran sebanyak 127.741 orang dari seluruh jumlah penduduk 365.344 orang, dengan demikian capaian kinerja kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk sebesar 34,96 persen, tingkat capaian cakupan kepemilikan akta lahir rendah disebabkan masih ada sebagian masyarakat yang memiliki akta lahir manual.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Kepemilikan KTP-el, Cakupan Kepemilikan Akta Lahir adalah Pelayanan Keliling Pendaftaran Pendudukan (Perekamanan KTP-el secara Mobile, Pengurusan Kartu Keluarga) dan Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil (Akta Lahir, Akta Kawin, Akta Kematian dll) di 20 Kecamatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Kurangnya kesadaran penduduk dalam pelaporan kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Perangkat SIAK dan Perangkat KTP-el di Kecamatan sebagian besar dalam kondisi kurang baik sehingga pelayanan penataan administrasi kependudukan terhambat.
- c. Minimnya sarana prasarana untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan dan jarak ibu kota kabupaten dengan kecamatan cukup jauh sehingga pelayanan administrasi kependudukan tidak berjalan dengan baik.
- d. Dengan mempertimbangkan faktor geografis, diperlukan suatu upaya untuk selalu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Solusi untuk pemecahan masalah adalah :

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana (Pembangunan Gedung Kantor, Pengadaan Mobil Pelayanan Keliling, Pengadaan Perangkat KTP-el, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor)
- b. Revolusi Pelayanan Dicapil (Urus 1 Dokumen Kependudukan dapat 3 sekaligus dokumen Kependudukan)
- c. Pelayanan Jemput Bola pengurusan Administrasi Kependudukan
- d. Pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk atau disingkat #GISA adalah sebuah gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.
- e. Go Digital dengan sarana, material dan SDM yang bekerja sangat baik, membangun Indonesia yang jauh lebih baik dalam sistem digital.
- f. Inovasi Pelayanan dengan melakukan Kerjasama dengan Stakholder Internal dan Eksternal tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Melakukan sosialisasi administrasi kependudukan ke masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui berbagai media dan sarana saluran, diantaranya melalui tatap muka langsung melalui sosialisasi kebijakan kependudukan, melalui media cetak, leaflet, pamflet, buku saku, spanduk dan lain-lain. Hal ini dilakukan secara intergratif dan berkesinambungan sehingga masyarakat semakin kenal dan dapat mengakses layanan administrasi kependudukan dengan baik.

**Tabel 2.31**  
**Perkembangan Data Kependudukan Tahun 2019- 2021**

NO	URAIAN	SAT.	TAHUN		
			2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP-el	Jiwa	210.990	210,957	220.125
2	Jumlah Penduduk Wajib KTP-el	Jiwa	251,827	253,056	260.666
3	Persentase Kepemilikan KTP-el	Persen	83,78	83,36	84.12
4	Jumlah Perekaman KTP-el	Buah	210.990	210,957	220.125
5	Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Jiwa	137.705	127,741	150.212
6	Jumlah Penduduk	Jiwa	363,823	365,344	365.606
7	Jumlah KK	KK	88.489	91,887	91.621
8	Jumlah Penduduk Laki-laki	Jiwa	183.720	183,861	184.038
9	Jumlah Penduduk Perempuan	Jiwa	180.103	181,483	181.568
10	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	37,85	34,96	41.08

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah



### 2.1.3.1.12. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan wajib bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah Salah satu program yang dilaksanakan yaitu Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan tujuan untuk Pemberdayaan Masyarakat berbasis pada modal sosial dan budaya lokal, penanggulangan masalah sosial serta budaya lokal. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa merupakan suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam membangun desa. Mengembangkan fungsi asistensi teknis dalam rangka menguatkan teknostrutur masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal; Memperkuat fungsi fasilitasi untuk meningkatkan kesadaran kritis dan prakarsa masyarakat. Mengaktualisasikan dan merevitalisasi nilai-nilai budaya lokal agar tetap mampu berfungsi sebagai acuan utama dalam pengembangan identitas diri dari setiap lembaga masyarakat dan setiap individu pada semua aspek kehidupan.

**Tabel 2.32**  
**Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan**  
**Urusan Pemerintah Daerah**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)						
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
-1	-2	-3	-6		-7		-8	
<b>TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR</b>								
<b>9</b>	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
9.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	235	235	235	235	235	235	235
9.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	10	6	6	6	6	6	6
9.3.	Jumlah LSM	26	26	26	26	26	26	
9.4.	LPM berprestasi	0	0		0		0	
9.5.	PKK aktif	7114	7125	7125	7130	7130	7140	7140
9.6.	Posyandu aktif	382	394	394	398	398	402	
9.7.	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	4	6	6	7	7	8	
9.8.	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	4	6	6	7	7	8	

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tahun 2020 ditargetkan 235 untuk Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan hal tersebut dapat dicapai dengan angka yang sama yaitu 235, seperti yang terjadi di tahun sebelumnya. Sama halnya dengan Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK yang mencapai target realisasi 6 pada Tahun 2021, dan untuk PKK Aktif juga mencapai target realisasi pada Tahun 2021 yaitu mencapai angka 7140.

#### 2.1.3.1.13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tingkat prevalensi peserta KB aktif

- a. Prevalensi peserta KB aktif
  - Jumlah Peserta Program KB Aktif tahun 2021 sebanyak 34,546 peserta pada tahun 2020 sebanyak 34,447 peserta ;
  - Jumlah Pasangan usia subur tahun 2021 sebanyak 48,130 pasangan Usia Subur tahun 2020 sebanyak 49,326 Pasangan Usia Subur;
  - Capaian kinerja sebanyak 71,77%.
- b. Rasio Petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap Desa Kelurahan
  - Jumlah Desa Kelurahan sebanyak 215 peserta;
  - PLKB/ PKB PNS Sebanyak 48 Orang PLKB/ PKB Non PNS sebanyak 218 orang pada tahun 2021. PLKB/ PKB PNS Sebanyak 80 Orang PLKB/ PKB Non PNS sebanyak 222 orang pada tahun 2020.

#### 2.1.3.1.14. Perhubungan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah. Berhubung Terminal Baru Pandan belum dioperasikan, maka kegiatan ini difokuskan kepada pengawasan dan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang mempunyai peranan dalam pengoperasian terminal. Pihak terkait tersebut antara lain Dinas PUPR, Dinas Perindag, Polisi Lalu Lintas, Organda dan lain-lain. Selain pengawasan dan koordinasi kegiatan ini juga diutamakan perawatan dan pembersihan terminal secara rutin setiap hari demi terciptanya kenyamanan dan kebersihan terminal.

**Tabel 2.33**  
**Data Perhubungan Darat di Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2017 - 2021**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Menurut Jenisnya						
	a. Perdesaan	Unit	327	327	539	571	578
	b. Truk	Unit	215	-	-	-	-

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	c. Becak Mesin	Unit	615	-	-	-	-
	d. Ojek	Unit	-	-	-	-	-
2	Jumlah Pengusaha Angkutan Umum	Usaha	8	8	8	8	8
3	Penerbitan Izin						
	a. Trayek Perdesaan	Buah	8	8	8	8	8
	b. Usaha Angkutan	Buah	6	6	6	6	6
4	Jumlah Terminal	Unit	1	1	1	1	1
5	Jumlah KIR/STUK Angkutan Umum	Unit	1.174	-	-	-	-
	a. Mobil Penumpang	Unit	575	-	-	-	-
	b. Bis	Unit	4	-	-	-	-
	c. Mobil Barang	Unit	561	-	-	-	-
	d. Kereta Gandeng	Unit	-	-	-	-	-
	e. Kereta Tempelan	Unit	6	-	-	-	-
6	Lama Pengujian KIR/STUK						
	a. Mobil Penumpang	Hari	-	-	-	-	-
	b. Bis	Hari	-	-	-	-	-
	c. Mobil Barang	Hari	-	-	-	-	-
	d. Kereta Gandeng	Hari	-	-	-	-	-
	e. Kereta Tempelan	Hari	-	-	-	-	-
7	Fasilitas Pendukung Keselamatan Pengujian	Unit & Manual	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah

#### 2.1.3.1.15. Komunikasi dan Informatika

Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dilaksanakan pada tahun 2021 dengan menginventaris domain (website Pemkab Tapanuli Tengah) beserta sub domain yang telah ada dan yang dibuat baru. Sebanyak 7 sub domain ditambah 1 aplikasi berbasis smartphone dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021, yaitu <https://jdih.tapteng.go.id> dikelola oleh Bagian Hukum dan Ortala Setdakab Tapanuli Tengah, <https://jdih-dprd.tapteng.go.id> dikelola oleh DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, <https://disperpusip.tapteng.go.id> dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tapanuli Tengah, <https://literasidigital.tapteng.go.id> dikelola oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah, <https://dppa.tapteng.go.id> (dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah, <https://satudata.tapteng.go.id> dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah, <https://tpakd.tapteng.go.id> dikelola oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tapanuli Tengah bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain itu juga dikembangkan aplikasi terpadu berbasis telepon selular yang bisa diunduh melalui *Play Store* yaitu “Klik Tapteng” yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah juga memfasilitasi pembuatan website kecamatan (20 kecamatan) yang dibuat desain websitenya dan tersedia secara offline. Website tersebut akan ditayangkan pada tahun 2022 setelah melakukan pelatihan pada operator kecamatan dan dalam melaksanakan updating tetap dibantu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah hingga mandiri.

#### 2.1.3.1.16. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah koperasi di Kabupaten Tapanuli Tengah sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan. Jumlah koperasi tahun 2021 berjumlah 391 unit koperasi, meningkat dari tahun 2020 yang berjumlah 379 unit koperasi sesuai data dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Tapanuli Tengah. Angka tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.34**  
**Jumlah Koperasi di Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2018 - 2021**

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi			
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Manduamas	16	17	15	15
2.	Sirandorung	15	15	15	15
3.	Andam Dewi	11	12	12	12
4.	Barus	25	25	26	26
5.	Barus Utara	2	2	2	2
6.	Sosorgadong	8	8	9	9
7.	Pasaribu Tobing	3	3	4	4
8.	Sorkam Barat	20	20	18	19
9.	Sorkam	12	13	16	16
10.	Kolang	23	23	24	25
11.	Tapian Nauli	24	25	25	25
12.	Sitahuis	6	6	6	6
13.	Pandan	99	102	103	106
14.	Tukka	11	11	11	12

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi			
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
15.	Badiri	21	22	23	24
16.	Pinangsori	14	14	14	18
17.	Lumut	8	8	9	9
18.	Suka Bangun	3	3	3	3
19.	Sibabangun	15	15	17	17
20	Sarudik	23	23	27	28
Jumlah		359	368	379	391

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kabupaten Tapanuli Tengah

**Tabel 2.35**  
**Jumlah UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019 – 2021**

No	Kecamatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Jumlah UMKM	Kegiatan	Jumlah UMKM	Kegiatan	Jumlah UMKM	Kegiatan
1	Manduamas	1.736	Aneka Jasa	1.736	Aneka Jasa	848	Aneka Jasa
2	Sirandorung	1.159	Aneka Jasa	1.159	Aneka Jasa	1.069	Aneka Jasa
3	AndamDewi	722	Aneka Jasa	722	Aneka Jasa	165	Aneka Jasa
4	Barus	2.448	Aneka Jasa	2.448	Aneka Jasa	2.466	Aneka Jasa
5	Barus Utara	328	Aneka Jasa	328	Aneka Jasa	439	Aneka Jasa
6	Sosorgadong	881	Aneka Jasa	881	Aneka Jasa	2.204	Aneka Jasa
7	Pasaribu Tobing	938	Aneka Jasa	938	Aneka Jasa	554	Aneka Jasa
8	Sorkam Barat	1.118	Aneka Jasa	1.118	Aneka Jasa	1.186	Aneka Jasa
9	Sorkam	1.395	Aneka Jasa	1.395	Aneka Jasa	2.767	Aneka Jasa
10	Kolang	1.361	Aneka Jasa	1.361	Aneka Jasa	386	Aneka Jasa
11	TapianNauli	1.377	Aneka Jasa	1.377	Aneka Jasa	2.002	Aneka Jasa
12	Sitahuis	375	Aneka Jasa	375	Aneka Jasa	382	Aneka Jasa
13	Pandan	3.897	Aneka Jasa	3.997	Aneka Jasa	5.790	Aneka Jasa
14	Tukka	802	Aneka Jasa	802	Aneka Jasa	1.086	Aneka Jasa
15	Badiri	1.366	Aneka Jasa	1.366	Aneka Jasa	3.042	Aneka Jasa
16	Pinangsori	1.925	Aneka Jasa	1.925	Aneka Jasa	2.691	Aneka Jasa
17	Lumut	606	Aneka Jasa	787	Aneka Jasa	1.685	Aneka Jasa
18	SukaBangun	431	Aneka Jasa	431	Aneka Jasa	158	Aneka Jasa

19	Sibabangun	1.088	Aneka Jasa	1.088	Aneka Jasa	1.322	Aneka Jasa
20	Sarudik	1.232	Aneka Jasa	1.432	Aneka Jasa	1.726	Aneka Jasa
	Jumlah	<b>25.165</b>		<b>25.666</b>		<b>31.968</b>	

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kabupaten Tapanuli Tengah

Inovasi daerah ini merupakan semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi jenis, prosedur, dan metoda pelayanan publik. Kabupaten Tapanuli Tengah berkomitmen melakukan inovasi di bidang pelayanan masyarakat serta memudahkan bagi pelaku UMKM dan pelaku ekonomi di bidang komoditas unggulan. pelayanan publik, UMKM menjadi salah satu bidang yang untuk dilakukannya inovasi terutama UMKM yang mengembangkan produk unggulan daerah. Inovasi yang dilakukan dengan mengikuti Ekspo produk unggulan daerah dengan penyelenggaraan pameran tingkat lokal maupun keikutsertaan dalam ajang pameran tingkat regional (provinsi Sumatera Utara) dan nasional. Inovasi di bidang UMKM lainnya adalah dengan mengembangkan sektor ekonomi kreatif melalui pengembangan kreasi intelektual (knowledge based economy) seperti barang seni atau kerajinan, fashion, fotografi, periklanan, film pendek, dan sebagainya. Serta pengembangan UMKM berbasis teknologi digital melalui pelatihan bisnis online agar produk UMKM dapat dikenal banyak kalangan

#### 2.1.3.1.17. Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tapanuli Tengah. Salah satu program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja penanaman modal yaitu Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah yang Keluaran (output)nya yaitu melalui koordinasi pengendalian dan pembinaan penanaman modal terhadap badan usaha yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dan pendataan perizinan dalam rangka pengawasan peruntukan dan operasional izin usaha. Diharapkan melalui kegiatan ini tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan/ regulasi lebih baik sehingga mendorong peningkatan iklim investasi di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjamin kepastian hukum, keamanan dan kenyamanan dalam berusaha.

Target Investasi yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan jumlah investor berskala nasional (PMD/PMN) ada 1 (satu) pada tahun 2021 dan jumlah nilai investasi berskala nasional (PMD/PMN) 456.000.000.000 pada 2021, kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN sebesar 676.099.000.000 pada tahun 2021 serta target lamanya proses perizinan selama 8 jam.

**Tabel 2.36**  
**Kegiatan Pendaftaran Ijin Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2021**

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Tanda Daftar Industri (TDI)	12	4	4
2	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	170	140	-
3	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	174	140	-
4	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.022	779	914
5	Ijin Gangguan (HO)	-	-	-
6	Ijin Trayek	-	-	-
7	Ijin Usaha Angkutan (SIUA)	1	3	-
8	Ijin Usaha JasaKonstruksi (IUJK)	21	10	0
9	Ijin Minuman Beralkohol	-	-	-
10	Ijin Persetujuan Prinsip	-	-	-
11	Ijin Usaha Industri	-	1	-
12	Ijin Reklame	9	8	5
13	Tanda Daftar Gudang (TDG)	3	3	0
14	Izin Apotek	2	-	6
15	Izin Toko Obat	13	13	10
16	Izin Usaha Pangkalan Gas Elpiji	16	12	22
17	Izin Lingkungan	9	7	4
18	Izin Limbah B3	6	1	-
19	Izin Klinik	3	4	4
20	Izin PAUD	20	43	37
22	Izin SMP	-	4	4
23	Izin Lokasi	1	-	0
24	Izin Usaha Perkebunan	1	1	-
25	Izin Usaha Perikanan	-	-	-
26	Izin Praktek Bidan	68	78	77
27	Izin Kerja Fisioterapis	4	4	1
28	Izin Kerja Bidan	130	48	-

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
29	Izin Promosi Kesehatan	-	-	-
30	Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)	155	134	19
31	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	-	-	-
31	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK/SIKTTK)	28	26	15
32	Izin Kerja Kesehatan Masyarakat	6	-	-
33	Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan	1	-	-
34	Izin Kerja Penyuluh Kesehatan	1	-	0
35	Izin Kursus	1	-	0
36	Izin Praktek Dokter	126	86	81
37	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	1	15	15
38	Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja	-	-	-
39	Izin Lembaga Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-
40	Izin Praktek Perawat	15	18	10
41	Izin Kerja Perawat	63	9	35
42	Izin Pusat Kegiatan Belajar Mengajar	-	-	-
43	Izin Praktek Apoteker	3	3	20
44	Izin Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan	-	3	-
45	Izin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	3	5	-
46	Izin Operasional Yayasan	-	-	-
47	Tanda Daftar Yayasan	-	-	-
48	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	1	6	9
49	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	4	-	-
50	Izin Kerja Analis Kesehatan	11	1	1
51	Izin Praktek Analis Kesehatan	-	2	2
52	Izin Sertifikat Laik Higienis	-	2	-
53	Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)	3	1	0
54	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	-	-	3
55	Surat Terdaftar Penyehatan Tradisional	-	-	-



No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
56	Izin Operasional Puskesmas	14	-	2
57	Izin TK (Taman Kanak-Kanak)	3	7	-
58	Izin SD (Sekolah Dasar)	2	4	4
59	Izin Kerja Radiografer	4	-	-
60	Izin Kerja Refraksionis Optisien (RO)	1	2	-
61	Izin Kerja Perekam Medis	3	1	-
62	Tanda Daftar Budidaya Tanaman Perkebunan (TDB-P)	4	1	0
63	Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUP)	1	2	6
64	Tanda Daftar Usaha Perikanan	1	-	0
65	Izin Operasional Unit Haemodialisa	-	1	0
66	Izin Pembukaan Kantor Cabang	-	1	0
67	Izin Penggalian dan Penanaman Kabel Fiber Optik	-	2	0
68	Izin Usaha Peternakan	-	4	1
69	Izin Praktek Penata Anestesi	-	1	0
70	Izin PIRT	-	3	9
71	Surat Keterangan Penelitian	-	1	9
72	Izin Dokter Hewan	-	-	1
73	Izin Usaha Simpan Pinjam	-	-	1
	<b>Jumlah</b>	<b>2.160</b>	<b>1.644</b>	<b>1.331</b>

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah

#### 2.1.3.1.18. Kepemudaan dan Olah Raga

Realisasi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut yang mampu mendukung keberhasilan pembangunan selama tahun 2017 – 2021 dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 2.37**  
**Perkembangan Kepemudaan, Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2017 - 2021**

No	Uraian	Jumlah				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Organisasi Pemuda	5	40	40	40	40
2	Jumlah Organisasi Olah raga	12	12	12	12	12

No	Uraian	Jumlah				
		2017	2018	2019	2020	2021
3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	3	3	4	3	3
4	Jumlah Kegiatan Olah raga	12	12	6	3	4
5	Gelanggang / Balai Remaja (Selain Milik Swasta)	1	1	1	1	1
6	Lapangan Olahraga	23	26	26	26	26

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah

#### 2.1.3.1.19. Perpustakaan

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki sebuah perpustakaan daerah yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain memiliki buku-buku yang tersedia di gedung perpustakaan, maka untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tapanuli Tengah juga memiliki satu unit Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) yang digunakan untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari lokasi perpustakaan. Adapun buku koleksi dan sarana yang tersedia di Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) dan gedung perpustakaan dapat dirinci sebagai berikut :

##### 1. Mobil Perpustakaan Keliling (MPK), memiliki:

- Buku bacaan : 800 eksemplar
- Mesin genset : 1 Unit
- Laptop : 1 Unit
- TV LED : 1 Unit
- Modem : 1 Unit
- Proyektor : 1 Unit
- Sepeda Motor/Box MPK : 1 Unit

##### 2. Perpustakaan Daerah, memiliki :

- Buku bacaan :
  - Koleksi tahun 2017 : 9,181 eksemplar
  - Pengadaan tahun 2018 : 2,259 eksemplar
  - Pengadaan tahun 2019 : 2,520 eksemplar
  - Pengadaan Tahun 2020 : -
  - Pengadaan Tahun 2021 : -
  - Hibah Bank Indonesia : 300 eksemplar
  - Hibah Perpustakaan RI Tahun 2018 : 572 eksemplar
  - Hibah Prov. Sumatera Utara : 264 eksemplar
  - Hibah Perpustakaan RI Tahun 2021 : 300 eksemplar
  - TOTAL : 16.196 eksemplar
- Buku bacaan digital sebanyak 179 judul atau 447 eksemplar yang bisa diakses dari jaringan (daring).

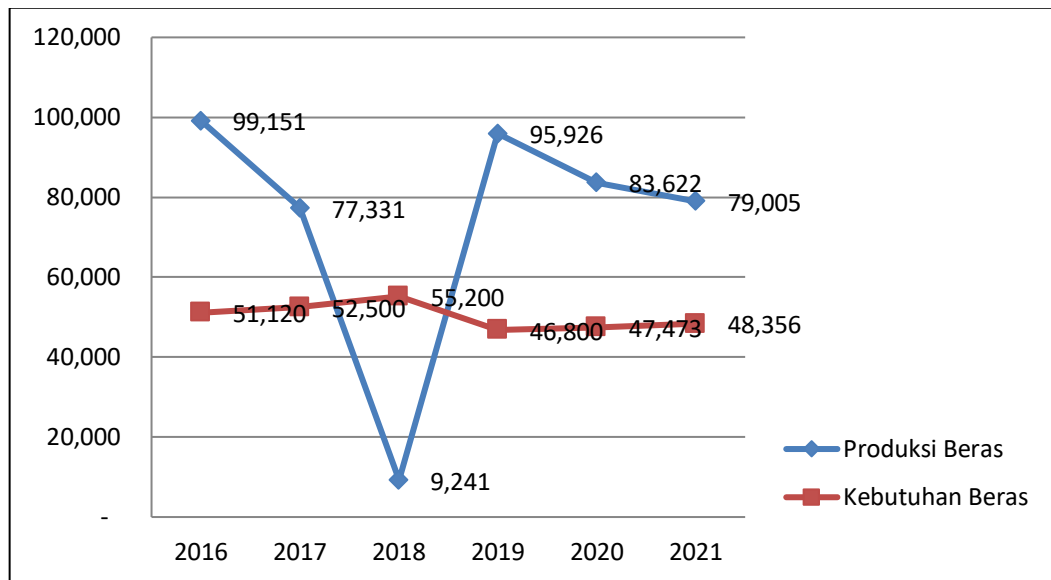
- Fasilitas internet yang menyediakan 4 unit komputer.
- Automasi Layanan Perpustakaan Inlislite 6 Unit Dari Kegiatan Dana DAK.

### 2.1.3.2. Fokus Urusan Pilihan

#### 2.1.3.2.1. Pertanian

Perkembangan kebutuhan beras dan produksi beras dapat dilihat pada Grafik di bawah, terlihat pada grafik tersebut bahwa selama tahun 2016-2021 Kabupaten Tapanuli Tengah mampu berswasembada beras. Pada tahun 2021 jumlah kebutuhan beras sebesar 48.356 Ton dan Produksi beras sebesar 79.005 Ton.

**Grafik 2.2**  
**Grafik Perimbangan Produksi dan Kebutuhan Beras**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 - 2021**



\*) Angka sementara menunggu rilis produktifitas dari BPS  
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah

Terjadinya penurunan produksi beras pada tahun 2020 disebabkan karena kemarau di awal tahun yang menyebabkan pergeseran tanam yang seharusnya periode Oktober-Maret Tahun 2019-2020 mundur hingga ke awal Mei, selanjutnya hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran panen (*carry over*) ke tahun 2021.

Data perkembangan populasi ternak di Kabupaten Tapanuli Tengah dari beberapa komoditi terus meningkat, diantaranya komoditi sapi, kerbau, domba serta itik. Namun untuk komoditi ayam kampung jumlahnya menurun dari 435.689 ekor di tahun 2020 menjadi 412.674 ekor pada tahun 2021. Demikian juga untuk komoditi ternak ayam petelur dari 4.000 ekor pada tahun 2020 menurun menjadi 2.500 ekor pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya data perkembangan populasi ternak di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.38**  
**Perkembangan Populasi Ternak**  
**di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 - 2021**

No.	Komoditi	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sapi	2.115	2.355	2.433	2.504	2.736	2.958
2.	Kerbau	9.311	10.242	10.444	10.648	10.927	11.638
3.	Kambing	15.410	15.872	16.188	16.257	14.488	13.358
4.	Domba	387	399	407	425	512	977
5.	Babi	71.870	74.026	75.705	69.525	30.316	9.689
6	Ayam Kampung	546.485	562.880	574.137	580.125	435.689	412.674
7.	Ayam Petelur	350	0	0	0	4.000	2.500
8.	Ayam Pedaging	17.151	0	0	50.000	224.400	292.000
9.	Itik Unggas	17.286	17.805	18.161	18.638	14.043	15.612
10.	Itik Manila	11.145	11.479	11.708	11.890	9.419	18.177
11.	Burung Puyuh	5.387	5.356	5.463	0	0	0
12	Merpati	2.092	2.387	2.434	2.030	1.928	2.000
13	Kelinci	410	604	616	457	343	104

*Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah*

Beberapa tanaman perkebunan rakyat unggulan di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah karet, kelapa, kelapa sawit, dan kakao. Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan komoditas unggulan di Kabupaten Tapanuli Tengah antara lain produksi karet tahun 2021 sebesar 23.619,99 ton. Demikian juga produktivitas kelapa tahun 2021 sebesar 6.712,77 ton. Produksi kelapa sawit rakyat tahun 2021 sebesar 8.006 ton. Luas Pertanaman, produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Tengah Tahun 2021 dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.39**  
**Luas Pertanaman, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Rakyat**  
**di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021**

No	Jenis Komoditi	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kg/Ha/Thn)	KK Petani
1	Karet	20.416	13.197	646	26.994
2	Kelapa	1.079	1.076	997	6.441
3	Kelapa Sawit	40.525	108.312	2.673	3.580
4	Kakao	7	5	692	3.804
5	Aren	-	-	-	264

6	Pala	-	-	-	40
7	Kopi Robusta	16	14	844	357
8	Cengkeh	12	-	-	357
9	Kemenyan	-	-	-	27
10	Kapuk	-	-	-	295
11	Lada	-	-	-	175
12	Kulit Manis	3	2	800	68
13	Kemiri	2	5	3.000	197
14	Gambir	-	-	-	26
15	Pinang	160	201	1.256	193

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah

#### 2.1.3.2.2. Kehutanan

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan keadaan kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologi untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, air permukaan. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai SK. 44/Menhut-II/2005 Kabupaten Tapanuli Tengah seluas 54.975,11 Ha.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian kawasan lindung dihadapkan pada permasalahan semakin meningkatnya tekanan sosial-ekonomi terhadap sumber hutan, serta sinergitas lintas instansi. Luas kawasan hutan di Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah 114.537,71 Ha. Luas kawasan hutan menurut fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.40**

**Data Luas Hutan berdasarkan Fungsi di Kabupaten Tapanuli Tengah**

No.	Kecamatan	Luas Kawasan (Ha)			
		Hutan Lindung	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Areal Penggunaan Lahan
1.	Sibabangun	1.545,00	4.729,20	-	2.545,00
2.	Sukabangun	-	-	-	1.950,00
3.	Lumut	475,00	-	-	1.325,00

4.	Pinangsori	853,00	-	-	6.924,00
5.	Badiri	735,00	-	-	6.197,00
6.	Pandan	-	-	-	300,00
7.	Sarudik	3.312,50	-	-	325,50
8.	Tukka	7.625	1.062,21	-	3.510
9.	Sitahuis	8750,90	-	-	-
10.	Tapian Nauli	6.062,40	562,50	-	1.265,63
11.	Kolang	7.312,51	1.312,50	7.312,50	4.768,75
12.	Sorkam	-	-	9.312,30	1.618,75
13.	Sorkam Barat	875,00	-	3.812,50	1.656,25
14.	Pasaribu Tobing	655,50	-	4.937,50	-
15.	Sosorgadong	13.984,30	-	3.875,00	1.406,25
16.	Barus	-	-	-	310,25
17.	Barus Utara	-	-	48,00	521,00
18.	Andam Dewi	1.879,00	-	6.687,20	1.312,5
19.	Sirandorung	575,00	-	5.755,00	2.562,5
20.	Manduamas	335,00	-	10.156,19	8.911,87
<b>Jumlah</b>		<b>54.975,11</b>	<b>7.666,41</b>	<b>51.896,19</b>	<b>47.410,75</b>

*Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Tengah dipadukan dengan Hasil Perhitungan BPKH Wilayah-I Medan terhadap SK Menteri Kehutanan RI No 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005*

Luas lahan kritis di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah seluas 95.469,25 Ha, dimana luas lahan kritis di luar kawasan hutan seluas 54.890,25 Ha sedangkan lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 40.579,00 Ha.

#### **2.1.3.2.3. Energi dan Sumber Daya Mineral**

Potensi investasi pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi granit, pasir dan sirtu (pasir dan batu), kuarsa, lempung, tras, batu gamping, batu apung, andesit – basal. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi yang besar untuk bahan galian golongan “C” sehingga memudahkan dalam pelaksanaan konstruksi bangunan yang memerlukan bahan galian tersebut. Kabupaten Tapanuli Tengah juga memiliki potensi bahan galian golongan “A” seperti batubara, uranium dan timah putih yang membutuhkan eksplorasi lebih lanjut untuk dapat menentukan deposit yang sebenarnya dari potensi bahan tambang tersebut.

Untuk bahan tambang jenis batubara di Kabupaten Tapanuli Tengah masih sangat muda, sehingga diperlukan waktu yang cukup lama agar batubara tersebut dapat dipakai. Sebaran potensi bahan galian secara umum digambarkan sebagai berikut :

- Granit : >455.726.250 ton tersebar di Kecamatan Pandan, Kecamatan Sitahuis.

Granit dikenal kuat dan tahan lama apabila dibandingkan dengan keramik

lainnya. Selain itu, granit juga tidak mudah retak atau pecah meskipun termakan usia dan menghadapi segala cuaca. Selain itu, lantai granit tidak mudah pudar dan cocok digunakan di area-area yang sering terpapar sinar matahari seperti kolam, teras, atau gazebo. Keramik yang berkualitas baik juga tahan lama dan sulit dipecahkan. Bahkan, keramik yang baik dapat bertahan hingga 10-20 tahun lebih jika perawatannya tepat.

- Lempung : ± 31.500.000 ton tersebar di Kecamatan Pandan, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Kolang, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Pinangsori. Tanah lempung adalah agregat partikel-partikel yang berukuran mikroskopik dan submikroskopik yang berasal dari pembusukan kimiawi unsur-unsur penyusun bantuan. Tanah lempung memiliki ciri-ciri berupa bersifat plastis, kadar air sedang hingga luas, permeabilitas yang sangat rendah, memiliki ukuran < 0,002 mm, berbutir halus, dan akan mengeras dalam keadaan kering. Tanah lempung umum digunakan dalam kegiatan pembangunan seperti batu bata dan kerajinan gerabah, sebagai wadah untuk dijadikan piring, kendi, guci, kuali, dan sebagainya. Adapun dalam pembangunan, manfaat tanah lempung dikenal untuk pembuatan batu bata.
- Tras : ± 18.900.000 ton tersebar di Kecamatan Tapian Nauli dan Kecamatan Kolang. Tras disebut pula sebagai pozolan, tergolong bahan galian industri atau golongan C yang cukup banyak mengandung silika amorf yang dapat larut di air atau dalam larutan asam. Tras dapat menjadi pengganti bahan semen setelah dicampur dengan bahan kapur (Lime).
- Pasir Kuarsa dan Batu Pasir : ± 766.090.000 tersebar di Kecamatan Pandan, Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Pinangsori.
- Sirtu (Pasir dan Batu) : > 7.938.750 tersebar di Kecamatan Pandan, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Kolang, Kecamatan Pinangsori, dan lain-lain.

Adapun potensi tambang golongan “B” yang teridentifikasi di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi timbal (Pb), seng (Zn), wolfram (W), niobium (Ni), dan zat radioaktif.

Berdasarkan cakupan pelayanan prasarana jaringan listrik di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2013, terdapat keluarga yang belum mendapatkan fasilitas listrik perdesaan yang tersebar di beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Sirandorung, Kecamatan Barus, Kecamatan Pasaribu Tobing, dan Kecamatan Andam Dewi. Di bidang energi, Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi Tenaga Air (PLTA) dan Tenaga Uap (PLTU).

Ketenagalistrikan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari :

1. PLTU Batubara Labuan Angin kapasitas 2 x 115 MW.
2. PLTA Sipan Sihaporas kapasitas 50 MW.
3. PLTMH Aek Bontar kapasitas 22 KW.



4. PLTMH Sipakpahi kapasitas 22 KW.
5. PLTS Terpusat Sitardas kapasitas 5 KW.
6. PLTS tersebar di beberapa wilayah desa tertinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### 2.1.3.2.4. Pariwisata

Dalam rangka mewujudkan slogan Kabupaten Tapanuli Tengah “*Negeri Wisata Sejuta Pesona*” dalam upaya pengembangan wilayah, peranan pariwisata menjadi sangat penting. Mengingat panjangnya mata rantai kegiatan usaha kepariwisataan yang meliputi biro perjalanan, pengangkutan, perhotelan, restoran pemandu wisata/pramuwisata, kerajinan rakyat, kesenian daerah, pemeliharaan dan pengembangan obyek wisata. Rantai kegiatan pariwisata ini akan membutuhkan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, cinderamata, bahan dan alat bangunan. Pada tahun 2021 penyelenggaraan festival budaya, pembangunan sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta destinasi wisata tidak menjadi prioritas kinerja dalam urusan pariwisata dikarenakan *refocusing* anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi. Demikian juga jumlah kunjungan wisatawan khususnya mancanegara yang tidak dapat difasilitasi baik keluar masuk dari Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menurunkan dampak virus corona. Namun untuk kunjungan wisatawan dalam negeri masih tetap aktif dengan tetap memperhatikan disiplin prosedur kesehatan. Pada tahun 2020 wisatawan nusantara yang berkunjung ke Kabupaten Tapanuli Tengah berjumlah 331.206 jiwa meningkat menjadi 335.678 jiwa pada tahun 2021.

**Tabel 2.41**

#### Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian			
			2018	2019	2020	2021
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	4	3	1	0
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	0	0	1	
3	Jumlah destinasi wisata yang dibangun	Unit	2	2	2	0
4	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jiwa	162	215	0	0
5	Jumlah Wisatawan Nusantara	Jiwa	208,190	228,978	331,206	335,678
6	Kunjungan Wisata	orang	208,352	229,193	331,206	335,678

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah

#### 2.1.3.2.5. Kelautan dan Perikanan

Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan potensi perikanan laut yang cukup besar adalah dengan pemberdayaan nelayan, peningkatan sarana dan prasarana, bantuan modal dan bimbingan, penetapan kawasan pantai sebagai daerah pengembangan agribisnis berbasis usaha perikanan.



Pengembangan komoditas perikanan darat dapat ditempuh melalui usaha penerapan teknologi tepat guna.

Pemanfaatan sawah untuk areal mina padi perlu terus ditingkatkan. Begitu juga dengan pemanfaatan perairan umum, baik melalui usaha budidaya ikan dengan sistem keramba, keramba jaring apung, merupakan alternatif yang dapat dikembangkan mengingat Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai potensi situ atau sungai yang cukup besar. Komoditas yang bisa dikembangkan dengan sistem ini adalah ikan mas, mujair dan nila.

Kegiatan *restocking* di perairan umum berupa lubuk larangan perlu terus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat sekitar situ atau sungai sebagai pengelola dan pengawas, sehingga dapat diatur musim penangkapannya, dan alat yang boleh dioperasikan. Budidaya udang tambak juga merupakan prospek yang cukup bagus untuk dikembangkan di beberapa pantai Kabupaten Tapanuli Tengah, hal ini didukung oleh kondisi perairan yang belum tercemar bila dibandingkan dengan perairan pantai di daerah lain.

Sub sektor perikanan merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang mampu mendorong perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah secara khusus dan Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara pada umumnya. Hal ini didukung oleh potensi sumberdaya perikanan dan kelautan di Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara yang terdiri dari sumberdaya perikanan tangkap, perairan umum maupun budidaya perikanan baik budidaya di air tawar (kolam, sawah), budidaya ikan di air payau (tambak), budidaya ikan di laut maupun budidaya Keramba Jaring Apung (KJA).

**Tabel 2.42**  
**Produksi Ikan (Ton) di Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2018-2021**

No	Kategori	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Penangkapan Ikan</b>					
	a. Laut	Ton	40.430	40.515,24	42.321	41.453
	b. Perairan Umum	Ton	1.230	1.280	1.290	1.300
<b>2</b>	<b>Budidaya</b>					
	a. Kolam	Ton	278.895	282.995	801.271	813.720
	b. Sawah	Ton	-	-	-	-
	c. Tambak	Ton	139.44755	150.997,55	2.663	12.000
	d. Budidaya Laut	Ton	92.965	148.215	1.210	1.240
	e. Keramba Jaring Apung (KJA)	Ton	46.482,5	68.282,5	1.856	1.866

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah

**Tabel 2.43**  
**Perahu Penangkap Ikan Laut**  
**di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2021**

No	Jenis Perahu	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
1	Perahu Tanpa Motor	Unit	210	100	110	100
2	Perahu Motor Tempel	Unit	810	1.458	1.472	1.502
3	Kapal Motor	Unit	1.254	1.009	1.020	1.100

*Sumber : Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah*

**Tabel 2.44**  
**Perkembangan Nelayan dan Petani Ikan**  
**di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2021**

No	Kategori	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
1	Nelayan Penuh	Orang	16.325	16.350	14.087	13.145
2	Nelayan Sambilan	Orang	5.326	5.415	9.889	11.038
3	Nelayan Sambilan Tambahan	Orang	13.396	13.560	1.094	903

*Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah*

#### **2.1.3.2.6. Perdagangan**

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan dukungan dana APBN telah melaksanakan revitalisasi Pasar sejak tahun 2006 serta rehabilitasi bangunan balairung di tiap-tiap kecamatan. Keberadaan pasar dan balairung tersebut diharapkan akan dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat serta menjadi sentra kegiatan perekonomian yang dapat melayani kecamatan-kecamatan sekitarnya.

Berdasarkan Rencana Sistem Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013 -2033, bahwa pusat-pusat pelayanan terdiri dari 3 tingkatan tata jenjang pusat pemukiman/pelayanan yaitu PKL (Pusat Kegiatan Lokal) berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan yaitu di Kecamatan Pandan dan Barus, PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa Desa yaitu Sorkam Barat, Manduamas, Pinangsori, Tapan Nauli, Sarudik dan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa yaitu pada Kecamatan Sirandorung, Andam Dewi, Barus Utara, Sosorgadong, Pasaribu Tobing, Sorkam, Kolang, Lumut, Badiri, Sibabangun dan Sukabangun.

**Tabel 2.45**  
**Capaian Kinerja Urusan Perdagangan**  
**di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2021**

NO	INDIKATOR	Tahun					
		2019		2020		2021	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Persentase pasar tradisional yang tergolong baik (%)	63	62,85	77,8	77,25	88,8	88,56
2	Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan (%)	50	46	58	56	66	65

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 jumlah pasar tradisional yang tergolong baik mencapai 77,25% dan pada tahun 2021 mencapai 88,56%. Dalam hal pencapaian target angka ini menggambarkan bahwa capaian tidak sesuai dengan target, namun dalam hal kinerja angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021.

#### 2.1.3.2.7. Perindustrian

Jumlah Usaha Industri (IKM) di Kabupaten Tapanuli Tengah selalu meningkat dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Pada tahun 2020 perkembangan industri kecil menengah di Kabupaten Tapanuli Tengah berjumlah 2.222 usaha industri meningkat pada tahun 2021 menjadi sebanyak 2.307 usaha industri. Jumlah usaha industri di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2019 - 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.46**  
**Perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM)**  
**di Kabupaten Tapanuli Tengah**

No	Kecamatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Jumlah usaha Industri	Jenis Usaha	Jumlah usaha Industri	Jenis Usaha	Jumlah usaha Industri	Jenis Usaha
1	Manduamas	28	IKM	29	IKM	29	IKM
2	Sirandorung	176	IKM	193	IKM	239	IKM
3	AndamDewi	53	IKM	55	IKM	67	IKM
4	Barus	172	IKM	173	IKM	179	IKM
5	Barus Utara	76	IKM	76	IKM	77	IKM
6	Sosorgadong	62	IKM	62	IKM	62	IKM

7	Pasaribu Tobing	48	IKM	48	IKM	50	IKM
8	Sorkam Barat	18	IKM	18	IKM	22	IKM
9	Sorkam	109	IKM	118	IKM	123	IKM
10	Kolang	83	IKM	94	IKM	94	IKM
11	TapianNauli	96	IKM	98	IKM	99	IKM
12	Sitahuis	28	IKM	29	IKM	29	IKM
13	Pandan	585	IKM	607	IKM	612	IKM
14	Tukka	82	IKM	92	IKM	92	IKM
15	Badiri	97	IKM	105	IKM	105	IKM
16	Pinangsori	112	IKM	119	IKM	121	IKM
17	Lumut	20	IKM	21	IKM	21	IKM
18	SukaBangun	13	IKM	13	IKM	13	IKM
19	Sibabangun	28	IKM	28	IKM	28	IKM
20	Sarudik	240	IKM	244	IKM	245	IKM
	<b>Jumlah</b>	<b>2.129</b>	<b>IKM</b>	<b>2.222</b>	<b>IKM</b>	<b>2.307</b>	<b>IKM</b>

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah

#### 2.1.3.2.8. Transmigrasi

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki wilayah transmigrasi yang saat ini telah berubah status menjadi Eks-Transmigrasi yang terletak pada 3 (tiga) kecamatan dengan jumlah luas wilayah yang berbeda-beda. Wilayah tersebut sudah berubah nama seperti yang terdapat di beberapa kecamatan yang terdiri dari kecamatan Manduamas, kecamatan Sirandorung, kecamatan Kolang dan kecamatan Sukabangun.

Kecamatan Manduamas terdiri dari 1 (satu) kelurahan 5 (lima) desa. Pada saat ini setelah pemekaran menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Manduamas dan kecamatan Sirandorung terdiri dari :

1. Desa Pagaran Nauli Kecamatan Manduamas;
2. Desa Sarma Nauli Kecamatan Manduamas;
3. Desa Tambahan Nanjur Kecamatan Manduamas;
4. Desa Pagaran Baru Kecamatan Manduamas;
5. Kelurahan Bajamas Kecamatan Sirandorung;
6. Desa Masnauli Kecamatan Sirandorung.

Sesuai dengan wilayah Transmigrasi sebelumnya berada di kecamatan Kolang yang pada saat ini sudah menjadi Eks-Transmigrasi yang terdiri dari 2 (dua) desa. Yang terdiri dari SP :

1. Makarta Nauli;
2. Desa Rawa Makmur.

Kecamatan Sukabangun yang terletak di bagian Selatan Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki wilayah Eks-Transmigrasi yang saat ini sudah devenitif menjadi desa pada kecamatan Sukabangun yaitu Pulo Pakkat II.

Dari jumlah kelurahan dan desa Eks-Transmigrasi yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah masih perlu pengembangan sarana dan prasarana yang ada pada Eks-Transmigrasi seperti pembinaan, pemberdayaan, fasilitasi pemberian bantuan untuk peningkatan ekonomi sosial dan budaya sehingga mampu bersaing dengan kecamatan yang sudah memiliki tingkat ekonominya yang sudah maju.

### 2.1.3.3 Fokus Layanan Pemerintahan Fungsi Penunjang

#### 2.1.3.3.1 Administrasi Pemerintahan

Urusan Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan, Sekretariat Daerah, dan 20 Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah. Sekretariat Dewan (Setwan) telah memfasilitasi kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan reses Anggota DPRD dari tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini, namun dikarenakan refocusing dana dialihkan untuk penanganan covid-19, maka kegiatan reses anggota DPRD tahun 2020-2021 tidak dilaksanakan.

**Tabel 2.47**  
**Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2019-2021**

No	Lokasi	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Dapil I			
	- Kec. Pandan	10	0	0
	- Kec. Sarudik	3	0	0
	- Kec. Tukka	6	0	0
2	Dapil II			
	- Kec. Badiri	4	0	0
	- Kec. Sukabangun	1	0	0
	- Kec. Sibabangun	3	0	0
	- Kec. Lumut	0	0	0
- Kec. Pinangsori	6	0	0	
3	Dapil III			
	- Kec. Sosorgadong	3	0	0
	- Kec. Barus	1	0	0
	- Kec. Barus Utara	1	0	0
	- Kec. Andam Dewi	3	0	0
	- Kec. Sirandorong	1	0	0
- Kec. Manduamas	4	0	0	
4	Dapil IV			
	- Kec. Sitahuis	0	0	0
	- Kec. Tapan Nauli	1	0	0
	- Kec. Kolang	2	0	0
	- Kec. Sorkam	1	0	0
	- Kec. Sorkam Barat	2	0	0
- Kec. Pasaribu Tobing	1	0	0	

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 6 (enam) Bagian yang ada di Sekretariat Daerah yaitu Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Ekonomi Pembangunan, Bagian Humasy, dan Bagian Kessos. Bagian Umum Sekretariat Daerah melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan Program peningkatan disiplin aparatur. Bagian Pemerintahan Umum melaksanakan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Bagian Kesejahteraan Sosial melaksanakan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Program Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan. Bagian Humasy melaksanakan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dan Program Kerjasama Informasi Penyelenggara Pemerintah Daerah. Bagian Hukum melaksanakan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Penertiban Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.48**  
**Penerbitan Produk Hukum Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2019-2021**

No	Jenis Peraturan	2019	2020	2021
1.	Perda tentang APBD	3	3	3
2.	Perda tentang Penerimaan Daerah	-	1	-
3.	Perda tentang Organisasi	-	1	-
4.	Perda tentang Penanaman Modal	-	-	-
5.	Perda tentang lain-lain	4	1	2
Jumlah		7	6	5

*Sumber : Bagian Hukum Setdakab Tapanuli Tengah*

Bagian Ekonomi Pembangunan melaksanakan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dan Program Pembinaan Pengelolaan Potensi Daerah.

Di Kabupaten Tapanuli Tengah ada 20 Kecamatan yang melaksanakan tugas pemerintahan di Kecamatan. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 2.49**  
**Nama Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah**

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (Km2)	%
1.	Manduamas	3	17	99,55	4,54
2.	Sirandorong	1	7	87,72	4,00
3.	Andam Dewi	1	13	122,42	5,58
4.	Barus Utara	-	6	63,02	2,87
5.	Barus	2	11	21,81	0,99
6.	Pasaribu Tobing	-	9	103,36	4,71
7.	Sosor Gadong	1	8	143,13	6,52
8.	Sorkam Barat	2	10	44,58	2,03
9.	Sorkam	4	17	80,61	3,67
10.	Kolang	2	12	436,29	19,88
11.	Tapian Nauli	1	8	83,01	3,78
12.	Sitahuis	1	5	50,52	2,30
13.	Pandan	20	2	34,31	1,56
14.	Sarudik	4	1	25,92	1,18
15.	Tukka	5	4	150,93	6,87
16.	Badiri	2	7	129,49	5,90
17.	Pinangsori	5	5	78,32	3,57
18.	Lumut	1	5	105,98	4,83



No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (Km2)	%
19.	Sibabangun	1	6	284,64	12,97
20.	Suka Bangun	-	6	49,37	2,25
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>159</b>	<b>2.194,98</b>	

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

#### 2.1.3.3.2 Pengawasan

Urusan ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam melaksanakan dan mendukung kinerja pengawasan maka pada tahun 2020 jumlah auditor terampil dan auditor ahli berjumlah 17 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.50**  
**Jumlah Auditor Kabupaten Tapanuli Tengah**

Sertikasi Auditor	Jumlah ASN / Tahun		
	2019	2020	2021
<b>Auditor Terampil</b>			
1. Auditor Pelaksana Lanjutan	1	1	
2. Auditor Penyelia	1	1	1
<b>Auditor Ahli</b>			
1. Ahli Pertama	1	3	3
2. Ahli Muda	4	8	9
3. Ahli Madya	7	4	3
4. Ahli Utama	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>16</b>

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah

Jumlah temuan dan rekomendasi BPK RI Tahun 2013-2016 mengalami peningkatan baik dari aspek temuan, rekomendasi dan jumlah kerugian negara seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.51**  
**Jumlah Temuan dan Rekomendasi BPK RI Tahun 2016 - 2020**

Thn	Temuan	Saran	Rp ( TOTAL)	Sudah Tindak Lanjut		Belum Tindak Lanjut	
				Jlh	Rp	Jlh	Rp
2016	14	31	3.467.964.039,34	19	1.823.202.389,65	12	1.644.761.649,69
2017	13	41	6.295.070.288,73	27	3.725.444.831,82	13	2.565.577.456,91
2018	16	91	14.359.931.631,68	76	4.327.959.733,62	12	9.550.906.405
2019	28	146	17.388.253.104,74	122	9.866.359.218,24	2	4.564.633.828,00
2020	9	40	6.746.096.498,13	21	1.284.456.972,87	19	5.461.639.525,26

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah

Sedangkan hasil pemeriksaan Inspektorat Propinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018 juga mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.52**  
**Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Sumatera Utara**  
**Tahun 2016 - 2020**

No	Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Saran	Status Tindak lanjut			
				SS	BS	BT	TT
1	2016	12	13	11	-	2	2
2	2017	6	8	7	1	-	-
3	2018	18	31	22	5	4	9
4	2019	15	25	15	10	-	-
5	2020	-	-	-	-	-	-

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah

Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2020 tidak dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Penjelasan :

1. Hasil Pemeriksaan Tahun 2017 yang pada LKPJ Tahun 2019 masih kondisi Nihil, hal ini disebabkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Reguler pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2017 diterima oleh Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 26 Pebruari 2019 dan sudah ditindaklanjuti pada tahun 2019 sehingga posisi sebagaimana dalam tabel tersebut diatas.
2. Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Reguler Tahun Anggaran 2018-2019 dengan nomor LHP: 45-04-2019 tanggal 30 Desember 2019 baru diterima Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 10 Januari 2019 sehingga sampai pada hari ini kami baru dapat memproses Penegasan Bupati Tapanuli Tengah tentang Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2018-2019 untuk diserahkan kemasing-masing OPD yang dijadikan obrik Pemeriksaan.

**Tabel 2. 53**  
**Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Saran	Status Tindak lanjut			
				SS	BS	BT	Sisa
1	2016	39	35	39	0	0	0
2	2017	77	78	68	1	9	10
3	2018	36	39	34	0	5	5
4	2019	36	50	0	14	36	36
5	2020	259	259	220	39	-	=

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah

Ket: SS = Sudah Selesai  
BS = Belum Selesai  
BT = Belum Tindak Lanjut  
TT = Tidak di Tindak Lanjuti

Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2020 telah dilaksanakan dan Laporan Hasil Pemeriksaan sudah disampaikan kepada masing-masing OPD.

Penjelasan :

1. Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2020 terdiri dari 104 Desa dan 20 Kecamatan;
2. Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Reguler Tahun Anggaran 2020 jumlah temuan 259 dan jumlah saran 259 sampai pada hari ini jumlah temuan yang sudah selesai 220 temuan dan belum selesai ditindaklanjuti 39 temuan.

#### **2.1.3.3.3 Perencanaan**

Urusan perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tapanuli Tengah. Menurut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati dan Pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemeliharaan serentak nasional pada tahun 2024. Berdasarkan pada pernyataan tersebut, maka jabatan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022-2024 diisi oleh pejabat Bupati sebagai pengganti Bupati yang masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2022. Untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang tersebut mengenai penyusunan dokumen perencanaan daerah, maka berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 berupa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Perkada.

#### **2.1.3.3.4 Keuangan**

Urusan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah. Untuk mendukung system prosedur pengelolaan keuangan Kabupaten Tapanuli Tengah maka dilaksanakan kegiatan penyusunan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Tugas utama dari Badan Pengelola

Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah yaitu melakukan penyusunan APBD dan P-APBD Kabupaten Tapanuli Tengah dan hal ini telah dilaksanakan walaupun pada beberapa penyusunan APBD tidak tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Tengah maka Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah telah melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi.

Selain itu Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah juga melakukan pendampingan pengelolaan PBB secara online dengan menghadirkan pendamping dalam pelaksanaan pengelolaan PBB untuk meningkatkan kemampuan aparatur Bidang Pendapatan untuk mengelola PBB.

#### 2.1.3.3.5 Kepegawaian

Kebutuhan akan peningkatan strata pendidikan menjadi alasan bagi PNS untuk terus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak hanya melanjutkan ke tingkat Strata 1 tapi juga ke strata 2. Dalam hal ini BKPSDM telah mendata jumlah PNS yang melanjutkan pendidikan ke Strata 1 sebanyak 38 orang. Sementara untuk jumlah PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 2 adalah sebanyak 32 orang. Data tersebut tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.54**  
**Jumlah PNS yang Melanjutkan Pendidikan**  
**Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendidikan S-2	18	71	5	42	32
2	Pendidikan S-1	27	27	43	97	38
3	Pendidikan D-IV	-	2	-	-	-
3	Pendidikan D-III	-	2	1	-	-
4	STPDN	4	4	4	2	-
<b>Jumlah</b>		<b>49</b>	<b>106</b>	<b>53</b>	<b>141</b>	<b>70</b>

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah

Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya di luar jam kerja atas biaya sendiri dan tidak boleh meninggalkan tugas dinas sehari-hari. Masa Studi adalah batas waktu paling lama dari keseluruhan waktu tempuh studi yang dilakukan di luar cutikuliah (terminal). Sebagai pemenuhan kebutuhan PNS untuk melanjutkan pendidikannya namun tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai PNS maka BKPSDM telah menerbitkan ijin belajar. Adapun datanya tersaji dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.55**  
**Jumlah Pemberian Ijin Belajar PNS Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	S-3	-	-	-	-	-
2	S-2	3	61	5	42	32
3	S-1	25	22	43	97	38
4	D-IV	-	-	-	-	-
5	D-III	-	2	1	-	-
Jumlah		28	85	49	139	70

*Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah*

Tugas belajar adalah tugas kedinasan yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal baik di dalam maupun di luar negeri, dengan meninggalkan tugas, di mana biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah. PNS yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dapat ditugaskan mengikuti pendidikan tertentu melalui tugas belajar. Penugasan PNS dalam tugas belajar merupakan kebutuhan daerah melalui mekanisme seleksi yang tepat dan transparan serta diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Pembiayaan tugas belajar ditanggung oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah negara lain, badan internasional, atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri. Tempat pendidikan PNS untuk mengikuti tugas belajar adalah lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan lain (swasta) dengan akreditasi minimal B yang bekerjasama dengan pemerintah, kementerian atau lembaga non kementerian.

**Tabel 2.56**  
**Jumlah Pemberian Tugas Belajar PNS Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	S-2	15	10	13	8	7
2	S-1	2	5	4	4	4
3	D-IV	4	6	1	1	1
4	D-III	-	-	-	1	1
Jumlah		21	21	18	14	13

*Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah*

Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada para Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta telah bekerja terus-menerus dalam jangka waktu tertentusekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun. Satyalancana ini ditetapkan pada tahun 1959. Satyalancana ini dibentuk dengan tujuan untuk menghargai jasa-jasa serta sebagai pendorong untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja sehingga dapat dijadikan teladan bagi Pegawai Negeri Sipil yang lain. Pemberian Satyalancana ini difasilitasi oleh BKPSDM sebagai fasilitator ASN di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu dengan mengajukan usulan ASN yang berhak diberikan penghargaan tersebut ke Kemendagri.

Adapun pengusulan dilakukan setiap tahun namun di tahun 2021 usulan masih dalam proses sehingga untuk realisasinya tidak ada di tahun tersebut. Data dari tahun ke tahun tersaji dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.57**  
**Jumlah Pemberian Satya Lencana Karya Satya**  
**Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	PNS yang berhak	354	100	151	-	227
2	Yang diusulkan	-	100	151	-	227
3	Realisasi	-	-	-	221	-

*Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah*

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib memberikan teladan bagi masyarakat, dengan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNS diwajibkan untuk mentaati peraturan sesuai dengan kedudukannya sebagai abdi negara. Apabila seorang PNS melakukan suatu bentuk pelanggaran (indisipliner), maka PNS tersebut akan diberikan sanksi kepegawaian. Sanksi kepegawaian merupakan sanksi administrasi yang berupa hukuman disiplin diperuntukkan bagi PNS yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS. Adapun beberapa jenis sanksi bagi PNS, diantaranya sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi. Pemberian hukuman disiplin bagi PNS dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dalam hal administrasi kepegawaian terhadap seorang PNS, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur ketentuan ketentuan mengenai Kewajiban, Larangan, Hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum, Penjatuhan hukuman disiplin, Keberatan atas hukuman disiplin, dan Berlakunya keputusan hukuman disiplin. Dalam peraturan tersebut juga secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Tujuan Pemerintah mengeluarkan Peraturan tentang Disiplin PNS adalah untuk menjamin tata tertib dan kelancaran tugas PNS itu sendiri, sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur Pemerintahan dapat berjalan semestinya yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan di Indonesia. Menurut M. Suparno (1992:85), Peraturan Disiplin PNS adalah peraturan

yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban – kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh PNS. Dengan maksud untuk mendidik dan membina PNS, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin.

Namun dalam kenyataannya, peraturan yang telah diterbitkan pemerintah diatas tidak dapat menekan pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS. Masih banyak ditemukan PNS yang tidak disiplin dalam bekerja, kurangnya kesadaran untuk menyelesaikan tugas, serta kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Hal ini dikarenakan tidak ada kepedulian dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, sehingga secara tidak langsung menimbulkan kegiatan pada instansi tersebut tidak berjalan dengan baik.

Jenis kasus indisipliner yang ditangani oleh BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah mulai dari disiplin kehadiran hingga pidana korupsi dan pidana pencabulan. Adapun angka penanganan kasus indisipliner di wilayah kerja BKPSDM Tapanuli Tengah tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.58**  
**Jumlah Pemberian Kasus Disiplin ASN di Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2019-2021**

No	Kasus	2019		2020		2021	
		jumlah	Ket.	jumlah	Ket.	jumlah	Ket.
1	Ringan	-		-		-	-
2	Sedang	-		-		-	-
3	Berat	3	Diberhentikan	8 1	Diberhentikan Pemberhentian sementara	8	Diberhentikan

*Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah*

#### **2.1.3.3.6 Pendidikan dan Pelatihan**

Dalam menjalankan pekerjaannya sebagai abdi negara, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentu perlu untuk terus mengembangkan diri. Pengembangan diri ini diperlukan untuk meningkatkan kinerjanya dalam bertugas sebagai seorang PNS. Untuk itu, diperlukanlah suatu pendidikan dan latihan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pendidikan dan Pelatihan PNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pengetahuan, wawasan sikap dan moral Pegawai Negeri Sipil.

Pendidikan dan Pelatihan PNS yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk. Berikut ini adalah jenis dan penggolongan pendidikan dan latihan PNS :

##### **a. Diklat Prajabatan**

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan merupakan bentuk pendidikan dan pelatihan yang dilakukan guna membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sekaligus untuk memberikan pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan juga mengenai bidang tugas serta budaya organisasinya.

##### **b. Diklat Dalam Jabatan**

Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Jenjang Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan yang perlu ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil ada 3 (tiga) jenis, meliputi :

### **1) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim)**

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan adalah diklat yang dilakukan guna memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap serta perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur, yang bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. Oleh karena itu diklat ini termasuk kedalam salah satu jenis diklat struktural, selain diklat prajabatan.

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan ini dilaksanakan guna mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dari aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklat Kepemimpinan ini terdiri dari empat jenjang:

1. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV bagi Jabatan Struktural Eselon IV.
2. Diklat Kepemimpinan Tingkat III bagi Jabatan Struktural Eselon III.
3. Diklat Kepemimpinan Tingkat II bagi Jabatan Struktural Eselon II.
4. Diklat Kepemimpinan Tingkat I bagi Jabatan Struktural Eselon I.

### **2) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional**

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah bentuk diklat yang dilakukan untuk memberikan bekal pengetahuan dan atau ketrampilan bagi para Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional.

Diklat Fungsional merupakan jenis Diklat Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Jenjang jabatan fungsional ini terdiri dari :

- Diklat fungsional keahlian yang merupakan bentuk diklat yang memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu dan terkait langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan.
- Diklat fungsional ketrampilan yang merupakan bentuk diklat yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan fungsional tertentu dan terkait langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan.

### **3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis**

Pendidikan dan Pelatihan Teknis merupakan diklat yang dilakukan guna mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas para PNS. Kompetensi Teknis ini merupakan kemampuan PNS dalam



bidang-bidang teknis tertentu yang digunakan demi pelaksanaan tugas masing-masing. Diklat teknis meliputi :

- Diklat teknis bidang umum/administrasi dan manajemen yang merupakan diklat yang memberikan ketrampilan dan/atau penguasaan pengetahuan dalam bidang pelayanan teknis yang sifatnya umum serta di bidang administrasi dan manajemen guna menunjang tugas pokok instansi yang bersangkutan.
- Diklat teknis substantif yang merupakan diklat yang memberikan ketrampilan dan/ atau penguasaan pengetahuan teknis terkait secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Selain jenis diklat di atas, dalam beberapa aplikasi kepegawaian terdapat jenis Diklat Formal dan Non Formal. Diklat formal sama seperti diklat fungsional, dimana diklat ini merupakan diklat wajib bagi para calon dan pejabat fungsional tertentu, contoh : diklat auditor, diklat profesi guru, dll. Sedangkan Diklat Non Formal adalah diklat yang tidak wajib dilaksanakan oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti : diklat pengelolaan keuangan, diklat manajemen sekolah, dan lain sebagainya.

Adapun pendidikan dan pelatihan yang telah dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah tersaji dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.59**  
**Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Prajabatan**  
**Tahun 2019-2021**

No.	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Diklat Prajabatan			
	Golongan II			
	- Reguler	-	-	-
	- Eks Honorer K 2	41	-	-
	Golongan II & III			243
	- Umum Gol. III	158	-	
	- Umum Gol. II	53	-	
2	Diklat Struktural	-		
	Diklatpim Tk. II	-	-	-
	Diklatpim Tk. III	-	-	-
	Diklatpim Tk. IV	-	-	-
3	Diklat Fungsional	-	-	
4	- Diklat Fungsional Kepala SD	40	-	-
5	- Diklat Fungsional Kepala SMP	40	-	-
6	Diklat TOF	-	-	-
7	Diklat MOT	-	-	-
	Diklat Pengembangan Kompetensi ASN		-	
	- Diklat Bendahara ASN	30	-	-
	Diklat Pengembangan Kompetensi Perangkat Desa		-	
	- Diklat Bendahara Desa	40	-	-
	- Diklat Kepemudaan Desa	40	-	-

	<b>Jumlah</b>	<b>472</b>	<b>0</b>	<b>243</b>
--	---------------	------------	----------	------------

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah

### 2.1.3.3.7 Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah. Salah satu tugas yang dilaksanakan yaitu melakukan pembinaan ormas. Berikut disajikan capaian kinerja penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

**Tabel 2.60**  
**Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Tahun 2019-2021**

No.	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2	2	2
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	4	4	4

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Tapanuli Tengah

## 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

### 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

**Tabel 2.61**  
**Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 dan 2021**

Kelompok Komoditas	2020	2021
Jumlah Makanan	483.409	539.537
Jumlah Bukan Makanan	379.463	363.732
Jumlah/Total	862.872	903.269

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Namun data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, sehingga dalam kegiatan Susenas data ini didekati melalui data pengeluaran rumah tangga.

Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar provinsi khususnya dilihat dari segi ekonomi.

Dari beberapa sektor lapangan usaha, unsur-unsur yang dapat diandalkan menjadi daya saing daerah yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor perdagangan besar dan eceran; serta sektor konstruksi.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021 tercatat sebesar Rp. 903.269,-. Rata-rata pengeluaran Rumah Tangga dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan dikarenakan berbagai faktor. Idealnya untuk mengukur daya beli, pendekatan yang terbaik adalah dengan mengukur tingkat pendapatan (*income*) dengan *disposable income*. Namun, permasalahannya sulit sekali untuk mengukur pendapatan seseorang karena setiap orang tidak hanya mendapatkan pendapatan dari gaji pokok mereka tetapi mereka juga kerap mendapat tambahan-tambahan dari sumber-sumber penghasilan yang lain. Nilai pengeluaran perkapita tidak dapat digunakan untuk keterbandingan antar wilayah mana yang daya belinya lebih baik. Selain itu 27 komoditi yang digunakan untuk mengukur daya beli tidak mencerminkan kondisi spesifik lokal dimana komoditas tiap daerah mungkin berbeda.

### 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah atau infrastruktur

#### a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Peruntukan RTRW di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi: Wilayah Hutan Produksi, Wilayah Hutan Produksi Terbatas, Wilayah Hutan Konversi, Wilayah Pertanian Tanaman Pangan, Wilayah Pertanian Tanaman Hortikultura,

Wilayah Perkebunan, Wilayah Industri, Wilayah Pertambangan, Wilayah Pariwisata, dan Wilayah Permukiman. Sesuai dengan telah ditetapkannya RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013, ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Tapanuli Tengah semakin meningkat. Peningkatan ini tidak terlepas dari strategi penyusunan RTRW yaitu rencana peruntukan wilayah dengan peruntukan yang telah ada dilapangan.

#### **b. Luas wilayah produktif**

Wilayah budidaya merupakan suatu wilayah yang dimanfaatkan untuk kegiatan manusia dalam rangka kegiatan dan penghidupannya. Kawasan budidaya diharapkan dapat menampung semua kegiatan masyarakat, pemerintah dan swasta dengan tetap mempertahankan asas penatagunaan tanah yaitu Lestari, Optimal dan Seimbang/serasi (LOS). Luas wilayah produktif di Kabupaten Tapanuli Tengah masih relatif sangat luas, pada tahun 2021 luas areal tanaman padi seluas 27.774ha dan palawija seluas 7.294ha. Selain itu untuk luas areal budidaya menurut jenis perikanan budidaya seluas 206,23ha.

### **2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi**

#### **a. Investasi**

Dalam mendukung perkembangan iklim berinvestasi, Kabupaten Tapanuli Tengah tetap berusaha untuk menjamin maupun mempermudah proses izin administrasi hingga pelaksanaan di lapangan melalui koordinasi, pengendalian dan pembinaan penanaman modal terhadap badan usaha yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dan pendataan perizinan dalam rangka pengawasan peruntukan dan operasional izin usaha. Diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan/regulasi lebih baik sehingga mendorong peningkatan iklim investasi di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjamin kepastian hukum, keamanan dan kenyamanan dalam berusaha.

#### **b. Angka Kriminalitas dan Jumlah Demonstrasi**

Pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban nasional (Kantrantibnas) dan pencegahan tindak kriminal diwujudkan melalui peningkatan kerjasama aparat dalam teknik pencegahan kejahatan; peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah; serta pengawasan pengendalian dan evaluasi Perda. Selanjutnya peningkatan dan kenyamanan lingkungan dilaksanakan melalui pengendalian keamanan lingkungan; pertemuan berkala Ormas, Orsospol, OKP dan LSM serta terselenggaranya Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).

## **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

Berdasarkan Pasal 306 ayat (5) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Bupati/ walikota menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

RKPD sampai Tahun 2022 dan realisasi RPJMD 2017- 2022 sampai dilakukan telaahan terhadap hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2022 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah. Formulir Evaluasi terhadap hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2021 dan realisasi RPJMD dapat dilihat pada lampiran RKPD 2023 ini.

## **2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah**

### **2.3.1 Isu Strategis**

Berdasarkan evaluasi capaian pembangunan serta program pembangunan yang memilikikaitan erat dengan prioritas pembangunan daerah, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang dijadikan isu strategis yang menjadi fokus pembangunan, beberapa isu strategis tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat yang didukung peningkatan SDM aparatur dan teknologi informasi yang memadai termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia anak didik serta peningkatan kualitas guru dan pemerataan guru;
2. Kondisi gedung perkantoran Bupati Tapanuli Tengah kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pembangunan gedung baru perkantoran Bupati Tapanuli Tengah yang terpadu dan terintegrasi dalam satu kawasan dengan tujuan semakin memudahkan akses bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik secara efektif dan cepat;
3. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. Demikian juga ketersediaan tenaga medis pada fasilitas rujukan. Sementara itu Angka Harapan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021 yaitu 67,24 tahun;
4. Kondisi jalan baik tahun 2021 sebesar 54,14% dan target sebesar 80,19% di tahun 2022. Oleh karena dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan untuk melaksanakan peningkatan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas di Kabupaten Tapanuli Tengah terutama menuju daerah-daerah pertanian, perkebunan, perikanan dan objek-objek wisata. Selanjutnya untuk meningkatkan fungsi jaringan irigasi dibutuhkan pembangunan/rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi untuk mempertahankan swasembada pangan;
5. Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni. Jumlah rumah layak huni tahun 2019 sebesar 78,76% dan tidak layak huni 21,24% sementara tahun 2018 jumlah rumah layak huni sebesar 77,92% dan tidak layak huni 22,08%. Selanjutnya jumlah rumah tangga yang belum terlayani air bersih 50%;
6. Angka Kemiskinan Tahun 2021 sebesar 12,67% mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 12,38%;

7. Belum optimalnya pelayanan investasi dan perijinan;
8. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam lokal antara lain pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata.

### **2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah**

#### **Daerah**

Untuk mengetahui permasalahan pembangunan berdasarkan bidang urusan pemerintah di Kabupaten Tapanuli Tengah, dijelaskan pada tabel berikut.

#### **2.3.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

##### **a. Pendidikan**

- 1) Masih banyaknya ruang kelas kondisi rusak. Persentase ruang kelas kondisi rusak untuk SD sederajat diatas 50 persen, SMP sederajat sebesar 40 persen dan SMA/SMK sederajat sebesar 35 persen.
- 2) Penempatan guru belum dilakukan secara merata, masih terdapat kesenjangan baik dari sisi jumlah maupun kualitas antara pedesaan dan perkotaan.
- 3) Belum optimalnya partisipasi pendidikan anak usia dini pada usia 0 – 6 tahun serta jumlah lembaga PAUD yang telah terakreditasi dan dimuat dalam Dapodik PAUD dan Dikmas. Jumlah lembaga PAUD dan TK tahun 2019 sebanyak 249 lembaga dengan jumlah murid 8.652 Orang murid serta jumlah guru 487 orang.
- 4) Belum optimalnya capaian APM di jenjang pendidikan dasar baik SD sederajat maupun SMP sederajat. APM SD/MI sebesar 96,51persen dan APM SMP/MTs sebesar 90,20persen.

##### **b. Kesehatan**

- 1) Masih adanya angka kematian Ibu melahirkan dan bayi lahir.
- 2) Masih adanya kasus stunting.
- 3) Masih rendahnya jumlah cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI). Jumlah cakupan desa/kelurahan UCI sebesar 63,72%. Sementara itu jumlah desa/kelurahan UCI 137 desa/kelurahan.
- 4) Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular dan meningkatnya angka kesakitan pada penyakit tidak menular.
- 5) Meningkatnya penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pertumbuhan penduduk dan mobilitas penduduk yang tinggi menyebabkan tingkat penularan penyakit seperti Diare, TBC, Malaria, DBD.
- 6) Terjadinya Pandemi Covid-19 secara global menyebabkan rentannya terhadap penularan Covid-19.
- 7) Belum tercapainya cakupan warga masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (*Universital Health Coverage/UHC*).
- 8) Belum optimalnya ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan terutama pelayanan kesehatan dasar,

- 9) Ketersediaan tenaga medis sebagai tenaga kesehatan fasilitas rujukan belum memadai.

**c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- 1) Belum semua jalan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah kondisinya baik. Panjang seluruh jalan Kabupaten Tapanuli Tengah 722,57 Km. Kondisi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 41,77 persen.
- 2) Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase serta adanya wilayah yang rentan terhadap bencana banjir.
- 3) Belum memadainya ketersediaan gedung perkantoran Bupati Tapanuli Tengah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan cepat.
- 4) Belum semua rumah tangga yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah terlayani air bersih serta masih adanya rumah tangga yang belum memiliki sanitasi.
- 5) Belum semua kawasan tersedia Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dan RDTR untuk mendukung RTRW.
- 6) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang termasuk mekanisme perizinan dan pengawasan pelaksanaannya.

**d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

- 1) Belum optimalnya fasilitas Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) di perumahan dan kawasan permukiman, antara lain penyediaan air bersih yang belum memadai dan merata, penyediaan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah yang belum tertangani secara terpadu serta perlunya perbaikan kualitas jalan lingkungan untuk mendukung mobilitas penduduk.
- 2) Keberadaan kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani secara optimal.
- 3) Belum optimalnya pemenuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Jumlah rumah tidak layak huni 16.874 atau 21,24% dari total rumah 79.445 rumah.

**e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

- 1) Masih adanya pelanggaran peraturan daerah oleh masyarakat.
- 2) Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- 3) Terjadinya penyakit sosial masyarakat.
- 4) Belum terpenuhinya daerah layanan pemadaman kebakaran di setiap wilayah.

**f. Sosial**

- 1) Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum terintegrasi dengan data pusat.
- 2) Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS).

- 3) Masih belum optimalnya persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.
- 4) Masih minimnya sarana sosial pemerintah (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi) dalam upaya pembinaan dan rehabilitasi PMKS. Jumlah sarana sosial pemerintah sebanyak 1 panti asuhan dan 6 panti asuhan yang dikelola masyarakat.

### **2.3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

#### **a. TenagaKerja**

- 1) Terjadinya pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadi pengurangan tenaga kerja.
- 2) Kurangnya minat penduduk usia kerja untuk bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan kewirausahaan.
- 3) Rendahnya kesadaran perusahaan dalam menerapkan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dan melaksanakan wajib lapor.
- 4) Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai dengan standar kebutuhan peralatan berbasis kompetensi.
- 5) Terbatasnya lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja serta terbatasnya informasi tentang lowongan kerja bagi para pencari kerja.

#### **b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- 1) Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan serta kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Belum optimalnya pengarusutamaan gender dalam masyarakat.
- 3) Masih sedikitnya lembaga PUG yang aktif dalam upaya pencapaian kesetaraan gender.
- 4) Belum Optimalnya Pemenuhan Hak Anak seperti Fasilitas Hidup Sehat Anak, Fasilitas Sekolah Ramah Anak , Fasilitas Puskesmas Ramah Anak, Fasilitas Taman Pustaka Anak , Fasilitas Rumah Aman Anak

#### **c. Pangan**

- 1) Belum optimalnya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah.
- 2) Masih belum optimalnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.
- 3) Perlunya diversifikasi pangan sehingga terwujudnya ketersediaan pangan.
- 4) Perlunya peningkatan kualitas SDM Penyuluh Pertanian dan Petani
- 5) Alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi lainnya
- 6) Perlunya pemanfaatan lahan pekarangan untuk cadangan gizi keluarga.
- 7)



**d. Pertanahan**

- 1) Masih banyaknya luas lahan yang belum bersertifikat.
- 2) Lambatnya pengadministrasian pertanahan di tingkat desa.
- 3) Kendala dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

**e. Lingkungan Hidup**

- 1) Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah.
- 2) Ketaatan pemilik usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup masih rendah.
- 3) Belum optimalnya pengelolaan persampahan terutama yang dapat menjangkau kecamatan.

**f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan.
- 2) Belum optimalnya sarana pelayanan administrasi kependudukan, khususnya belum tersedianya mobil keliling pelayanan administrasi kependudukan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil.
- 3) Sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil termasuk gedung kantor belum memadai.

**g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- 1) Belum optimalnya pembinaan aparat desa
- 2) Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- 3) Belum optimalnya kesiapan pemerintah desa dalam penerapan Undang-Undang tentang Desa.
- 4) Belum memadainya SDM aparat desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa.
- 5) Kurangnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

**h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- 1) Masih tingginya angka Wanita Usia Subur (WUS) yang tidak ingin hamil dan tidak ingin memakai alat kontrasepsi (*Unmet need*).
- 2) Masih rendahnya kesadaran kaum pria untuk berperan serta secara aktif dalam program KB sebagai akseptor KB.
- 3) Semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 4) Masih tingginya pernikahan usia dini.
- 5) Belum memadainya sarana dan prasarana termasuk gedung kantor untuk melaksanakan pelayanan KB.

**i. Perhubungan**

- 1) Belum meratanya penyediaan rambu-rambu lalu lintas dikecamatan.
- 2) Peningkatan moda transportasi darat, laut dan udara.

- 3) Belum adanya alat uji kendaraan bermotor.
- 4) Belum semua daerah dapat dilalui moda transportasi angkutan umum.
- 5) Minimnya moda transportasi laut menuju daerah/objek wisata bahari.
- 6) Perlunya perpanjangan runway bandara Dr. F.L Tobing agar bisa didarati pesawat berbadan lebar.
- 7) Belum adanya prasarana lalu lintas berbasis IT.

**j. Komunikasidan Informatika**

- 1) Pengembangan aplikasi sistem informasi belum mencakup seluruh tata kelola penyelenggaraan pemerintahan maupun layanan publik.
- 2) Sumberdaya manusia yang memiliki penguasaan teknis bidang komunikasi dan informatika belum mencukupi.
- 3) Masih terdapat area yang belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi.
- 4) Pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika untuk mendukung penerapan e-government.

**k. Koperasi dan UMKM**

- 1) Terbatasnya kapasitas sumberdaya manusia bidang koperasi dan UMKM dalam manajemen, penguasaan teknologi, dan inovasi pengembangan produk.
- 2) Belum optimalnya pengembangan permodalan koperasi dan UMKM.
- 3) Belum optimalnya pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan pelaku UMKM.
- 4) Masih rendahnya Daya saing produk UMKM dibanding produk daerah lain.

**l. PenanamanModal**

- 1) Terbatasnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 2) Belum optimalnya penyajian data dan potensi investasi melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- 3) Kebijakan *Online Single Submission* (OSS) masih belum mencakup semua layanan perijinan.

**m. KepemudaandanOlahraga**

- 1) Belum optimalnya penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan.
- 2) Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan.
- 3) Prestasi olahraga tingkat provinsi dan nasional perlu ditingkatkan
- 4) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana beberapa cabang olahraga.
- 5) Kurangnya pelatihan dan ketrampilan teknis pembinaan pemuda dan keolahragaan.
- 6) Kurangnya pelaksanaan kegiatan baik kepemudaan maupun keolahragaan.

**n. Statistik**

- 1) Belum optimalnya pengelolaan satu data pembangunan.

- 2) Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan.

**o. Persandian**

- 1) Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian sehingga persandian masih sebatas sarana komunikasi antar instansi pemerintah.

**p. Kebudayaan**

- 1) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi.
- 2) Belum optimalnya promosi seni dan budaya Kabupaten Tapanuli Tengah
- 3) Terbatasnya fasilitasi dan pemeliharaan cagar budaya.
- 4) Belum optimalnya penyelenggaraan festival seni dan budaya

**q. Perpustakaan**

- 1) Belum memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung urusan Perpustakaan.
- 2) Belum adanya SDM Pengelola Perpustakaan maupun pustakawan.
- 3) Minimnya jumlah koleksi buku di perpustakaan.
- 4) Belum tersedianya gedung perpustakaan daerah sebagai sumber informasi bagi masyarakat.
- 5) Belum tumbuh dan berkembangnya lembaga perpustakaan di tingkat desa/kelurahan, seperti perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat dan perpustakaan di rumah-rumah ibadah.
- 6) Belum terlaksananya promosi tentang keberadaan perpustakaan.

**r. Kearsipan**

- 1) Belum memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung urusan Kearsipan
- 2) Belum adanya SDM Pengelola kearsipan atau arsiparis.
- 3) Belum adanya sistem duplikasi arsip ke dalam bentuk informatika/digital.
- 4) Belum tersedianya gedung/ruangan khusus untuk menyimpan arsip
- 5) Belum dimanfaatkannya teknologi informasi untuk menyimpan dan menampilkan arsip.

### **2.3.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan**

**a. Kelautan dan Perikanan**

- 1) Menurunnya jumlah produksi ikan tangkap dan ikan budidaya air tawar.
- 2) Semakin banyaknya jumlah terumbu karang yang rusak.
- 3) Ketersediaan industri processing pasca tangkap di kabupaten Tapanuli Tengah;
- 4) Kurangnya diverifikasi pengolahan ikan pasca tangkap.
- 5) Kurangnya kesiapan masyarakat nelayan dalam menjalankan regulasi pemerintah pusat.

**b. Pariwisata**

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana di obyek wisata unggulan daerah.
- 2) Belum optimalnya promosi kegiatan kepariwisataan dan potensi objek wisata di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 3) Belum optimalnya Penataan / pengembangan destinasi pariwisata.
- 4) Kurangnya Pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata;
- 5) Kurangnya dukungan dan pemahaman masyarakat terhadap pariwisata sebagai sektor unggulan daerah;
- 6) Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan di daerah-daerah objek wisata.

**c. Pertanian**

- 1) Luas areal tanaman pangan khususnya untuk komoditi padi mengalami penurunan.
- 2) Belum optimalnya Proteksi pemerintah terhadap pengendalian harga poduk pertanian;
- 3) Masih rendahnya kapasitas SDM pertanian, peternakan, dan perkebunan yang berpengaruh pada penguasaan teknik budidaya, pengelolaan manajemen dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 4) Meningkatnya konversi lahan pertanian menjadi perkebunan;
- 5) Ketersediaan benih, pupuk, pestisida sesuai jumlah dan harga yang terjangkau oleh petani;
- 6) Ketersediaan alat mesin pertanian (Alsintan) mendukung modernisasi pertanian masih sangat kurang di tingkat petani.

**d. Perdagangan**

- 1) Perlunya revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan.
- 2) Peningkatan daya saing produk.
- 3) Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor.
- 4) Belum optimalnya pengawasan distribusi barang.

**e. Perindustrian**

- 1) Penguasaan teknologi dan inovasi produk yang rendah.
- 2) Kualitas dan daya saing produk yang masih rendah.
- 3) Perlunya pengembangan industri kreatif.
- 4) Perlunya pengembangan industri kecil dan menengah.

**f. Transmigrasi**

- 1) Kurangnya kegiatan dari pemerintah pusat yang bersifat padat karya.
- 2) Belum adanya kelanjutan program nasional bagi daerah eks transmigrasi dalam rangka mendukung keberlanjutan pengelolaan daerah eks transmigrasi.

#### **2.3.2.4 Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

##### **a. Perencanaan Pembangunan Daerah**

- 1) Belum optimalnya ketersediaan perencanaan pembangunan yang menjawab permasalahan sektoral pada pembangunan daerah.
- 2) Belum optimalnya implementasi proses penyusunan perencanaan secara partisipatif dalam menjawab isu dan tantangan pembangunan daerah.

##### **b. Pengawasan**

- 1) Masih kurangnya kapasitas SDM pemeriksa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan;
- 2) Masih kurangnya kuantitas APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah).
- 3) Masih kurangnya SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada masing masing PD.
- 4) Masih kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

##### **c. Keuangan**

- 1) Belum optimalnya upaya peningkatan pendapatan asli daerah.
- 2) Terbatasnya kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah.

##### **d. Kepegawaian**

- 1) Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan.
- 2) Masih terjadinya pelanggaran disiplin aparatur pemerintah.
- 3) Masih kurangnya ketersediaan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing perangkat daerah.

##### **e. Legislasi Daerah**

- 1) Belum optimalnya fungsi Sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD sebagai lembaga legislasi daerah

##### **f. Sekretariat Daerah**

- 1) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana gedung perkantoran untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 3) Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- 4) Masih rendahnya kualitas pelayanan komunikasi dan penyebarluasan informasi kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat

- 5) Belum seluruh manajemen pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan teknologi informasi berbasis elektronik, baik melalui e-government maupun e-office.
- 6) Belum seluruh prosedur pelayanan disusun dalam bentuk *Standar Operasional Prosedur* (SOP), baik pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 7) Belum dilaksanakannya evaluasi/survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 8) Perlunya peningkatan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

**BAB III**  
**RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH**  
**DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2023 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

**3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

**3.1.1 Kondisi Ekonomi Nasional**

Kuatnya Perekonomian Indonesia yang sudah terlihat di Tahun 2022 dan berlanjut ke 2023 adalah bukti bahwa penanganan pandemi berbuah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di 2022 tentunya menjadi faktor penting.

Sementara di Kawasan ASEAN-5, pertumbuhan ekonomi diperkirakan justru berada dalam tren meningkat. Dalam periode 2021-2023 Indonesia diramalkan akan bertumbuh kuat sebesar 3,3 persen, 5,6 persen dan 6,0 persen, sedangkan Malaysia 3,5 persen, 5,7 persen dan 5,7 persen. Dalam laporan WEO Januari 2022 tersebut IMF juga memberikan beberapa rekomendasi penguatan kerangka kebijakan yang komprehensif untuk negara-negara, yaitu memperkuat kebijakan di sektor kesehatan, termasuk pemerataan vaksin, perubahan kebijakan moneter yang harus didukung dengan komunikasi yang efektif, memperkuat posisi dan kesinambungan fiskal, memperkuat kerja sama internasional, dan melanjutkan reformasi struktural dan kebijakan perubahan iklim.

Dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Nasional maka Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 berkisar antara 4,0 persen dan 6,0 persen. Kebijakan Nasional yang diambil oleh Pemerintah Pusat akan memberi dorongan yang positif bagi Daerah yang ada di Indonesia termasuk Kabupaten Tapanuli Tengah.

**3.1.2 Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara**

**3.1.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Perekonomian Sumatera Utara tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.859.870,95 miliar dan PDRB per kapita mencapai Rp 55,18 juta. Ekonomi Sumatera Utara tahun 2020

mengalami kontraksi sebesar 2,61 persen.

Kontraksi terjadi pada beberapa lapangan usaha. Kontraksi tertinggi dialami oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 6,51 persen; diikuti oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,93 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,46 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2020, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,99 persen; diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,64 persen; Kontruksi sebesar 0,27 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 0,26 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dari lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi sebesar 1,67 persen.

Struktur PDRB Sumatera Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Lapangan Usaha utama, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (3,87 persen); Industri Pengolahan (1,43 persen); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (3,62 persen); dan Konstruksi (2,18 persen). Struktur PDRB Sumatera Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Ekonomi Sumatera Utara triwulan IV-2020 dibanding triwulan IV-2019 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar 3,81 persen. Kontraksi tertinggi dialami oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,86 persen; diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 7,36; dan Pertanian, Kehutanan, Perikanan sebesar 5,63 persen. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADHK, kontraksi terjadi pada beberapa lapangan usaha. Kontraksi tertinggi dialami oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,77 persen; diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,26 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 4,71 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2020, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,48 persen; diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 0,18 persen; Real Estate sebesar 0,07 persen; dan Jasa Keuangan sebesar 0,04 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dari lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi sebesar 1,84 persen.

Komponen Impor Barang dan Jasa merupakan komponen yang mengalami kontraksi tertinggi sebesar 18,34 persen; diikuti Ekspor Barang dan Jasa sebesar 15,09 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto sebesar 3,47 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara tahun 2021, sumber kontraksi tertinggi dari Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar -4,18 persen; yang diikuti oleh Komponen PK-RT sebesar -1,52 persen, dan PMTB -0,36 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dari komponen lainnya sebesar 4,99 persen. Struktur PDRB Sumatera Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sumatera Utara, yaitu sebesar 52,32 persen; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang



dan Jasa sebesar 33,09 persen; Komponen PMTB sebesar 30,63 persen; Komponen PK-P sebesar 6,93 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,90 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 0,92 persen. Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 25,81 persen.

Perekonomian Sumatera Utara diperkirakan akan meningkat secara gradual seiring dengan terus berlangsungnya program vaksinasi dan aktivitas yang berangsur pulih. Menguatnya kinerja ekonomi global akan mendorong akselerasi produksi komoditi ekspor dari industri pengolahan. Usaha bangunan dan perdagangan akan mengalami akselerasi sejalan dengan kondusifnya kegiatan proyek baik Proyek Strategis Nasional terkait infrastruktur, optimisme UU Cipta Kerja, dan ekspansi swasta, serta HBKN Idul Fitri yang mendorong aktivitas penjualan eceran.

Sebagai pembanding dari berbagai sumber, maka perhitungan analisis proyeksi mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis dari Bank Indonesia Sumatera Utara pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada Tahun 2021 tercatat sebesar 3.30-4.30 persen dan Tahun 2022 tercatat sebesar 4.50-5.50 persen.
2. Berdasarkan hasil rakortek yang tertuang dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Target Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dalam mencapai kontribusi nasional pada Tahun 2022 adalah sebesar 5,0-5,4 persen.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan meningkat optimis (high scenario) sebesar 5,00-5.40 persen dengan nilai tengah 5,20 persen. Namun, akibat pandemic covid-19 yang masih belum teratasi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 10 Kab/Kota dengan kasus tinggi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penyesuaian proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 menjadi 3,00-4,00 persen dengan nilai middle sebesar 3,50 persen dan pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,00-5,00 persen (low scenario) dengan nilai middle 4,50 persen.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menurut lapangan usaha terlampir pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2023**

Lapangan Usaha	Pertumbuhan (Persen)			
	Realisasi		Proyeksi	
	2020	2021	2022	2023
a. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1,95	3,87	4,87	3,40-4,40
b. Pertambangan dan Penggalian	-2,31	1,92	2,92	2,50-3,50
c. Industri Pengolahan	-0,84	1,43	2,43	2,80-3,80
d. Pengadaan Listrik dan Gas	3,16	4,93	4,93	3,80-4,80
e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	3,79	3,62	4,62	3,50-4,50
f. Kontruksi	-3,42	2,18	3,18	3,30-4,30
g. Perdagangan Besar dan Eceran,	-1,94	3,62	4,62	3,80-4,80



Reparasi Mobil dan Sepeda Motor				
h. Transportasi dan Pergudangan	-12,77	-3,63	-2,63	3,40-4,40
i. Akomodasi dan Makan Minum	-9,26	-0,81	0,81	4,60-5,60
j. Informasi dan Komunikasi	6,17	6,51	7,51	5,70-6,70
k. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,29	4,46	5,46	4,00-5,00
l. Real Estate	1,57	2,50	3,50	2,90-3,90
m, n. Jasa Perusahaan	-4,71	-0,14	0,14	2,00-3,00
o. Adm Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial	0,73	2,08	3,08	4,50-5,50
p. Jasa Pendidikan	1,52	3,05	4,05	3,00-4,00
q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-2,46	0,25	1,25	3,00-4,00
r, s, t, u. Jasa Lainnya	-3,74	1,43	2,43	3,50-4,50
<b>PDRB</b>	<b>-1,07</b>	<b>2,61</b>	<b>3,13</b>	<b>4,00-5,00</b>

Sumber : Berita Resmi Statistik, 07 Februari 2022

Dari sisi pengeluaran, Covid-19 masih berpengaruh pada konsumsi rumah tangga. Tetapi diprediksi pada Tahun 2021 dan 2022, Sejalan dengan program vaksinasi, maka diharapkan konsumsi rumah tangga akan mengalami kenaikan yang signifikan. Kebijakan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran dan penjagaan ketersediaan bahan pokok, diharapkan akan dapat membantu untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Peningkatan Ekspor akibat membaiknya aktivitas industri hilir di negara tujuan utama diprediksi dapat meningkatkan Ekspor Luar Negeri.

Perkembangan vaksin menjadi kunci berlanjutnya recovery pertumbuhan ekonomi, Kenaikan permintaan domestik dan eksternal, Percepatan pembangunan pemerintah dan swasta yang sempat melambat/tertunda di tahun 2020 akan mendorong perbaikan investasi. Langkah penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah dari sisi kesehatan maupun pemulihan ekonomi akan mendorong konsumsi pemerintah. Rencana pemerintah melanjutkan program jaring pengaman sosial diprediksi akan menopang konsumsi rumah tangga. Tabel di berikut ini menggambarkan proyeksi PDRB Sumatera Utara dari sisi pengeluaran.

**Tabel 3.2**  
**Proyeksi PDRB Sumatera Utara dari Sisi Pengeluaran**

Komponen PDRB Pengeluaran	PDRB Pengeluaran ADHK (Persen)				
	Kondisi Awal (Realisasi)		Target		
	2020	2021	2022	2022 (low scenario)	2022 (high scenario)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-2,83	1,69	2,60-3,60	3,60-4,60	4,60-5,00
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-4,02	-2,59	0,60-1,60	1,60-2,60	2,60-3,00
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-1,69	3,46	2,10-3,10	3,10-4,10	4,10-4,50
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-1,17	3,47	1,60-2,60	2,60-3,60	3,60-4,00
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri	-10,31	15,09	8,70-9,70	9,70-10,70	15,30-15,60
7. Impor Luar Negeri	-14,87	18,34	3,60-4,60	4,60-5,60	4,00-4,40
<b>PDRB</b>	<b>-1,07</b>	<b>2,61</b>	<b>3,00-4,00</b>	<b>4,00-5,00</b>	<b>5,00-5,40</b>



Sumber : Bappedasu dan Tenaga Ahli 2021

Selanjutnya, dalam rangka mendorong tercapinya target pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang disusun oleh Provinsi Sumatera Utara mengarah pada hal-hal berikut:

1. Pemulihan sektor pertanian melalui bantuan benih; bantuan sarana dan prasarana; bantuan peralatan; penguatan sumber daya manusia pelaku pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi;
2. Pemulihan industri dalam negeri melalui penguatan industri yang bernilai tambah; penguatan mutu dan standarisasi produk; penguatan skill dan peningkatan sumber daya manusia pelaku industri;
3. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui optimalisasi KSPN Danau toba dan berbagai destinasi-destinasi unggulan lainnya; penciptaan destinasi-destinasi dan desa-desa wisata baru; pelaksanaan event-event wisata dan budaya; penguatan sumber daya manusia pelaku pariwisata; penguatan mutu dan standarisasi produk UMKM dan IKM; penguatan digitalisasi dan ekspor produk UMKM dan IKM, serta penguatan sumber daya manusia pelaku UMKM dan IKM;
4. Peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan; harmonisasi peraturan dan; peningkatan investasi pada berbagai proyek strategis;
5. Penguatan daya beli dan penjangkaran inflasi yang dilaksanakan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

### **3.1.2.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Provinsi Sumatera Utara**

Dampak Covid-19 masih berpengaruh bagi ekonomi, menuntut berbagai negara untuk segera mengambil berbagai kebijakan. IMF membagi pandemi Covid-19 dalam beberapa fase, yaitu fase isolasi dan stabilisasi yang diikuti oleh fase pemulihan, dimana kesehatan masyarakat dan kebijakan ekonomi memiliki peran yang dominan. Kebijakan penanganan kesehatan, isolasi, dan karantina memegang peranan terbesar yang diharapkan dapat memperlambat transmisi dan menghindari kondisi yang lebih parah. Aktivitas perekonomian ditutup, sementara pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka melalui *social savety net*.

Beberapa Tantangan yang dihadapi Sumatera Utara terkait aktifitas ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kasus Covid-19 yang belum bisa dikendalikan dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki kasus covid tinggi;
2. Inflasi Sumatera Utara Fluktuatif. Pergerakan inflasi tahunan Sumatera Utara dipengaruhi oleh perubahan harga bahan makanan, khususnya cabai merah. Fluktuasi harga cabai merah sangat tinggi sementara bobotnya terhadap inflasi cukup besar, sehingga pergerakan harganya sangat mempengaruhi pergerakan inflasi. Di



satu sisi, Sumatera Utara memiliki sentra produksi cabai merah seperti di Simalungun, Dairi, Karo, Langkat, Humbang Hasundutan dan Batubara. Komoditas bahan makanan bergantung pada pola tanam, kondisi cuaca, serta periode-periode khusus seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Di sisi lain, pola perdagangan antar daerah yang semakin kuat didukung oleh kelancaran distribusi antar provinsi, juga turut mempengaruhi pergerakan harga komoditas Bahan Makanan di Sumatera Utara;

3. Rendahnya kemandirian fiskal Sumatera Utara semakin terasa di masa pandemi dimana PAD dan retribusi tertekan dengan lesunya aktivitas masyarakat dan program insentif fiskal yang diberikan;
4. Rendahnya minat investor asing dan kondisi iklim usaha yang kurang kondusif;
5. Pengurangan dana transfer dari pusat ke daerah.

Pemulihan ekonomi tentu tidak lepas dari berbagai sektor yang memiliki peran sangat besar dalam menopang laju pertumbuhan. Oleh karenanya, pemulihan ekonomi juga difokuskan pada:

1. Peningkatan layanan Kesehatan, Pandemi Covid-19 telah banyak menyebabkan dampak yang sangat signifikan bagi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dilakukan upaya peningkatan layanan Kesehatan yang telah ada baik melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan COVID-19 disamping itu dilaksanakan juga Peningkatan pelayanan rumah sakit rujukan, penurunan prelevansi stunting serta layanan Kesehatan terhadap lansia.
2. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Meningkatkan peran UMKM dalam aktivitas ekspor dan investasi, terutama UMKM yang berorientasi ekspor, hal ini dilakukan untuk mendorong program UMKM dan IKM baru tumbuh dan naik kelas secara intensif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
3. Peningkatan konektifitas infrastruktur (sentra produksi, destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, daerah tertinggal)

Dalam upaya mendorong kembali ekonomi, infrastuktur dan aksesibilitas pada kawasan wisata, aksesibilitas pada sentra-sentra penghasil komoditas dan daerah tertinggal akan menurangi kesejangan yang berpadat pada pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

### **3.1.3 Kondisi Ekonomi Daerah**

#### **3.1.3.1. Pertumbuhan Ekonomi**



Pertumbuhan ekonomi merefleksikan peningkatan produksi seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin bergairahnya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Nilai PDRB dapat dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut atau dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar yang biasa disebut dengan harga konstan. Perhitungan nilai PDRB dengan harga berlaku disebut dengan nilai PDRB nominal, sedangkan perhitungan PDRB dengan harga konstan disebut dengan nilai PDRB Rill. Nilai PDRB rill menghilangkan efek kenaikan harga (inflasi) sehingga benar-benar mencerminkan kenaikan produksi seluruh barang dan jasa yang tingkat kenaikannya disebut sebagai laju pertumbuhan ekonomi daerah.

**Tabel 3.3**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2021 (dalam persen)**

No	Lapangan Usaha	Realisasi		Proyeksi	
		2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,02	2,34	3,19	3,79
2	Pertambangan dan Penggalian	-2,28	5,14	5,64	5,89
3	Industri Pengolahan	-2,78	4,13	4,53	4,68
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,84	3,53	5,03	6,28
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,9	0,54	2,29	3,79
6	Konstruksi	-5,12	3,4	4,40	5,15
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,53	5,73	6,23	6,48
8	Transportasi dan Pergudangan	-7,13	-9,82	1,50	3,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6,61	1,03	2,53	3,78
10	Informasi dan Komunikasi	7,15	7,73	8,13	8,28
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,15	6,25	6,63	6,75
12	Real Estate	1,29	0,92	2,42	3,67
13	Jasa Perusahaan	-1,77	0,95	2,15	3,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,74	-0,58	1,25	2,50
15	Jasa Pendidikan	0,04	4,46	4,96	5,21
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,22	-0,93	0,85	1,70
17	Jasa lainnya	-1,34	2,98	3,48	3,73
<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)</b>		<b>-0,76</b>	<b>2,56</b>	<b>3,36</b>	<b>3,91</b>

Sumber: BPS Kab Tapanuli Tengah, Tapanuli Tengah Dalam Angka, 2021

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2020 berkontraksi sebesar 0,76 persen. Kondisi ini disebabkan oleh Pandemi COVID-19 yang masih ada hingga saat ini. Namun seiring penanganan dan pemulihan dampak Pandemi COVID-19, termasuk upaya pemulihan ekonomi daerah maka pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi meningkat hingga mencapai 2,56 persen. Diharapkan untuk mencapai

pertumbuhan ekonomi normal kembali maka dinas/OPD memacu kegiatan sektoralnya untuk mendukung pemulihan ekonomi, dan mendorong peran pelaku usaha untuk memulihkan kegiatan ekonomi dengan menggerakkan sektor produktif.

Kondisi Covid-19 yang mulai berkurang di Indonesia menyebabkan perekonomian di Tapanuli Tengah bergerak ke arah positif. Sehingga diproyeksikan perekonomian di Tapanuli Tengah dalam dua tahun kedepan bergerak semakin besar seiring dengan geliat perekonomian masyarakat yang semakin aktif. Sektor pertanian, sektor perdagangan serta sektor industri merupakan sektor yang semakin naik nilainya dalam dua tahun ke depan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang semakin naik.

### 3.1.3.2. PDRB perkapita

Pendapatan perkapita menunjukkan besarnya pendapatan yang diperoleh setiap penduduk secara rata-rata. Nilai pendapatan perkapita dapat dilihat melalui proxy menggunakan indikator PDRB per Kapita dimana indikator ini didapatkan dari nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. Angka PDRB per Kapita tersebut secara makro digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk. Terlihat bahwa angka PDRB per Kapita Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami kenaikan secara periodik dengan capaian sebesar 28,75 juta rupiah pada tahun 2021.

Data PDRB perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**PDRB Perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
<b>PDRB per Kapita per Tahun (juta rupiah)</b>					
<b>ADHB</b>	23,49	24,93	26,12	27,87	28,75
<b>ADHK</b>	17,45	18,04	18,43	19,16	19,36

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022, data diolah

### 3.1.3.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kesejahteraan sosial. Indeks ini terdiri dari tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi pengeluaran. Metode perhitungan IPM diadaptasi dari metode perhitungan *Human Development Indeks* (HDI) oleh *United Nation Development Program* (UNDP). Berikut adalah Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah disertai dengan komponen pembentuknya.

**Tabel 3.5**



**Komponen Pembentuk  
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019-2021**

Uraian	2019	2020	2021
<b>Angka Harapan Hidup</b>	67,08	67,15	67,24
<b>Rata-rata Lama Sekolah</b>	8,48	8,62	8,84
<b>Harapan Lama Sekolah</b>	12,79	13,06	13,07
<b>Pengeluaran per kapita</b>	10.175	10.071	10.138
<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>68,86</b>	<b>69,23</b>	<b>69,61</b>

*Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022*

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM merupakan data strategis bagi ukuran kinerja pemerintah. Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 69,61. IPM di Kabupaten Tapanuli Tengah yang bermakna SEDANG meskipun masih cukup jauh dibandingkan angka Nasional.

Peningkatan IPM selama lima tahun terakhir hingga 2021 ini disebabkan oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat (UHH) dan pengetahuan (HLS dan RLS). Sedangkan dimensi standar hidup layak (pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan) sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai dampak Pandemi COVID-19.

**a. Pendidikan**

Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

- Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun penduduk sudah menyelesaikan jenjang pendidikan.

Capaian rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Tapanuli Tengah selama 8,62 tahun menjadi 8,84 tahun pada tahun 2021. Meskipun meningkat akan tetapi capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Tapanuli Tengah masih jauh berada di bawah angka capaian rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara.

- Harapan Lama Sekolah (HLS)



Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Indikator Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Sama halnya dengan rata-rata lama sekolah, capaian harapan lama sekolah juga mengalami pola peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2019, harapan lama sekolah di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 12,79 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 13,07 tahun pada tahun 2021. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk yang memasuki usia sekolah (kurang lebih 7 tahun) memiliki kesempatan mengenyam pendidikan selama 13,07 tahun atau menduduki jenjang pendidikan hingga kuliah semester kedua.

**b. Kesehatan**

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Angka harapan hidup cenderung meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, di mana pada tahun 2019 angka harapan hidup Tapanuli Tengah selama 67,08 tahun dan terus meningkat hingga pada tahun 2021 mencapai 67,24 tahun. Peningkatan ini tentu merupakan capaian yang positif bagi perwujudan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

**3.1.3.4. Penduduk Miskin**

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Gambaran kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah tersaji pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.6**  
**Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Penduduk Miskin (%)	14,66	13,17	12,53	12,38	12,67
2	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	53,05	48,53	46,99	47,19	49,95
3	Garis Kemiskinan	367.687	369.471	376.474	406.646	429.050





(Rp/Kapita/Bulan)					
-------------------	--	--	--	--	--

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa selama periode tahun 2017 hingga tahun 2020, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah cenderung menurun di mana pada tahun 2017 sebesar 14,66 persen dan menurun hingga mencapai 12,38 persen pada tahun 2020. Namun dikarenakan dampak COVID-19 yang mulai merambah hingga gelombang kedua terjadi di tahun 2021, maka pada tahun 2021 terjadi kenaikan kembali angka kemiskinan yaitu hingga mencapai 12,67 persen.

### 3.1.3.5. Gini Rasio

Gini Rasio adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Distribusi pendapatan semakin merata ketika koefisien rasio gini antara 0,20 s/d 0,35 dan sebaliknya distribusi pendapatan dikatakan sangat timpang antara 0,50 s/d 0,70. Pada tahun 2020 gini ratio Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 0,335 sebagai dampak penyebaran wabah Covid-19 dan menurun hingga mencapai 0,2917 persen pada tahun 2021

### 3.1.3.6. Inflasi

Pendekatan laju inflasi Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan laju inflasi di Kota Sibolga. Pada kurun waktu 2017-2021 laju inflasi Kota Sibolga mengalami penurunan. Inflasi terendah terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 1,86 persen. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat sehingga konsumsi masyarakat juga menurun.

**Grafik 3.1**  
**Laju Inflasi Tahun 2017-2021**



Sedangkan laju inflasi untuk Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia kurun waktu 2017-2021 juga mengalami penurunan. Untuk Provinsi Sumatera Utara laju inflasi

terendah terjadi pada Tahun 2018 yaitu sebesar 1,23 % dan untuk Indonesia laju inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,68%.

Inflasi Kota Sibolga tahun 2023 diperkirakan akan kembali meningkat menjadi 2,00 %.

### 3.1.3.7. Tingkat Penangguran Terbuka

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, indikator ketenagakerjaan digunakan sebagai salah satu indikator untuk menggambarkan kesejahteraan sosial. Indikator ketenagakerjaan tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

TPAK mengidentifikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK mencerminkan penyediaan tenaga kerja atau jumlah angkatan kerja. TPAK merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam kelompok yang sama. Semakin besar TPAK, semakin besar jumlah angkatan kerja dalam kelompok yang sama. Sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk yang masih bersekolah dan mengurus rumah tangga, semakin besar jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja, akan berakibat semakin kecil TPAK.

TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Perkembangan angkatan kerja dan TPAK di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**TPAK dan Kesempatan Kerja**  
**di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021**

INDIKATOR		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Angkatan Kerja	107.233	93.863	201.096
	A. Bekerja	100.624	85.906	186.530
	B. Pengangguran	6.609	7.957	14.566
2	Bukan Angkatan Kerja	26.427	40.432	66.859
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	80,23	69,89	75,05
	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>6,16</b>	<b>8,48</b>	<b>7,24</b>

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2021

Pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka Tapanuli Tengah mencapai 7,24 persen. Angka ini menurun dari tahun 2020 yang mencapai titik tertinggi dalam lima tahun terakhir yakni 7,54 persen. Adapun tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selain itu jumlah angkatan kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mengindikasikan masih cukup banyaknya perempuan yang lebih memilih menjadi ibu rumah tangga.

### 3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021 maka tantangan perekonomian daerah adalah bahwa Perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian nasional dan global sehingga diperlukan pemulihan ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19.

Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun pasca pandemi Covid-19. Adapun beberapa perubahan yang diidentifikasi antara lain (1) perubahan bentuk rantai pasok berupa kondisi sistem rantai pasok tradisional yang bersifat linear akan dianggap tidak relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasok digital (*digital supply network*); (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.

Upaya pemulihan ekonomi juga akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pascapandemi Covid-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum Covid-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi Covid-19.

Selanjutnya prospek perekonomian daerah jika penyelesaian wabah Covid-19 tidak selesai di tingkat global dan nasional hingga masuk triwulan IV tahun 2020 atau bahkan tahun 2021, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif. Namun pesatnya kegiatan pemulihan ekonomi nasional dan pencegahan wabah Covid-19 maka pada triwulan III dan IV Tahun 2020 diprediksi mulai mengalami *recovery*. Pemulihan ekonomi diperkirakan terjadi pada permintaan domestik didorong oleh melonggarnya penerapan pembatasan sosial di domestik sehubungan dengan penerapan fase kenormalan baru (*new normal*) di Indonesia dan daerah-daerah diharapkan akan mendorong peningkatan lapangan usaha perdagangan, konstruksi, dan sektor pariwisata.

Selanjutnya 2021, tahun 2022 hingga tahun 2023 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 terutama dalam rangka mengejar target jangka menengah dan panjang. Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi: industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan

untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### **3.1.4.1. Tantangan**

Perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian nasional dan global sehingga diperlukan pemulihan ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19 sehingga tantangan yang dihadapi antara lain :

1. Varian baru COVID-19 dan potensi pandemi menjadi endemi.
2. Belum optimalnya Pelayanan sektor kesehatan
3. Belum memadainya infrastruktur;
4. Naiknya jumlah penduduk miskin;
5. Pengurangan pengangguran;
6. Belum optimalnya Penguatan Koperasi dan UMKM serta pelaku-pelaku usaha pada sektor-sektor ekonomi potensi lokal dan strategis seperti pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, industri dan perdagangan.
7. Belum optimalnya daya saing produk dan sumber daya manusia agar dapat bersaing di pasar global;
8. Rendahnya minat investor dalam berinvestasi;
9. Belum optimalnya pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah; dan
10. Belum optimalnya peran pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

#### **3.1.4.2. Propek Perekonomian Daerah**

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023 serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha- usaha yang harus dilakukan dalam pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi Covid-19 antara lain :

1. Meningkatkan Pelayanan sektor kesehatan;
2. Menyediakan infrastruktur perekonomian yang memadai dan berkualitas untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha;
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor ekonomi lokal dan strategis pada sektor-sektor ekonomi potensi lokal dan strategis seperti pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, industri dan perdagangan.
5. Meningkatkan aksesibilitas dan sinergitas antara masyarakat, dunia usaha dan lembaga pendidikan dengan pemerintah daerah.
6. Mendorong investasi yang berbasis sumber daya lokal baik SDA maupun SDM dan berwawasan lingkungan.

## **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

### **3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Alokasi Dana Desa dari APBN; 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan Dana insentif daerah. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.

Untuk mendukung terwujudnya peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, arah kebijakan yang dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal.
2. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
3. Optimalisasi aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
4. Optimalisasi hasil usaha BUMD agar memberikan kontribusi yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
5. Khusus untuk pendapatan lain-lain yang sah, bagi hasil dari Pemerintah Provinsi berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam mendukung pendanaan berbagai program dan kegiatan. Bagi hasil dari Pemerintah Provinsi ini antara lain Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan lain-lain. Pendapatan dari Bagi Hasil dengan Pemerintah Provinsi ini sangat terkait dengan aktivitas ekonomi daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat berperan dalam memberikan insentif dan dorongan aktivitas perekonomian daerah.

Selanjutnya realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.8**  
**Jumlah Pendapatan Daerah Tahun 2021-2022**  
**dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023**

Uraian	Jumlah		
	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022	Proyeksi/Target Tahun 2023
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>84,473,837,625.39</b>	<b>113,992,782,400</b>	<b>81,826,467,155</b>
Pendapatan Pajak Daerah	21,753,911,125.00	26,724,578,000	23,332,000,000
Pendapatan Retribusi Daerah	2,107,703,613.00	9,953,220,000	3,977,500,000
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,736,247,710.00	11,421,986,400	10,427,213,155
Lain-lain PAD yang Sah	51,875,975,177.39	65,892,998,000	44,089,754,000
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,016,941,042,886.00</b>	<b>1,068,357,971,271</b>	<b>1,156,406,174,360</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	971,901,728,050.00	1,026,137,677,000	1,110,227,034,360
Pendapatan Transfer Antar Daerah	45,039,314,836.00	42,220,294,271	46,179,140,000
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>59,920,100,454.00</b>	<b>-</b>	<b>15,000,000,000</b>
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	59,920,100,454.00	-	15,000,000,000
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,161,334,980,965.39</b>	<b>1,182,350,753,671</b>	<b>1,253,232,641,515</b>

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 Sebesar Rp. 81.826.467.155,- menurun dari realisasi Tahun 2021. Penurunan ini terjadi pada Lain-lain PAD yang sah. Tetapi proyeksi pada Tahun 2023 terjadi peningkatan untuk Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Untuk Pendapatan Transfer, pada proyeksi tahun 2023 mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2021 dan tahun 2022 yakni sebesar Rp. 1.156.406.174.360. Tetapi untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada proyeksi tahun 2023 sebesar Rp. 15.000.000.000,- mengalami penurunan yang sangat signifikan dari realisasi tahun 2021 yakni sebesar Rp. 59.920.100.454,-.

### 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022 secara umum antara lain :

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada Pemerintahan Desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan DAU, DAK dan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
5. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian prioritas pembangunan Tahun 2022 yaitu Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Pengembangan Sentra-Sentra Ekonomi, Pengembangan Perekonomian Desa/Kelurahan, Peningkatan Pelayanan Publik, dan Peningkatan Kerjasama Daerah.
6. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional dan provinsi sesuai dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.

Selanjutnya realisasi dan proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.9**  
**Jumlah Belanja Daerah Tahun 2021-2022**  
**dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023**

Uraian	Jumlah		
	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022	Proyeksi/Target Tahun 2023
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>768,058,776,859.20</b>	<b>810,150,902,150.00</b>	<b>823,029,691,608.00</b>
Belanja Pegawai	444,375,484,308.00	475,959,241,577.00	494,479,929,228.00
Belanja Barang dan Jasa	313,060,917,795.20	314,402,568,577.00	323,403,593,577.00
Belanja Bunga	6,804,191,856.00	7,431,946,896.00	4,388,168,803.00
Belanja Hibah	3,296,682,900.00	11,099,145,100.00	500,000,000.00
Belanja Bantuan Sosial	521,500,000.00	1,258,000,000.00	258,000,000.00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>213,498,667,879.00</b>	<b>140,349,561,274.00</b>	<b>216,588,776,734.00</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,922,864,672.00	35,290,927,094.00	75,290,927,094.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63,471,748,125.00	41,919,801,200.00	61,919,801,200.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	120,739,620,542.00	59,567,753,420.00	75,806,968,880.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,364,434,540.00	3,571,079,560.00	3,571,079,560.00
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>768,338,650.00</b>	<b>2,048,879,934.00</b>	<b>24,888,317,812.00</b>
Belanja Tak Terduga	768,338,650.00	2,048,879,934.00	24,888,317,812.00
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>177,407,900,616.00</b>	<b>200,297,737,100.00</b>	<b>201,573,072,100.00</b>



Belanja Bagi Hasil		3,667,779,800.00	2,370,950,000.00
Belanja Bantuan Keuangan	177,407,900,616.00	196,629,957,300.00	199,202,122,100.00
<b>Total Jumlah Belanja</b>	<b>1,159,733,684,004.20</b>	<b>1,152,847,080,458.00</b>	<b>1,266,079,858,254.00</b>

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa proyeksi belanja pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.266.079.858.254,- mengalami peningkatan pada realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp. 1.159.733.684.004,2 dan belanja tahun 2022 sebesar Rp. 1.152.847.080.458. Peningkatan terjadi pada semua jenis belanja yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Peningkatan belanja pada proyeksi tahun 2023 dalam rangka mencapai tujuan RKPD Tahun 2023 dan percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Proyeksi pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.253.232.641.515,- dan proyeksi belanja pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.266.079.858.254,-. Terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 12.847.216.739,-.

### 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali atau diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto yang akan digunakan untuk menutupi defisit.

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Pe njualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah dan Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran Pembiayaan bersumber dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pembayaran Hutang Retensi. Selanjutnya realisasi dan proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.10**  
**Jumlah Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2022 dan Proyeksi**  
**Pembiayaan Daerah Tahun 2023**

Uraian	Jumlah		
	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022	Proyeksi/Target Tahun 2023
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>154,362,752,041.50</b>	<b>28,217,044,805</b>	<b>23,827,000,000</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	42,359,367,041.50	28,217,044,805	23,827,000,000
Penerimaan Pinjaman Daerah	112,003,385,000.00		
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>58,500,196,525.00</b>	<b>57,720,718,018</b>	<b>10,979,783,261</b>
Penyertaan Modal Daerah	3,200,196,525.00	3,541,668,018	3,804,762,741
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	55,300,000,000.00	54,179,050,000	7,175,020,520
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>95,862,555,516.50</b>	<b>(29,503,673,213)</b>	<b>12,847,216,739</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	97,463,852,477.69	-	-

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan netto pada proyeksi tahun 2023 sebesar Rp. 12.847.216.739,- sedangkan pada realisasi tahun 2021 pembiayaan netto sebesar Rp. 95.862.555.516,50 dan pada tahun 2022 pembiayaan netto minus sebesar Rp.



29.503.673.213,-. Pembiayaan netto pada proyeksi tahun 2023 yang bernilai positif dikarenakan perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp. 23.827.000.000,- dan adanya penurunan pengeluaran pembiayaan pada Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dari tahun 2021 dan tahun 2022.

## BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

#### 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pencapaian pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang awalnya diperkirakan akan menempatkan Indonesia ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang menghadapi tantangan besar akibat pandemi COVID-19 di awal tahun 2020. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Diperlukan kerja keras untuk mempertahankan pencapaian pembangunan pada periode RPJMN sebelumnya agar sasaran di atas dapat dicapai.

Visi Misi Presiden terpilih tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut akan diwujudkan melalui **sembilan Misi** yang dikenal sebagai **Nawacita Kedua**, meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Keterkaitan Misi Presiden, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan adalah sebagai berikut :

**Gambar 4.1**  
**Misi Presiden, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan**



#### 4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025. Visi - Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi – misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, pernyataan visi- misi ini menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi-misi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara.

Visi dan misi pembangunan daerah Sumatera Utara tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai sebagaimana juga tertuang dalam PRPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019- 2023. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 yang akan dicapai diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2023**

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	
1	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;	1*	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender	Indeks Pendidikan	Poin	68,85-69,35
			1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,96
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46
			1.2. Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,81
3	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri;	2*	Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	75,75-76,25
			2.1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,50
		3*	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta (Rp)	61
			3.1. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	75,12
			3.2. Meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing	NTP	Poin	111,41
			3.3. Meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata (Akomodasi Makan Minum dan Transportasi Pergudangan)	Persen	7,18
		4*	Meningkatkan infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Poin	0,78

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
		pendukung ekonomi			
		4.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	78,55
			Rasio Elektrifikasi	Persen	100
			Akses Rumah Layak Huni	Persen	68,98
			Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	Persen	62,92
2	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesis sosial yang kuat serta harmonis;	Meningkatkan Kualitas Sistem Politik Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Demokrasi	Poin	66,33
			Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai (Kategori)	70,00 (B)
		2.1	Meningkatnya kebebasan sipil (Civil Liberties)	Skor Kebebasan Sipil	-
		2.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) serta pelayanan publik yang prima	Opini BPK (WTP) terhadap laporan kinerja keuangan daerah	WTP
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai (Predikat)	BB (72,00)
			Indeks Pelayanan Publik	Kategori	4,20 (A-)
4	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia	Mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	Persen	97
		4.1	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Persen
					75
5	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pariwisata berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	69,38
		5.1	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	Persen
		5.2	Meningkatnya kualitas air laut	Indeks Kualitas Air Laut	NA
		5.3	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	Persen
		5.4	Meningkatnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	Juta Ton CO2eq
					48,03



Penetapan tujuan dan sasaran pada ke tiap misi pada perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara dimana target Makro Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RKPd Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi : 5,00-6,00 persen;
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi : 72,25-72,75;
3. Persentase Kemiskinan menurun menjadi : 8,80-7,80 persen;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi : 6,30-5,30 persen;
5. Indeks Gini (Gini Ratio) menurun menjadi : 0,309 poin;
6. Laju Inflasi menurun menjadi : 2,00 persen;
7. Emisi GRK menurun menjadi : 35,55 juta Ton CO<sub>2</sub>eq

#### 4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

Tujuan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Rencana Pembangunan Daerah periode 2023–2026 diukur melalui indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro daerah bagi pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana berikut:

**Tabel 4.2**  
**Tujuan dan Indikator Tujuan RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 - 2026**

Tujuan	Indikator	Kondisi Awal	Target Akhir
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	Na	65,00 (B)
Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing SDM Tapanuli Tengah	Indeks Pembangunan Manusia	69,61	71,49-71,89
Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Taapanuli Tengah	Tingkat Kemiskinan	12,67	10,00-11,00
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,56	4,00-6,00

Berdasarkan pada tabel tersebut, maka penjelasan masing-masing tujuan dan ditetapkan sasaran pembangunan pada setiap tujuan yaitu :

##### 1. Tujuan Pertama, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) merupakan konsep penyelenggaraan tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi



manusia, menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, dan secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus memenuhi unsur transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, yang merupakan dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Perwujudan *Good Governance* tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, tetapi juga pada kerja sama yang baik antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk mencapai konsesus bersama, di mana dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien.

Tujuan pertama, yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)** memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP, Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT dengan indikator Indeks Pelayanan Publik

## **2. Tujuan Kedua, Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing SDM Tapanuli Tengah**

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu aset penting dalam suatu pembangunan daerah. Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan serta pemanfaatan teknologi IT untuk membantu pengembangan kompetensi. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah terus mengupayakan peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan yang berkeadilan, serta memberikan ruang bagi para pemuda untuk ikut serta dalam pembangunan, agar dapat tercipta sumber daya manusia di Kabupaten Tapanuli Tengah yang berkompeten dan berdaya saing.

Tujuan kedua, yaitu **Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing SDM Tapanuli Tengah** memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Indeks Kesehatan
- b. Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat dengan indikator Indeks Pendidikan

## **3. Tujuan Ketiga, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tapanuli Tengah**

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri semaksimal mungkin. Kesejahteraan merupakan keadaan ideal yang diinginkan oleh setiap masyarakat. Dukungan terhadap peningkatan kompetensi masyarakat di berbagai bidang termasuk dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja, berwirausaha, serta pengoptimalan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah.



Tujuan ketiga yaitu **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tapanuli Tengah** memiliki rumusan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan indikator Indeks Pengeluaran dan PDRB Perkapita;
- b. Meningkatnya kompetensi angkatan kerja lokal dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka; dan
- c. Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan indikator Indeks Gini.

#### **4. Tujuan Keempat, Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan**

Pandemi Covid-19 merupakan bencana yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Hancurnya sektor perekonomian sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Pertumbuhan perekonomian di beberapa daerah merosot tajam. Adanya fenomena Pandemi Covid-19 ini membuat seluruh daerah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomiannya agar tidak semakin terpuruk. Kabupaten Tapanuli Tengah termasuk salah satu daerah yang terkena dampak nyata dari adanya Pandemi Covid-19 ini, yang pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonominya mencapai -0,76. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah terus mengupayakan pertumbuhan perekonomian yang semakin meningkat. Peningkatan sektor perekonomian Tapanuli Tengah dilakukan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada secara optimal, baik dari sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pariwisata maupun subsektor ekonomi kreatif. Selain mengelola sektor-sektor unggulan secara optimal, pembangunan infrastruktur untuk mendukung sarana dan prasarana setiap kegiatan juga terus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang merata. Dalam pengembangan perekonomian Tapanuli Tengah terdapat hal yang harus diperhatikan agar tidak berdampak signifikan atau menimbulkan permasalahan bagi Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang merupakan suatu konsep pengembangan perekonomian dengan memperhatikan lingkungan agar dapat berjalan beriringan dengan baik.

Tujuan keempat, yaitu **Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan** memiliki rumusan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah dengan indikator LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan LPE Kategori Industri Pengolahan;
- b. Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah dan ekonomi kreatif dengan indikator LPE Sektor Pariwisata dan LPE Subsektor Ekonomi Kreatif;
- c. Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata dengan indikator Indeks Infrastruktur; dan



- d. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana.

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator beserta target dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 4.3**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten**  
**Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2023**

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun Target
				2023
<b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	-	na	51,00 (CC)
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	-	31,46 (C) (2020)	40,00 (C)
	Indeks MCP ( <i>Monitoring Center for Prevention</i> )	-	84,7	85,7
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	61,311 (2020)	62,752
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	na	57,50 (C)
<b>Meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Tapanuli Tengah</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	-	69,61	70,36-70,76
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	-	0,727	0,730
	Prevalensi stunting	-	25,3	24,3
Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	-	0,658	0,673
<b>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah</b>	<b>Tingkat Kemiskinan</b>	%	12,67	11,00-12,00
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	-	0,706	0,710
	PDRB per Kapita	Juta Rp	28,75	31,62
Meningkatnya kompetensi angkatan kerja lokal	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,24	6,74
Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan	Indeks Gini	-	0,335	0,318



Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun Target	
				2023	
masyarakat					
<b>Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>	%	2,56	3,00-5,00	
Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,34	2,40	
	LPE kategori industri pengolahan	%	4,13	4,3475	
Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah	LPE Sektor Pariwisata (akomodasi dan makan minum)	%	1,03	3,89	
Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Indeks Infrastruktur	-	31,98	32.83	
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	na	68,00	
	Indeks Risiko Bencana	-	191,2	183,10	

## 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2023

### 4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Perencanaan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah tidak lepas dari isu atau kebijakan pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan. Sebelum menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023, maka perlu dilakukan telaahan terhadap RPJMN.

Sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yaitu "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur" dan arahan RPJPN Tahun 2005-2025 untuk RPJMN 2020-2024 (Tahap IV) yaitu "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing" dan dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan

jangka menengah RPJMN 2020-2024 serta hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2021 dan juga kebijakan pembangunan tahun 2022, maka tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2023 adalah **“Penguatan Pembangunan Inklusif untuk Penguatan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan”**.

Pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut diharapkan akan mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Nasional pada tahun 2023 antara lain:

**Tabel 4.4**  
**Indikator Sasaran Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2023**

Indikator Pembangunan	Target 2023
Pertumbuhan Ekonomi	5,3-5,9 Persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,3-5,9 Persen
Rasio Gini	0,375-0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,29-73,35
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	26,8-27,1 Persen
Tingkat Kemiskinan	7,0-8,0 Persen

Dalam jangka menjaga kesinambungan antara RKP dengan RPJMN 2020-2024, maka PN dalam rangka RKP 2023 merupakan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dengan penekanan terhadap:

**1. Prioritas Nasional 1:** Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Kebijakan pembangunan pada PN memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian; industri pengolahan; pariwisata; Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM); serta didukung penguatan reformasi fiskal; penguatan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi; peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT); pemanfaatan digitalisasi dan ekonomi hijau.

**2. Prioritas Nasional 2:** Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pembangunan wilayah pada tahun 2023 diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah.

**3. Prioritas Nasional 3:** Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, yang merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi Covid-19. Pembangunan SDM pada tahun 2023 akan ditekankan pada reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, pengembangan Science-Techno Park, serta pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0

**4. Prioritas Nasional 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, serta meningkatkan peran kebudayaan sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan dalam percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

**5. Prioritas Nasional 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar**

Pembangunan infrastruktur tahun 2023 akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui program prioritas pada pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan, infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, serta transformasi digital.

**6. Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**

Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim pada tahun 2023 berfokus pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih tangguh untuk mendukung pemulihan dan transformasi dampak Covid-19 ke arah pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Transformasi pasca pandemi Covid-19 pada pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim akan dititikberatkan pada upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penanganan limbah B3 dan peningkatan pemantauan kualitas lingkungan secara otomatis; perbaikan sistem ketahanan bencana yang tanggap terhadap bencana yang bersifat seketika (*sudden onset*) maupun perlahan (*slow onset*); serta pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca.

**7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik**

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Pemulihan ekonomi didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi dan pemberantasan korupsi di tengah pandemi, serta penguatan kerja sama pembangunan internasional untuk pengamanan pasokan vaksin dari negara produsen utama. Hal ini didukung

penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan dari beberapa negara di Asia dan keamanan siber. Pada bidang pelayanan publik difokuskan pada penguatan kelembagaan, tata kerja dan standarisasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, tahapan persiapan Pemilu akan dimulai dengan verifikasi data Kartu Tanda Penduduk secara online.

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera dalam RPJMN 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memperluas investasi, perdagangan serta diversifikasi pasar regional dan global melalui kerjasama internasional, seperti: Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (*Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle*), integrasi kawasan (*belt and road initiatives*) dan masyarakat ekonomi ASEAN;
2. Menjadi lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional;
3. Mempercepat transformasi ekonomi melalui:
  - Hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah;
  - Mengoptimalkan manfaat pembangunan jalan tol Trans Sumatera, bandara dan pelabuhan;
  - Pengembangan kawasan ekonomi di sepanjang koridor pesisir timur Sumatera untuk hilirisasi komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan yang berorientasi ekspor (hub internasional di Kuala Tanjung).

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional terdapat prioritas strategis/*Major Project* (MP) yang akan mendorong percepatan pembangunan Wilayah Sumatera Tahun 2020-2024 dan yang diharapkan memiliki kontribusi signifikan dalam RKP Tahun 2023. Beberapa *Major Project* Utama Tahun 2023 yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara dan yang membutuhkan dukungan daerah antara lain:

1. Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba;
2. Pembangunan Jalan Trans pada Pulau tertinggal, terluar dan terdepan: Pulau Nias, Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan Medan;
3. Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 juta) di Sumatera Utara;
4. Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Pelabuhan Kuala Tanjung;
5. Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis di Sumatera Utara; dan
6. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Sumatera Utara.

Di dalam pelaksanaannya, *Major Project* dan indikasi pendanaannya dimutakhirkan melalui RKPD dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran beasran dan sumber pendanaan. Hal ini untuk memastikan *Major Project* dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan. Selanjutnya untuk mendukung program nasional melalui Proyek Prioritas



Strategis (*Major Project*) yang terkait langsung dengan RKP 2023. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mendukung melalui Program/Kegiatan sesuai dengan lokasi *Major Project* yang telah ditentukan oleh Pusat maupun lokasi-lokasi yang belum ditentukan oleh Pemerintah Pusat namun dirasa dapat mendukung pencapaian *Major Project* tersebut.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, maka Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP) pada RKP Tahun 2023 ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKP Tahun 2023**

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);	1. Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan; 2. Peningkatan pasokan bahan bakar nabati; 3. Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi; 4. Peningkatan pemenuhan energi domestic; dan 5. Pengembangan industri pendukung EBT.
		2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;	1. Pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif) 2. Pengelolaan hutan berkelanjutan; 3. Penyediaan air untuk pertanian; 4. Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas; 5. Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan 6. Pengembangan waduk multiguna.
		3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;	1. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; 2. peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan; 3. peningkatan produktivitas, kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar; 4. peningkatan keberlanjutan

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
			produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan 5. peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
		4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan;	1. Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut; 2. Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan; 3. Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan; 4. Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan 5. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
		5. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi;	1. Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar; 2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; 3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; 4. Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha; dan 5. Peningkatan nilai tambah usaha social
		6. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi;	1. Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; 2. Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
			<p>melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;</li> <li>4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;</li> <li>5. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan</li> <li>6. Pengembangan industri halal.</li> </ol>
		7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN);	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;</li> <li>2. Peningkatan akses pendalaman pasar ekspor;</li> <li>3. Pengelolaan impor;</li> <li>4. Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;</li> <li>5. Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;</li> <li>6. Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan</li> <li>7. Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.</li> </ol>
		8. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pendalaman sektor keuangan;</li> <li>2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;</li> <li>3. Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;</li> </ol>

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
			4. Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; 5. Reformasi fiskal; dan 6. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
2.	Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	1. Pembangunan Wilayah Sumatera; 2. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali; 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara; 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan; 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi; 6. Pembangunan Wilayah Maluku; 7. Pembangunan Wilayah Papua.	
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;  2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;  3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan kesehatan;	1. Percepatan cakupan administrasi kependudukan; 2. Integrasi sistem administrasi kependudukan; 3. Pendampingan dan layanan terpadu; dan 4. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.  1. Sistem jaminan sosial nasional; 2. Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; 3. Perlindungan sosial adaptif; dan 4. Kesejahteraan sosial.  1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dengan kesehatan reproduksi; 2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat; 3. Peningkatan pengendalian penyakit; 4. Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (germas); dan

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
			5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
		4. Peningkatan Layanan Pendidikan Berkualitas; Pemerataan Pendidikan	1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2. Pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun; 3. Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan; 4. Penjamin mutu pendidikan; dan 5. Peningkatan tata kelola pendidikan.
		5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda;	1. Pemenuhan hak dan perlindungan anak; 2. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; 3. Kualitas pemuda.
		6. Pengentasan Kemiskinan;	1. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga; 2. Keperantaraan usaha dan dampak sosial; 3. Reforma agraria; dan 4. Perhutanan sosial.
		7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.	1. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri; 2. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas; 3. Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi; dan 4. Prestasi olahraga.
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter;	1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong-royong, dan budi pekerti; 2. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsif; 3. Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter; 4. Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
			<p>revolusi mental;</p> <p>5. Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila;</p> <p>6. Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.</p>
		2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;	<p>1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;</p> <p>2. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;</p> <p>3. Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;</p> <p>4. Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan</p> <p>5. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.</p>
		3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;	<p>1. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;</p> <p>2. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama;</p> <p>3. Penyelarasan relasi agama dan budaya;</p> <p>4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan</p> <p>5. Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.</p>
		4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.	<p>1. Peningkatan budaya literasi;</p> <p>2. Pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan</p>

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
			aksara daerah, serta sastra; 3. Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas dan daya cipta; 4. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;	1. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau; 2. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman; 3. Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; 4. Keselamatan dan keamanan transportasi; 5. Ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan 6. Waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
		2. Infrastruktur Ekonomi;	1. Konektivitas jalan; 2. Konektivitas kereta api; 3. Konektivitas laut; 4. Konektivitas udara; dan 5. Konektivitas darat.
		3. Infrastruktur Perkotaan;	1. Transportasi perkotaan; 2. Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan; 3. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan; dan 4. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan.
		4. Energi dan Ketenagalistrikan;	1. Keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan; 2. Akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan 3. Kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
		5. Transformasi Digital.	1. Penuntasan infrastruktur TIK; 2. Pemanfaatan infrastruktur TIK; dan 3. Fasilitas pendukung transformasi digital.
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan	1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;	1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
	Perubahan Iklim		<p>hidup;</p> <p>2. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;</p> <p>3. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan</p> <p>4. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.</p>
2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;		<p>1. Penanggulangan bencana; dan</p> <p>2. Peningkatan ketahanan iklim.</p>	
3. Pembangunan Rendah Karbon		<p>1. Pembangunan energi berkelanjutan;</p> <p>2. Pemulihan lahan berkelanjutan;</p> <p>3. Pengelolaan limbah;</p> <p>4. Pengembangan industri hijau; dan</p> <p>5. Rendah karbon pesisir dan laut.</p>	
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Konsolidasi Demokrasi;	<p>1. Penguatan kapasitas lembaga demokrasi;</p> <p>2. Penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan</p> <p>3. Peningkatan kualitas komunikasi publik.</p>
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;		<p>1. Penguatan integritas NKRI dan perlindungan WNI di Luar Negeri;</p> <p>2. Penguatan kerjasama pembangunan internasional;</p> <p>3. Peningkatan citra positif di dunia internasional; dan</p> <p>4. Peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global.</p>	
3. Penegakan Hukum Nasional;		<p>1. Penataan regulasi;</p> <p>2. Perbaikan sistem hukum pidana dan perdata;</p> <p>3. Penguatan sistem anti korupsi; dan</p> <p>4. Peningkatan akses terhadap keadilan.</p>	
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;		<p>1. Penguatan implementasi manajemen ASN;</p> <p>2. Transformasi pelayanan publik;</p> <p>3. Penataan kelembagaan dan</p>	



NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
			proses bisnis; dan 4. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
		5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.	1. Penguatan keamanan dalam negeri; 2. Penguatan kemampuan pertahanan dibarengi Confidence Building Measures (CBM); 3. Penguatan keamanan laut; 4. Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan 5. Penguatan ketahanan dan keamanan siber.

#### 4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

Selain mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD juga dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi dengan pembangunan daerah Tahun 2023.

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah akan menjadi arahan bagi perangkat daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk Tahun 2023 sebagai kontribusi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan daerah Sumatera Utara Tahun 2023 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan Tahun 2022. Kebijakan pembangunan daerah Sumatera Utara Tahun 2023 masih mempertimbangkan keberlanjutan upaya pemulihan dampak Covid-19 dimana masih terjadinya varian baru yang sempat mempengaruhi kondisi masyarakat sehingga prioritas pembangunan lebih mengarah pada upaya peningkatan perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing sumber daya manusia dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023.

Berpedoman pada arah kebijakan yang telah diuraikan di atas serta berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021, Rancangan RKP, isu strategis serta permasalahan di Provinsi Sumatera Utara, maka tema pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah **“Akselerasi Pencapaian Sumatera Utara Bermartabat melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah”**.

Arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 diarahkan pada akselerasi pencapaian target pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat yang dijabarkan dalam prioritas daerah Tahun 2023 dengan fokus sebagai berikut:

**1. Prioritas peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan strategis daerah, yaitu:**

- a. Pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dalam rangka memenuhi akses pemerataan layanan pendidikan;
- b. Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk siswa/i jenjang SMA, SMK dan SLB Negeri dengan prioritas intervensi kepada siswa/i kurang mampu sejumlah 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) jiwa;
- c. Pembangunan kampung beasiswa *scholarships booth* sebagai wadah informasi beasiswa S1, S2, S3 di Pekan Raya Sumatera Utara Medan;
- d. Kerjasama *link and match* Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/vokasi dengan dunia usaha, dunia industri melalui:
  - 1) Penyelarasan kurikulum vokasi/SMK dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi;
  - 2) *Teaching Factory* atau pembelajaran berbasis produk dan bisnis dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi;
  - 3) *MoU* dan *MoA* yang ditandatangani melalui kerjasama *link and match* antara SMK dan dunia usaha dan dunia industri dengan jumlah sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) *MoU/MoA* kerjasama;
- e. Pembangunan 33 (tiga puluh tiga) unit pojok baca dan gerobak baca serta pengembangan perpustakaan digital (*e-library*);
- f. Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara menyapa melalui kelas motivasi bagi siswa/i Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan se-Sumatera Utara;
- g. Penguatan materi kearifan lokal serta penyelarasan kecerdasan spritual, emosional dan intelektual dalam kurikulum melalui pola integrasi ilmu;
- h. Penguatan pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) melalui metode *training of trainer (TOT)* pada tenaga pendidik di 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota.

**2. Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan strategis daerah, yaitu:**

- a. Penanganan Covid-19 melalui penguatan pola 3T (*Testing, Tracing, Treatment*), percepatan vaksinasi, penyediaan obat-obatan, penguatan kapasitas rumah sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis;
- b. Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Sakit Haji Medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
- c. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan prevalensi stunting;

- d. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan 100 (seratus) bed dalam rangka rehabilitasi narkoba pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem;
- e. Kampanye gerakan masyarakat sehat (GERMAS) melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada masyarakat 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara;
- f. Pemberian jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) Provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta PBI JKN sebanyak 4.733.689 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) jiwa;
- g. Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/bus kesehatan.

**3. Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah, yaitu:**

- a. Fasilitasi kerja sama 10 (sepuluh) sektor ekonomi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja;
- b. Fasilitasi standarisasi 1.000 (seribu) UMKM dan IKM menuju digitalisasi pemasaran;
- c. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi melalui bursa kerja online;
- d. Penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi melalui peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta peraturan daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RPUM).

**4. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor agraris, yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan strategis daerah, yaitu:**

- a. Peningkatan produksi daging sapi menjadi sebesar 17.149,75 (tujuh belas ribu seratus empat puluh sembilan koma tujuh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi;
- b. Peningkatan produksi daging kambing/domba menjadi sebesar 1.537,50 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan ekspor;
- c. Mempertahankan swasembada beras dan jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;
- d. Peningkatan produksi cabe merah sebesar 190.011 (seratus sembilan puluh ribu sebelas) ton dan bawang putih sebesar 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) ton serta bawang merah sebesar 18.675 (delapan belas ribu enam ratus

tujuh puluh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;

- e. Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 459.403,89 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga koma delapan sembilan) ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 216.996 (dua ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ton dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor.

**5. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah, yaitu:**

- a. Penataan kawasan wisata dan cagar budaya, melalui:
  - 1) Pengembangan kawasan pariwisata, meliputi ekowisata tangkahan, Bahorok/Bukit Lawang-Langkat; agrowisata Ulu Pungkut-Madina; wisata alam dan budaya-Kepulauan Nias; wisata religi dan sejarah Barus-Tapanuli Tengah; wisata religi dan sejarah Candi Bahal-Padang Lawas Utara;
  - 2) Pengembangan desa wisata melalui 3 (tiga) konsep tematik yaitu agro, eko dan budaya;
  - 3) Dukungan penataan cagar budaya Kesultanan Langkat, situs Benteng Putri Hijau, Bawomataluo dan Lapangan Merdeka Medan.
- b. Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi Unesco dalam rangka mempertahankan status Unesco Global Geopark Kaldera Toba;
- c. Digitalisasi promosi pariwisata;
- d. Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan Forum Kesultanan Melayu.

**6. Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi, yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan strategis daerah, yaitu:**

- a. Mempertahankan pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan dukungan pencapaian 80 (delapan puluh) persen Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP);
- b. Peningkatan capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan target predikat BB;
- c. Peningkatan capaian Indeks Pelayanan Publik dengan target predikat A-.

**7. Prioritas peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga, yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan strategis daerah, yaitu:**

- a. Penguatan pusat wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di Provinsi Sumatera Utara;
- b. Pembangunan 300 Kampung Bersinar (Bersih Narkoba);



- c. Channel Layanan Pengaduan Masyarakat terkait pembangunan Sumatera Utara;
- d. Gubernur dan Wakil Gubernur mendengar melalui kegiatan dialog dengan masyarakat secara langsung maupun virtual;
- e. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial melalui peningkatan pelayanan panti yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara;
- f. Peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan sarana prasarana olahraga dalam rangka Pekan Olahraga Nasional Tahun 2024;
- g. Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi;
- h. Pembangunan Sports Centre di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dalam rangka persiapan tuan rumah Pelaksanaan PON ke-XXI Tahun 2024;
- i. Dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah.

**8. Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan strategis daerah, yaitu:**

- a. Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategis kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 218,22 (dua ratus delapan belas koma dua dua) kilometer dan pencapaian tingkat kemantapan jalan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 85 (delapan puluh lima) persen;
- b. Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan;
- c. Optimalisasi jaringan irigasi sebesar lebih kurang 78.000 (tujuh puluh delapan ribu) hektar;
- d. Pembangunan dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Mebidang;
- e. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mebidang;
- f. Pembangunan role model pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.000 (seribu) unit;
- g. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 35,55 (tiga puluh lima koma lima lima) juta eq.CO2 (Ekuivalensi Karbondioksida) melalui kebijakan daerah tentang pembangunan rendah karbon;
- h. Penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin sebanyak 8.745 (delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima) kepala keluarga dan dukungan terhadap pelaksanaan sistem pertanian terintegrasi sebanyak 7 (tujuh) unit pembangkit listrik tenaga surya.

Proyeksi indikator kinerja makro Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 disajikan

pada tabel berikut



**Tabel 4.6**  
**Proyeksi Indikator Makro Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,60-6,00
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	8,80-7,80
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,30-5,30
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,25-72,50
5	Rasio Gini	Poin	0,309
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO <sub>2</sub> eq	33,55

*Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2023*

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dengan memperhatikan capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang bersifat makro. Analisis terhadap capaian indikator makro digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis pertanian, industri dan pariwisata.

Pembangunan dengan fokus dari segi kewilayahan bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Sumatera Utara. Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi ke dalam 4 (empat) wilayah yaitu Wilayah Pantai Timur, Wilayah Pantai Barat, Wilayah Dataran Tinggi dan Kepulauan Nias. Wilayah Timur relatif datar, bagian tengah bergelombang dan berbukit sedangkan bagian barat merupakan dataran bergelombang dan wilayah Nias merupakan wilayah kepulauan.

Pembangunan kewilayahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 didasarkan pada kebutuhan yang berbeda di tiap wilayah dengan memprioritaskan peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan daya saing melalui sektor agraris, peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olahraga dan peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

#### **4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023**

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergis dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih

optimal. Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus/tema pembangunan tiap tahap yang menjadi acuan penentuan prioritas pembangunan RKPD setiap tahunnya

Tema Pembangunan Tahun 2023: Penguatan pembangunan inklusif untuk penguatan ekonomi daerah yg. Berkelanjutan

Tema pembangunan di Tapanuli Tengah tahun 2023 adalah Penguatan pembangunan inklusif untuk penguatan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Wabah Covid-19 yang telah menginfeksi seluruh belahan dunia berdampak pada semua sektor, baik sosial, politik maupun ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2021 menunjukkan angka 3 persen yang mengindikasikan bahwa perekonomian di Tapanuli tengah sudah bangkit dari badai ekonomi akibat Covid-19. Sehingga diharapkan Di tahun 2023, penguatan pembangunan inklusif di Tapanuli Tengah dapat menyebabkan pemerataan kesejahteraan di seluruh sektor/golongan masyarakat. Ekonomi inklusif ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi permasalahan di Tapanuli Tengah. Dalam mencapai tema tahun 2023, prioritas pembangunan Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi Komoditas dan Produk Unggulan Daerah yang Berdaya Saing
- Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
- Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dalam rangka mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar
- Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Covid-19

#### **4.2.4 Program Prioritas Daerah**

Program prioritas daerah merupakan program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Dalam perumusan dokumen perencanaan, program dianggap menjadi cikal bakal keberhasilan tujuan dan sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Program prioritas yang tercantum dalam tabel di bawah ini merupakan program yang sudah disesuaikan dengan nomenklatur di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang merubah nomenklatur dan kode. Program Prioritas Kabupaten Tapanuli Tengah secara terpisah terdapat pada Tabel VI.5.

**Tabel 4.7**  
**Program Prioritas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023**

NO	TUJUAN/SASARAN/PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM		INDIKATOR	TARGET		OPD
				2023		
				K		
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi	60,00 (B)		
1.1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Nilai SAKIP	40,00 (C)		
			<b>Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</b>			
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Wilayah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	95		SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Peningkatan kesejahteraan masyarakat	95		SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Produk hukum yang dikeluarkan	95		SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis Struktural dan Diklat Teknis Fungsional	80		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen Musrenbang Kabupaten/Kota	1		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan yang diterbitkan	100		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Indeks MCP (Monitoring Center for Prevention)	85.70	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jumlah tindak lanjut temuan	482	INSPEKTOR AT
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	62.752	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	100	BPKPAD
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah	51	BPKPAD
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan daerah	12	BPKPAD
<b>2</b>	<b>Meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Tapanuli Tengah</b>		Indeks Pembangunan Manusia	70,36-70,76	

2.1		<b>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>	Indeks Kesehatan	0.730	
			<b>Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas</b>		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	C a k u p a n Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	70	DINAS KESEHATAN
			Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	DINAS KESEHATAN
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio dokter per satuan penduduk	0.16	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan puskesmas yang menyediakan obat sesuai dengan RKO (Rencana Kebutuhan Obat)	100	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita	9.57	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi stunting		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di RSUD Pandan	100	RSUD PANDAN
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rasio Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten (per 100.000 penduduk anak)	16.61	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.2		<b>Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat</b>	Indeks Pendidikan	0.673	
		<b>Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas</b>			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100	DINAS PENDIDIKAN
			Angka Kelulusan:	100	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	100	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Fasilitas Pendidikan	2	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	10.66	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3		<b>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah</b>	Tingkat Kemiskinan	11,00-12,00	
3.1		<b>Meningkatnya pendapatan masyarakat</b>	Indeks Pengeluaran	0.710	
		<b>Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas</b>			
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	34	DINAS SOSIAL

		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda Kader dan Pelopor)	241	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			PDRB per Kapita	31.62	
		<b>Optimalisasi Komoditas dan Produk Unggulan Daerah yang Berdaya Saing</b>			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah unit usaha yang dilakukan pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan	125	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.2		<b>Meningkatnya kompetensi angkatan kerja local</b>	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.74	
		<b>Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Covid-19</b>			
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0.5	DINAS KETENAGA KERJAAN
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.90	DINAS KETENAGA KERJAAN
			Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	5.0	DINAS KETENAGA KERJAAN
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tatakelola yang layak	2.2	DINAS KETENAGA KERJAAN
			Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator HI	30	DINAS KETENAGA KERJAAN
4		<b>Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan</b>	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,00-5,00	

4.1		<b>Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah</b>	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.40	
			<b>Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dalam rangka mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar</b>		
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Konsumsi ikan	37	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	42.5	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	42.5	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan ( Tersedia cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	60	DINAS KETAHANAN PANGAN
			LPE kategori industri pengolahan	4.348	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Pemanantaun Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal dan Dunia Usaha	1267000000 00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	75	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.2		<b>Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah</b>	LPE Sektor Pariwisata (akomodasi dan makan minum)	3.89	
		<b>Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dalam rangka mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar</b>			
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1.93%	DINAS PARIWISATA
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	5%	DINAS PARIWISATA
			Persentase jumlah pertumbuhan wisatawan mancanegara per kebangsaan	268	DINAS PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	55.12	DINAS PARIWISATA
4.3		<b>Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata</b>	Indeks Infrastruktur	32.83	
		<b>Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dalam rangka mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar</b>			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	74.34	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	60	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Dengan Satuan : Rumah Tangga)	22	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	64.26	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya Pelayanan Publik (Dengan Satuan:%)	85	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan Permukiman Kumuh yang ditangani	3.29	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio rumah layak huni	83.06	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana d	4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penggunaan tanah	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Jenis Pelayanan Angkutan	90	DINAS PERHUBUNGAN
Rasio Kondisi Prasarana Perhubungan		90	DINAS PERHUBUNGAN	
Persentase Peningkatan Penanganan Kemacetan Lalu		90	DINAS PERHUBUNGAN	

				Lintas		
4.4			<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68.00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang dapat ditangani	61	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Indeks Risiko Bencana	183.10	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Resiko Bencana Kabupaten	183.10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

#### **4.3 Penyeragaman Prioritas Pembangunan Nasional (RKP Tahun 2023) dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara (RKPD Tahun 2023) dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (RKPD Tahun 2023)**

Dasar hukum yang mendukung perlunya sinergi perencanaan Pusat dan Daerah adalah:

- 1. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain bertujuan untuk:**
  - a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
  - b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan dan sinergi pusat dan daerah.
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengamanatkan:**
  - a. Pasal 258 ayat (3) mengamanatkan bahwa kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
  - b. Pasal 259 ayat (1) mengamanatkan bahwa untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah.
  - c. Pasal 259 ayat (2) mengamanatkan bahwa koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.



- d. Pasal 263 ayat (4) menyebutkan bahwa RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional:

- a. Kewenangan hanya oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri;
- b. Kewenangan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan, seperti pertumbuhan ekonomi, angka kematian ibu dan bayi, angka partisipasi murni, dan lain-lain;
- c. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

Saat ini, sinergi dan integrasi perencanaan antar pusat dan daerah belum sepenuhnya terwujud, karena tidak seluruh perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Pusat mencerminkan kebutuhan di tiap-tiap daerah. Disisi lain, perencanaan pembangunan di daerah yang perlu dukungan pemerintah pusat masih belum disusun berdasarkan isu strategis daerah yang sinergi dengan Prioritas Nasional. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Nasional (RKP) dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara (RKPD Provinsi) dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.8**  
**Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional**

No	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Sumatera Utara					RPD Kab. Tapanuli Tengah						
	Indikator	Target					Indikator	Target					Indikator	Target			
		2020	2021	2022	2023	2024		2019	2020	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026
1	IPM						IPM	71,12	71,67	71,50- 72,00	72,00- 72,50	72,50- 73,00	IPM	70,36- 70,76	70,74- 71,14	71,11- 71,51	71,49- 71,89
2	Tingkat Kemiskinan (%)	11,55	10,95	10,45	10,05	9,38	Tingkat Kemiskinan (%)	8,87	8,63	9,00- 8,00	8,90- 7,90	8,80- 7,80	Tingkat Kemiskinan (%)	11,00- 12,00	10,67- 11,67	10,33- 11,33	10,00- 11,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,00	3,80	3,60	3,20	2,90	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5	5,45	6,00- 5,75	5,75- 5,50	5,50- 5,25	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,74	6,5	6,25	6,00
4	Indeks Gini						Indeks Gini	0,325	0,32	0,313	0,311	0,309	Indeks Gini	0,318	0,312	0,306	0,300
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	6,00	6,70	7,00	7,30	7,50	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	5,4	3,00- 4,00	4,00- 5,00	5,00- 6,00	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	3,00- 5,00	3,25- 5,25	3,50- 5,50	4,00- 6,00
6	PDRB per Kapita (Juta Rp)						PDRB per Kapita (Juta Rp)	55	59	68,50- 68,75	68,75- 69,00	69,00- 69,25	PDRB per Kapita (Juta Rp)	26,74	26,83	26,91	27,00



**Tabel 4.9**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023, Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023**

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan 2. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris 3. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata	1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dalam rangka mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	4. Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	2. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas 3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Covid-19 4. Optimalisasi Komoditas dan Produk Unggulan Daerah yang Berdaya Saing
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan 6. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	5. Pembangunan Sumber daya Manusia yang Berkualitas
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi 8. Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	6. Pembangunan Sumber daya Manusia yang Berkualitas
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	9. Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	7. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dalam rangka mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	10. Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	8. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dalam rangka mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	9. Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



#### 4.4 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Tapanuli Tengah

Pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek keruangan (spasial) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat secara merata dan berkeadilan. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan paradigma yang berkembang dalam penataan ruang, maka wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, pertahanan keamanan maupun lingkungan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terpadu. Kawasan strategis Kabupaten Tapanuli Tengah mencakup arahan mengenai Kawasan Strategis Nasional, serta mencakup arahan mengenai Kawasan Strategis Kabupaten Tapanuli Tengah yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Kawasan strategis Provinsi di Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu kawasan strategis Labuhan Angin–Sibolga;
2. Kawasan strategis Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas:
  - a. Kawasan strategis ekonomi;
  - b. Kawasan strategis Sosial dan Budaya; dan
  - c. Kawasan strategis lingkungan.

##### A. Kawasan strategis ekonomi meliputi:

NO	KAWASAN STRATEGIS EKONOMI	TIPOLOGI	LOKASI
1	KSK Labuhan Angin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi ekonomi yang cepat tumbuh</li> <li>- Kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas</li> <li>- Kawasan Industri</li> </ul>	Kecamatan Tapan Nauli
2	KSK Minapolitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi ekonomi yang cepat tumbuh</li> <li>- Kawasan perikanan</li> </ul>	Kecamatan Sarudik Kecamatan Tapan Nauli Kecamatan Sorkam Barat Kecamatan Barus
3	KSK Agropolitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi ekonomi yang cepat tumbuh</li> <li>- Kawasan pertanian</li> </ul>	Kecamatan Manduamas Kecamatan Kolang Kecamatan Badiri Kecamatan Sibabangun

B. Kawasan strategis Sosial dan Budaya meliputi:

Kawasan Strategis Sosial dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah KSK Cagar Budaya Barus di Kecamatan Barus dan Barus Utara. KSK ini merupakan kawasan konservasi warisan budaya di Kabupaten Tapanuli Tengah

C. Kawasan strategis lingkungan meliputi

Kawasan Strategis Lingkungan di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah KSK Mursala di Kecamatan Tapani Nauli. ini merupakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten KSK Tapanuli Tengah

**Gambar 4.2**  
**Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Tapanuli Tengah**



#### 4.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah

RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunannya memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 -2026. Saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD tersebut disampaikan melalui Sistem

Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebanyak 221 usulan yang terdiri dari Fraksi Nasdem sebanyak 89 usulan, Fraksi Golkar sebanyak 17 usulan, Fraksi PDIP sebanyak 30 usulan, Fraksi Gerindra sebanyak 16 usulan, Fraksi Gabungan sebanyak 16 usulan, Fraksi Ferindo sebanyak 29 usulan dan Fraksi Demokrat sebanyak 21 usulan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.10**  
**Daftar Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah**

No	F R A K S I	Jumlah Usulan
1	NASDEM	89
2	GOLKAR	17
3	PDIP	30
4	GERINDRA	16
5	GABUNGAN	19
6	PERINDO	29
7	DEMOKRAT	21
<b>TOTAL</b>		<b>221</b>

. Pokok-Pokok Pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Pokok-pokok pikiran DPRD untuk penyusunan RKPD Tahun 2023 diakomodir melalui dua sumbe dana yaitu sumber dana APBD Kabupaten Tapanuli Tengah dan Bantuan Keuangan Provinsi adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Yang diakomodir**

No	Usulan Pokok Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	SUMBER DANA
<b>1</b>	<b><i>Pembangunan Tanggul Sungai</i></b>	
	Pembangunan Bendung Aek Kase D.I. Simanosor Kec. Sibabangun	BKP
	Pembangunan Bronjong Desa Simanosor Kec. Sibabangun	APBD KAB
<b>2</b>	<b><i>Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan</i></b>	
	Normalisasi Sungai Saba Jae Desa Simanosor Kec. Sibabangun	BKP



	Rehabilitasi D.I. Pangambatan/Gonting Mahe Kec. Sorkam	BKP
	Normalisasi Muara Desa Pasar Sorkam Kec. Sorkam Barat	BKP
	Rehabilitasi Irigasi Desa Pelita Kec. Sorkam	BKP
<b>3</b>	<b><i>Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota</i></b>	
	Pembangunan Parit Jalan Lingkungan Desa Sibuluan Indah Kec. Pandan	BKP
	Pembangunan Parit Kel. Tukka Kec. Tukka	BKP
	Pembangunan Jalan Rabat Beton Lingkungan I Tano Ponggol Kelurahan Sibuluan Nalambok Kec. Sarudik	BKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Pargarutan Kec. Sorkam	BKP
	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Banjar Teleng Kel. Pinangsori Kec. Pinangsori	BKP
<b>4</b>	<b><i>Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	
	Rehabilitasi Kantor Lurah Aek Tolang Kec. Pandan	BKP
	Pembangunan Kantor Lurah Kelurahan Hutabolon Kec. Tukka	BKP
<b>5</b>	<b><i>Pembangunan Jalan</i></b>	
	Pembukaan Jalan Desa Gunung Kelambu Kec. Badiri	BKP
	Pembangunan Jalan Lingkungan Aek Sitio-tio Kec. Pandan	BKP
	Peningkatan Jalan Ruas Lumut - Sihiong Kec. Kec. Lumut	BKP
	Pembangunan Gorong-gorong Jl. Prof. M. Hujairin Kel. Sibuluan Terpadu Kec. Pandan	BKP
	Pembangunan Dek Penahan Jalan di Desa Sigiring-giring Kec. Tukka	BKP
	Peningkatan Jalan Tumba Paranginan Desa Parsihotangan Kec. Manduamas	BKP
	Peningkatan Jalan Garingging - Simarlelan Kec. Lumut	BKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Pasar Baru Kel. Sibuluan Indah Kec. Pandan	BKP
	Peningkatan Jalan Sogar - Silambang Kec. Sirandorung	BKP
	Peningkatan Jalan menuju Dusun IV Lehu Desa Siantar CA Kec. Sosorgadong	BKP
	Peningkatan Jalan Suka Maju - Makmur Kec. Pasaribu Tobing	
	Peningkatan Jalan Sihobuk - Masundung Kec. Pinangsori	BKP
	Peningkatan Jalan Kelurahan Sarudik Kec. Sarudik	
	Pembangunan Gorong-gorong di Ruas Jalan Hutabolon - Watas Taput Kec. Tukka	BKP
	Peningkatan Jalan Poriaha - Aloban	BKP
	Peningkatan Jalan Pertanian Sibuluan Kecamatan Pandan	APBD KAB
	Peningkatan Jalan TPA Aek Nabobar Kec. Pinangsori	
<b>6</b>	<b><i>Rehabilitasi Jembatan</i></b>	
	Rehab. Jembatan Asrama TNI Sarudik menuju SMK Sarudik	APBD KAB
	Rehabilitasi Jembatan gantung Pasar Tarandam - Kinali/Ujung batu Kec. Barus	APBD KAB
	Rehabilitasi Jembatan Pasir Bidang Kec. Sarudik	BKP
	Rehabilitasi Jembatan Aek Siate-ate Desa Sait Kalangan II Kecamatan Tukka	BKP



#### 4.6 Inovasi Kebijakan Pembangunan

Untuk mengakselerasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah, senantiasa dikembangkan inovasi dari mulai perencanaan hingga pelaporan, pelayanan bagi masyarakat dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Inovasi daerah ini merupakan semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi jenis, prosedur, dan metoda pelayanan publik. Kabupaten Tapanuli Tengah berkomitmen melakukan inovasi di bidang pelayanan masyarakat serta memudahkan bagi pelaku UMKM dan pelaku ekonomi di bidang komoditas unggulan.

**Gambar 4.3**  
**Gambaran Pelayanan di DPMPSTP Kabupaten Tapanuli Tengah**



Pelayanan publik yang terpadu merupakan landasan pembangunan yang kokoh yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien. Di masa pandemi Covid-19 ini, pelayanan publik masih berjalan dengan memerhatikan protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah pusat. Namun pelayanan ini terbatas dan menyulitkan beberapa masyarakat yang tinggal di pelosok Kabupaten Tapanuli Tengah. Oleh karena itu diperlukan inovasi pelayanan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal-hal yang dilakukan antara lain pelayanan kependudukan selain di hari kerja juga dilakukan di hari sabtu; adanya integrasi pelayanan berbasis teknologi yang memudahkan masyarakat pelosok untuk melakukan pelayanan secara online yang mudah diakses dan menambah unsur kenyamanan dalam pelayanan.

**Gambar 4.4**  
**Inovasi bagi pelaku UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah**



*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM*

Selain di bidang pelayanan publik, UMKM menjadi salah satu bidang yang untuk dilakukannya inovasi terutama UMKM yang mengembangkan produk unggulan daerah. Inovasi yang dilakukan dengan mengikuti Ekspo produk unggulan daerah dengan penyelenggaraan pameran tingkat lokal maupun keikutsertaan dalam ajang pameran tingkat regional (provinsi Sumatera Utara) dan nasional. Inovasi di bidang UMKM lainnya adalah dengan mengembangkan sektor ekonomi kreatif melalui pengembangan kreasi intelektual (knowledge based economy) seperti barang seni atau kerajinan, fashion, fotografi, periklanan, film pendek, dan sebagainya. Serta pengembangan UMKM berbasis teknologi digital melalui pelatihan bisnis online agar produk UMKM dapat dikenal banyak kalangan.

**BAB V**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

**5.1 Sinergitas Program Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan  
Kabupaten Tapanuli Tengah**

Sinergitas Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini:



Tabel 5.1

## Sinergitas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI	PROGRAM KAB/KOTA	KEGIATAN KAB/KOTA	SUB KEGIATAN KAB/KOTA	PAGU ANGGARAN	OPD	KET
1	Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan (Dalam rangka pencapaian Indeks Pendidikan sebesar 68,85-69,35 Poin)	Penguatan pembelajaran jarak jauh (distance learning) melalui metode training of trainer (TOT) pada tenaga pendidik di 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3,270,000,000	Dinas Pendidikan	<b>Kewenangan Provinsi terbatas pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan</b>
					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	300,000,000		
					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	400,000,000		
					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	500,000,000		
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	800,000,000		
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3,752,520,000		



			Menengah Pertama	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	550,000,000		
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	300,000,000		
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	700,000,000		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50,000,000		
		Pembangunan 33 (Tiga Puluh Tiga) unit Pojok Baca dan Gerobak Baca serta Pengembangan Perpustakaan Digital (E-Library)	Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah	6,000,000	Dinas Perpustakaan



					Kabupaten/Kota			
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	349,598,439		
2	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat (Dalam rangka pencapaian Indeks Kesehatan sebesar 75,75-76,25 Poin)	Penanganan Covid-19 Melalui Penguatan Pola 3T (Testing, Tracing, Treatment), Percepatan Vaksinasi, Penyediaan Obat – Obatan, Penguatan Kapasitas Rumah Sakit Dan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	435,460,000	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	150,000,000		
					Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	100,000,000		



				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1,942,430,000	
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100,000,000	
	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK), Balita Kurus Dan Anak Sekolah Sebanyak 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) Jiwa Dalam Rangka Penurunan Prevalensi Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,216,525,000	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	150,000,000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	190,944,000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1,328,915,000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	4,281,715,000	



					Masyarakat			
		Penguatan pusat wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di Provinsi Sumatera Utara						
		Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Kepada Masyarakat Kurang Mampu Sebanyak 420.000 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu) Jiwa Dan Penyediaan Kontribusi Bagi Peserta PBI JKN Sebanyak 4.733.689 (Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan) Jiwa	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	27,303,200,000	Dinas Kesehatan	
2	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat (Dalam rangka pencapaian Indeks Kesehatan sebesar 75,75-76,25 Poin)	<p>Penanganan Covid-19 Melalui Penguatan Pola 3T (Testing, Tracing, Treatment), Percepatan Vaksinasi, Penyediaan Obat – Obatan, Penguatan Kapasitas Rumah Sakit Dan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis</p> <p>Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK), Balita Kurus Dan Anak Sekolah Sebanyak 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) Jiwa Dalam Rangka Penurunan Prevalensi Stunting</p>	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					





		<p>Penguatan pusat wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Kepada Masyarakat Kurang Mampu Sebanyak 420.000 (Empat Ratus Dua Puluh Ribuh) Jiwa Dan Penyediaan Kontribusi Bagi Peserta PBI JKN Sebanyak 4.733.689 (Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribuh Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan) Jiwa</p>						
3	<p>Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan (Dalam rangka pencapaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</p>	<p>Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terintegrasi Melalui Bursa Kerja Online</p>	<p>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</p>	<p>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan unit Kompetensi</p> <p>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</p>	<p>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi</p> <p>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari</p>	<p>1,156,489,381</p> <p>100,000,000</p>	<p>Dinas Ketenagakerjaan</p>	



sebesar  
75,12  
Persen)

		Kerja berdasarkan kluster kompetensi	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	110,000,300
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	80,000,000
Program hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial	822,000,000



				Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	187,598,000	Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	16,000,000	
	Fasilitasi Standarisasi 1000 (seribu) UMKM dan IKM Menuju Digitalisasi Pemasaran	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan	Pemberdayaan melalui usahan mikro	84,769,150	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan



			dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan				
			Program Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	84,734,267	
	Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Investasi Daerah tentang Pemberian Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0		
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



							Satu Pintu	
4	Peningkatan Daya Saing melalui Sektor Agraris (Dalam rangka pencapaian Nilai Tukar Petani sebesar 111,41 Poin)		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	350,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Mempertahankan swasembada beras dan jagung	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	262,000,000	Dinas Pertanian	



					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	63,000,000	Dinas Pertanian	
		Peningkatan Produksi Hortikultura (Cabai)	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura	72,000,000	Dinas Pertanian	
		Peningkatan Daging Sapi dan Domba	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	50,000,000	Dinas Pertanian	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	80,000,000	Dinas Pertanian	



				Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				
5	Peningkatan Daya Saing Sektor Pariwisata (Dalam rangka pencapaian kontribusi sektor pariwisata sebesar 17,18 persen)	Pengembangan desa wisata melalui 3 konsep tematik yaitu agro, eko dan budaya	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	0	150,000,000	Disporapar	
					0	100,000,000		
			Pengelolaan Kawasan Strategis		0	500,000,000		



				Pariwisata Kabupaten / Kota	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Parwisata	200,000,000		
			0	0	0	150,000,000		
					0	575,000,000		
6	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi (Dalam rangka pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi sebesar Poin Kategori "BB")	Pendampingan SAKIP dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					





		<p>Pendampingan Reformasi Birokrasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Sosialisasi Penyusunan Road map Perangkat Daerah, Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan Sosialisasi Budaya Kerja Pemerintah Kota Padang Sidempuan</p>						
		<p>Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat</p>						
		<p>Sosialisasi Penerapan Standar Pelayanan</p>						
		<p>Mempertahankan Pencapaian Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dan dukungan Pencapaian Opini WTP pada Pemerintah Kabupaten/Kota</p>	<p>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</p>					
7	<p>Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga</p>	<p>Penguatan pusat wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di Provinsi Sumatera Utara</p>	<p>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan</p>					

(Dalam rangka pencapaian persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan sebesar 93 persen)	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Melalui Peningkatan Pelayanan Panti Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara	Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	24,999,460	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di	Pemberian Layanan Rujukan	35,000,900		



				Luar Panti Sosial				
8	Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan (Dalam rangka pencapaian Indeks Infrastruktur sebesar 0,79 Poin)	Pembangunan Role Model Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Terintegrasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Sebanyak 1000 (seribu) unit.	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2,135,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		Pembangunan dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Mebidang	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan sampah	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolaan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kab/kota	4,654,102,838	Dinas Lingkungan Hidup	
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		19,997,910	



	<p>Penanganan Jalan strategi provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategi kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 218,22 (dua ratus delapan belas koma dua dua) kilometer dan pencapaian tingkat kemantapan jalan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 85 (delapan Puluh lima) persen</p>	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	<p>Pembangunan Jalan 14,565,000,000</p> <p>Pemeliharaan Rutin Jalan 1,500,000,000</p> <p>Pembangunan Jembatan 7,900,000,000</p> <p>Rehabilitasi Jembatan 200,000,000</p>	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	<p>Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan</p>	Program Penyelenggaraan Tata Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 748,160,000</p>	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<p>Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 249,999,710</p>		



	Optimalisasi jaringan irigasi sebesar lebih kurang 78.000 (tujuh puluh delapan ribu) hektar	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya di Bawah Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1,887,173,450		
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mebidang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50,000,000		



## 5.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (*output*) kegiatan maupun keluaran program (*outcome*), sasaran dari kegiatan, satuan, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja perangkat daerah.

Berdasarkan prioritas pembangunan impulsif ekonomi berkelanjutan yang menitikberatkan pada pemerataan pembangun, penurunan angka kemiskinan dan penurunan angka pengangguran, maka dijabarkan pada urusan yang terdiri atas:

### A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, yaitu :

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
5. RSUD.
6. Satpol PP.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Sosial.

### B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, yaitu:

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Ketahanan Pangan.
3. Lingkungan Hidup.
4. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Perhubungan.
8. Komunikasi dan Informatika.
9. Koperasi dan UKM.
10. Perizinan.
11. Kepemudaan dan Olahraga.
12. Perpustakaan.

13. Tenaga Kerja.
- C. Urusan Pilihan**, yaitu:
1. Kelautan dan Perikanan.
  2. Pariwisata.
  3. Pertanian.
  4. Perindustrian dan Perdagangan.
- D. Pendukung Urusan Pemerintahan**, yaitu:
1. Sekretariat Dewan.
  2. Sekretariat Daerah.
- E. Penunjang Urusan Pemerintahan**, yaitu:
1. Badan Perencana Pembangunan Daerah.
  2. BPKPAD.
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- F. Pengawasan**, yaitu:
1. Inspektorat.
- G. Kewilayahan**, yaitu meliputi 20 Kecamatan.
- H. Pemerintahan Umum**, yaitu :
1. Bakesbang.

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan daftar perangkat daerah berdasarkan bidang urusan dan jumlah Pagu pada SIPD.

**Tabel 5.2**  
**Daftar Pagu Perangkat Daerah Berdasarkan Urusan**

KODE	URUSAN	JUMLAH PAGU ( Rp)
1	2	3
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
1	DINAS PENDIDIKAN	399,227,502,175
2	DINAS KESEHATAN	152,256,150,634

KODE	URUSAN	JUMLAH PAGU ( Rp)
1	2	3
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	73,550,252,145
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	88,539,056,936
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	9,449,289,173
6	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA	12,396,632,691
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4,405,440,798
8	DINAS SOSIAL	4,793,694,442
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3,401,933,015
2	DINAS KETAHANAN PANGAN	2,864,929,651
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18,005,172,664
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6,125,824,943
5	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7,406,282,798
6	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	22,082,775,660
7	DINAS PERHUBUNGAN	4,781,602,747
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4,600,000,000
9	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3,356,224,635
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	4,065,198,450
11	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2,430,871,849
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	2,961,271,441
13	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
14	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,802,610,899
15	DINAS PARIWISATA	3,876,428,864
16	DINAS PERTANIAN	





KODE	URUSAN	JUMLAH PAGU ( Rp)
1	2	3
		12,517,953,005
17	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3,740,060,429
18	DINAS KETENAGAKERJAAN	3,770,176,421
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
1	SEKRETARIAT DAERAH	49,622,477,590
2	SEKRETARIAT DPRD	28,069,446,745
3	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
4	BAPPEDA	7,451,207,144
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	259,393,905,114
6	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6,262,611,135
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
1	INSPEKTORAT	6,376,645,923
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>		
1	KECAMATAN PANDAN	10,911,376,863
2	KECAMATAN SARUDIK	3,266,916,526
3	KECAMATAN TUKKA	3,679,278,710
4	KECAMATAN BADIRI	2,138,343,195
5	KECAMATAN PINANGSORI	3,531,682,211
6	KECAMATAN LUMUT	1,726,719,799
7	KECAMATAN SIBABANGUN	1,967,963,123
8	KECAMATAN SUKA BANGUN	896,245,069
9	KECAMATAN TAPIAN NAULI	2,370,674,277
10	KECAMATAN SITAHUIS	1,890,388,197
11	KECAMATAN SORKAM	2,668,017,892
12	KECAMATAN SORKAM BARAT	1,534,233,433
13	KECAMATAN KOLANG	2,177,221,961
14	KECAMATAN PASARIBU TOBING	1,053,843,880
15	KECAMATAN BARUS	2,781,385,101
16	KECAMATAN SOSORGADONG	1,662,168,707
17	KECAMATAN BARUS UTARA	722,668,253
18	KECAMATAN ANDAM DEWI	1,628,745,787
19	KECAMATAN SIRANDORUNG	1,665,820,575
20	KECAMATAN MANDUAMAS	2,670,406,905
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>		
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3,552,127,674



KODE	URUSAN	JUMLAH PAGU ( Rp)
1	2	3
<b>TOTAL</b>		<b>1,266,079,858,254</b>

Berikut ini adalah lampiran dari daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta pagu berdasarkan SIPD:

## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode pembangunan.

#### **6.1 Indikator Kinerja Makro Pembangunan**

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian pembangunan pada akhir periode pembangunan tahun 2026. Target capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



**Tabel 6.1**  
**Penetapan Target Indikator Kinerja Makro**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026**

No.	RPJMN					RPJMD Provinsi Sumatera Utara					RPD Kabupaten Tapanuli Tengah				
	Indikator	Target				Indikator	Target				Indikator	Target			
		2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	7,40	8,00			Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,00-6,00				Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	3,00-5,00	3,25-5,25	3,50-5,50	4,00-6,00
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,80	6,00			Tingkat Kemiskinan (%)	8,80-7,80				Tingkat Kemiskinan (%)	11,00-12,00	10,67-11,67	10,33-11,33	10,00-11,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,70	4,40			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,50-5,25				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,74	6,50	6,25	6,00
4	IPM					IPM	72,50-73,00				IPM	70,36-70,76	70,74-71,14	71,11-71,51	71,49-71,89
5	Indeks Gini					Indeks Gini	0,309				Indeks Gini	0,318	0,312	0,306	0,300
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)					Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)					Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	2,50	2,75	3,00	3,5



## 6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP.

Berikut ini penetapan indikator kinerja utama pada pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023-2026 yang tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 6.2**  
**Penetapan Target Indikator Kinerja Utama**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023**

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun Target
				2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	69,61	70,36-70,76
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	2,56	3,00-5,00
3	PDRB per Kapita		28,75	31,62
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	na	68,00
5	Indeks Infrastruktur	-	31,98	32,83
6	Tingkat Kemiskinan	%	12,67	11,00-12,00
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,24	6,74
8	Indeks Gini	-	0,335	0,318
9	Indeks Reformasi Birokrasi	-	na	51,00 (CC)
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	na	57,50 (C)

## 6.3 Indikator Kinerja Kunci

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu



organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan adalah indikator outcome yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut. Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci merupakan indikator kinerja menurut Permendagri 86 Tahun 2017 yang disempurnakan pada indikator urusan pelayanan umumnya melalui Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan indikator kinerja kunci daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 6.3**  
**Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target 2023
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>				
<b>I. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>				
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	69,61	70,36-70,76
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	2,56	3,00-5,00
3	PDRB per Kapita		26,48	31,62
4	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,34	2,40
5	LPE kategori industri pengolahan	%	4,13	4,347
6	LPE Sektor Pariwisata (Akomodasi dan makan minum)	%	1,03	3,89
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	na	68,00
8	Indeks Risiko Bencana	-	191,2	183,10
9	Indeks Infrastruktur	-	31,98	32,83
10	Tingkat Kemiskinan	%	12,67	11,00-12,00
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,24	6,74
12	Indeks Pengeluaran	-	0,706	0,710
13	Indeks Gini	-	0,335	0,318
14	Indeks Reformasi Birokrasi	-	na	51,00 (CC)
15	Nilai SAKIP	-	31,46 (C) (2020)	40,00 (C)
16	Indeks MCP (Monitoring Center for Prevention)	-	84,7	85,7
17	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		61,311 (2020)	62,752
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	na	57,50 (C)
19	Laju Inflasi	%	1,49%	2
20	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Juta Ton CO <sub>2</sub> eq	na	2,5
21	Prevalensi stunting	%	25,3	24,3
<b>II. Kesejahteraan Sosial</b>				



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target 2023
1	Indeks Pendidikan	-	0,727	0,730
2	Indeks Kesehatan	-	0,658	0,673
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>				
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar</b>				
<b>a) Pendidikan</b>				
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	na	82,77%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	na	99,00%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	na	83,29%
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	na	6,89%
<b>b) Kesehatan</b>				
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	%	0.05	0,05%
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	50	50,00%
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	86	90,00%
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	80	84,00%
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	82	86,00%
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	83	87,00%
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	75	79,00%
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	76	78,00%
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	98	98,20%
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	7	17,00%
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	51	55,00%
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	41	45,00%
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	14	24,00%
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	29	39,00%
<b>c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	na	15,00%
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	na	64,35%
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	%	na	64,41%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	na	97,24%
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	na	86,76%
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	na	59,87%



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target 2023
7	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	na	100,00%
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	na	100,00%
<b>d) Perumahan Rakyat</b>				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	%	na	100,00%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	%	na	100,00%
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	na	75,17%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	na	5%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	na	6,16%
<b>e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>				
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	99,99%	100,00%
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	75,00%	80,00%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	na	400 Orang
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	na	400 Orang
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	na	1100 Orang
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	98,76%	100,00%
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	15 Menit	15 menit
<b>f) Sosial</b>				
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	na	100,00%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	na	100,00%
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar</b>				
<b>a) Tenaga Kerja</b>				
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	39,65%	47,59%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,30%	0,50%
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	45,25%	46,55%
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	1,1%	2,2%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	5,00%	5,00%
<b>b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	10,54%	10,66%
2	Rasio anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (per 100.000 penduduk anak)	Angka	14,44	16,61
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO yang ditangani instansi terkait kabupaten (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	13,11	14,86





No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target 2023
<b>c) Pangan</b>				
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	na	1,60%
<b>d) Pertanian</b>				
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	na	100,00%
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	na	0%
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	na	0%
4	Tersedianya Tanali Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	na	TIDAK ADA
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	na	100,00%
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	na	100,00%
<b>e) Lingkungan Hidup</b>				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%	na	73,68
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	na	7,30%
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	na	72,50%
<b>f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
1	perekaman KTP elektronik	%	84,45%	100,00%
2	persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	31,95%	42,00%
3	kepemilikan akta kelahiran	%	78,27%	98,00%
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	%	15,15%	29,46%
<b>g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
1	Persentase Pengentasan Desa sangat tertinggal dan tertinggal	%	72,33%	57,86%
2	Persentase peningkatan satatus desa berkembang dan maju serta mandiri	%	27,67%	42,14 %
<b>h) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana</b>				
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	3,72%	2,14%
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	71,77	73,70%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	17,08%	16,98%
<b>i) Perhubungan</b>				
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	%	60%	63%
2	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	%	45%	47%
<b>j) Komunikasi dan Informatika</b>				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	16%	20,00%
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	94%	96%
3	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	44%	54%
<b>k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>				
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	12,5%	15%
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	100%	100,00%



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target 2023
<b>l) Penanaman Modal</b>				
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	na	15%
<b>m) Kepemudaan dan Olahraga</b>				
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	na	1%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	na	5%
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	na	2 Medali
<b>n) Statistik</b>				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100%	100,00%
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	88%	94,00%
<b>o) Persandian</b>				
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	10%	15%
<b>p) Kebudayaan</b>				
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	na	100,00%
<b>q) Perpustakaan</b>				
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	%	na	42,50%
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	na	30,00
<b>r) Kearsipan</b>				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	2,51%	3,13%
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	na	1,19%
<b>Urusan Pilihan</b>				
<b>a) Kelautan dan Perikanan</b>				
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	na	1.250,00 Ton
<b>b) Pariwisata</b>				
1	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	orang	0	12
2	Persentase kunjungan wisatawan nusantara	persen	335.678 (2021)	5%
3	Tingkat hunian akomodasi	%	37,12 (2021)	55,12%
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,33 (2021)	0,60%
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2,21%	2,6%
<b>c) Pertanian</b>				
1	Persentase peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	0.24	0,88
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	na	100,00%
<b>d) Kehutanan</b>				
<b>e) Energi dan Sumber Daya Mineral</b>				
<b>f) Perdagangan</b>				
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	na	0,75%
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	na	100,00%
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan	%	na	17,14%



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target 2023
	perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			
<b>g) Perindustrian</b>				
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	3,68%	10,00%
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	37,5%	42,5%
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100%	100,00%
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	71,4%	74,5%
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	%	100%	100,00%
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	95%	97,00%
<b>h) Transmigrasi</b>				
<b>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b>				
<b>a) Perencanaan dan Keuangan</b>				
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	10%	13,72%
2	Rasio PAD	%	9,51%	10,00%
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	na	Level 2
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	na	Level 3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	24%	28%
6	Opini Laporan Keuangan	-	WTP	WTP
<b>b) Pengadaan</b>				
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	na	50%
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	na	50,0%
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	na	34,75%
<b>c) Kepegawaian</b>				
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	446%	446%
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	60%	62%
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	1%	1,5%
<b>d) Manajemen Keuangan</b>				
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	10%	11%
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	24%	26%
3	Manajemen Aset	-	ADA	ADA
	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)			
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset			



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target 2023
	tetap? (Ya/Tidak)			
	3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)			
	4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)			
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	7%	6,5%
<b>e) Transparansi dan Partisipasi Publik</b>				
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	na	100,00%
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100%	100,00%
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>				
<b>I. Kemampuan Ekonomi Daerah</b>				
<b>1 Pangan</b>				
01.01	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	903.269	950.000
01.02	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Rp	363.732	390.000
<b>2 Pertanian</b>				
02.01	Nilai Tukar Petani (Pendekatan angka Provinsi)	-	98,08	99,00
<b>II Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>				
<b>1 ESDM</b>				
01.01	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	85,24	87,14
01.02	Persentase penduduk yang mengakses internet	%	52,88	59,73
<b>III Iklim Berinvestasi</b>				
<b>1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>				
01.01	Angka kriminalitas (crime rate)	%	na	50,00
<b>2 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
02.01	Nilai Indeks Desa Membangun	-	0,5736 (Tertinggal)	0,5842 (Tertinggal)
<b>IV Sumber Daya Manusia</b>				
<b>1 Ketenagakerjaan</b>				
01.02	Persentase penduduk berpendidikan tinggi	%	9,81	10,00



## **BAB VII P E N U T U P**

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 merupakan tahapan akhir penyusunan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 yang memuat rencana kegiatan pembangunan daerah Tahun 2023, rancangan kerangka ekonomi daerah, beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 serta rencana kerja dan pendanaan yang merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah sepanjang Tahun 2023. RKPD menjadi dasar dan pedoman bagi OPD untuk menyusun Rencana Kerja pada Tahun 2023.

RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 mempedomani Rencana Pembanguan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah 2023-2026. RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 menjadi pedoman dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen RPD dan menjadi bahan penyempurnaan perangkat daerah dalam perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dalam RPD Tahun 2023-2026.

RKPD Tahun 2023 ini disusun untuk persiapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 dalam rangka menyepakati antara lain permasalahan pembangunan daerah; prioritas pembangunan daerah; arah kebijakan pembangunan; program dan kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional serta klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Keterlibatan dan komitmen seluruh Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang telah disusun dalam dokumen RKPD Tahun 2023 menjadi hal yang penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan yang telah direncanakan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH**

**YETTY SEMBIRING, SSTP, MM**

